



# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

## **KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar isi ..... i

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 6

1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... 11

1.4 Maksud dan Tujuan ..... 13

1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... 14

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... 1**

2.1 Kondisi Umum Daerah ..... 1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... 1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 41

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... 69

2.1.4 Aspek Daya Saing ..... 144

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... 167

2.2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD ..... 167

2.3 Inovasi Daerah ..... 181

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... 183

2.5 Isu Strategis ..... 230

2.6 Capaian Indikator Pembangunan ..... 241

2.6.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ..... 241

2.6.2 Standar Pelayanan Minimal ..... 266

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

**DAERAH TAHUN 2023 ..... 1**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 21

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... 1**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... 1

4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023..... 9

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ..... 51

4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 60

4.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ..... 71

4.6 Integrasi SPM ..... 73

4.7 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pinrang ..... 88

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... 1**

5.1 Kerangka Pendanaan ..... 1

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023..... 2

5.3 Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah  
Tahun 2023 ..... 12

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... 1**

6.1 Indikator Kinerja Daerah ..... 1

6.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... 11

6.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable  
Develompent Goals (TPB/SDGs) ..... 15

**BAB VII PENUTUP ..... 1**

7.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 1

7.2 Kesimpulan ..... 1





BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 6056);



13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023.

1

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. DPRD yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang untuk Tahun 2023 yang dimulai dari Bulan Januari 2023 dan berakhir pada bulan Desember 2023.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
  - g. BAB VII : PENUTUP.



- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari satu dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman :
- Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang dalam menyusun Renja PD
  - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2023
  - Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023, maka :
- Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD Kabupaten Pinrang; dan
  - Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam rangka melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dengan DPRD Kabupaten Pinrang;
- (2) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan plafon Anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan Penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk :
- menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2023;
  - menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan



d. mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

#### BAB IV KELEMBAGAAN

##### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang Keluaran Kegiatan dan indikator Kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan, Inspektur Kabupaten Pinrang, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Analisis dan Evaluasi Usulan Anggaran Tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 06 Juli 2022  
BUPATI PINRANG



Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 15  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam menghadapi globalisasi Indonesia dituntut untuk tetap konsisten dalam menaikkan angka pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci dalam memasuki era digital yang bertumpu pada perkembangan teknologi, mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan terbangunnya sumber daya yang handal sehingga pembangunan teknologi informasi dan komunikasi menjelma menjadi hal yang sangat krusial. Digitalisasi dianggap sebagai kunci untuk memenangkan persaingan global.

Dengan semakin berkembang pesatnya dunia digital, Interaksi yang semula dilakukan secara tatap muka kini telah mengalami pergeseran paradigma. Perkembangan dunia digital telah mengubah cara kerja, beraktivitas, belajar, hingga bertransaksi menjadi serba *online*. Hal ini berdampak pada meningkatnya populasi dunia maya sebagai konsekuensi logis dari adanya penggunaan akses internet yang semakin masif. Dinamika ini menunjukkan bahwa fungsi dan ketersediaan infrastruktur digital menjadi sangat krusial.

Dengan potensi demografi dan sumber daya alam yang sangat memadai, Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan ini. Pembangunan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pinrang pada khususnya. Oleh karena itu pilihan strategi pembangunan dengan fokus utama pembangunan sumber daya manusia sangat tepat untuk menjawab tantangan tersebut, mengingat Indonesia saat ini berada dalam fase pembangunan yang menuntut sumber daya manusia Indonesia yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa dari negara berkembang menjadi negara yang jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, mengurangi ketimpangan sosial dan ketimpangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan



dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah sebagai pencapaian aspirasi setiap warga masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pengarahan kepada terjadinya pemerataan pembangunan ekonomi (equity) dan pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainability). Proses pembangunan tersebut harus disusun secara terencana sehingga dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya dalam jangka panjang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021, serta dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2023 akan fokus pada penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia sesuai dengan tema dan arah pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2023 yaitu ***“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia”***. Dengan arah pembangunan seperti ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2023, sehingga RKPD ini nantinya sudah memenuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, juga sebagai bentuk perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, adaptif dan responsif terhadap perkembangan yang ada.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Adapun capaian Ekonomi Makro Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 yaitu : Pertumbuhan Ekonomi 5,04%, PDRB Perkapita 53,41 juta, Indeks Gini 0,367 Tingkat Kemiskinan 8,81%, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,06%, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,45.

Selain memperhatikan capaian diatas, penyusunan dokumen RKPD 2023 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 juga diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024, RPJP Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025, dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke IV (empat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat

daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang menyusun dokumen RKPD ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang ini dilakukan melalui beberapa tahapan perencanaan yang dilakukan secara teknokratis, Partisipatif, Politis serta Bottom – Up dan Top – down. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-



program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah melalui visi dan misinya. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang. Pendekatan bottom up merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional sedangkan pendekatan top down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedicated program.

Pada tahun 2022 ini, selain pendekatan perencanaan tersebut di atas penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang telah menggunakan pendekatan holistik, integratif, spasial dan tematik. Dari pendekatan perencanaan tersebut, kemudian dituangkan ke dalam model penganggaran yang berbasis money follow program. Hal ini dimaksudkan agar, program-program prioritas yang belum tercapai dapat segera dilakukan percepatan melalui kinerja masing-masing perangkat daerah guna Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada Minggu I Januari 2022 yang diikuti oleh Unsur Organisasi Kemasyarakatan, Forkopimda dan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang. Selanjutnya secara teknis prioritas Perangkat Daerah 2023 yang termuat dalam rancangan awal RKPD 2023 disampaikan kepada Kecamatan untuk menjadi bahan dalam pelaksanaan Musrenbang di 12 Kecamatan se Kabupaten Pinrang. Terkait dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Perangkat Daerah melakukan Penginputan data awal Rancangan Renja pada e-Planning (SIPD).

2. Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan mulai Minggu II Februari s/d Minggu IV Februari 2022 yang diikuti oleh seluruh Stakeholder yang ada pada Kecamatan yang untuk selanjutnya rumusan hasil Musrenbang Kecamatan tersebut divalidasi/diverifikasi oleh verifikator kecamatan dalam SIPD untuk selanjutnya ke tahapan Forum Perangkat daerah.

3. Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pinrang Dilaksanakan pada minggu IV bulan Maret yang diikuti oleh seluruh stakeholder. Sebelum Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten didahului dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Minggu I bulan Maret dengan diikuti oleh

Perwakilan DPRD Kabupaten Pinrang dan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pinrang serta Utusan Masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah penyempurnaan rancangan akhir RKPD.

4. Penetapan RKPD

Rancangan Akhir yang telah disusun selanjutnya difasilitasi oleh Gubernur melalui Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan saran dan masukan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil penyusunan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
  9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 6041) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM sub urusan Kebakaran Kab/Kota;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
46. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24).

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029.
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

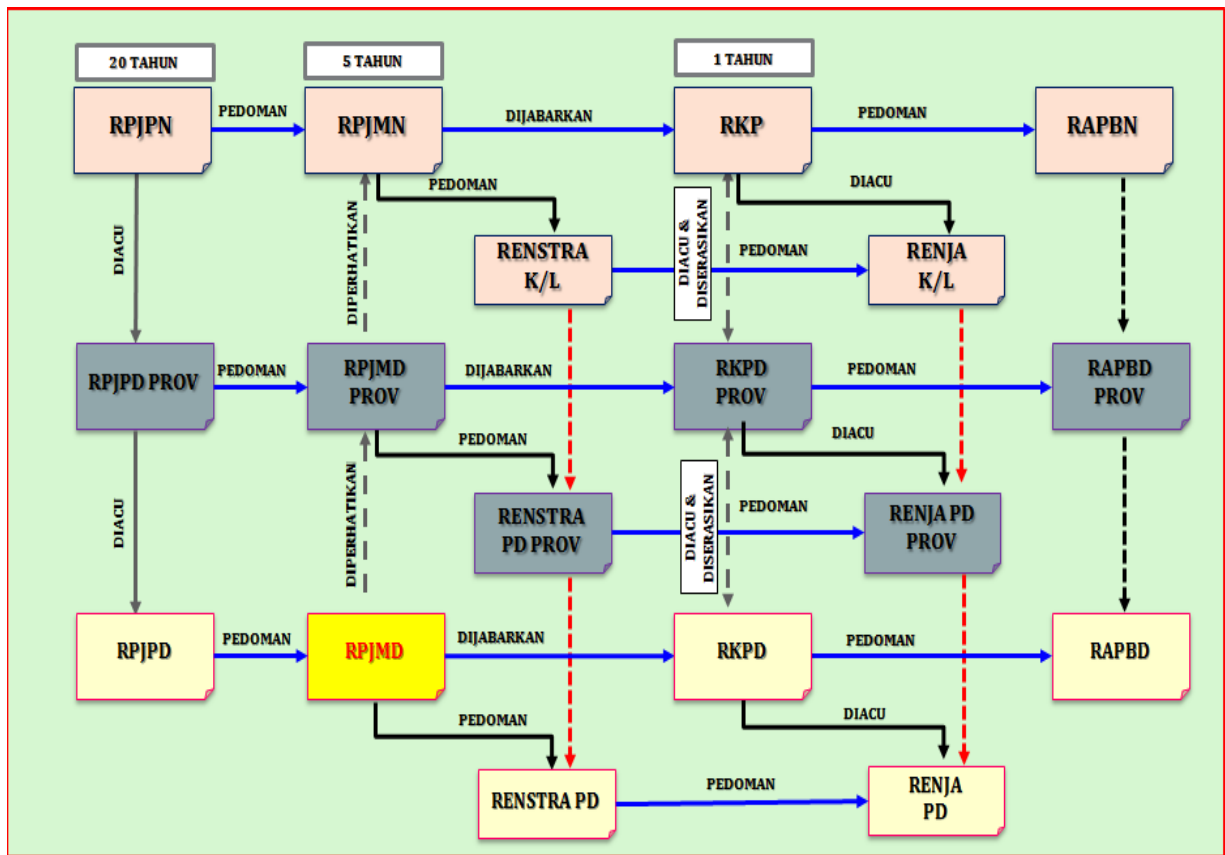
Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 merupakan dasar penyusunan rancangan KUA Tahun 2023 dan rancangan PPAS tahun 2023 untuk dibahas dan disepakati antara Bupati dengan DPRD. Penyusunan



KUA – PPAS digunakan untuk menjamin konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran, seluruh kebijakan, Program dan Kegiatan serta Anggaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan APBD Tahun 2023.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar. 1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber : Pemandagri 86 Tahun 2017 dan telah diolah Tim Penyusun

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan gambaran dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Kemudian RKPD kabupaten dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.

Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya RKPD tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun maksud disusunnya RKPD 2023 Kabupaten Pinrang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi.
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serts Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **b. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2023 adalah untuk:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan.
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023.
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Menjamim keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pinrang.
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
8. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
9. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
10. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
11. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

## **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang dan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan

RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2023**

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 2023**

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.



## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak ±185 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak pada koordinat 4°10'30" sampai 3°19'13" Lintang Selatan dan antara 119°26'30" sampai 119°47'20" Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan (40 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km².

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang 2021

No	Kecamatan	Luas kecamatan (km2)	Persentase
1	Suppa	74,20	3,78
2	Mattiro Sompe	96,69	4,94
3	Lanrisang	73,01	3,72
4	Mattiro Bulu	132,49	6,75
5	Watang Sawitto	58,97	3,01
6	Paleteang	37,29	1,90
7	Tiroang	77,73	3,96
8	Patampanua	136,85	6,98
9	Cempa	90,30	4,60
10	Duampanua	291,86	14,88
11	Batulappa	158,99	8,10
12	Lembang	733,09	37,37
Pinrang		1.961,77	100,00

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2022

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 733,09 Km<sup>2</sup> atau sekitar 37,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang, kemudian selanjutnya Kecamatan Duampanua dengan luas 291,86 Km<sup>2</sup> (14,88%). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah hanya 37,29 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,90% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang.

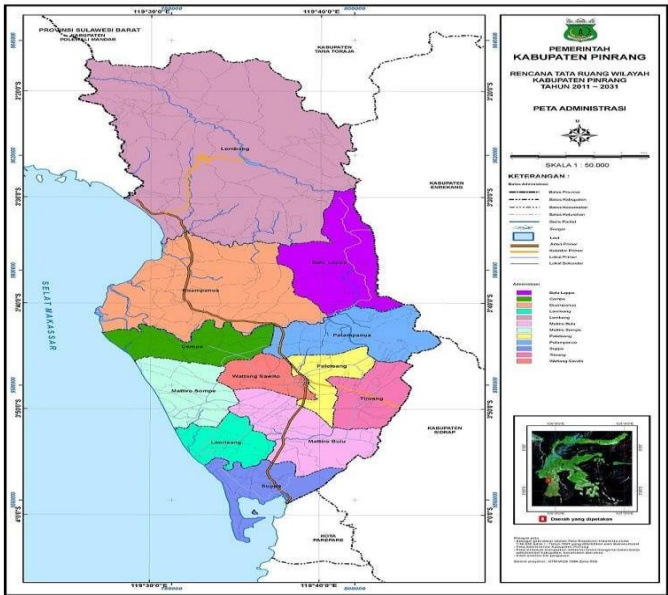
**Tabel 2.2**  
**Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2021**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RK/RW	RT
1	Suppa	8	2	22	5	151	144
2	MattiroSompe	7	2	19	4	43	86
3	Lanrisang	6	1	16	3	29	71
4	Mattiro Bulu	7	2	19	6	57	117
5	WatangSawitto	-	8	-	17	48	112
6	Paleteang	-	6	-	14	22	81
7	Tiroang	-	6	-	13	14	63
8	Patampanua	7	4	17	13	59	102
9	Cempa	6	1	15	2	34	79
10	Duampanua	10	5	25	10	72	155
11	Batulappa	4	1	11	4	25	43
12	Lembang	14	2	37	5	84	193
Pinrang		69	40	181	96	638	1.246

Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel 2.2 total wilayah administrasi Kabupaten Pinrang terdiri dari 69 desa, 40 kelurahan, 22 dusun, 96 lingkungan , 638 RK/RW dan 1.246 RT. Secara detail wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang**



Sumber: Perda RTRW Tahun 2012 Kabupaten Pinrang

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pinrang pada umumnya memiliki permukaan bervariasi, wilayah bagian utara terdiri dataran tinggi dan perbukitan yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut, sehingga wilayah ini cocok dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultural dan sayur-sayuran. Wilayah bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan



dan pertanian. Wilayah bagian barat meliputi wilayah pesisir dengan ketinggian 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal pengembangan potensi perikanan. Klasifikasi ketinggian/topografi di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Ketinggian 0 – 100 mdpl** Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawtito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
- **Ketinggian 100–400 mdpl** Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan Paleteang.
- **Ketinggian 400–1000 mdpl** Wilayah yang termasuk kedalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua.
- **Ketinggian di atas 1000 mdpl** Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa.

**Tabel 2.3**  
**Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang Dari Permukaan Laut (MDpl)**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Ketinggian (Meter)
1	Suppa	Majenang	2-265
2	MattiroSompe	Langnga	2-212
3	Lasinrang	Jampue	2-14
4	MattiroBulu	Bua	12-228
5	WatangSawito	Sawitto	6-14
6	Paleteang	Lallengbata	14-157
7	Tiroang	Tiroang	13-23
8	Patampanua	Teppo	13-86
9	Cempa	Cempa	2-18
10	Duampanua	Lampa	2-965
11	Batulappa	Bilajeng	20-1007
12	Lembang	Tuppu	2-1908

Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2022

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan berdasarkan kemiringan lereng yang terdiri dari :

1. Kemiringan 0-3 % Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
2. Kemiringan 3 – 8 % Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kecamatan, Suppa, Mattiro Bulu, Batulappa dan Kecamatan Paleteang.
3. Kemiringan 8 – 45 % Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Wilayah Kecamatan Duampanua.

4. Kemiringan > 45 % Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayah kaki pegunungan seperti Kecamatan Lembang.

Klasifikasi ketinggian/ Topografi kelerengan di Kabupaten Pinrang berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Luas dan Persentase Wilayah Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelerengan**  
**Tahun 2021**

No	Kelerengan	Kriteria	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 -2	Datar	100.370,20	51,1
2	2-15	Landai	15.696,80	8,1
3	15 -40	Berbukit	50.246	25,6
4	>40	Berbukit	29.864	15,2
Jumlah			196.177	100

Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2022

Kondisi Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Endapan alluvium dan sungai, endapan alluvium dan sungai mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter.
2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakht dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan brekiterfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya di bagian utara Kota Pinrang, sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan di bagian selatan sekitar Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan denganParepare). Kearah Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relative sama dengan batuan gunung api.
3. Batuan aliran lava, batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga putih, bekekartiang, penyebarannya ke arah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), batuan ini terletak di bagian Timur Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai ke wilayah Kabupaten Sidrap, satuan batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400 meter.

5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, satuan batuan ini berbentuk lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100 meter dengan penyebaran sekitar BuluTirasa dan Pakoro.
6. Batu pasir, satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.

Jenis tanah wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Jenis Kabupaten Pinrang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Suppa Aluvial Kelabu; Grumosol Kelabu; Aluvial Hidromorf; Regosol Kelabu.
- Mattiro Sompe Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Kelabu Olif
- Lanrisang Grumosol Kelabu;
- Mattiro Bulu Regosol Kelabu; Grumosol Kelabu; Brown Forest Soil
- Watang Sawitto Aluvial Kelabu; Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Olif; Regosol Kelabu.
- Paleteang Regosol Coklat Kelabuan; Aluvial Kelabu Olif; Aluvial Kelabu Kekuningan; Regosol Kelabu Kekuningan.
- Tiroang Regosol Kelabu; Brown Forest Soil;
- Patampanua Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Hidromorf; Regosol Kelabu Kekuningan; Fodsolik Coklat; Aluvial Kelabu Olif; Brown Forest Soil; Fodsolik Coklat Kekuningan
- Cempa Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Olif
- Duampanua Fodsolik Coklat Kekuningan; Aluvial Kelabu Kekuningan; Fodsolik Coklat; Aluvial Kelabu Olif; Aluvial Hidromorf.
- Batulappa Fodsolik Coklat; Fodsolik Coklat Kekuningan.
- Lembang Brown Forest Soil

Keadaan hidrologi Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil data yang diperoleh, ditemukan daerah-daerah yang masih mengalami genangan periodik. Sedangkan untuk sumber air permukaan antara lain berasal dari aliran sungai yang mengalir wilayah-wilayah Kabupaten Pinrang. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pinrang adalah sungai Kariango, Sungai Mamasa, Lasape dan Sungai Saddang. Sungai yang terbesar adalah Sungai Saddang yang berhulu di atas pegunungan, airnya mengalir dan bermuara ke Selat Makassar. Sungai Saddang yang mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif besar sangat potensial dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, air bersih dan reservoir untuk pembangkit listrik. Selain Sungai Saddang, air tanah dangkal berupa sumur-sumur yang dibuat oleh masyarakat dan air tanah dalam berupa sumur artesis juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Selain itu, pada kondisi tertentu terutama pada saat musim hujan sungai tersebut mempengaruhi sebagian wilayah Kabupaten Pinrang, khususnya di daerah aliran sungai, karena memungkinkan adanya limpasan air sungai yang merupakan ancaman banjir di daerah yang bersangkutan.



Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman-Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9bulan, bulan lembab 1 – 2 bulan dan bulan kering 2 – 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman - Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar 1526 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% - 85%.

Di Kabupaten Pinrang terdapat 5 (lima) stasiun curah hujan antara lain stasiun curah hujan Pinrang dengan periode pengamatan 30 tahun, stasiun curah hujan lainnya dengan periode pengamatan rata-rata baru 12 tahun. Stasiun curah hujan tersebut antara lain: stasiun curah hujan Malimpung, Langnga, Benteng dan Lasape.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebesar 55,92mm<sup>3</sup>/bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yakni sebesar 79,2 mm<sup>3</sup>, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yakni sebesar 828,3 mm<sup>3</sup>.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Pinrang,Tahun 2021**

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan
Januari	828,3	29
Februari	501,4	20
Maret	623,7	22
April	285,7	14
Mei	132,2	9
Juni	167,4	14
Juli	79,2	11
Agustus	133,2	11
September	132,5	11
Oktober	363,6	18
November	463,7	24
Desember	737,2	25

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2022

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.

**a. Kawasan Lindung**

**Kawasan Lindung terdiri atas :**

**1). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

**a. Kawasan hutan lindung**

Kawasan hutan lindung dengan luas 45.168 Ha (empat puluh lima ribu seratus enam puluh delapan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

**b. Kawasan resapan air.**

Kawasan resapan air ditetapkan di kawasan sekitar hutan lindung dan kawasan sekitar daerah aliran sungai di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

**2). Kawasan perlindungan setempat**

Kawasan perlindungan merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi sungai, danau atau waduk, dan RTH kawasan perkotaan dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:

**a. kawasan sempadan sungai;**

Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Kariango dan Sungai Saddang dengan ketentuan:

- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengankedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

- daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
  - daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- b. Kawasan sempadan pantai;
- Kawasan sempadan pantai ditetapkan disepanjang pesisir pantai Kabupaten Pinrang sepanjang 101 (seratus satu) kilometer di Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang, dengan ketentuan:
- daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
  - daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- c. Kawasan sekitar danau atau waduk
- Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan di Bendungan Benteng Kecamatan Patampanua dengan ketentuan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi.
- d. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- Kawasan ruang terbuka hijau kawasan berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK di Kabupaten Pinrang.

### 3). Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan lindung geologi, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan abrasi.
  - 1. Kawasan rawan gempa bumi

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.
- 2. Kawasan rawan tsunami

Kawasan rawan tsunami ditetapkan disepanjang wilayah pesisir Kabupaten



Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

3. Kawasan rawan abrasi

Kawasan rawan abrasi ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan imbuhan air tanah meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi air tanah berupa kawasan Cadangan Air Tanah Pinrang Sidenreng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

Kawasan sekitar mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan BatuLappa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

**B. Kawasan lindung lainnya.**

Kawasan lindung lainnya sebagaimana ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan lindung lainnya merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau ditetapkan di kawasan:

- a. Konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe,

sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

- b. Konservasi perairan laut berupa kawasan konservasi terumbu karang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

**c. Kawasan Rawan Bencana Alam**

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan banjir;
- b. Kawasan rawan gelombang pasang; dan
- c. Kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan banjir ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Saddang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dengan luasan 5.465 (lima ribu empat ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cempa dengan luasan 658 (enam ratus lima puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe dengan luasan 1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang dengan luasan 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua dengan luasan 65,92 (enam puluh lima koma Sembilan puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang dengan luasan 359,81 (tiga ratus lima puluh Sembilan koma delapan puluh satu) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa dengan luasan 9,45 (Sembilan koma empat puluh lima) hektar.

Kawasan rawan gelombang pasang, ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, sebagian wilayah Kecamatan BatuLappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenisnya Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Banjir	Angin Kencang	Tanah Longsor	Kebakaran	Gempa
1	Suppa	-	-	-	-	-
2	MattiroSompe	5	2	1	1	-
3	Lanrisang	1	-	2	1	-
4	MattiroBulu	1	-	-	1	-
5	WatangSawitto	4	1	-	7	-
6	Paleteang	-	1	-	1	-
7	Tiroang	6	-	-	-	-
8	Patampanua	2	1	-	1	-
9	Cempa	1	1	1	-	-
10	Duampanua	12	3	-	2	-
11	Batulappa	2	-	1	-	-
12	Lembang	6	2	9	1	-
Jumlah		40	11	14	15	-

Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2022

Untuk menangani masalah bencana, maka dibuat jalur dan ruang evakuasi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (escape way) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*). Jalur evakuasi bencana meliputi:

**Tabel 2.7**  
**Jalur Evakuasi Bencana Di Kabupaten Pinrang**

JENIS BENCANA	LOKASI
Gelombang Pasang dan Tsunami	- ruas jalan Lero Menralo – Tana Mili, ruas jalan Sabangparu – Ladea – Tonrognge dan ruas jalan Ujung Lero – Tana Mili di Kecamatan Suppa
	- Ruas jalan Jampue–Paladang–Polewali–Tonrongnge di Kecamatan Lanrisang;
	- Ruas jalan Langnga – Patobong – Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
	- Ruas jalan Wakka–Akkajang–Cempa Pasar di Kecamatan Cempa;
	- Ruas jalan Kajuanging–Tuppu dan ruas jalan Pajalele–Teppo–Cenrana di Kecamatan Lembang; dan
	- Ruas jalan Paria–Pekkabata,ruas jalan Serang-Kappe–Data, dan ruas jalan Maroneng-Bungi–Rajang di Kecamatan Duampanua.

Sumber data: Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012 - 2032

Jalur evakuasi bencana yang tercantum diatas direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

Ruang evakuasi bencana (Melting point) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana meliputi:

- a. Pos Angkatan Laut dan SD 230 Majjakka B di Kecamatan Suppa;
- b. Lapangan Sepak Bola Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- c. Kantor Camat Cempa di Kecamatan Cempa;
- d. Lapangan Sepakbola Pekkabata dan lapangan sepakbola Rajang di Kecamatan Duampanua; dan
- e. SD 141 Tuppu dan Lapangan Terbuka Cenrana di Kecamatan Lembang.

Dalam dokumen KLHS Kabupaten Pinrang, salah satu kajian risiko yang dihadirkan adalah kajian risiko bencana. Kajian ini didasarkan pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisa terhadap kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Pada dasarnya, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dilakukan di Kabupaten Pinrang tahun 2011. Upaya tersebut adalah dengan penyusunan Dokumen RPB tahun 2011 sekaligus merangkum pengkajian risiko bencana. Batasan dalam pengkajian tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga kajian risiko bencana yang disusun sekarang merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya. Dasar pengkajian risiko bencana disamakan dengan aturan terkait kebencanaan hingga tingkat nasional. Pengkajian tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Pengkajian tersebut didasarkan dengan indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut untuk menghasilkan tingkat risiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian risiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Adapun hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Pinrang dilihat pada table dibawah ini:



Tabel 2.8  
Jenis Bahaya dan ResikoTinggi di Kabupaten Pinrang

Jenis Bahaya	Luas (ha)	Persentase Luas terhadap Wilayah Kabupaten (%)
Banjir	106,59	0,06
Cuaca Ekstrim	47.899,56	24,78
Gempa Bumi	79.790,31	41,28
Karhutla	19.978,69	10,34
Tanah Longsor	51.924,16	26,86

Sumber data: Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Pinrang

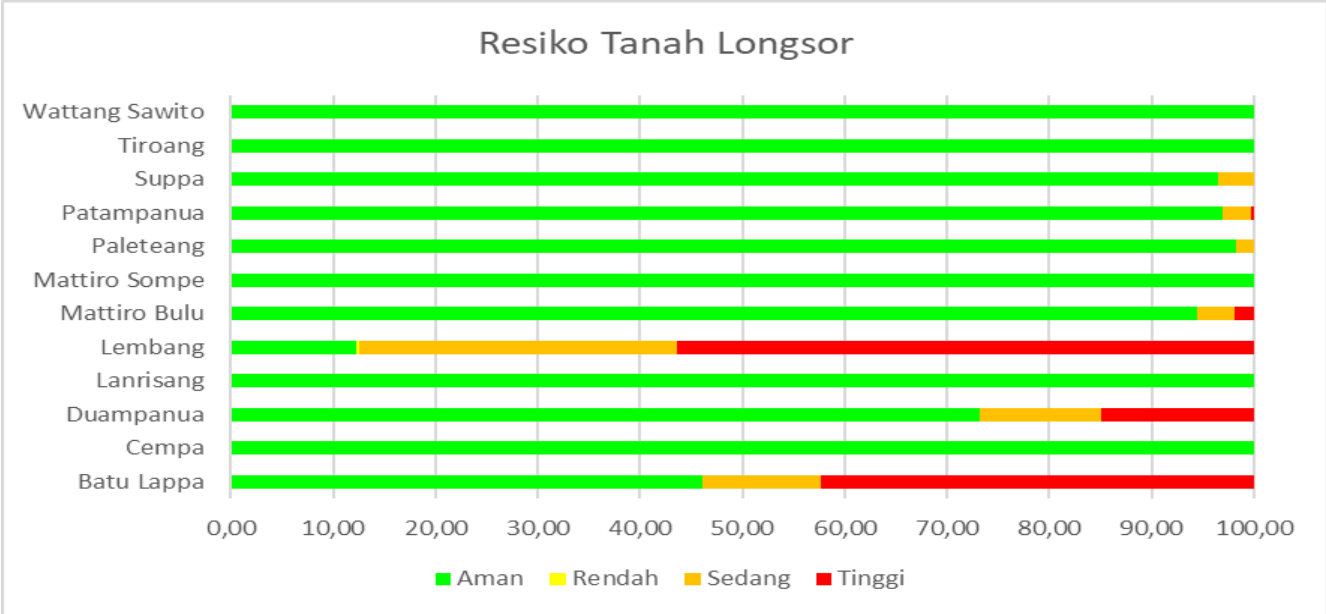
Berdasarkan hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang terdapat 5 jenis bahaya yang berisiko tinggi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor. Lokasi bencana tanah longsor yang tertinggi berada di Kecamatan Lembang karena penutupan lahan yang kurang baik (perubahan tutupan lahan) serta tergolong daerah pegunungan.

Tabel 2.9  
Lokasi ResikoTanah Longsor Tinggi di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Luas Kategori Bencana Tanah Longsor			
	Aman	Rendah	Sedang	Tinggi
Batulappa	7.418,87	18,02	1.849,21	6.826,99
Cempa	8.927,85			
Duampanua	21.050,00	12,25	3.396,27	4.314,80
Lanrisang	6.389,68			
Lembang	8.774,91	192,03	22.347,90	40.506,75
MattiroBulu	12.075,19		468,52	246,15
MattiroSompe	8.971,62			
Paleteang	4.867,04		85,65	
Patampanua	12.177,54		350,34	29,48
Suppa	7.562,64		270,97	
Tiroang	7.317,55			
WattangSawitto	6.837,72			
Total (ha)	112.370,61	222,29	28.768,86	51.924,16
Total (%)	58,14	0,12	14,88	26,86

Sumber data: Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Pinrang

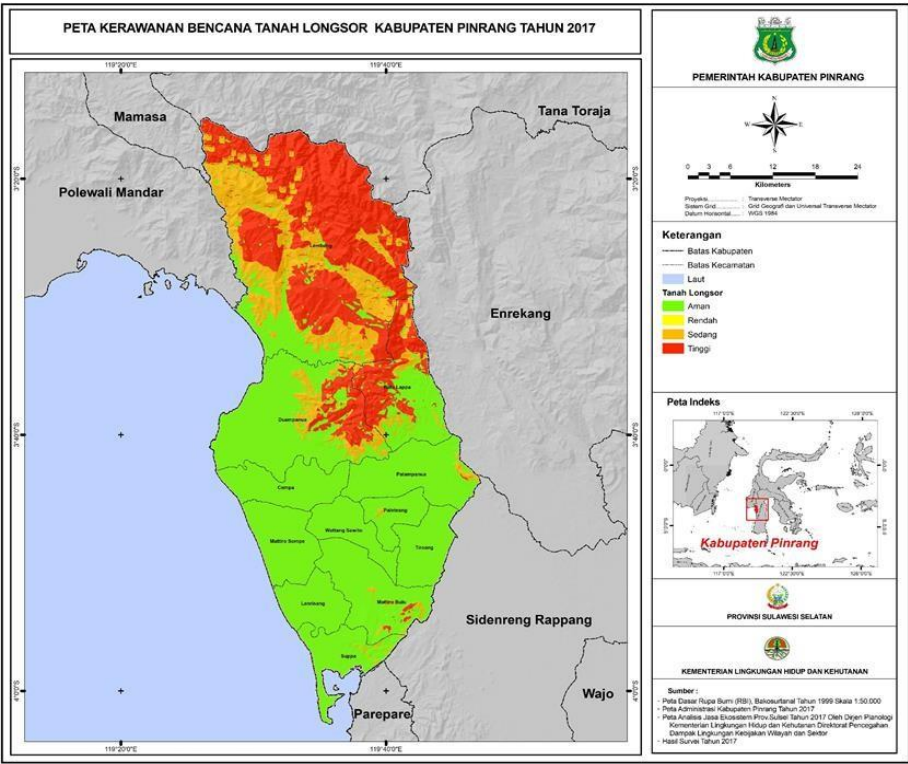
Gambar 2.2  
Grafik Persentase Luas Resiko Tanah Longsor di Kabupaten Pinrang



Sumber data: Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Pinrang

Gambar 2.3

Peta Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pinrang Tahun 2017



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa berdasarkan administrasi potensi terjadinya resiko longsor terbesar terdapat pada Kecamatan Lembang dan Batulappa. Hal ini dikarenakan topografi kedua kecamatan tersebut sebagian wilayahnya berupa pengunungan. Sementara penggunaan lahannya umumnya berupa semak belukar dan pertanian, dimana pemanfaatan lahan secara umum tidak berkelanjutan.

**A. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya, terdiri atas:

- 1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- 2. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- 3. Kawasan peruntukan pertanian;
- 4. Kawasan peruntukan perikanan;
- 5. Kawasan peruntukan pertambangan;
- 6. Kawasan peruntukan industri;
- 7. Kawasan peruntukan pariwisata;
- 8. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- 9. Kawasan Peruntukan lainnya.

Pengembangan wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang.

Salah satu rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang meliputi pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang, terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama; dan system jaringan prasarana lainnya.

**a. Pusat-Pusat Kegiatan**

Salah satu Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang meliputi pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang, terdiri atas pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

**Tabel 2.10**  
**Pusat–Pusat Kegiatan Kabupaten Pinrang**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Kawasan Perkotaan Pinrang yang meliputi:  - Sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto,  - Sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan  - sebagian wilayah Kecamatan Tiroang;	- Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa;  - Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua;  - Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;  - Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua;	meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri  - Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa;  - Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;  - Pusat Permukiman perdesaan Waetuo di Kecamatan Lanrisang;

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kawasan Perkotaan Kassa di Kecamatan Batulappapa; dan</li><li>- Kawasan PerkotaanTaddokkong di Kecamatan Lembang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pusat Permukiman perdesaanTadang Palie di Kecamatan Cempa;</li><li>- Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua;</li><li>- Pusat Permukiman perdesaan Lembang Mesakada di Kecamatan Lembang;</li><li>- Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang; dan</li><li>- Pusat permukiman perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang</li></ul>

Sumber data: Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032

a. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama yang ada Kabupaten Pinrang terdiri dari Sistem jaringan transportasi darat, Sistem jaringan transportasi laut, Sistem jaringan transportasi udara.

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas Sistem jaringan jalan dan Sistem jaringan perkeretaapian.

a. Sistem jaringan jalan

Sistem jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan; dan lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan arteri primer; jaringan jalan kolektor primer; jaringan jalan lokal.

Tabel 2.11  
Sistem Jaringan di Kabupaten Pinrang

SISTEM JARINGAN JALAN	LOKASI
1. Jaringan jalan arteri Primer	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruas Batas Provinsi Sulawesi Barat – Batas Kota Pinrang sepanjang 43,554 (empat Puluh tiga koma lima lima empat) kilometer;</li><li>b. Ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,891 (nol koma delapan Sembilan satu) kilometer;</li><li>c. Ruas jalan Ahmad Yani sepanjang 2,804 (dua koma delapan kosong empat) kilometer;</li></ul>



2. Jaringan jalan kolektor primer	<p>d. Ruas Batas Kota Pinrang – Batas Kota Parepare sepanjang 20,154 (dua puluh Koma satu lima empat) kilometer; dan</p> <p>e. Ruas jalan Jenderal Sudirman sepanjang 2,912 (dua koma sembilan satu dua) kilometer.</p> <p>a. Ruas Pinrang –Rappang sepanjang 19,68 (Sembilan belas koma enam delapan) kilometer;</p> <p>b. Ruas jalan Pincara – Malimpung – Malaga Batas Kabupaten Enrekang sepanjang 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) kilometer; dan</p> <p>c. Ruas jalanTuppu–Bakaru sepanjang 20,00 (duapuluh koma nol) kilometer.</p>
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber data: Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012–2023

Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang meliputi trayek angkutan dan terminal.

- Trayek angkutan, meliputi:
  - Trayek angkutan barang, terdiri atas Trayek angkutan barang dalam provinsi yang melayani pergerakan moda angkutan barang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan Trayek angkutan barang antar provinsi yang melayani pergerakan moda angkutan barang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Pulau Sulawesi.
  - Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Pulau Sulawesi;
  - Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
  - Trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kawasan Perkotaan Pinrang dengan PPK dalam wilayah Kabupaten Pinrang.
- Terminal , meliputi :
  - Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Paleteang;
  - Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C, terdiri dari:
    - 1) Terminal Suppa di Kecamatan Suppa;
    - 2) Terminal Jampue di Kecamatan Lanrisang;
    - 3) Terminal Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
    - 4) Terminal Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;
    - 5) Terminal Tiroang di Kecamatan Tiroang;
    - 6) Terminal Teppo di Kecamatan Patampanua;
    - 7) Terminal Cempa di Kecamatan Cempa;
    - 8) Terminal Kassa di Kecamatan Batulappa;

- 9) Terminal Pekkabata di Kecamatan Duampanua; dan
- 10) Terminal Taddokkong di Kecamatan Lembang.

Terminal penumpang tipe C dan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C merupakan terminal terpadu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

- Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum.
- Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Nama ruas – ruas jalan provinsi yang melalui Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada Tabel 2. 12.

**Tabel 2.12**  
**Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Kabupaten Pinrang**

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANGRUAS (Km)
	LAMA	BARU		
	NO. RUAS	NO. RUAS		
1	079	080	Pinrang–Rappang	19,68
2	080	081	Paleteang -Malimpung -Malaga–Kabere	24,23
3	081	082	Tuppu - Pao- Pamulungan - Batas Kab. TanaToraja	40,2

Sumber: Keputusan Gubernur Sul-Sel Nomor 2755/XII/Tahun 2015

- Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Kewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- Jalan Kota merupakan jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Kewewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota.

- Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Kewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

## 2. Sistem jaringan perkeretaapian

Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Pinrang terdiri atas jaringan jalur kereta api, stasiun kereta api; fasilitas operasi kereta api.

Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Pinrang ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan system jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Jaringan jalur kereta api merupakan jaringan jalur kereta api umum antar kota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah –Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Pinrang – Pangkajene – Pinrang – Makassar –Sungguminasa–Takalar–Bulukumba–Watampone–Parepare.

Stasiun kereta api ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.

## 3. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari Tatanan ke pelabuhanan; dan Alur pelayaran.

### a. Tatanan Kepelabuhanan

Tatanan kepelabuhanan berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan dan industri.

Tatanan kepelabuhanan, terdiri atas:

- Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Kajuanging di Kecamatan Lembang;
- Pelabuhan pengumpan terdiri atas:
  - 1) Pelabuhan Marabombang di Kecamatan Suppa;
  - 2) Pelabuhan Ujung Lero di Kecamatan Suppa; dan
  - 3) Pelabuhan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe.
- Terminal khusus yaitu Terminal Khusus PLTD Suppa di Kecamatan Suppa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Alur Pelayaran

Alur pelayaran terdiri atas:

- Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan Kajuanging dan pelabuhan nasional lainnya; dan
- Alur pelayaran local yang menghubungkan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Pinrang dan pelabuhan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 4. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Jaringan prasarana lainnya di Kabupaten Pinrang terdiri atas: sistem jaringan energi, system jaringan telekomunikasi, system jaringan sumber daya air; dan system prasarana pengelolaan lingkungan.

##### 1) Sistem Jaringan Energi

Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud merupakan rencana pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energy terbarukan untuk mendukung ketersediaan energy listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Pinrang terdiri atas:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakar di Kecamatan Lembang dengan kapasitas 126 (seratus dua puluh enam) megawatt;
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Suppa di Kecamatan Suppa dengan kapasitas 62 (enam puluh dua) megawatt;
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sawitto di Kecamatan Patampanua dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) megawatt;
- Pengembangan energy listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Pinrang terdiri atas: Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Kecamatan Lembang, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Duampanua; dan Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan kapasitas 25 (dua puluhlima) Mwe.

Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas:

- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Bakar – GI Tuppu - GI Pinrang, GI Pinrang - GI Parepare, dan GI Parepare–GI Suppa; dan
- Gardu Induk (GI) Bakar dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Lembang dan GI Pinrang dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA di Kecamatan Watang Sawitto.

##### 2) Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas jaringan teresterial; dan jaringan satelit. Selain jaringan terestrial dan satelit, system jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *BaseTransceiver Station* telekomunikasi.

Sistem jaringan telekomunikasi dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Pinrang di Kecamatan Watang Sawitto dengan kapasitas 3.576 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) satuan sambungan telepon.



3) **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sumber air dan prasarana sumberdaya air.

1. Sumber Air

Sumber air terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, bendungan, embung, sumber air permukaan lainnya, dan cekungan air tanah (CAT).

2. Prasarana Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air terdiri atas system jaringan irigasi dan system pengendalian banjir. Sistem jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Pinrang.

**Tabel 2.13**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Pinrang**

No	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	KEWENANGAN
1	<p>Sumber Air, meliputi:</p> <p>a. Air permukaan yang bersumber dari WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Kariango, DAS Rappang, dan DAS Karajae;</p> <p>b. Bendung, yaitu Bendung Benteng dan Bendung Pasolengan di Kecamatan Duampanua, Bendung PadangLolo dan Bendung Taccipi di Kecamatan Patampanua dan Bendung Kalosi di Kecamatan Lembang;</p> <p>c. Bendungan yaitu Bendungan Bakaru di Kecamatan Lembang;</p> <p>d. Embung, yaitu Embung Watangpulu di Kecamatan Suppa, dan Embung WatangKassa dan Embung WatangKasa II di Kecamatan BatuLappa, Embung Binanga Karaeng I dan Embung Binanga Karaeng II di Kecamatan Lembang, dan Embung Malimpung di Kecamatan Patampanua;</p> <p>e. sumber air permukaan lainnya berupa mata air yang meliputi mata air Pakeng, mata air Taddokkong, dan mata air Tuppu di Kecamatan Lembang, mata air Rajang, dan mata air Massewae di Kecamatan Duampanua, dan mata air Tapporang di Kecamatan Batulappa; dan</p> <p>f. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi : Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng Rappang yang melintasi Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Duampanua.</p>	<p>WS Lintas Provinsi</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p>Kewenangan pemerintah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah</p>

2	<p>Prasarana Sumber Daya Air</p> <p>- Sistem Jaringan Irigasi</p> <p>a DI Saddang dengan luas pelayanan 42.931 (empat puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh satu) hektar;</p> <p>b DI Taccipi dengan luas pelayanan 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua; dan</p> <p>c Daerah Irigasi (DI) terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) DI meliputi total luas pelayanan 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Mattiro Bulu.</p> <p>-Sistem Pengendalian Banjir</p> <p>Pengendalian terhadap luapan air Sungai Saddang dan Sungai Kariango</p>	<p>Kewenangan Pemerintah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Provinsi</p> <p>Kewenangan Pemerintah Kabupaten</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber Data: Perda RTRW Kabupaten Pinrang TAhun 2012– 2032

1) **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas Sistem pengelolaan persampahan; Sistem penyediaan air minum (SPAM); Sistem jaringan drainase; Sistem jaringan air limbah; dan Jalur evakuasi bencana.

a. Sistem pengelolaan persampahan.

Sistem pengelolaan persampahan ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaurulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pinrang terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesanakhir (TPA) sampah.

Lokasi TPS di Kabupaten Pinrang meliputi TPS sampah organik dan TPS sampah nonorganik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan di kawasan perkotaan PKL, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo. Lokasi TPST dan TPA di Kabupaten Pinrang ditetapkan di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua dengan luasan 5,3 (lima koma tiga) hektar.

b. Sistem penyediaan air minum (SPAM).

Sistem penyediaan air minum dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitaspenyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensidancakupan pelayanan.

SPAM terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Pinrang. SPAM bukan jaringan

perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPAM di Kabupaten Pinrang dipadukan dengan system jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. SPAM jaringan perpipaan terdiri atas :

- Unit air baku yang bersumber dari:
  - 1) Sungai, yaitu Sungai Saddang dan Sungai Kariango;
  - 2) Mata air, yaitu mata air Pakeng di Kecamatan Lembang, dan mata air Rajang di Kecamatan Duampanua.
- Unit produksi air minum meliputi:
  - 1) SPAM Zona I, meliputi Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Cempa dan Kecamatan Batulappa mengambil air baku dari Bendung Benteng;
  - 2) SPAM Zona II, meliputi Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe mengambil air baku dari Sungai Kariango; dan
  - 3) SPAM Zona III, meliputi Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua mengambil air baku dari mata air Pakeng dan/atau mata air Rajang.
- Unit distribusi air minum ditetapkan di seluruh kecamatan.

Sistem saluran drainase melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, dan Sungai Kariango yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Pinrang. Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.

Sistem saluran drainase primer dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, dan Sungai Kariango yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Pinrang. Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.

c. Sistem jaringan air limbah;

Sistem jaringan air limbah ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem jaringan air limbah meliputi system

pembuangan air limbah setempat dan system pembuangan air limbah terpusat. Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki system pembuangan air limbah terpusat. Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat.

d. Jalur evakuasi bencana.

Jalur dan ruang evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (*escape way*) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*).

Jalur evakuasi bencana meliputi:

- a. Ruas jalan Lero Minralo – Tana Mili, ruas jalan Sabangparu – Ladea – Tonrongnge dan ruas jalan UjungLero–Tana Mili di Kecamatan Suppa;
- b. Ruas jalanJampue –Paladang–Polewali–Tonrongnge di Kecamatan Lanrisang;
- c. Ruas jalanLangnga–Patobong–Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- d. Ruas jalanWakka–Akkajang–CempaPasar di Kecamatan Cempa;
- e. Ruas jalan Kajuanging–Tuppu dan ruas jalan Pajalele–Teppo-Cenrana di Kecamatan Lembang;dan
- f. Ruas jalan Paria–Pekkabata, ruas jalan Serang-Kappe–Data, dan ruas jalan Maroneng-Bungi –Rajang di Kecamatan Duampanua.

Jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

Ruang evakuasi bencana (*Melting point*) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana meliputi:

- a. Pos Angkatan Laut dan SD 230 Majjakka B di Kecamatan Suppa;
- b. Lapangan Sepak Bola Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- c. Kantor Camat Cempa di Kecamatan Cempa;
- d. Lapangan Sepakbola Pekkabata, dan lapangan sepakbola Rajang di Kecamatan Duampanua; dan
- e. SD 141 Tuppu dan Lapangan Terbuka Cenrana di KecamatanLembang.

• **Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis Kabupaten Pinrang merupakan bagian wilayah Kabupaten Pinrang yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumber daya alam,



dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Pinrang terdiri atas: Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

- Kawasan Strategis Nasional adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang berada di Kabupaten Pinrang.
- Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Pinrang terdiri atas: KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dan KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut penjelasannya:

a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, Sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
2. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
3. Kawasan pengembangan budidaya udang ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:

1. kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang di wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian Kecamatan Batulappa, sebagian Kecamatan Lembang dan sebagian Kecamatan Patampanua; dan
2. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kecamatan

Lembang.

- c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, merupakan kawasan hutan lindung ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang
- Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), terdiri atas: kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dengan sudut kepentingan social budaya, kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut penjelasannya:
    - 1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
      1. Kawasan perkotaan Pinrang sebagai pusat pemerintahan , pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat perdagangan dan jasa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang dan sebagian wilayah Kecamatan Tiroang.
  - Kawasan Agropolitan yang terdiri atas:
  - Kawasan Agropolitan Bakaru yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan, komoditas pertanian hortikultura dan komoditas perkebunan ditetapkan di Kecamatan Lembang;
  - Kawasan Agropolitan Sipatuo, Malimpung, dan Padang Loang (SIPUNDANG) yang berbasis agrobisnis komoditas perkebunan yang ditunjang oleh komoditas perikanan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan Patampanua;
  - Kawasan Agropolitan Watang Pulu, Alitta, dan Makkawaru (WALIMA) yang berbasis agrobisnis komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Mattiro Bulu;
  - Kawasan Agropolitan Batulappa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan Batulappa;dan
  - Kawasan Agropolitan Tiroang yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Tiroang;
  - Kawasan Agropolitan Paleteang yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Paleteang;
  - Kawasan Agropolitan Cempa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Cempa;
  - Kawasan Agropolitan Sawitto yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Watang

Sawitto.

- Kawasan Minapolitan yang terdiri atas:
  - Kawasan Minapolitan Paria, Data Bittoeng, dan Maroneng (PADABIMA) yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Duampanua yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Kajuangin;
  - Kawasan Minapolitan Wiringtasi yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Suppa yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Pelabuhan Ujung Lero;
  - Kawasan Minapolitan Mattiro Sompe, Lanrisang dan Cempa (MALACE) yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Cempa yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Pelabuhan Langnga;
  - Kawasan Pariwisata Alam Lembang ditetapkan di Kecamatan Lembang;
  - Kawasan Pariwisata Alam Permandian Air Panas Sulili ditetapkan di Kecamatan Paleteang;
  - Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dan sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu; dan
  - Kawasan rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM) Buttusawe di Kecamatan Duampanua.
- d. KSK dengan sudut kepentingan social dan budaya
1. Kawasan Istana Addatuang Sawitto di Kec. Watang Sawitto
  2. Kawasan monument dan makam lasinrang di Kecamatan Paleteang
  3. Kawasan Makam Tuan Fakki di Kec. Tiroang
- e. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
1. Kawasan bendungan Benteng di Kecamatan Patampanua
- f. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup:
1. Kawasan jalur hijau mangrove pesisir pantai Kabupaten Pinrang disebagian wilayah Kec.Suppa, sebagian wilayah kec. Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
  2. Kawasan DAS Saddang di Kecamatan Lembang, Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Patampanua.
  3. Kawasan Hutan Kota Bulu Paleteang di Kecamatan Paleteang.

4. Kawasan rawan banjir di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

- **Kawasan Kelautan dan Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

- i. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Suppa, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Lanrisang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mattiro Sompe, kawasan Pesisir dan laut Kecamatan Cempa, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Duampanua, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Lembang.

- ii. Kawasan peruntukan budidaya perikanan;

Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri dari:

- a. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
- b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
- c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

- iii. Kawasan pengolahan ikan

Kawasan pengolahan ikan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

- iv. Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan.

Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, dan Kecamatan Lembang.

• **Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan**

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang, terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, dan Kawasan peruntukan perkebunan. Berikut penjelasan terkait kawasan peruntukan pertanian:

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 44.861 Ha (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian Wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 30.914 Ha (tigapuluh ribu sembilan ratus empat belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

Tabel 2.14

No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Suppa	1.716	3,83	2.503	8,1
2	Lanrisang	3.714	8,28	1.015	3,28
3	MattiroBulu	4.822	10,75	3.689	11,96
4	MattiroSompe	3.679	8,2	878	2,84
5	Paleteang	3.137	6,99	2.251	7,28
6	Tiroang	4.835	10,78	2.413	7,81
7	WatangSawitto	4.033	8,99	834	2,7
8	Patampanua	4.464	9,95	4.394	14,21
9	Cempa	4.237	9,45	2.240	7,25
10	Duampanua	7.671	17,1	7.359	23,81
11	Batulappa	458	1,02	1.798	5,82
12	Lembang	2.093	4,67	1.530	4,95
Total		44.861	100	30.914	100

Sumber: Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang



- Kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kelapa ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
- Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa;
- Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Lembang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa; dan
- Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

**Tabel 2.15**  
**Kawasan Peruntukan Perkebunan di Kecamatan di Kabupaten Pinrang**

No	Kecamatan	Luas(Ha)	persentase(%)
1	Suppa	1.351	5,53
2	Lanrisang	-	-
3	MattiroBulu	2.685	11
4	MattiroSompe	-	-
5	Paleteang	78	0,32
6	Tiroang	-	-
7	WatangSawitto	-	-
8	Patampanua	2.233	9,15
9	Cempa	864	3,54
10	Duampanua	1.620	6,63
11	Batulappa	1.212	4,96
12	Lembang	14.374	58,87
Total		24.417	100

Sumber: Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

- Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
- Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, dan sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang.
- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pinrang ditetapkan

sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas 44.861Ha (empat puluh empat ribu delapan ratus enampuluh satu hektar).

• **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:

- 1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya,
- 2. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- 3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

**Tabel 2.16**  
**Kawasan Pariwisata di Setiap Kecamatan Kabupaten Pinrang**

Kecamatan	Kawasan Peruntukan pariwisata budaya	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Kawasan peruntukan Pariwisata buatan
KecamatanTiroang	MakamTuan Fakki		
Kecamatan Mattiro Sompe		Pantai Ammani Desa Mattirotasi, dan Pantai Ujung Tape Kelurahan Pallameang	
Kecamatan MattiroBulu			
Kecamatan Lembang	Masjid Tua Tondo Bunga Desa Letta, dan Benteng Paremba Desa Benteng Paremba	Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla Desa Benteng Paremba, Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh, Permandian Batu Pandan Kelurahan Betteng, Permandian Balaloang Permai Desa Pakeng, Goa Paniki Desa Binanga Karaeng, dan Pantai Kajuanging dan Pantai Kanipang Desa Sabbangparu	Danau Buatan PLTA Bakaru di Desa Ulusaddang
Kecamatan Duampanua	Makam Raja –raja Kaballangan Desa Kaballangan, dan MakamTosalamae di Desa Massewae	Bukit Tirasa Kelurahan Lampa, Air Terjun Lamoro Desa Massewae, Permandian Pasandong Desa Kaballangang, dan Pantai Kappe dan Pantai Maroneng di Kelurahan Data	
Kecamatan Lanrisang	Masjid Tua At Taqwa Jampue dan Saoraja Datu Lanrisang	Pantai Wae Tuwoe Desa WaeTuwoe	
Kecamatan Suppa	Pengrajin Sarung Sutra Mandar, Masjid Tua Ujung Lero Desa Lero, Istana Datu Suppa dan Makam Besse Kajuara Kelurahan WatangSuppa	Pantai Wiring Tasi Desa Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero Desa Lero, Pantai Ujung Labuang Desa Ujung Labuang, Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru Desa	Tempat pengasapan ikan, tempat pembuatan perahu tradisional,

		Tasiwalie Pantai BongingPonging Desa Lotang Salo, Pantai Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang	perkebunan kelapa dalam dan pelabuhan nelayan di Desa Lero
Kecamatan Paleteang	Makam Lasinrang di Kelurahan Laleng Bata, Makam Petta Malae di Kelurahan Temmasarangnge, Arajang Sawitto dan Pusara Benteng Sawitto dan Makam Addatuang Sawitto Matinro Langkara'na	Bulu Paleteang di Kelurahan Temmassaarangnge, dan Permandian Air Panas Sulili Kelurahan Mamminasae	
Kecamatan Watang Sawitto	Saoraja Desa Liang Garessi, Monumen Lasinrang, Istana Addatuang Sawitto Kelurahan Sawitto dan Kompleks Makam Raja-raja Sawitto		
Kecamatan	Kawasan Peruntukan pariwisata budaya	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Kawasan peruntukan Pariwisata buatan
Kecamatan Batulappa		Goa BatuLappa Desa BatuLappa	
Kecamatan Patampanua		Batu Moppangnge Desa Malimpung	Bendungan Benteng di Kelurahan Benteng dan rumah makan terapung di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua
Kecamatan Cempa		Pantai Wakka Desa Tadangpalie	

Sumber: Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

• **Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas**

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan, terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas:

- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa belerang ditetapkan di sebagian wilayah Desa Sulili Kecamatan Paleteang;
- b. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan terdiri atas:
  - 1). Komoditas batu gamping, ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa;
  - 2). Komoditas pasir kuarsa, ditetapkan di sebagian wilayah Desa Malimpung Kecamatan Patampanua dan Kecamatan Tiroang;
  - 3). Komoditas andesit, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa;
  - 4).Komoditas urukan tanah setempat ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Suppa dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua; dan  
5). Komoditas kerikil berpasir alami, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Paleteang.

2. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang berada di wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Lembang dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa.

• **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industry meliputi:

- 1. Kawasan peruntukan industry besar yang merupakan kawasan industry manufaktur;
- 2. Kawasan peruntukan industry sedang; dan
- 3. Kawasan peruntukan industry sedang terdiri atas:
  - o Kawasan peruntukan industry pengolahan komoditas hasil hutan dan pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan 100 (seratus) hektar; dan
  - o Kawasan peruntukan industry logam, mesin, dan tekstil ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dengan luasan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar.
- 4. Kawasan peruntukan industry rumah tangga.

Kawasan peruntukan industry rumah merupakan kawasan aglomerasi industry rumah tangga.

**Tabel 2.17**

**Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pinrang**

No	Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi
1	Industri Besar	Sebagian wilayah Kecamatan Suppa, dan sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe
2	Industri Sedang	Di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan 100 (seratus) hektar
		Di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dengan luasan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar.
3	Industri Rumah Tangga	Di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

Sumber: Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

Secara umum jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan jenis kelamin, setiap tahunnya dari tahun 2017 – 2021 jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan data terakhir Tahun 2021 berjumlah 408.109 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebanyak 57.975 jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Duampanua berjumlah 50.076 jiwa. Secara rinci penyebaran penduduk di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel2.18**  
**Jumlah Penduduk Perkecamatan**  
**Di Kabupaten Pinrang Tahun 2017 – 2021**

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Mattiro Sompe	30.117	30.491	31.085	30.155	30.873
2	Suppa	33.179	33.641	33.899	34.434	34.580
3	Mattiro Bulu	30.980	30.939	31.205	31.524	31.410
4	Watang Sawitto	56.695	56.630	57.383	56.570	57.975
5	Patampanua	38.244	37.796	38.178	37.577	38.051
6	Duampanua	50.647	49.448	49.719	50.226	50.076
7	Lembang	48.382	46.844	47.403	46.932	47.796
8	Cempa	20.237	19.550	19.689	19.543	19.673
9	Tiroang	25.530	23.439	23.660	23.409	23.848
10	Lanrisang	19.762	19.749	19.812	19.713	19.918
11	Paleteang	43.003	41.815	42.209	42.630	42.588
12	Batulappa	11.806	11.516	11.429	11.281	11.381
Jumlah		408.582	401.858	405.671	403.994	408.109

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, 2022



Tabel 2.19  
Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perkecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2017- 2021

No	Kecamatan	Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki -laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Mattiro Sompe	14.717	15.400	30.117	7,37	14.879	15.612	30.491	7,58	15.163	15.922	31.085	7,66	14.729	15.426	30.155	7,46	15.061	15.812	30.873	7,56
2	Suppa	16.428	16.751	33.179	8,12	16.668	16.973	33.641	8,37	16.839	17.060	33.899	8,35	17.143	17.291	34.434	8,52	17.173	17.407	34.580	8,47
3	MattiroBulu	15.196	15.784	30.980	7,58	15.136	15.803	30.939	7,69	15.228	15.977	31.205	7,69	15.449	16.075	31.524	7,80	15.386	16.024	31.410	7,69
4	WatangSawitto	27.918	28.777	56.695	13,88	27.793	28.837	56.630	14,09	28.179	29.204	57.383	1.414	27.810	28.760	56.570	14,00	28.478	29.437	57.975	14,19
5	Patampanza	18.868	19.376	38.244	9,36	18.509	19.287	37.796	9,4	18.733	19.445	38.178	9,41	18.490	19.087	37.577	9,30	18.679	19.372	38.051	9,32
6	Duampanza	24.844	25.803	50.647	12,4	24.218	25.230	49.448	12,3	24.376	25.343	49.719	1.225	24.692	25.534	50.226	12,43	24.620	25.456	50.076	12,27
7	Lembang	24.344	24.038	48.382	11,84	23.495	23.349	46.844	11,65	23.824	23.579	47.403	1.168	23.569	23.363	46.932	11,62	23.975	23.821	47.796	11,71
8	Cempa	9.994	10.243	20.237	4,95	9.657	9.893	19.550	4,86	9.733	9.956	19.689	4,85	9.702	9.841	19.543	4,84	9.791	9.882	19.673	4,82
9	Tiroang	12.761	12.769	25.530	6,25	11.595	11.844	23.439	5,83	11.678	11.982	23.660	5,83	11.533	11.876	23.409	5,79	11.744	12.104	23.848	5,84
10	Lanrisang	9.611	10.151	19.762	4,84	9.638	10.111	19.749	4,91	9.677	10.135	19.812	4,88	9.630	10.083	19.713	4,88	9.743	10.175	19.918	4,88
11	Paletang	21.405	21.598	43.003	10,52	20.745	21.070	41.815	10,4	20.933	21.276	42.209	1.040	21.098	21.532	42.630	10,55	21.140	21.448	42.588	10,43
12	Batulappa	5.933	5.873	11.806	2,89	5.746	5.770	11.516	2,86	5.651	5.778	11.429	2,81	5.624	5.657	11.281	2,79	5.612	5.769	11.381	2,78
	Jumlah	202.019	206.563	408.582	100	198.079	203.779	401.858	100	200.014	205.657	405.671	100	199.469	204.525	403.994	100	201.402	206.707	408.109	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang 2022

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun criteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada table dibawah ini:

**Tabel 2.20**  
**Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan**

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan Yang diperkenankan
1	I	Semua Jenis Penggunaan Lahan
2	II	Semua Jenis Penggunaan Lahan Kecuali Psi
3	III	Semua Jenis Penggunaan Lahan Kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembangan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), Semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan Hutan Lindung

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Penjelasan:

1. Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsive terhadap pemupukan.

2. Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit factor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran–saluran air.
3. Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor– faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.
4. Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.
5. Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/dihutankan.
6. Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah tererosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.
7. Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.
8. Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/batuan singkapan/tanah pasir pantai. Karena itu Tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami di bawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2.21

Persentase Kemampuan Lahan Menurut Kelas di Kabupaten Pinrang

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	6.591,38	3,41
IV	6.790,50	3,51
V	86.256,57	44,63
VI	91.560,16	47,37
VIII	2.087,31	1,08

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Berdasarkan criteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Pinrang. Hasilnya 47,37% luas lahan kelas VI, 44,63% luas lahan kelas V, 3,51 % luas lahan kelas IV, 3,41 % luas lahan kelas II, dan 1,08% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Pinrang umumnya hanya mampu untuk penggunaan semua jenis pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan criteria kuantitatif kemampuan lahan dan factor pembatas, lahan di Kabupaten Pinrang umumnya mengandung krikil atau batuan dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami.

Adapun kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada table dibawah ini:

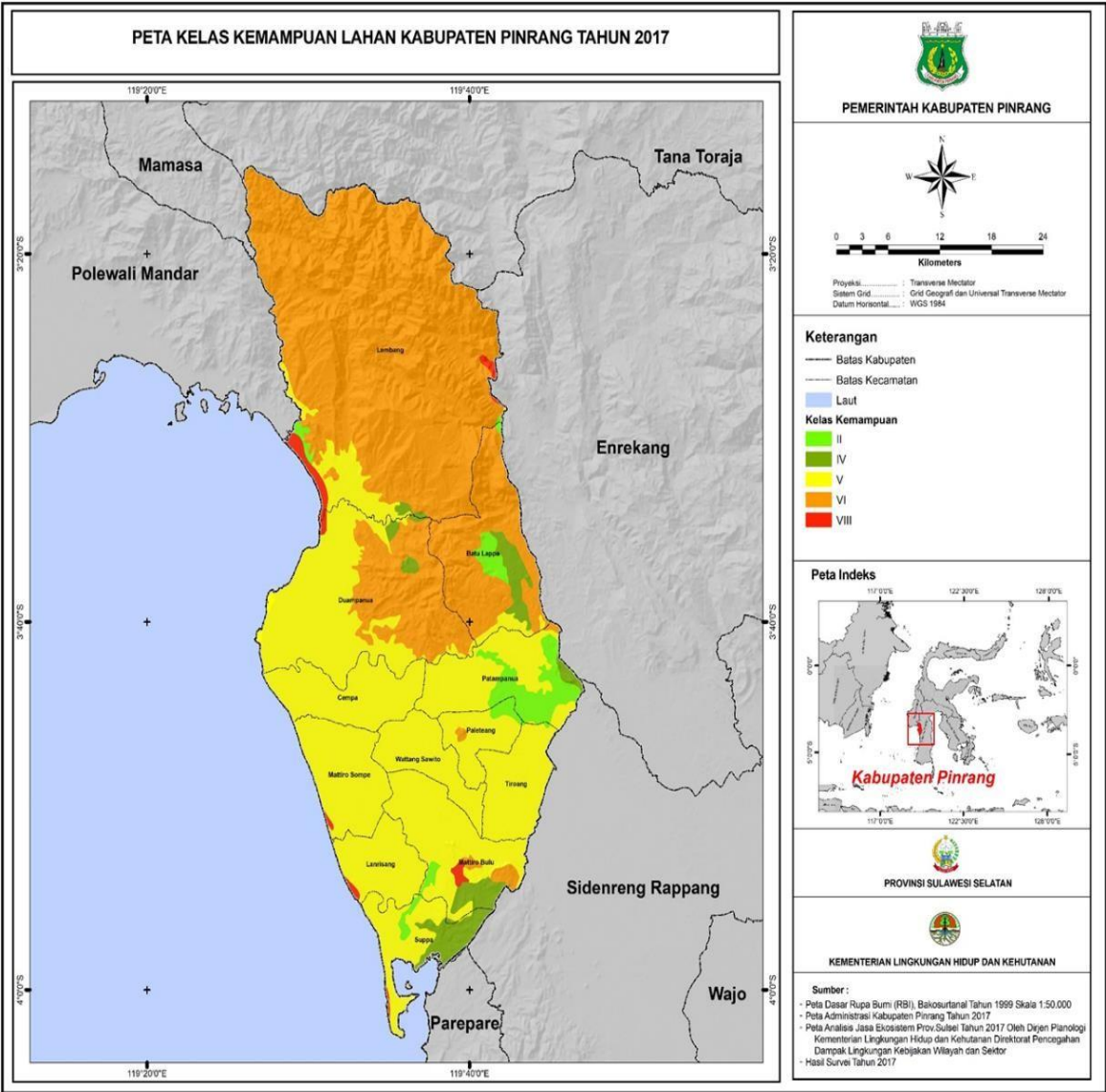
Tabel 2.22  
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Kelas (ha)				
	II	IV	V	VI	VIII
BatuLappa	1.117,48	1.747,82	794,78	12.452,99	
Cempa			8.924,30	0,01	3,54
Duampanua		564,96	16.107,18	11.949,46	151,72
Lanrisang	2,62		6.226,21		160,85
Lembang	383,29	270,82	3.819,14	66.127,92	1.220,41
MattiroBulu	293,89	1.444,17	10.020,09	745,42	286,30
MattiroSompe			8.861,16		110,46
Paleteang	509,17		4.297,73	145,78	
Patampanua	3.868,84	440,22	8.109,72	138,59	
Suppa	365,78	2.322,51	4.991,29		154,03
Tiroang	50,31		7.267,24		
WatangSawito			6.837,72		
Total	6.591,38	6.790,50	86.256,57	91.560,16	2.087,31

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Batu Lappa (1.117,48 ha) dan Kecamatan Patampanua (3.868,84ha). Sedangkan untuk sebagian daerah Kecamatan Lembang dan Mattiro Bulu tidak sesuai dijadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagaralam, hutan lindung, atau tempat rekreasi.

**Gambar. 2.4**  
**Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pinrang Tahun 2017**



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa eksosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skalaragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah.



Penyediaan air bersih di Kabupaten Pinrang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel2.23**  
**Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Pinrang**

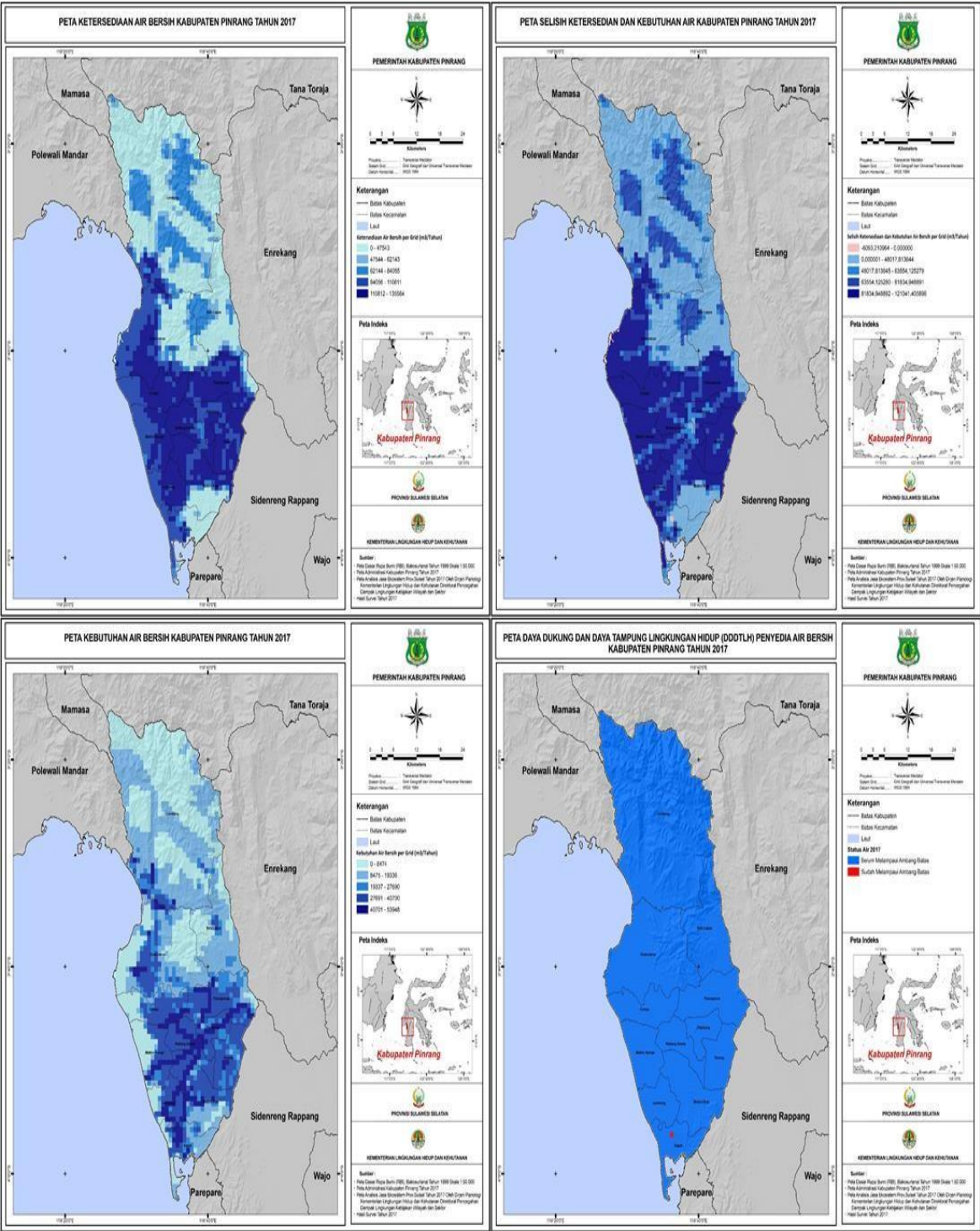
Kecamatan	Status Air Tahun 2017(m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
BatuLappa	12.389.379,22	2.771.781,17	9.617.598,05
Cempa	16.240.770,99	3.116.239,70	13.124.531,29
Duampanua	33.130.750,82	5.833.475,63	27.297.275,20
Lanrisang	11.359.329,44	2.871.203,88	8.488.125,56
Lembang	48.366.519,75	8.836.447,43	39.530.072,33
MattiroBulu	18.020.559,89	5.622.097,92	12.398.461,97
MattiroSompe	14.478.618,57	2.759.368,25	11.719.250,32
Paleteang	8.974.247,67	2.647.651,97	6.326.595,70
Patampanua	19.851.677,15	5.287.307,15	14.564.370,00
Suppa	9.594.305,67	2.811.884,45	6.782.421,22
Tiroang	13.541.800,22	3.414.149,78	10.127.650,44
WattangSawito	12.079.234,12	3.733.305,05	8.345.929,08
Total	218.027.193,50	49.704.912,33	168.322.281,17

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Pinrang sebesar 218.027.193,50 m<sup>3</sup>/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 49.704.912,33m<sup>3</sup>/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 168.322.281,17m<sup>3</sup>/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Lembang (48.366.519,75 m<sup>3</sup>/Tahun), dan Duampanua (33.130.750,82 m<sup>3</sup>/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan kecamatan tersebut di atas merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus dan masih terdapat banyak kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersedian dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Paleteang (6.326.595,70m<sup>3</sup>/Tahun).

Gambar 2.5

Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Pinrang



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indicator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Kesejahteraan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021, sector yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku adalah sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 45,90%. Kemudian disusul oleh sector Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,48%. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.24  
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2017-2021

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
		Hb	Hb	Hb	Hb	Hb
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian,KehutanandanPerikanan	48.51	47.02	45.03	45.22	45,90
2	Pertambangandanpenggalian	2.63	2.71	2.75	2.80	2,78
3	Industripengolahan	6.37	6.10	6.28	6.14	6,09
4	PengadaanListrikdanGas	0.08	0.08	0.08	0.08	0,08
5	PengadaanAir,PengelolaanSampah,Li mbah danDaurUlang	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
6	Konstruksi	9.67	10.08	10.85	10.78	10,29
7	Perdagangan besar dan eceran;ReparasiMobildanSepeda Motor	13.13	13.89	14.63	14.42	14,48
8	TransportasidanPergudangan	2.54	2.58	2.65	2.31	2,42
9	PenyediaanAkomodasidanMakanMinum	0.89	0.93	0.97	0.87	0,89
10	InformasidanKomunikasi	2.20	2.29	2.36	2.59	2,57
11	JasaKeuangandanAsuransi	2.12	2.11	2.05	2.01	2,02
12	RealEstate	3.28	3.21	3.17	3.32	3,17
13	JasaPerusahaan	0.11	0.11	0.11	0.10	0,10
14	AdministrasiPemerintahan,PertanahandanJaminanSosialWajib	3.71	3.99	4.05	4.08	4,07
15	JasaPendidikan	2.79	2.85	2.94	3.09	2,93
16	JasaKesehatandanKegiatanSosial	1.26	1.28	1.33	1.49	1,53
17	JasaLainnya	0.72	0.75	0.76	0.67	0,68
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100,00

Sumber data: Pinrang Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Pinrang

Tabel 2.25  
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan  
Usaha Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2017-2021

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
		Hk	Hk	Hk	Hk	Hk
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,94	46,00	44,64	44,57	44,60
2	Pertambangan dan penggalian	2,21	2,27	2,32	2,37	2,39
3	Industri pengolahan	6,25	6,01	6,22	6,13	6,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,00	0,005	0,005
6	Konstruksi	9,17	9,21	9,65	9,70	9,21
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,54	15,19	15,58	15,35	15,58
8	Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,84	2,94	2,59	2,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,93	0,96	0,85	0,88
10	Informasi dan Komunikasi	2,89	3,02	3,14	3,55	3,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,06	2,04	1,95	1,95	1,95
12	Real Estate	3,2	3,16	3,14	3,27	3,18
13	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	3,81	3,84	3,88	3,95
15	Jasa Pendidikan	3,05	3,13	3,18	3,35	3,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,35	1,39	1,51	1,53
17	Jasa Lainnya	0,76	0,80	0,80	0,71	0,73
PDRB		100	100,00	100,00	100	100

Sumber data: Pinrang Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Pinrang

**Tabel 2.26**  
**Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas harga dasar konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021**  
**(Juta Rp).**

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hb	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3		4		5		6		7	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.935.912,09	5.267.114,96	8.507,077,50	5.514.127,22	8.839.082,07	5.700.352,00	9.081.427,01	5.716.122,55	9.986.570,08	6.009.179,18
2	Pertambangan dan penggalian	430.860,30	248.092,15	490.703,09	271.620,17	539.429,20	296.875,30	563.220,59	303.562,22	604.730,68	321.629,11
3	Industri pengolahan	1.041.413,17	701.117,76	1.103.170,41	720.778,31	1.233.228,21	794.067,20	1.233.483,28	785.743,32	1.324.626,49	829.314,33
	Pengadaan Listrik dan Gas	12.772,01	12.621,25	14.158,56	13.751,77	15.602,65	15.316,20	16.162,20	15.998,98	17.527,30	17.072,53
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	718,86	572,48	797,43	619,73	841,1	634,9	899,97	671,98	951,39	702,72
6	Konstruksi	1.581.449,55	1.031.813,81	1.823.210,55	1.104.632,21	2.130.422,44	1.232.741,50	2.165.469,94	1.243.766,10	2.239.866,65	1.241.390,33
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.148.673,58	1.622.759,01	2.512.472,39	1.820.609,58	2.871.418,43	1.989.820,40	2.895.761,18	1.968.919,95	3.151.611,14	2.099.014,46
8	Transportasi dan Pergudangan	415.352,10	311.622,65	467,003.85	340,947.64	520.620,01	375.406,90	463.596,12	331.949,52	527.045,11	362.370,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145.045,05	98.772,98	167,890.53	111,366.84	190.276,74	122.204,90	175.703,11	109.435,44	118.312,31	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

10	Informasi dan Komunikasi	359.960,15	324.624,86	413,278.43	361,652.60	462.477,61	401.284,60	520.698,77	455.098,61	558.560,75	486.317,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	346.559,59	231.326,24	382,341.02	244,128.40	402.042,59	249.464,90	404.477,46	250.301,65	438.497,84	262.236,02
12	Real Estate	536.283,95	359.338,36	580,868.66	379,130.55	622.566,47	400.743,80	667.137,37	419.114,69	690.638,92	428.870,50
13	Jasa Perusahaan	17.206,89	13.293,47	19,613.08	14,599.72	21.341,59	15.628,70	20.007,94	14.383,87	21.431,93	15.146,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	607.005,04	416.090,67	721,621.92	456,738.56	794.166,16	490.077,90	819.870,58	497.655,84	886.324,56	532.488,24
15	Jasa Pendidikan	457.148,86	341.715,35	515,670.66	375,251.63	576.322,27	406.611,80	621.250,73	429.791,92	637.274,24	444.024,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206.797,90	147.077,08	231,972.42	161,513.01	260.904,77	177.188,40	298.691,02	193.536,87	332.294,97	206.651,30
17	Jasa Lainnya	117.402,87	84.670,52	135,928.48	95,750.76	149.577,58	101.659,30	135.155,71	90.398,42	147.864,68	97.772,61
<b>PDRB</b>		<b>16.360.561,94</b>	<b>11.212.623,60</b>	<b>18.087.778,99</b>	<b>11.987.218.7</b>	<b>19.630.319,95</b>	<b>12.770.078,60</b>	<b>20.083.012,97</b>	<b>12.826.451,93</b>	<b>21.758.576,96</b>	<b>13.472.492,78</b>

Sumber data: PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Pinrang



Uraian Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang adalah berasal dari sektor pertanian yang tiap tahun mengalami peningkatan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 7.935.912,09 dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp.9.986.570,08. Jika disandingkan dengan data Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku maka sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04% jika dibanding dengan tahun 2020 yang mengalami perlambatan sebesar 0,44%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali konstruksi yang berkontraksi sebesar -0,19%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 9,16% dan jasa lainnya sebesar 8,16%.Sementara itu, beberapa lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,13%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,11%; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,00%. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.27**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2017- 2021**

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,65	4,69	3,37	0,28	5,13
2	Pertambangan dan penggalian	11,22	9,48	9,30	2,25	5,95
3	Industri pengolahan	8,26	2,80	10,17	-1,05	5,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,95	8,96	11,38	4,46	6,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,27	8,25	2,45	5,84	4,58
6	Konstruksi	6,62	7,06	11,60	0,89	-0,19
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,82	12,19	9,29	-1,05	6,61
8	Transportasi dan Pergudangan	7,54	9,41	10,11	-11,58	9,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,59	12,75	9,73	-10,45	8,11
10	Informasi dan Komunikasi	9,79	11,41	10,96	13,41	6,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,23	5,53	2,19	0,34	4,77
12	Real Estate	6,58	5,51	5,70	4,58	2,33
13	Jasa Perusahaan	7,02	9,83	7,05	-7,97	5,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,88	9,77	7,30	1,55	7,00
15	Jasa Pendidikan	8,92	9,81	8,36	5,70	3,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,21	9,82	9,71	9,23	6,78
17	Jasa Lainnya	9,56	13,09	6,17	-11,08	8,16
	PDRB	7,84	6,91	6,53	0,44	5,04

Sumber data: PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Pinrang

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami perlambatan sebesar 0,44. Sedangkan pertumbuhan Sulsel dan Nasional mengalami kontraksi sebesar -0,70 dan -2,07. Sementara pada tahun 2021 ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan sebesar 5,04%. Angka ini masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang bertumbuh sebesar 4,65% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69%. Hal tersebut ditunjukkan dalam table dan gambar sebagai berikut:

**Tabel 2.28**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kab. Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021**

No	Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	7,84	6,91	6,53	0,44	5,04	5,35
2	Kab. Sidrap ( daerah setara)	%	5,95	3,97	4,75	(6,87)	4,16	2,39
3	Sul Sel	%	7,21	7,06	6,92	-0,70	4,65	5,03
4	Nasional	%	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	3,38

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang 2022

2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah tersebut, dan PDRB Perkapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat pendapatan perkapita di suatu wilayah.

Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan gambaran pada table dibawah ini:

**Tabel 2.29**  
**Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang, Daerah Setara ( Kab. Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menurut harga berlaku Tahun 2017- 2021**

No	PDRB Perkapita (ADHB)	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Pinrang	(Juta Rp)	43,95	48,28	52,05	52,93	53,41
2	Kab. Sidrap (daerah setara)	(Juta Rp)	40,24	43,25	46,49	44,12	47,19
3	Sul Sel	(Juta Rp)	47,82	52,64	57,03	56,51	59,66
4	Nasional	(Juta Rp)	51,89	55,99	59,06	56,93	62,2

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang 2022

Berdasarkan pada tabel diatas data menunjukkan meskipun PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang tiap tahunnya meningkat namun masih dibawah dari PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Pendapatan Perkapita Nasional.

3. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum danterus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indicator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

**Tabel 2.30**  
**Perbandingan Inflasi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017- 2021**

No	Inflasi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	3,43	1,96	2,45	2,37	2,37	2,5
2	SulSel	%	4,44	3,50	2,35	2,04	2,40	2,95
3	Nasional	%	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	2,60

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang, 2022



Perkembangan Inflasi Kabupaten Pinrang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pasang surut. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2021 angka inflasi sebesar 2,37%. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa tentang indeks gini dikelompokkan ke dalam ketimpangan rendah apabila indeks gini lebih kecil dari 0,3; dikategorikan ketimpangan sedang apabila indeks gininya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila indeks gininya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan indeks gini Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2017- 2021 pada table berikut :

**Tabel 2.31**  
**Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pinrang, Daerah Setara ( Kab. Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017– 2021**

No	IndeksGini	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	0,309	0,359	0,336	0,375	0,367
2	Kabupaten Sidrap	0,325	0,340	0,284	0,349	NA
3	Sul Sel	0,429	0,388	0,391	0,382	0,377
4	Nasional	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang 2022

Bila diperhatikan table tersebut diatas dalam kurun waktu 2017–2021 Kabupaten Pinrang Indeks Gininya terkategori ketimpangan **sedang**. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung seimbang. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing-masing kategori (17Kategori).

5. Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang berfluktuatif walaupun cenderung menurun, hal ini musti menjadi perhatian Pemerintah Daerah mengingat dengan menurunnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk memfokuskan Program yang terkait penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 2.32**  
**Perbandingan Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten**  
**Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017- 2021**

No	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	91,54%	91,19%	91,54%	91,14%	91,19%
2	Kabupaten Sidrap	94,7%	94,84	95,21	94,95	NA
3	Sul Sel	90,52%	91,13%	91,44%	91,04%	91,47%
4	Nasional	89,88%	90,34%	90,78%	89,81%	90,29%

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang 2022

Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan di tahun 2020 sebesar 91,14% dan meningkat di tahun 2021 sebesar 91,19%. Angka ini masih berada di bawah persentase penduduk di atas garis kemiskinan Sulawesi Selatan, namun berada di atas angka nasional.

6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Kabupaten Pinrang jumlah penduduk miskin dari tahun 2017-2021 angkanya fluktuatif.

**Tabel 2.33**  
**Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang**

No	Indikator	Tahun (Jiwa )					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	31,28	31,43	32,94	31,85	33,56	33,51
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,48	8,46	8,81	8,46	8,86	8,81
3	Garis Kemiskinan (ribu jiwa)	250.163	256.054	280.746	294.349	338.731	345. 892

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang 2022

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebanyak 33,51 ribu jiwa atau sebesar 8,81%. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 33,56 ribu jiwa atau 8,86%.

**7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Perkembangan pembangunan suatu Negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia sangat penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Indikator dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah wilayah atau Negara tergolong dalam wilayah atau Negara maju, berkembang atau terbelakang.

Di Kabupaten Pinrang untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 hal yang paling mendasar dalam pembangunan manusia, yaitu Angka Harapan Hidup, Pengetahuan dan standar hidup layak. Hasil perhitungan IPM ini menggambarkan secara umum pembangunan manusia Kabupaten Pinrang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.34**  
**Komponen IPM Kabupaten**  
**Pinrang Tahun 2017- 2021**

Uraian Angka	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan Hidup ( Tahun )	68,68	68,98	69,39	69,61	69,77
Harapan Lama Sekolah (Tahun )	13,19	13,20	13,22	13,23	13,24
Rata – rata Lama Sekolah (Tahun )	7,54	7,84	7,85	7,86	7,87
Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Ribuan Rupiah)	11.279	11.508	11.828	11.844	11.956
<b>IPM</b>	<b>69,90</b>	<b>70,62</b>	<b>71,12</b>	<b>71,26</b>	<b>71,45</b>

Sumber data: BPS Kabupaten Pinrang 2022

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang selama periode tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 dicapai 69,90, tahun 2018 dicapai 70,62 tahun 2020 dicapai menjadi 71,26 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 71,45%. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa indikator pendukung dalam penentuan nilai Indeks Pembangunan Manusia diantaranya : Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk yang setiap tahun juga mengalami peningkatan.

**Tabel 2.35**  
**Perbandingan IPM Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kab. Sidrap),**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017–2021**

No	IPM	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	69,90	70,62	71,12	71,26	71,45
2	Daerah Setara (Kab.Sidrap)	69,84	70,60	71,05	71,93	71,54
3	Sul Sel	70,34	70,90	71,66	71,94	72,24
4	Nasional	70,81	71,39	71,92	71,21	72,29

Sumber data: BPS 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IPM di Kabupaten Pinrang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 69,90 di tahun 2017 menjadi 71,45 di tahun 2021, akan tetapi nilai IPM Kabupaten Pinrang masih jauh dibawah dari nilai IPM daerah setara seperti Kabupaten Sidrap yang memiliki nilai IPM 71,54 di tahun 2021 dan dibawah dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan yakni 72,29 di tahun 2021. Walaupun nilai IPM Kabupaten Pinrang berada diatas nilai IPM Nasional akan tetapi masih perlu untuk melakukan peningkatan target dan kinerja untuk indikator pendukung dari nilai Indeks Pembangunan Manusia.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pendidikan

Tercapainya pembangunan sumber daya manusia ditandai dengan tingginya kualitas hidup yang dicapai masyarakat. Salah satu standar yang ditetapkan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Indeks pendidikan adalah salah satu komponen dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pendidikan ini nantinya dapat digunakan untuk mengukur atau membandingkan perubahan dari beberapa variabel yang mencerminkan kinerja sektor pendidikan dan disajikan dalam bentuk angka/indeks. Angka Indeks yang praktis dan mudah dibaca yang dapat memberikan gambaran kondisi output kinerja sektor pendidikan di daerah yang dibentuk dari indikator angka partisipasi murni, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Hasil dari perhitungan Indeks Pendidikan dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 2.40  
Indeks Pendidikan Tahun 2017- 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pendidikan (nilai)	61,77	62,80	62,89	62,95	63,01

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Indeks pendidikan dibentuk dari indikator angka partisipasi murni, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Indeks Pendidikan Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan nilai 62,89 menjadi 62,95 pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 63,01. Walaupun angka indeks pendidikan ini tiap tahunnya meningkat namun belum mencapai target yaitu sebesar 63,15.

2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf ( AMH ) merupakan Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana. Indikator Angka Melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama pada daerah-daerah pedesaan dan terpencil dimana jumlah penduduk yang tidak dapat mendapatkan akses pendidikan (bersekolah) atau indicator yang menunjukkan kemampuan penduduk suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka



melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Penduduk yang 15 tahun keatas yang melek huruf (penduduk yang bisa baca) pada tahun 2017 – 2021 menunjukkan pada tahun 2017 dicapai 95,05%, dan pada tahun tahun 2020 meningkat ke 99,99%.

**Tabel 2.41**  
**Angka Melek Huruf Kabupaten Pinrang**

No	Bidang/urusan	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa Membaca dan Menulis	212.990	215.950	225.899	259.790	
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	224.071	225.609	226.000	259.823	
3.	AMH Kabupaten Pinrang 15 tahun Keatas	95,05%	95,72%	99,96%	99,99%	Blm rilis

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang 2022

**3. Angka Rata –Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 dicapai 7,86 dan tahun 2021 mencapai 7,87.

**Tabel 2.42**  
**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kab. Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Rata-rata lama sekolah Kab.Pinrang	7,54	7,84	7,85	7,86	7,87
2	Angka Rata-rata lama sekolah Daerah Setara (Kab.Sidrap)	7,52	7,79	7,83	7,84	7,94
3.	Angka Rata-rata lama Sekolah SulSel	7,95	8,02	8,26	Prov	8,46
4.	Angka Rata-rata lama sekolah Nasional	8,10	8,17	8,34	Pusat	8,54

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang 2022

Dari tabel diatas Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang walaupun mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, namun pada tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah kabupaten lain atau yang setara seperti Kabupaten Sidrap. Kondisi ini berbeda pada tahun 2020 dimana angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pinrang lebih tinggi dibanding Kabupaten Sidrap. Angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada nilai 8,46 di tahun 2021 dan angka rata-rata lama sekolah Nasional berada pada angka 8,54 di tahun yang sama.

4. Indeks Kesehatan

Ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, dan kesehatan termasuk dalam salah satu dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup. Dari indikator tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Tabel 2.43  
Indeks Kesehatan Tahun 2017– 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kesehatan (nilai)	74,89	75,35	75,98	76,32	76,57

Sumber data: Dinas Kesehatan, 2022

Di Kabupaten Pinrang Indeks Kesehatan pada tahun 2019 sebesar 75,98 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 76,32. Dan pada tahun 2021 meningkat lagi mencapai 76,57. Walaupun angka indeks kesehatan di Kabupaten Pinrang masih tergolong baik akan tetapi masih perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dari segi fasilitas dan pelayanan kesehatan terutama disaat pandemic seperti ini.

5. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Harapan hidup berbeda dengan lama hidup, lama hidup atau panjang hidup yakni jumlah tahun maksimum penduduk untuk dapat hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk suatu negara atau daerah dengan daerah lainnya tidak berbeda karena umur manusia ada batas maksimumnya. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat

dalam melakukan perawatan bayi yang dilahirkan semakin membaik sehingga dapat mencapai harapan hidup yang lebih baik pula.

Tabel 2.44

Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kab.Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017–2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Kabupaten Pinrang	68,68	68,98	69,39	69,61	69,77
2	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Daerah Setara (Kab.Sidrap)	68,82	69,15	69,59	69,83	69,97
3	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Sulawesi Selatan	69,84	70,08	70,43	70,57	72,65
4	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Nasional	71,06	71,20	71,34	73,4	73,55

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Angka Usia Harapan Hidup selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pinrang dari 68,68 pada tahun 2017 menjadi 69,77 pada tahun 2021. Akan tetapi angka ini masih lebih rendah dibanding dengan kabupaten yang setara seperti Kabupaten Sidrap yang memiliki Angka Usia Harapan Hidup sebesar 69,97 di tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan 72,65 dan Nasional 73,55. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup agar bisa melampaui target nasional.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indicator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Salah satu indicator dalam IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini terkait dengan tujuan dari MDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan semua variabel signifikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Sederajat penduduk perempuan, APS

SMP/Sederajat penduduk perempuan, APS SMA/Sederajat penduduk perempuan, Angka Buta Hurufpenduduk perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja penduduk perempuan, rasio jenis kelamin, rasio jenis kelamin saat lahir, dan persentase penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan. Adapun hasil dari Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.43**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,44	95,45	95,35	96,24	95,11

Sumber data: Pinrang Dalam Angka, BPS 2022

Di Kabupaten Pinrang Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan dari 95,35 pada tahun 2019 menjadi 96,24 pada tahun 2020. Namun di tahun 2021 angkanya menurun menjadi 95,11. Nilai Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pinrang masih relatif baik akan tetapi angka ini masih harus terus dipertahankan dalam hal pencapaian misi dan tujuan dari TPB di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Pinrang pada khususnya.

**7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indicator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indicator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauhmana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

**Tabel 2.44**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**  
**Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,61	61,73	67,92	68,11	68,43

Sumber data: Pinrang Dalam Angka, BPS 2022

Nilai IDG Kabupaten Pinrang untuk tahun 2020 sebesar 68,11 dan untuk tahun 2021 sebesar 68,43.

8. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

**Tabel 2.45**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	orang	153.357	166.922	165.960	167.701	165.431
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	orang	255.011	278.166	280.966	283.694	286.334
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,1	60,01	59,07	59,11	57,78

Sumber Data: BPS 2022

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dimulai dari tahun 2017 sebesar 60,1% kemudian naik pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 60,1% kemudian turun di tahun 2019 menjadi 59,01% dan naik lagi pada angka 59,11%. Namun di tahun 2021 menurun lagi menjadi 57,78%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi perekonomian yang juga mengalami pasang surut.

9. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah indicator tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, indikator ini diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan dari indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan disamping menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Besarnya tingkat pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas dikarenakan mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.



Tabel 2.46  
Tingkat PengangguranTerbuka

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	orang	6.769	4.669	4.834	7.020	6.717
Penduduk Angkatan Kerja	orang	153.422	166.922	165.960	167.701	165.431
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,41	2,80	2,91	4,19	4,06

Sumber Data: BPS 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Pinrang mengalami pasang surut lima tahun terakhir. Di tahun 2020 sebesar 4,19, hal ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang menyerang seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Tahun 2021 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yaitu sebesar 4,06%. Hal ini berarti bahwa jumlah pengangguran usia angkatan kerja semakin berkurang.

Tabel 2.46  
Perbandingan Tingkat PengangguranTerbuka Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kab. Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pinrang	%	4,41	2,80	2,91	4,19	4,06
Daerah Setara (Kab. Sidrap)	%	3,17	4,29	4,35	5,91	NA
Sulsel	%	5,61	4,94	4,62	6,31	5,72

Sumber Data: BPS 2022

10. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Tabel 2.47  
Rasio Penduduk Yang Bekerja

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Yang Bekerja	orang	147.207	162.253	161.126	160.681	158.714
Angkatan Kerja	orang	153.357	166.922	165.960	167.701	165.431
Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	96,0	97,20	97,09	95,81	95,94

Sumber Data: BPS 2022

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir, 96,0% di tahun 2017 dan 97,20% di tahun 2018 kemudian turun menjadi 97,09% di tahun 2019 dan 95,81% di tahun 2020. Pada tahun 2021 angkanya naik lagi menjadi 95,94%. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Pinrang dimana permintaan tenaga kerja semakin meningkat, yang secara otomatis juga mengurangi jumlah pengangguran usia angkatan kerja.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya.

Tabel 2.48  
Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79,01	83,62	84,75	85,99	86,45
IKM Institusi Pelayanan Perizinan	%	83,16	84,25	85,5	89,87	94,86
IKM Institusi Pelayanan Kesehatan	%	NA	78,25	79,5	85,37	85,39
IKM Institusi Pelayanan Kependudukan	%	84,66	84,67	85,75	98,89	89

Sumber Data: Bagian Ortala SETDA Kabupaten Pinrang, 2022

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari 79,01 di tahun 2017, lalu 83,62 di tahun 2018, 84,75 di tahun 2019, tahun 2020 dengan nilai 85,99. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 86,45 dan melampaui target RKPD tahun 2021 sebesar 86,25. Diharapkan agar nilai IKM Kabupaten Pinrang terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang.

12. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas,tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan

keseimbangan gizi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi didapatkan dari jumlah keragaman konsumsi pada setiap individu yang dikonsumsi setiap harinya, yaitu kelompok padi – padian + kelompok umbi-umbian + kelompok pangan hewani + kelompok minyak lemak+ kelompok buah/biji berminyak + kelompok kacang-kacangan + kelompok gula + kelompok buah + kelompok lain-lainnya yang nilainya didapatkan dari aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, yang mana dengan besarnya keragaman pangan dikonsumsi oleh masyarakat makin besar pula skor PPH Konsumsi.

**Tabel 2.49**  
**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi**  
**Tahun 2017– 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PHH) konsumsi	89,20	89,30	89,30	89,50	90,60

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa skor pola pangan harapan (PHH) konsumsi Kabupaten Pinrang untuk tahun 2020 sebesar 89,5% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 90,60. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang memiliki pola konsumsi yang semakin beragam. Salah satu factor yang menyebabkan kondisi ini adalah karena Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Ketahanan Pangan gencar melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan pekarangan kepada kelompok tani sehingga mereka dapat memanfaatkan lahan pekarangan yang ada dengan menanam berbagai macam tanaman pangan untuk dikonsumsi

masyarakat. Akan tetapi dengan angka ini Kabupaten Pinrang harus meningkatkan nilai skor PPH atau paling tidak mempertahankannya.

13. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan didapatkan dari jumlah produksi dari kelompok padi-padian + kelompok umbi-umbian + kelompok pangan hewani + kelompok minyak lemak + kelompok buah/biji berminyak + kelompok kacang-kacangan + kelompok gula + kelompok sayur dan buah dan kelompok lain-lain melalui aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan meningkatnya jumlah produksi pada setiap komoditi maka makin besar skor PPH Ketersediaan yang didapatkan.

Adapun skor pola pangan harapan ketersediaan Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.50  
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  
Ketersediaan Tahun 2017–2021

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PHH) Ketersediaan	80,20	81,10	82,00	82,10	81,05

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian skor pola pangan harapan ketersediaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 berada pada nilai 82,10 dan pada tahun 2021 sebesar 81,05. Pencapaian skor pola pangan harapan ketersediaan dipengaruhi oleh jumlah produksi ikan dan sayur-sayuran, jagung dan umbi-umbian, dan perhitungan neraca bahan makanan.

14. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan dimaksudkan untuk mengantisipasi kekuranganketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa cadangan pangan Nasional terdiri dari cadangan pangan Pemerintah, cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah maka perhitungan cadangan pangan Pemerintah Daerah menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras

perkapita pertahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Dari hasil perhitungan cadangan pangan inilah maka ditetapkanlah nilai penguatan cadangan pangan yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.51**  
**Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penguatan Cadangan Pangan	113,12%	141,20%	156,06%	173,06%	269,88%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Di Kabupaten Pinrang terjadi penguatan cadangan pangan pada tahun 2019 sebesar 156,06% dan tahun 2020 sebesar 173,06%. Di tahun 2021 meningkat menjadi 269,88% dimana angka ini merupakan persentase dari jumlah cadangan pangan bulog sebesar 26.977,25 ton ditambah dengan jumlah cadangan pangan yang berada di Dinas Ketahanan Pangan sebesar 10,99 ton.

**15. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**

Pembangunan sector pertanian memegang peran yang strategis dalam pembangunan di Sulawesi Selatan. Peran strategis pertanian tersebut antara lain melalui kontribusi yang nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan daerah, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sector pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap perekonomian Kabupaten Pinrang semakin nyata. Selama periode 2014 –2019, rata-rata kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) terhadap PDRB mencapai 27,97% merupakan sector yang memberikan kontribusi terbesar, namun cenderung menurun setiap tahun sekitar -2,04%, ini disebabkan kontribusi dari sektor lain mulai mengalami peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) dalam 5 (lima) tahun terakhir di atas angka 110 dimana pada tahun 2019 sebesar 106,91 dan tahun 2020 sebesar 105,13. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Pinrang masih cukup tinggi, namun berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan petani di Indonesia rata-rata 4 (empat) kali lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja industry pengolahan, tetapi mereka tidak pernah turun ke jalan demonstrasi setiap peringatan hari buruh yang dilaksanakan tanggal 1 Mei setiap tahunnya.

Tabel 2.52  
Kontribusi sector pertanian  
terhadap PDRB Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi sector pertanian	Rp.	4.146.630.070.000	4.262.829.800.000	4.008.675.325.000	4.138.181.200.000	4.048.978.940.000
2	Jumlah PDRB	Rp	16.360.561.940.000	18.087.778.990.000	19.630.319.950.000	20.083.021.970.000	21.758.580.000.000
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	25,34	23,56	20,42	20,61	18,60

Sumber Data: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, 2022

16. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ketahun, dimana mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 520.911.900.000 atau 12,56% setelah itu cenderung menurun sampai dengan tahun 2019 dan meningkat di tahun 2020 sebesar Rp. 484.163.500.00 atau 11,70%, ini disebabkan sector pertanian padi masih mendominasi kontribusinya terhadap PDRB sector Pertanian/Perkebunan.

Tabel 2.53  
Kontribusi sektor pertanian (palawija)  
terhadap PDRBTahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)	Rp.	520.911.900.000	515.964.600.000	417.655.600.000	484.163.500.000	371.412.540.000
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Rp	4.146.630.070.000	4.262.829.800.000	4.008.675.325.000	4.138.181.200.000	4.048.978.940.000
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	12,56	12,10	10,42	11,70	9,17

Sumber Data: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, 2022

17. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya perhektar di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dari 6 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 5,9ton/ha pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan karena beberapa factor salah satunya karena faktor cuaca dan hama pada tanaman.

Dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 6,08 ton/ha karena kesadaran petani menggunakan pupuk organik karena kelangkaan pupuk bersubsidi serta adanya kesadaran petani melakukan pengendalian pra tanam khususnya hama tikus dan pengamatan berkala terhadap tanaman bersama dengan petugas penyuluh serta adanya dukungan program strategis pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dengan prioritas kegiatan penggunaan bibit unggul bermutu, pengawasan pupuk dan pestisida, pembagian sarana alat mesin pertanian serta peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian. Disamping itu adanya faktor iklim yang mendukung keberhasilan produktivitas tanaman pada tahun ini.



**Tabel 2.54**  
**Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya**  
**per hektar Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya perhektar	6,1 ton/ha	6,19 ton/ha	6 ton/ha	5,9 ton/ha	6,08 ton/ha

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

**Tabel 2.55**  
**Luas Panen dan Produksi padi sawah**  
**menurut kecamatan di Kabupaten**  
**PinrangTahun 2020-2021**

No	Kecamatan	LuasPanen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kw/Ha)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Suppa	1.942	1.988	12.632	12.087	59,00	60,80
2	Mattirosompe	10.354	11.112	60.771	67.561	59,00	60,80
3	Lanrisang	8.378	8.882	51.135	54.003	59,00	60,80
4	Mattirobulu	11.551	11.249	68.664	68.394	59,00	60,80
5	Watangsawitto	9.312	9.312	54.941	56.617	59,00	60,86
6	Paleteang	5.308	5.256	31.010	31.956	59,00	60,79
7	Tiroang	11.367	11.159	67.065	67.847	59,00	60,80
8	Patampanua	12.035	13.549	79.467	82.378	59,00	60,80
9	Cempa	11.246	11.425	66.995	69.464	59,00	60,80
10	Duampanua	15.186	15.328	90.435	93.194	59,00	60,79
11	Batulappa	2.723	3.326	20.013	20.222	59,00	60,79
12	Lembang	5.685	6.008	35.854	36.529	59,00	60,80
	Jumlah	105.087	108.594	638.982	660.252	59,00	60,80

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

Luas panen padi sawah di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan dari 104.107 Ha pada tahun 2016 menjadi 108.302 Ha di tahun 2020. Begitupun halnya dengan produksi padi di Kabupaten Pinrang yang mengalami peningkatan dari 625.312 ton ditahun 2016 menjadi 638.983 ton di tahun 2020. Dan pada tahun 2021 angka produktivitas meningkat menjadi 60,80 kw/ha dengan luas panen sebesar 108.594 ha dan jumlah produksi sebesar 660.252 ton. Walaupun luas panen dan produksi terus meningkat dalam lima tahun terakhir ini akan tetapi produktivitasnya mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas salah satunya factor iklim dan hama pada tanaman.

**Tabel 2.56**  
**Luas Panen dan Produksi padi sawah di Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2021	108.594	660.252	60,80
2	2020	108.302	638.983	59,00
3	2019	105.087	630.524	60,00
4	2018	105.726	654.329	61,89
5	2017	105.839	645.618	61,00
6	2016	104.107	625.311	60,64

Sumber data :Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang,Tahun 2022

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya, diantaranya :

1. Kondisi Sarana infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi masih banyak mengalami kerusakan,
2. Ketersedian saprodi khususnya benih dan pupuk bersubsidi seringkali mengalami kelangkaan di tingkat petani pada saat dibutuhkan,
3. Faktor iklim yang terkadang susah diprediksi seperti banjir di musim hujan dan kekeringan,
4. Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang masih sering terjadi,
5. Jumlah penyuluh PNS yang lebih sedikit dibanding jumlah desa/kelurahan yaitu sisa jumlah PPL PNS 73 orang sedangkan jumlah Desa/Kelurahan 109
6. Harga komoditi yang seringkali mengalami Fluktuasi

Faktor–factor penyebab keberhasilan ini dalam peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya, diantaranya:

1. Kerjasama yang baik antara SKPD lingkup pertanian.
2. Dukungan masyarakat khususnya para stakeholder bidang pertanian (Kelompok tani, GP3A/P3A, Penyuluh) sebagai ujung tombak pertanian telah melaksanakan fungsi secara maksimal.
3. Komitmen yang tinggi segenap aparat Dinas Pertanian dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.
4. Sinergitas program dan kegiatan lintas SKPD di bawah arahan dan petunjuk bapak Bupati telah nyata memberikan hasil yang positif.
5. Dukungan Anggaran dan Kegiatan APBD Tingkat Provinsi dan APBN.

**18. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**

Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pinrang setiap tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2017- 2021, walaupun sektor pertambangan bukan merupakan sector unggulan, namun sampai saat ini izin

pertambangan di Kabupaten Pinrang semakin diperketat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penambangan – penambangan liar, dan sampai saat Pemerintah Kabupaten Pinrang senantiasa melakukan pembinaan, penertiban dan pencegahan terjadinya penambangan liar.

**Tabel 2.57**  
**Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	2,63	2,71	2,75	2,80	2,78

Sumber Data: BPS Kabupaten Pinrang, 2022

**19. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**

Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku diambil dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dibagi Jumlah PDRB Kabupaten Pinrang sehingga Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 1,68% dan pada tahun 2020 menurun sebesar 1,55% karena pandemi covid19 sehingga tidak ada event pariwisata ataupun cabang olahraga yang dipertandingkan. Akan tetapi di tahun 2021 mulai menunjukkan perkembangan sehingga naik menjadi 1,56%.

**Tabel 2.58**  
**Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku**  
**Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,63	1,66	1,68		

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

**20. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB**

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2017 – 2021 berfluktuasi dari tahun ke tahun yang meliputi perikanan tangkap, perikanan darat, dan perikanan laut.

Untuk tahun 2021 sektor kelautan bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten. Adapun kontribusi sector perikanan terhadap PDRB Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebesar 22,19% dengan nilai PDRB sector perikanan sebesar Rp 4.828.228,00.

**Tabel 2.59**  
**Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Kelautan dan Perikanan	Rp.	3.232.876,61	4.408.650,00	3.908.397,00	4.179.275,00	4.828.228,00
PDRB	Rp.	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97	21.758.576,96
Kontribusi Sektor perikanan Terhadap PDRB	%	19,70	24,37	19,91	20,81	22,19

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, 2022

21. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perdagangan Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2017–2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun sampai saat ini Kabupaten Pinrang belum memiliki komoditi berdasarkan ekspor bersih perdagangan.

Tabel 2.60  
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Perdagangan	Rp.	2.148.673,58	2.512.472,39	2.871.418,43	2.895761,18	3.151.611,14
PDRB	Rp.	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97	21.758.576,96
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,41	13,89	14,63	14,42	14,48

Sumber Data: Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang, 2022

22. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2017–2021 mengalami fluktuatif, namun nilai yang paling tinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 6,35% atau senilai Rp.1.041.413.170.000.

Tabel 2.61  
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Industri	Rp.	1.041.413,17	1.103.170,41	1.233.288,21	1.233.483,28	1.324.626,49
PDRB	Rp.	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97	21.758.576,96
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6,35	6,09	6,28	6,14	6,16

Sumber Data: Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang, 2022

23. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melaluipelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Program-program reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung dengan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi. Peningkatan jumlah opini audit BPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara langsung dapat

meningkatkan pencapaian target jumlah opini audit BPK berpredikat WTP. Selain itu, peningkatan kualitas SAKIP dan LAKIP akan berpengaruh langsung pada pencapaian target jumlah instansi pemerintah yang akuntabel.

**Tabel 2.62**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun	
		2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	52,67	58,28

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat daerah, 2022

Di Kabupaten Pinrang untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 yaitu 52,67. Dan meningkat ditahun 2021 sebesar 58,28 dan telah melampaui target RKPD tahun 2021. Angka diatas 55 merupakan kategori bernilai baik.

**24. Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana system ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Di tahun 2021 meningkat menjadi 63,59dan melampaui target tahun 2021 sebesar 63,35.

**Tabel 2.63**  
**Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang Tahun 2017– 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	56,98	60,06	61,54	62,86	63,59

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2022

**2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

**2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator kinerjapenyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

1. Bidang Urusan Pendidikan

1.1 Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD selama rentang tahun 2017-2021 semakin meningkat dimana pada tahun 2020 tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD sebesar 92,83% dan pada tahun 2021 sebesar 95,79%. Capaian tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.65**  
**Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun**  
**yang berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2017– 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Anak	14.268	14.870	8.019	13.548	13.732
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Yang bersangkutan	Anak	22.023	22.06	10.910	14.594	14.336
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	64,79	67,45	73,50	92,83	95,79%

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

1.2 Tingkat Partisipasi Usia Pendidikan Dasar

Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada tahun 2020 sebesar 95,28 dan pada tahun 2021 sebesar 95,32%.

**Tabel 2.66**  
**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Anak	46.439	46.781	46.527	44.232	44.003
2	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	46.599	46.936	47.354	46.423	46.164



3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	99,66	99,67	98,25	95,28	95,32%
4	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	99,08	99,22	98,9	98,71	98,75
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	106,64	109,28	104,47	102,64	103,8

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

1.3 Tingkat Partisipasi Usia Pendidikan Menengah Pertama

Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2020 sebesar 92,06% dan pada tahun 2021 sebesar 98,27%.

Tabel 2.67

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang  
berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama  
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Anak	23.445	23.168	19.227	21.309	22.860
2	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	24.797	24.455	23.319	23.147	23.263
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,55	94,74	82,45	92,06	98,27%
4	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	72,00	72,21	72,85	72,73	73,52
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	76,71	81,49	82,81	83,14	81,23

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

1.4 Pendidikan Kesetaraan

Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2020 sebesar 97,27% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 97,02%. Pada tahun 2021 jumlah warga Negara yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami penurunan disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan indicator. Jika pada tahun sebelumnya yang diukur adalah rentang usia 7- 56 tahun sedangkan pada tahun 2021 rentang usia yang diukur adalah usia 7-18 tahun.

**Tabel 2.68**  
**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Anak	2.652	3.096	2.965	3.383	1.138
2	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	2.935	3.363	3.210	3.478	1.173
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	90,37	92,05	92,37	97,27	97,02%

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

2. Bidang Urusan Kesehatan

2.1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk

Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,07% dan pada tahun 2021 sebesar 0,08%.

**Tabel 2.69**  
**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlahpenduduk	Orang	197	200	200	303	319
2	Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	Orang	369.595	374.583	377.199	407.236	408.109
3	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap jumlahpenduduk	%	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08%

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi

Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Pinrang selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.70**  
**Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	RS	1	1	3	3	3
2	Jumlah RS di Kabupaten/Kota	RS	2	2	3	3	3
3	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kotayang terakreditasi	%	50	50	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.3 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 98,47% dan tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.71  
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Ibu hamil	7.100	6.899	7.547	7.830	7.215
2	Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten /Kota	Ibu hamil	7.100	7.318	8.034	7.951	7.215
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,21	94,27	93,94	98,47	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.4 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

Tabel 2.72  
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Ibu Bersalin	6.889	6.739	7.210	7.383	6.726
2	Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten/Kota	Ibu Bersalin	7.024	6.985	7.736	7.383	6.726
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	98,08	96,48	93,20	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.5 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.73  
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Sesuai standar	Bayi	6.891	6.741	7.717	7.394	6.740
2	Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten/Kota	Bayi	6.991	6.741	7.187	7.384	6.740
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi Baru lahir	%	99	100	107	100,13	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Cakupan pelayanan kesehatan balita yang sesuai standar telah mencapai 100% pada tahun 2019 namun tahun 2020 menurun menjadi 69,88% disebabkan karena kurangnya kunjungan masyarakat di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2021 naik lagi mencapai 100%.

Tabel 2.74  
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standarTahun2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Balita	33.351	33.921	25.095	24.843	32.974
2	Jumlah Balita di Kabupaten/Kota	Balita	29.571	35.640	25.095	35.546	32.974
3	Cakupan pelayanan kesehatan balita Sesuai standar	%	112,78	95,18	100,00	69,88	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.7 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

Tabel 2.75  
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Sesuai standar	Anak	22.491	12.432	11.639	23.244	69.404
2	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota	Anak	41.970	12.432	11.639	23.244	69.404
3	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	53,59	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.8 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skirining Kesehatan

Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

Tabel 2.76  
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2019- 2021

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	0	159.221	232.011
2	Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten /Kota	Orang	0	159.221	232.011
3	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	0	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.9 Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Persentase warga Negara berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

Tabel 2.77  
Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatanSesuai standar	Orang	12.698	13.199	15.231	43.332	54.247
2	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten /Kota	Orang	23.170	15.106	15.231	43.332	54.247
3	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkanskrining kesehatan Sesuai standar	%	54,80	87,38	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

2.10 Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.78**  
**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3.952	29.147	8.776	121.474	69.870
2	Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota	Orang	95.765	301.347	266.802	121.474	69.870
3	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	4,01	9,67	3,28	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

**1.1 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Persentase penderita diabetes mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.79**  
**Persentase penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	0	2.615	3.263	9.078
2	Jumlah penderita DM di Kabupaten/ Kota	Orang	0	0	2.615	3.263	9.078
3	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	0	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

**1.2 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa**

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai standar pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.



**Tabel 2.80**  
**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1.360	1.389	918	867	1.037
2	Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	Orang	1.360	1.389	918	867	1.037
3	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa Sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan,2022

**2.11 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar**

Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.81**  
**Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	464	271	596	398	629
2	Jumlah penderita TBC di Kabupaten /Kota	Orang	464	271	596	398	629
3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC Sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Kesehatan, 2022

**2.12 Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV**

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.82**  
**Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	0	0	9.404	7.799	7.531
2	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang	0	0	9.404	7.799	7.531
3	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	0	0	100,00	100,00	100,00

Sumber Data:Dinas Kesehatan,2022

**3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**3.1 Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi**

**Infrastruktur Pengendalian Banjir**

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebesar 64,55% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 62,00%.

**Tabel 2.83**  
**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Ha	9,673,622.92	10,314,650.95	13,784,446.96	17.083.283,73	16.409.116
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Ha	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65
3	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	36,55	38,97	52,08	64,55	62,00%

Sumber Data: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2022

**3.2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota**

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 58,29% dan pada tahun 2021 sebesar 55,00%.

**Tabel 2.84**  
**Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Meter	1,360,824.52	1,581,992.61	1,723,085.65	1.724.060,26	1.626.692
2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	Meter	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08
3	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	46,01	53,49	58,26	58,29	55,00

Sumber Data: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2022

**3.3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 60,65% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mencapai 93,00%. Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2020 seluas 5.404 ha merupakan data hasil pengukuran dan sudah disetujui namun belum ditetapkan. Sehingga pada tahun 2021 data luas daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten direvisi menjadi sebesar 8.294 ha dengan mengacu pada PermenPUPR No. 14/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

**Tabel 2.85**  
**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas irigasi kewenangan kab/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha)	Ha	4.700	4.750	5.015	5.030	7.706
2	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	Ha	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	56,67	57,27	60,47	60,65	93,00

Sumber Data: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2022

**3.4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang**

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 93,50% dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 95,05% akan tetapi belum memenuhi target 100% karena selisih 4,95% tersebut termasuk kategori yang belum ada akses karena rumah tangga tersebut mengambil air minum langsung melalui sungai, laut dan danau.

**Tabel 2.86**

**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Rumah tangga	-	78.038	92.665	93.014	123.892
2	Jumlah total proyeksi rumah tangga	Rumah tangga	-	86.610	99.490	99.490	130.339
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	-	90,10	93,14	93,50	95,05%

*Sumber Data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya danTata Ruang, 2022*

**3.5 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestic**

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic pada tahun 2020 mencapai 97,56% dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 97,78%.

**Tabel 2.87**  
**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah diIPALD)	Rumah	-	112.597	116.061	116.948	117.524
2	Jumlah rumah di Kabupaten Pinrang	Rumah	118.471	119.051	119.667	119.868	120.196
3	Persentase jumlah rumahtanggayangmemperoleh layanan pengolahan airlimbahdomestik	%	-	94,57	96,99	97,56	97,78%

Sumber Data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2022

**3.6 Rasio kepatuhan IMB**

Rasio kepatuhan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.88**  
**Rasio kepatuhan IMB kab/kotaTahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	IMB	82.061	85.867	88.127	88.352	88.680
2	Jumlah IMB yang berlaku	IMB	82.061	85.867	88.127	88.352	88.680
3	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2022

**3.7 Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Pinrang**

Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2019 sebesar 95,58% dan naik sebesar 65,73% pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 terjadi perubahan menjadi 61,35% karena adanya relokasi anggaran covid19 sehingga anggaran infrastruktur mengalami keterbatasan.

**Tabel 2.89**  
**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	
1	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	km	715,50	801,54	823,64	566,38	528,69
2	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	km	861,70	861,70	861,7	861,7	861,7
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,03	93,01	95,58	65,73	61,35%

Sumber Data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2022

3.8 Rasio Tenaga Operator/teknisi/analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2020 mencapai 89,90% dan pada tahun 2021 mencapai 94,13%.

Tabel 2.90  
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab /kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Operator dan teknis/analisis	orang	-	-	313	383	433
2	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	orang	-	-	352	426	460
3	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	88,92	89,90	94,13%

Sumber Data: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi, 2022

3.9 Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi mencapai 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel 2.89  
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	
1	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	km	715,50	801,54	823,64	566,38	528,69
2	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	km	861,70	861,70	861,7	861,7	861,7
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,03	93,01	95,58	65,73	61,35%

Sumber Data: Dinas Bina Marga,Cipta Karya danTata Ruang, 2022

3.10 Rasio Tenaga Operator/teknisi/analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2020 mencapai 89,90% dan pada tahun 2021 mencapai 94,13%.



**Tabel 2.90**  
**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab /kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Operator dan teknis/analisis	orang	-	-	313	383	433
2	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	orang	-	-	352	426	460
3	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	88,92	89,90	94,13%

Sumber Data: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi, 2022

**3.11 Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi**

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi mencapai 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021.

**Tabel 2.91**  
**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan Pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Proyek	441	265	255	121	606
2	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Proyek	441	265	255	121	606
3	Rasio proyek yang menjadi kewenangan Pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi, 2022

**4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**4.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai 28,91%.

**Tabel 2.92**  
**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani Pada tahun n	Rumah	-	-	341	1.010,00	292
2	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada Tahun n	Rumah	-	-	1.941	1.010,00	1.010
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	-	17,57	100,00	28,91

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

**4.2 Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat**  
**Terdampak Relokasi Program Pemerintah**

Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Pinrang belum tersedia.

**Tabel 2.93**  
**Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak**  
**relokasi program pemerintah kabupaten/kota Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+ Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah tangga	-	-	-	-	-
2	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi criteria penerima pelayanan	Rumah tangga	-	-	-	-	-
3	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten/kota	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

**4.3 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten**  
**Pinrang yang ditangani**

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha Kabupaten Pinrang yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 49,67% dan tahun 2021 sebesar 4,55%.

**Tabel 2.94**  
**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di kab/kota yang ditangani Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Ha	0,21	0,4	7,99	3,04	0,14
2	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Ha	13,46	13,25	14,11	6,12	3,08
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	1,56	3,01	56,63	49,67	4,55

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

**4.4 Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**

Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 berkurang sebanyak 4,62% dan tahun 2021 berkurang lagi sebanyak 4,53%.

**Tabel 2.95**  
**Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2017–2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah unit rumah tidak layak huni	Rumah	5.964	5.687	6.887	5.537	5.434
2	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	Rumah	118.471	119.051	119.667	119.868	120.021
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,03	4,77	5,76	4,62	4,53

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

**4.5 Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai 6,40%.

**Tabel 2.96**  
**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Rumah	-	-	6.722	6.846	7.679
2	Jumlah unit Rumah kab/kota	Rumah	-	-	6.722	6.846	120.021
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	-	100,00	100,00	6,40

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

**5. Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**5.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**

Persentase gangguan trantibum di Kabupaten Pinrang yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat menjadi 100%.

**Tabel 2.97**  
**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengaduan yang ditangani	Pengaduan	9	10	6	9	8
2	Jumlah pengaduan Pelanggaran yang masuk	Pengaduan	9	10	10	9	8
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00

Sumber Data: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

**5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**

Persentase perda dan perkada yang ditegakkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,76% dan pada tahun 2021 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.98**  
**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Tahun 2017–2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Pelanggaran	7	18	35	25	33
2	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang Memuat sanksi	Perda/Perkada	41	41	33	33	33
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	17,07	43,90	60,61	75,76	100,00

Sumber Data: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

**5.3 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2020 sebanyak 363.417 jiwa dan pada tahun 2021 sebanyak 263.689 jiwa yang berada di 12 kecamatan. Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ini adalah penduduk usia 13-59 tahun, dimana bentuk layanan informasinya berupa surat edaran tentang rawan bencana.

**Tabel 2.99**  
**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2017 -2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa/kecamatan	408.582 Jiwa/12 kecamatan	401.858 Jiwa/12 kecamatan	405.671 Jiwa/12 kecamatan	363.417 Jiwa/12 kecamatan	263.689 jiwa/12 kecamatan

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

**5.4 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2020 sebanyak 407.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dan pada tahun 2021 sebanyak 79.108 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah ini merupakan jumlah penduduk yang berada di lokasi rawan bencana.

**Tabel 2.100**  
**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa/kecamatan	408.582 Jiwa, 12 kecamatan	401.858 Jiwa, 12 kecamatan	405.671 Jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	79.108 jiwa, 12 kecamatan

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

**5.5 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2020 sebanyak 407.236 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah korban sebanyak 292 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.

**Tabel 2.101**  
**Jumlah warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa/kecamatan	408.582 Jiwa, 12 kecamatan	401.858 Jiwa, 12 kecamatan	405,671 Jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	292 jiwa, 12 kecamatan

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

**5.6 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 83,51% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 96,12%. Adapun kejadian kebakaran yang lambat tertangani disebabkan oleh lokasi kejadian yang jauh dan sulit terjangkau sehingga penanganan kebakarannya di atas waktu tanggap (response time) yaitu 6,37 menit.



**Tabel 2.102**  
**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban**  
**kebakaran Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten /kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	Layanan	57	79	124	81	99
2	Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	Kejadian	96	119	202	97	103
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	59,38	66,39	61,39	83,51	96,12%

Sumber Data: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

**5.7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**

Waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kebakaran di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 15 menit dan tahun 2021 selama 6,37 menit.

**Tabel 2.103**  
**Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**  
**Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	6,37

Sumber Data: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

**6. Bidang Urusan Sosial**

**6.1 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti**

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar

panti di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%. Menurunnya jumlah anak terlantar pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya program penelusuran dan reunifikasi keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, sehingga anak terlantar dapat dikembalikan kepada keluarganya.

**Tabel 2.104**  
**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indicator SPM) Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	-	-	53	84	62
2	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar Dan gelandangan pengemis	Orang	-	-	53	84	62
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikatorSPM)	%			100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Sosial, 2022

Data pada tahun 2017-2018 belum tersedia karena Dinas Sosial Kabupaten Pinrang belum memasukkan program dan kegiatan yang mengacu pada indicator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Pinrang belum memiliki data atau masih dalam proses pendataan terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar panti.

**6.2 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan SetelahTanggap Darurat Bencana Daerah**

Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mencapai 100%. Akan tetapi di

tahun 2021 jumlah korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meningkat karena banyaknya kejadian bencana alam salah satunya kebakaran dan angin puting beliung.

**Tabel 2.105**  
**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam Satu tahun anggaran	Korban	192	292	118	79	224
2	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah Tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Korban	192	292	118	79	224
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Sosial, 2022

**2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**

**1. Bidang Urusan Tenaga Kerja**

**1.1 Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja**

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerjadi Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 0,92 % dan meningkat sebesar 80,00% pada tahun 2021. Adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan oleh karena pada tahun 2021 sudah terpecah menjadi sub kegiatan sedangkan pada tahun 2020 masih berupa kegiatan. Capaian ini jauh melampaui target tahun 2021 yaitu sebesar 1,02%.

**Tabel 2.106**  
**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	Kegiatan	20	17	13	18	8
2	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	Kegiatan	1.812	1.864	1.820	1.952	10
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana tenaga kerja	%	1,10	0,91	0,71	0,92	80,00

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2022

**1.2 PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 0,68% dan pada tahun 2021 sebesar 87,49%.

**Tabel 2.107**  
**PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Tenaga kerja	216	668	204	40	4.708
2	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Tenaga kerja	5.093	5.798	5921	5.921	5.381
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	4,24	11,44	3,44	0,68	87,49

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2022

**1.3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**

Tingkat produktivitas tenaga kerjadi Kabupaten Pinrang selama tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 7.982,56 pada tahun 2020 dan sebesar Rp 155.087,98pada tahun 2021.

**Tabel 2.108**  
**Tingkat ProduktivitasTenaga Kerja Tahun 2017 -2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB tahun berjalan (atasdasar harga konstan)	Rupiah	11.212.623,63	11.987.443,92	12.770.078,59	12.826.451,93	13.472.492,79
2	Jumlah tenaga kerja	Tenaga kerja	146.653	162.253	161.126	160.681	8.687
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Juta Rupiah)	7.645,68	7.388,85	7.925,52	7.982,56	155.087,98

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

**1.4 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 36,69% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,16%. Walaupun jumlah perusahaan di tahun 2021 berkurang karena adanya penyelarasan dari Kemendagri dan Inspektorat, namun jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak semakin meningkat.

**Tabel 2.109**

**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan	97	113	164	164	310
2	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	390	432	447	447	418
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	24,87	26,16	36,69	36,69	74,16

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2022

**1.5 Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten**

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 58,10% dan pada tahun 2021 sebesar 63,02%. Jumlah pencaker yang mengambil kartu kuning pencaker (AK.1) semakin meningkat disebabkan oleh banyaknya permintaan tenaga kerja seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Pinrang. Tentu saja ini juga berdampak mengurangi tingkat pengangguran.

**Tabel 2.110**  
**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Pencaker	1.600	635	383	875	1.341
2	Jumlah pencaker yang terdaftar	Pencaker	2.908	1.130	743	1.506	2.128
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	55,02	56,19	51,55	58,10	63,02

Sumber Data:Dinas TenagaKerjaDanTransmigrasi,2022

**2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**2.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD**

Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 9,19% dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 74,38%. Terjadinya peningkatan jumlah Anggaran yang Responsif Gender jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena di tahun 2021 sudah mencakup jumlah anggaran yang ada di 12 kecamatan.

**Tabel 2.111**  
**Persentase ARG pada belanja langsung APBD Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Rupiah			46.650.000	58.769.455.600	260.150.796.558
2	Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD	Rupiah			6.942.315.000	639.301.728.716	349.771.753.083
3	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	%			0,67	9,19	74,38

SumberData:DinasPengendalianPenduduk,KB,P3A,2022

**2.2 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait**

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 0,12% dan menurun pada tahun 2021 sebesar 0,07%. Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak merupakan peran aktif dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdapat di



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tanggap menangani kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

**Tabel 2.112**  
**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota Yang didampingi	Anak			26	159	80
2	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	Anak			82.606	135.783	120.025
3	Persentase anak korban kekerasan yang Ditangani instansi terkait	%			0,03	0,12	0,07

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, KB,P3A, 2022

**2.3 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)**

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2020 sebesar 53,97% dan pada tahun 2021 sebesar 56,42%.

**Tabel 2.113**  
**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Perempuan			42	111	84
2	Jumlah penduduk perempuan	Perempuan			163.106	205.657	148.865
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)	%			25,75	53,97	56,43

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, KB,P3A,2022

**3. Bidang Urusan Pangan**

**3.1 Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)**

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 35,43% dan meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 55,29%. Jumlah cadangan pangan

pada tahun 2021 sebanyak 26.988,24 ton dimana jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah cadangan pangan bulog sebanyak 26.977,25 ton dan cadangan Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 10,99 ton. Sedangkan jumlah kebutuhan pangan sebanyak 48.815,28 ton dihitung berdasarkan kebutuhan beras per kapita yaitu 120 kg/kapita dikali dengan jumlah penduduk.

**Tabel 2.114**  
**Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Cadanganpangan	Ton	11.312,77	14.120,50	15.606,44	17.306,2	26.988,24
2	Jumlah kebutuhanpangan	Ton	49.029,84	48.222,96	48.500,64	48.840,24	48.815,28
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	23,07	29,30	32,18	35,43	55,29%

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

4. **Pertanahan**

4.1 **Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan PeruntukkanTanahnya diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan**

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2020 mencapai 21,25% dan pada tahun 2021 telah mencapai 100%. Pemanfaatan tanah yang peruntukkannya sesuai dengan izin lokasi ini antara lain bergerak di bidang usaha perumahan subsidi, pembibitan ayam niaga, pembangunan fasilitas kesehatan, wisata pantai, mini market dan department store.

**Tabel 2.115**  
**Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanTahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	Ha	-	-	-	8,5	38,189
2	Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	ha	-	-	-	40	38,189
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	-	-	21,25	100

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2022

4.2 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 masih 22,5% dan pada tahun 2021 telah mencapai 59,60%. Adapun jenis fasilitas umum yang dibangun yaitu taman kota, hutan kota, jalur hijau jalanan sendapan sungai lapangan olahraga, pekarangan kantor/mesjid/sekolah, dan area pemakaman.

Tabel 2.116  
Persentase PenetapanTanah Untuk Pembangunan  
Fasilitas Umum Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum	ha	-	-	-	4.500	177,53
2	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan Fasilitas umum	ha	-	-	-	20.000	297,87
3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	-	-	-	22,5	59,60

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2022

4.3 Persentase Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

Persentase ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 21,18% dan pada tahun 2021 telah mencapai 100%.

Tabel 2.117  
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka  
Penanaman Modal Tahun 2017– 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas Izin lokasi	ha	-	-	-	4.500	38,189
2	Luas izin lokasi yang diterbitkan	Ha	-	-	-	21.250	38,189
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka PenanamanModal	%	-	-	-	21,18	100

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2022

4.4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap   Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum danTanah Absentee

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 16,6% dan pada tahun 2021 sebesar 40,78%.

Tabel 2.118  
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5ha	orang	-	-	-	2.500	736
2	Jumlah penerima tanah obyek landreform	orang	-	-	-	15.000	1.805
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikanyang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	-	-	16,6	40,78

Sumber Data:Dinas Perhubungan danPertanahan,2022

4.5 Tersedianya tanah untuk masyarakat

Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat berdasarkan izin membuka tanah yang telah diterbitkan pada tahun 2020 sebesar 21% dan pada tahun 2021 telah mencapai 100%.

Tabel 2.119  
Tersedianya tanah untuk masyarakat Tahun 2017 -2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin Membuka tanah	ha	-	-	-	630	38,189
2	Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	ha	-	-	-	3.000	38,189
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	-	21	100

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanian, 2022

4.6 Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi

Tabel 2.120  
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan  
melalui mediasi Tahun 2017–2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	kasus	-	-	-	4	6
2	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	kasus	-	-	-	20	8
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	-	20	75

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2022

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi di Kabupaten Pinrang selama tahun 2021 sebanyak 6 kasus yang telah terselesaikan atau telah mencapai 75%. Adapun kasus yang lain masih sementara dalam proses penyelesaian.

5. Lingkungan Hidup

5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pinrang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pinrang dihitung berdasarkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan hutan. IKLH di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 dengan nilai 68,74% dan pada tahun 2021 dengan nilai 67,56%.

Tabel 2.121  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  
Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKA = Indeks Kualitas Air	Nilai	68,33	70	70	70	52,22
2	IKU = Indeks Kualitas Udara	Nilai	97,24	95,88	95,4	94,31	95,52
3	ITH = Indeks Tutupan Hutan	Nilai	57,58	57,58	46,71	48,62	42,16
4	IKLH Kab/Kota = (IKA30%) + (IKD30%) + (ITH 40%).	%	72,69	72,79	68,29	68,74	67,56

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

5.2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Pinrang

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 71,80% dan pada tahun 2020 sebesar 57,19%, namun menurun sebesar 44,21% pada tahun 2021.

**Tabel 2.122**  
**Terlaksananya Pengelolaan Sampah di**  
**Wilayah Kab/Kota Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	Ton	75.524	128.892,52	45.338,81	36.205,97	28.549,14
2	Total Volume Timbunan Sampah Kab/Kota	Ton	81.026	60.846,03	62.062,95	63.304,14	64.570,30
3	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Kab/Kota	%	93,21	95	71,80	57,19	44,21

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

**5.3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang mencapai 100% selama tahun 2019-2021.

**Tabel 2.123**  
**Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan,dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kab/kota	Usaha /kegiatan	21	23	56	3	3
2	Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Usaha /kegiatan	21	23	56	3	3
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH danPUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	77,00	85,00	100,00	100,00	100

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**6.1 Perekaman KTP Elektronik**

Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas di Kabupaten Pinrang yang telah melakukan perekaman KTP elektronik meningkat dari tahun 2019 sebanyak 90,62% menjadi 96,91% di tahun 2020 dan ditahun 2021 menjadi 99%. Capaian di tahun 2021 ini telah melebihi target RPJMD di tahun 2021 yaitu 98% dan proyeksi



target 2021 RKPD tahun 2022 yakni 98%. Hal ini terjadi karena ada program dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yaitu Program Pendaftaran Penduduk dengan cara mendatangi rumah-rumah, sekolah-sekolah dan lembaga untuk pendataan.

**Tabel 2.124**  
**Perekaman KTP Elektronik Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP	penduduk	256.718	271.056	277.115	278.715	290.231
2	Jumlah penduduk17 Tahun keatas	penduduk	287.478	279.262	284.002	287.592	292.735
3	Perekaman KTP Elektronik	%	89,30	97,06	90,62	96,91	99,15

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

**6.2 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 26,91%. Di tahun 2021 meningkat menjadi 51% dan sudah melebihi dari target RPJMD ditahun 2021 yaitu 30% serta proyeksi target pada RKPD Tahun 2022 yaitu 30%.

**Tabel 2.125**  
**Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Anak	-	-	10.749	34.194	63.560
2	Jumlah anak usia 0-17 tahun	Anak	-	-	129.789	127.072	125.308
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	%	-	-	8,28	26,91	50,72

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

**6.3 Kepemilikan akta kelahiran**

Jumlah anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Pinrang yang telah memiliki akta kelahiran selama tahun 2020 sebesar 26,91%. Pada tahun 2021 realisasi kepemilikan akta kelahiran meningkat menjadi 98% sesuai dengan target RPJMD untuk tahun 2021 yaitu 98% dan telah melebihi target RKPD Tahun 2022 yaitu 75%

**Tabel 2.126**  
**Kepemilikan akta kelahiran Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Anak	121.238	119.897	130.135	130.197	128.434
2	Jumlah anak usia 0-18 tahun	Anak	138.418	129.575	135.783	134.580	131.216
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	87,58	92,53	95,84	96,74	97,88

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

**6.4 Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama**

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama pada tahun 2020 sebesar 72,09%. Dan ditahun 2021 telah mencapai 100% karena seluruh Perangkat Daerah telah melaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani bersama.

**Tabel 2.127**  
**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	-	-	7	31	44
2	Jumlah OPD	OPD	-	-	43	43	44
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	-	-	16,28	72,09	100

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Desa Tertinggal adalah desa yang masyarakatnya serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan desa lainnya.

Persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar 56% dan pada tahun 2021 sebesar 10%. Desa tertinggal yang memenuhi criteria desa berkembang yaitu Desa Maroneng. Kemudian terdapat 1 desa yang turun status menjadi desa sangat tertinggal yaitu Desa Lembang Mesakada.

Tabel 2.128  
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi criteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Desa	5	14	9	7	1
2	Jumlah desa tertinggal (per-awal Tahun n)	Desa	41	36	16	12	10
3	Persentase Pengentasan DesaTertinggal	%	12	39	56	58	10

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

7.2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang bias memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa jumlah desa berkembang yang memenuhi criteria desa mandiri pada tahun 2019 sebanyak 1desa dan untuk tahun 2020 sebanyak 2 desa.

Persentase peningkatan status Desa Mandiri di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 masih 5% namun pada tahun 2021 tidak ada desa berkembang yang memenuhi criteria untuk menjadi desa mandiri. Namun terdapat 3 desa berkembang yang menjadi desa maju yaitu Desa Matunru-tunrue, Desa Pincara, dan Desa Makkawaru.

**Tabel 2.129**  
**Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlahdesaberkembangyang memenuhi ktiteriadesa mandiri per tahunberdasarkanIndeks Desa Membangunpertahun	Desa	0	1	1	2	0
2	Jumlahdesaberkembang(per-awaltahunn)	Desa	19	28	46	39	37
3	Persentase PeningkatanStatus DesaMandiri	%	0	4	2	5	0

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.1 TFR (Angka KelahiranTotal)

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Pinrang pada 2020 sebesar 2,64 dan pada tahun 2021 menjadi 2,61.

**Tabel 2.130**  
**TFR (Angka KelahiranTotal) Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,70	2,68	2,65	2,64	2,61

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A,2022

8.2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m CPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive PrevalenceRate/mCPR) pada tahun 2020 sebesar 65,02% dan pada tahun 2021 sebesar 68,05%.

**Tabel 2.131**  
**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah peserta KB aktif modern	peserta	36.616	36.395	37.346	36.605	39.798
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	56.928	56.372	57.705	56.297	58.478
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive PrevalenceRate/mCPR)	%	84,32	64,56	64,72	65,02	68,05

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, KB,P3A, 2022

8.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) pada tahun 2020 sebesar 11,48% dan pada tahun 2021 sebesar 10,76%.

Tabel 2.132

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi Tidak terlayani	PUS	20.321	8.718	6.643	6.464	6.292
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	56.928	56.372	57.705	56.297	58.478
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	23,34	15,47	11,51	11,48	10,76

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, KB,P3A, 2022

9. Perhubungan

9.1 Rasio konektivitas Kabupaten Pinrang

Rasio konektivitas di Kabupaten Pinrang dihitung berdasarkan jumlah trayek dikali bobot trayek kemudian dibagi dengan jumlah kebutuhan trayek. Pada tahun 2020 diperoleh capaian 1,3 dan pada tahun 2021 dengan rasio konektivitas sebesar 1,5. Dengan kata lain rasio konektivitas kabupaten dengan indeks baik.

Tabel 2.133  
Rasio konektivitas Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	IK 1 (Angkutan Jalan) =Jumlah trayek x bobot trayek) bagi jumlah Kebutuhan trayek	1	1	1	1	1
2	IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5
3	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota=(IK1x bobot angkutan jalan) +(IK2x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2022

9.2 Kinerja lalu lintas Kabupaten

Kinerja lalu lintas di Kabupaten Pinrang diperoleh persentase sebesar 0,44 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 0,41. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lalulintas di Kabupaten Pinrang relative lancar dengan arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas.

Tabel 2.134  
Kinerja lalu lintas Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	V/C ratio di jalanKabupaten/ Kota	0,44	0,44	0,44	0,44	0,41

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2022

10. Komunikasi dan Informatika

10.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021 dengan jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosandi sebanyak 83 OPD termasuk kelurahan.

Tabel 2.135  
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoTahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	OPD	43	83	83	83	83
2	Jumlah OPD	OPD	83	83	83	83	83
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2022

10.2 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online danTerintegrasi

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan



terintegrasi pada tahun 2017 masih mencapai 0% dikarenakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru terbentuk pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pinrang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai target kinerja yang direncanakan sehingga mencapai perolehan 100%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 ditargetkan 26 sistem untuk diintegrasikan dan yang terealisasi hanya 4 sistem saja sehingga realisasi capaian hanya 15,38%. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 3 tambahan system baru yaitu WBS, Jelitaku dan Siap Bos yang merupakan aplikasi perizinan. Terjadinya pengurangan jumlah layanan public karena ada beberapa system yang sudah tidak digunakan lagi.

**Tabel 2.136**  
**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan terintegrasi	layanan publik	0	3	4	4	7
2	Jumlah layanan publik	layanan publik	3	3	26	26	16
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	100	15,38	15,38	43,75

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2022

**10.3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah**

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang tahun 2017 mencapai 86,65 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 107.493 jiwa dari 124.055 jiwa, tahun 2018 mencapai 80,74 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 165.490 jiwa dari 204.950 jiwa di tahun 2019 mencapai 81,15 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 230.095 jiwa dari 283.553 jiwa dan di tahun 2020 mencapai 90,97 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 257.960 jiwa dari 283.553 jiwa yang ada di Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2021 capaian persentase masyarakat yang

menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang sebesar 98,73% dengan sasaran sebanyak 284.620 jiwa dari 288.275 jumlah penduduk usia 17 tahun keatas. Pada tahun ini juga terdapat 3 tambahan media yang tadinya sebanyak 7 media sebagai media diseminasi informasi public.

**Tabel 2.137**  
**Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Penduduk	107.493	165.490	230.095	257.960	284.620
2	Jumlah penduduk usia 17 Tahun keatas	Penduduk	124.055	204.950	283.553	283.553	288.275
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	%	86,65	80,74	81,15	90,97	98,73

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2022

**11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**11.1 Persentase Koperasi yang berkualitas**

Persentase koperasi yang berkualitas di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 13,10% dan pada tahun 2021 sebesar 19,36%. Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terdapat 73 koperasi yang meningkat kualitasnya dari total 377 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Pinrang. Namun terdapat sekitar 120 koperasi yang tidak aktif dan sudah direkomendasikan untuk dibubarkan.

**Tabel 2.138**  
**Persentase Koperasi yang berkualitas Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Koperasi	66	52	50	49	73

2	Jumlah seluruh koperasi	Koperasi	364	370	371	374	377
3	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	18,13	14,05	13,48	13,10	19,36

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2022

11.2 Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 8,94% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 13,96%. Adanya peningkatan jumlah usaha mikro pada tahun ini, salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan klasifikasi kelas usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah berdasarkan criteria modal usaha yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tabel 2.139  
Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Tahun 2017–2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Usaha mikro	200	400	480	1.856	3.881
2	Jumlah usaha Mikro keseluruhan	Usaha mikro	20.202	20.567	20.767	20.767	27.806
3	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,9	1,9	2,3	8,94	13,96

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2022

12. Penanaman Modal

12.1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 1,95% dan pada tahun 2021 sebesar 5,22%. Realisasi Investasi PMDN tahun 2021 sebesar Rp.1.861.142.147.835 mengalami peningkatan atau capaiannya 100% sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMDN tahun 2019 sebesar 1.764.011.673.880 dan tahun 2020 sebesar 1.764.011.673.880. Rata-rata capaiannya adalah mengalami peningkatan atau capaiannya 89,35%. Dan rata-rata capaian kinerja Rp.4.114.089.345.893,00.

**Tabel 2.140**  
**Persentase peningkatan investasi di**  
**Kabupaten PinrangTahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investasi tahun n –Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rp	50.573.408.000	235.184.600.000	-190.803.343.932	34.314.717.812	97.130.473.955
2	Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rp	168.531.570.000	1.920.500.300.000	1.729.696.956.068	1.764.011.673.880	1.861.142.147.835
3	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang	%	30,01	12,25	-11,03	1,95	<b>5,22</b>

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

**13.1 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**

Sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ditegaskan bahwa pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan salah satu strategi pelayanan kepemudaan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi menuju kemandirian pemuda.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,21% dan pada tahun 2020 sebesar 0,52%. Di tahun 2021 naik menjadi 15,66%. Hal ini berbeda dengan tahun lalu karena perhitungan tahun lalu mengambil jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha hanya di ibu kota kabupaten yakni Kecamatan Watang Sawitto saja tetapi tahun ini sudah mencakup seluruh kecamatan sehingga jumlahnya meningkat drastis.

**Tabel 2. 141**  
**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan**  
**ekonomi mandiri Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha dikabupaten / kota	Pemuda	100	155	201	522	15.255
2	Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	Pemuda	95.564	97.247	98.281	101.056	97.402
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,10	0,16	0,21	0,52	15,66

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

**13.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan pada tahun 2019 sebesar 0,83% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,39%. Ditahun 2021 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan meningkat menjadi 15,80%. Hal ini berbeda dengan tahun lalu karena perhitungan tahun lalu mengambil jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha hanya di ibu kota kabupaten yakni Kecamatan Watang Sawitto saja tetapi tahun ini sudah mencakup seluruh kecamatan sehingga jumlahnya meningkat drastis.

**Tabel 2.142**  
**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten/kota	Pemuda	433	673	816	2.418	15.395
2	Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	Pemuda	95.564	97.247	98.281	101.056	97.402
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	0,45	0,69	0,83	2,39	15,80

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

**13.3 Peningkatan Prestasi Olahraga**

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pinrang dilihat dari jumlah perolehan medali pada event olahraga tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2019 diraih 4 medali pada event olahraga namun pada tahun 2020 tidak ada dikarenakan tidak ada event olahraga nasional dan internasional yang diadakan. Ditahun 2021 Kabupaten Pinrang menyumbang medali emas di cabang olahraga takraw dan futsal sehingga jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional menjadi 2 medali.

**Tabel 2.143**  
**Peningkatan Prestasi Olahraga**  
**Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	38	146	4	Tidak ada	2

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

**14. Statistik**

**14.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Hal ini berkat strategi pengumpulan data dan distribusi data statistic melalui suatu system (Decision Support System DSS) Lontara Pinrang yang sudah terintegrasi di pusat data Kabupaten Pinrang.

**Tabel 2.144**  
**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**  
**Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD	44	44	44	44	44
2	Jumlah OPD	OPD	44	44	44	44	44
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100,00	100,00	<b>100</b>

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2022

**14.2 Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% selama 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2017-2021.



**Tabel 2.145**  
**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan daerah	OPD	44	44	44	44	44
2	Jumlah OPD	OPD	44	44	44	44	44
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100,00	100,00	100

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2022

**15. Persandian**

**15.1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**

Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sampai tahun 2020 masih menunjukkan pencapaian kinerja 0% dimana belum melakukan system elektronik (S.E) yang menerapkan System Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian, salah satu upaya dalam melaksanakan system keamanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2017-2021 melalui pemasangan Firewall pada tahun 2020 penambahan system keamanan dengan pemasangan Honypot sebagai system keamanan data dan informasi Kabupaten Pinrang.

**Tabel 2.146**  
**Tingkat keamanan informasi pemerintah Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah nilai per area keamanan informasi	OPD	0	0	0	0	44
2	Jumlah area penilaian	OPD	5	5	0	0	44
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	0	0	0	100

SumberData:DinasKomunikasi, InformatikadanPersandian, 2022

**16. Kebudayaan**

**16.1 Terlestarikannya Cagar Budaya**

Jumlah cagar wisata yang terdata dan telah dilestarikan di Kabupaten Pinrang dalam kurun waktu 2017-2021 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.147**  
**Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	44	44	44	44	44
2	Jumlah cagar budaya yang terdata	Cagar budaya	44	44	44	44	44
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**17. Perpustakaan**

**17.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 mencapai 42,06%.

**Tabel 2.148**  
**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	<b>42,06</b>

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2022

**17.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 25,94% dan tahun 2021 sebesar 26,96%. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh jumlah koleksi perpustakaan yang meningkat sebanyak 3,84% dari koleksi tahun lalu. Juga adanya peningkatan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

**Tabel 2.149**  
**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2017 -2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	UPLM1=Pemerataan Layanan perpustakaan	%	0,98	0,100	0,146	0,123	0,123
2	UPLM 2 = Ketercukupan koleksi	%	87,25	90,05	92,41	78	81,84
3	UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan	%	0,100	0,107	0,127	0,107	0,107
4	UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	%	103,43	92,56	109,92	85,05	88,32
5	UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP	%	-	-	-	-	0,03

6	UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	0,005	0,006	0,009	0,005	0,03
7	UPLM7=Anggota perpustakaan	%	23,00	25,00	28,03	18,26	18,26
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \text{UPLM}/\text{AM}$	%	30,68	29,69	32,95	25,94	26,96

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2022

18. Kearsipan

18.1 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja

Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Pinrang tahun 2020 75% dan pada tahun 2021 sebesar 75,18%.

Tabel 2.150  
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	T=Tingkat ketersediaan arsip	%	58,5	66,25	75	75	75,18
2	a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	75	85	100	100	100
3	i=Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	79	90	100	100	100
4	s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	80	90	100	100	100
5	j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	-	-	-	-	0,72
6	$T=(a+i+s+j)/4$	%	234	265	300	300	300
			58,5	66,25	75	75	75,18

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2022

18.2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat

Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 33,33% dan pada tahun 2021 mencapai 66,67%.

Tabel 2.151

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan  
pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan  
bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan  
public dan kesejahteraan rakyat Tahun 2017 -2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	T=Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	13,33	15	33,33	33,33	66,67
2	m=Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	-	-	-	-	100
3	b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	%	-	-	-	-	0
4	g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab.yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	%	-	-	-	-	0
5	a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	%	-	-	100	100	100
6	c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	%	80	90	100	100	100
7	i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	%	-	-	-	-	100
8	T = (m + b + g + a + c +i)/6	%	80	90	200	200	400
			13,33	15	33,33	33,33	66,67

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2022

2.1.3.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

1.1 JumlahTotal Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)

Selama kurun waktu 2017– 2020, produksi perikanan Kabupaten Pinrang meningkat per tahunnya, yakni dari 58.511,39 ton pada tahun 2017 menjadi 77.259,41 ton pada tahun 2020. Pada tahun 2021 meningkat lagi sebesar 80.516,58 ton. Angka ini masih merupakan total produksi perikanan budidaya sedangkan untuk produksi perikanan tangkap masih dalam proses validasi oleh

Kementerian KKP. Adapun data finalnya akan dirilis sekitar bulan Agustus atau September 2022.

**Tabel 2.152**  
**Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) di wilayah Kabupaten Pinrang (sumber data: one data KKP) Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (sumber data: one Data KKP)	Ton	58.511,39	65.552,62	69.475,78	77.259,41	<b>80.516,58</b>

Sumber Data: Dinas Perikanan, 2022

**2. Pariwisata**

**2.1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan**

Keberhasilan pembangunan pariwisata suatu daerah dapat dilihat dan diukur dari tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan citra pariwisata daerah. Seperti dengan menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan promosi pariwisata dalam memperkenalkan produk wisata untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan.

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 16,67% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhannya -100 dan ditahun 2021 meningkat menjadi 11.76%

**Tabel 2.153**  
**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah wisatawan tahun n- Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	5	3	5	-35	2
2	Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	22	27	30	35	17
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara perkebangsaan	%	22,73	11,11	16,67	-100,00	11,76

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,2022

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 22,73% pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 11,11%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 16,67% namun pada tahun 2020 tidak ada wisatawan mancanegara (-100%). Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Tetapi ditahun 2021 meningkat menjadi 11,76% dikarenakan pandemi covid19 sudah melandai dan pertumbuhan ekonomi telah meningkat.

**2.2 Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten Pinrang**

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 mencapai 13,94% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -88,01%. Dan meningkat menjadi 82,52% ditahun 2021.

**Tabel 2.154**  
**Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	10.765	10.577	7.528	-54.149	6.089
2	Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	32.658	43.423	54.000	61.528	7.379
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang	%	32,96	24,36	13,94	-88,01	82,52

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,2022

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 32,96% persentase pertumbuhan pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 24,36%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 13,94% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan -88,01%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19yang melanda dunia. Setelah semua kembali membaik maka ditahun 2021 persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang di kabupaten Pinrang meningkat menjadi 82,52%.

**2.3 Tingkat Hunian Akomodasi**

Pesatnya pertumbuhan di sector Pariwisata mempengaruhi pesatnya pembangunan di bidang pendukungnya, salah satu komponen industry pariwisata yang besar peranannya di Indonesia adalah usaha perhotelan. Dilihat dari fungsi utama hotel adalah sewa kamar atau jasa penginapan. Konsumen



mengharapkan sesuatu yang bukan hanya sekedar kamar menginap, namun mereka lebih mengharapkan hal lain seperti pelayanan, fasilitas dan kondisi lingkungan yang menyenangkan, sopan santun dan rasa hormat dari seluruh karyawan dalam melayani. Hal tersebut membutuhkan sebuah kegiatan komunikasi untuk dapat saling mendapat pengertian dari berbagai pihak terutama pihak yang paling berpengaruh untuk perusahaan. Sehingga semua pihak mendapatkan kepuasan dan terpenuhi kebutuhannya.

Tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 13,15% dan pada tahun 2020 sebesar 12,24%.

**Tabel 2.155**  
**Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kamaryangterjual	Kamar	209	238	302	279	378
2	Jumlah kamaryangtersedia	Kamar	2.148	2.152	2.297	2.280	2.931
3	TingkatHunian Akomodasi	%	9,72	11,05	13,15	12,24	12,89

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemudadan Olahraga, 2022

Pada table diatas, dapat kita lihat realisasi Persentase tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 9,72, pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 11,05%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 13,15% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 12,24%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Di tahun 2021 perekonomian sudah mulai membaik sehingga tingkat hunian akomodasi meningkat menjadi 12,89%.

**2.4 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 1,68% dan pada tahun 2020 sebesar 1,55%. Dan meningkat menjadi 1,56% di tahun 2021.

**Tabel 2.156**  
**Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,63	1,66	1,68	1,55	<b>1,56</b>

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar

1,63%, pada tahun 2018 sebesar 1,66%. Pada tahun 2019 sebesar 1,68% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,55%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Setelah pandemi covid19 mulai melandai maka kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Pinrang pun mulai meningkat menjadi 1,56% ditahun 2021.

2.5 Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 2,28% dan pada tahun 2020 1,72% sedangkan ditahun 2021 sebesar 1,56%.

Tabel 2.157  
Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	2,07	2,12	2,28	1,72	1,56

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2022

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar 2,07%, pada tahun 2018 sebesar 2,12%. Pada tahun 2019 sebesar 2,28% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,72%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Begitupun halnya ditahun 2021 kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2021 sebesar 1,56%.

3. Pertanian

3.1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Produktivitas pertanian per hektar per tahun di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebanyak 5,90 ton/ha dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,08 ton/ha.

Tabel 2.158  
Produktivitas pertanian perhektar per tahun Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton/ha	645.618	654.329	630.524	638.983	660.252
2	Luas panen	Ha	105.839	105.726	105.087	108.302	108.594
3	Produktivitas pertanian per hektar Per tahun	Ton/ha	6,10	6,18	6,00	5,90	6,08

Sumber Data: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

3.2 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular yang terjadi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 14,43% dan tahun 2020 sebesar 9,66% dan menurun ditahun 2021 sebesar 8,99% karena bidang yang membidani ini terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pencegahan penyakit hewan. Akan tetapi hal ini masih belum memenuhi target tahun 2021 yaitu 7,25%.Hal ini terjadi karena pandemi covid19 sehingga petugas memiliki keterbatasan dalam menangani kejadian dan kasus penyakit hewan.

Tabel 2.159  
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus  
Penyakit Hewan Menular Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kejadian /kasuspenyakit hewan tahunberjalan- jumlahkejadian /kasuspenyakit hewan tahun sebelumnya	Kejadian /Kasus	-	-	512	392	401
2	Jumlah kejadian /kasuspenyakit hewan tahun sebelumnya	Kejadian /Kasus	-	-	3.548	4.060	4.461
3	Persentase PenurunanKejadian dan JumlahKasusPenyakit Hewan Menular	%	-	-	14,43	9,66	8,99

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perkebunan, 2022

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1 Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energy lain untuk keperluan nonlistrik.

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:(1) wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan (2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satupertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Pengusahaan Panas Bumi terdiri atas: pengusahaan Panas Bumi

untuk Pemanfaatan Langsung, dan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung digunakan untuk:

(1) wisata; (2) agrobisnis; (3) industri; dan (4) kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di dalam Kawasan Hutan konservasi, pengusahaan panas Bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.

Izin Pemanfaatan Langsung diberikan oleh bupati/wali kota untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: (1) wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan (2) wilayah laut paling jauh  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. Izin Pemanfaatan Langsung diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang. Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung harus berkoordinasi dengan Menteri.

Berdasarkan konsep pemanfaatan panas bumi diatas dan pencapaian IKK yaitu Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2.160**  
**Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi**  
**yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang Tahun 2017-**  
**2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin	Perusahaan	-	-	-	-	-
2	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Perusahaan	-	-	-	-	-
3	persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

5. Perdagangan

5.1 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko adalah bangunan Gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan. Izin usaha toko modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan

komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen untuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri:

(1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Minimarket); (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruangwilayah; dan (4) memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:(1) memiliki hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Minimarket); (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya TokoSwalayan; dan (4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. Pemenuhan Komitmen sampai batas waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen untuk Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan : (1) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan (4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas dan pencapaian IKK yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.161 dibawah ini:



**Tabel 2.161**  
**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Tahun 2017 - 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin Sesuai ketentuan	Pelaku usaha	25	30	33	36	44
2	Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota	Pelaku usaha	25	30	33	39	44
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	100,00	100,00	92,31	<b>100</b>

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

Berdasarkan Tabel 2.161 diatas menunjukkan bahwa pencapaian IKK Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan pada tahun 2017-2019 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 92,31 % atau terdapat 3 (tiga) pelaku usaha yang belum memperoleh izin. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 100% yang artinya bahwa seluruh pelaku usaha telah memperoleh izin.

**5.2 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Tahun 2019-2021**

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sector pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati. Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atauKelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten. Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.

Pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Persentase kinerja realisasi pupuk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 40,54% dan pada tahun 2020 sebesar 40,34%. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 44,84%. Walaupun capaian ini meningkat namun jumlah realisasi masih jauh dari jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani.

**Tabel 2.162**  
**Persentase kinerja realisasi pupuk Tahun 2017**  
**-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi	Ton	0	0	27.932	31.602,45	37.789,21
2	RDKK	Ton	0	0	68.901	78.335,81	84.271,61
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,00	0,00	40,54	40,34	<b>44,84</b>

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

### **5.3 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) BertandaTera Sah yang Berlaku**

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda terabatal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP. Dalam hal Tera ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.

Uji Sampel dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel. Uji sampel hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tigapuluh) tahun.

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandatera sah yang berlaku di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 25,56% dan pada tahun 2020 sebesar 63,17%. Namun pada tahun 2021 capaian ini menurun menjadi 54,51%. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan sehingga kegiatan ini pun terbatas.

**Tabel 2.163**  
**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandatera sah yang berlaku Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	UTTP	517	733	723	1.308	1.129
2	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	UTTP	2.667	2.726	2.830	2.071	2.071
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	19,38	26,89	25,56	63,17	<b>54,51</b>

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

**6. Perindustrian**

**6.1 Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang**

Kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah, dan industry besar. Kegiatan usaha industry ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, bahwa Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Industri **besar** merupakan industry yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua) puluh orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

Matriks penggambaran criteria industry dapat dilihat pada Gambar 2.6 dibawah ini:

**Gambar 2.6**  
**Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan**  
**Nilai Investasi Untuk Klasifikasi**  
**Usaha Industri**

Nilai Investasi  Tenaga Kerja	< Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000 – Rp15.000.000.000	> Rp15.000.000.000
1-19 orang	Industri Kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

Izin usaha industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri. IUI meliputi IUI kecil untuk industry kecil, IUI menengah untuk industry menengah, dan IUI besar untuk industry besar. Berdasarkan PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, bahwa IUI diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri. Perusahaan wajib berlokasi di Kawasan industri kecuali perusahaan dengan ketentuan: (1) berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kawasan industri atau telah memiliki Kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan industrinya telah habis, (2) termasuk klasifikasi industry kecil dan industry menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, atau (3) industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industry dan berlokasi diluar Kawasan industri dapat diberikan IUI dengan ketentuan : (1) berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) termasuk klasifikasi industri menengah, wajib berlokasi di Kawasan peruntukan industry sesuai dengan RTRW.

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar -28% dan pada tahun 2020 sebesar 4,11%. Pada tahun 2021 pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang melonjak tajam dengan persentase sebesar 567,12% dimana jumlah industry kecil dan menengah pada tahun ini sebanyak 487 industri. Pertambahan industry ini disebabkan oleh adanya kemudahan dalam pemberian izin usaha melalui aplikasi OSS dan juga adanya bantuan UMKM dari Dinas Koperasi untuk para pelaku usaha industry kecil dan menengah.

**Tabel 2.164**  
**Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	Industri kecil dan menengah	79	3	-29	3	414
2	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	Industri kecil dan menengah	20	99	102	73	73
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang	%	395	3,03	-28	4,11	<b>567,12</b>

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

**6.2 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK**

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP dan RPIK. RPIP atau RPIK mengatur industri pengolahan non migas yaitu industri yang masuk kategori C dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk industri batubara dan pengilangan migas.

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK pada tahun 2020 mencapai 39,20%. Pada tahun 2021 persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK adalah sebesar 428,64 dengan rata-rata capaian sasaran RIPIN dalam RPIK sebesar 71,44%. Angka ini merupakan akumulasi dari capaian 5 indikator dalam RPIK yaitu pertumbuhan sector industri sebesar 78,50%; kontribusi industri terhadap PDRB sebesar 61,45%; nilai ekspor sector industri sebesar 80,71%; nilai investasi sector industri sebesar 186,7%; dan jumlah tenaga kerja di sector industri sebesar 21,28%.



**Tabel 2.165**  
**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jika terdapat N indicator pembangunan industry dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indicator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indicator tersebut	%	-	-	-	39,20	428,64

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

**6.3 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan JumlahIzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 15,28% dan pada tahun 2020 sebesar 13,67%. Pada tahun 2021 capaian ini meningkat menjadi 23,95% dengan jumlah izin yang dipantau langsung di lokasi sebanyak 250 izin. Sedangkan sisanya tetap dipantau dan diawasi melalui aplikasi.

**Tabel 2.166**  
**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	99	102	73	76	250
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	305	407	480	556	1.044
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	32,46	25,06	15,28	13,67	<b>23,95</b>

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

**6.4 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait**

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017-2021 masih 0%.

**Tabel 2.167**  
**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	0	0	0	0	0
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	0	0	0	0	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

**6.5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Pinrang**

Kawasan industri diatur dalam PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industry berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hokum dan didirikan berdasarkan hokum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Badan usaha dapat berbentuk: (1) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; (2) Koperasi; atau (3)

Perseroan Terbatas. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI. IUKI diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sampai tahun 2021 masih 0%.

**Tabel 2.168**  
**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan**  
**dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin**  
**Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di**  
**Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	0	0	0	0	0
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	0	0	0	0	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasanden gan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

6.6 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini

Informasi industri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Sistem

Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Untuk melaksanakan penyampaian Informasi Industri dan Informasi Lain, Pengelola SIINas memberikan Akun SIINas tipe D kepada Kepala Daerah.

**Tabel 2.169**  
**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keterkinian informasi industri:		0	0	0	0	
	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan		0	0	0	0	50
	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan		0	0	0	0	25
	Tidak Menyampaikan informasi industri						0
2	Kelengkapan informasi industry meliputi:						
	Informasi produksi dan kapasitas produksi		0	0	0	0	10
	Informasi bahan baku dan bahan penolong		0	0	0	0	10
3	Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	95

Sumber Data: Dinas PERINDAGEM, 2022

Berdasarkan Tabel 2.169 diatas menunjukkan bahwa pencapaian IKK Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini pada tahun 2017-2020 sebesar **0%**. Hal tersebut terjadi karena Pengelola SIINas belum memberikan Akun SIINas tipe D kepada Kepala Daerah. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan yang terdaftar di akun SIINas sebanyak 13 perusahaan dan mereka juga telah melaporkan perusahaannya melalui aplikasi tersebut. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para

pelaku usaha tersebut dalam melaporkan usahanya, terutama kendala di aplikasi yang terkadang sulit untuk diakses. Selain itu kurangnya pemahaman para pelaku usaha akan aplikasi tersebut.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

1.1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 19,19% dan pada tahun 2020 sebesar 20,68%.

Pada tahun 2021 rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan sebesar 17,16% dengan jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan sebesar Rp 235.794.088.713,00.

Tabel 2.170  
Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rupiah	211.205.357.642,85	228.512.393.667,00	235.566.080.914,00	262.200.172.664,00	235.794.088.713,00
2	Jumlah APBD	Rupiah	1.285.718.310.365,85	1.303.598.764.098,84	1.227.724.924.055,22	1.268.124.083.700,05	1.374.460.808.334,00
3	Rasio Belanja Pegawai diLuar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,43	17,53	19,19	20,68	17,16

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022

1.2 Rasio PAD Terhadap APBD Nonmigas Tahun 2017-2021

Rasio PAD terhadap APBD nonmigas pada tahun 2019 sebesar 10,26% dan pada tahun 2020 sebesar 9,99%. Pada tahun 2021 rasio PAD terhadap APBD non migas sebesar 10,24% dimana jumlah PAD sebesar Rp 134.066.665.485,33 dan jumlah APBD non migas sebesar Rp 1.309.369.355.200,18.

Tabel 2.171  
Rasio PAD Terhadap APBD Non MigasTahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PAD	Rupiah	118.859.698.609,48	130.651.477.245,38	133.311.262.030,14	151.056.079.570	134.066.655.485,33
2	Jumlah APBD NonMigas	Rupiah	1.220.049.099.292,48	1.281.808.141.976,38	1.299.421.857.734,83	1.312.648.049.358,18	1.309.369.355.200,18
3	Rasio PAD	%	9,74	10,19	10,26	9,99	10,24

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022

1.3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam SPIP ada lima unsur penilaian yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan. Penilaian SPIP ini pun terdiri dari 26 sub unsur yang nanti akan dirangkum kedalam tingkatan. Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP di Kabupaten Pinrang selama tahun 2019 dan tahun 2020 berada di level 3. Pada saat penyusunan RKP di tahun 2021 ini nilai SPIP belum keluar dari BPKP tetapi angka sementara merujuk ke level 3.

Tabel 2.172  
Maturitas Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber Data: Inspektorat, 2022

1.4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aspek penilaian APIP adalah pengelolaan SDM sebesar 30%, Praktik profesional sebesar 30%, Akuntabilitas dan manajemen kinerja 10%, Budaya dan hubungan organisasi 10% dan struktur tata kelola 20%. Kemudian nilai elemen tersebut dirangkumdan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level1/level2/level3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP di Kabupaten Pinrang selama tahun 2017 dan tahun 2020 berada di level 3. Untuk tahun 2021 penilaian dari BPKP belum keluar pada saat penyusunan RKPD ini.



**Tabel 2.173**  
**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang Dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber Data: Inspektorat, 2022

**1.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)**

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) pada tahun 2019 sebesar 79,61% dan pada tahun 2020 sebesar 81,94%. Pada tahun 2021 rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) sebesar 70,64%

**Tabel 2.174**  
**Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah belanja urusan pemerintahan –transfer expenditures	Rupiah	826.228.243.231	835.799.724.152	913.995.426.295	931.864.515.548,00	913.995.426.295,00
2	Jumlah belanja APBD	Rupiah	1.143.410.107.563	1.282.671.059.726,38	1.148.030.804.512	1.188.373.367.238	1.293.820.146.095,00
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	72,26	65,16	79,61	78,42	70,64

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022

**1.6 Opini Laporan Keuangan**

Opini laporan keuangan Kabupaten Pinrang setiap tahunnya mencapai WTP dan untuk tahun 2020 mencapai WTP kembali. Dan pada tahun 2021 opini laporan keuangan Kabupaten Pinrang belum Keluar dari BPK.

Tabel 2.175  
Opini Laporan Keuangan Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber Data: Inspektorat, 2022

2. Pengadaan

2.1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 0%. Jumlah kontrak dari tahun 2019 sebanyak 824 dan meningkat ditahun 2021 menjadi 2.918.

Tabel 2.176  
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.Yang ditandatangani pada kuartal pertamaTahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani Pada kuartal pertama tahun	Kontrak	0	0	0	0	0
2	Jumlah kontrak keseluruhan tahun	Kontrak	65	669	672	824	2.918
3	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pinrang, 2022

2.2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Tahun 2017-2021

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2019 sebesar 7,52% dan pada tahun 2020 sebesar 10,60%. Ditahun 2021 menurun menjadi 8,66%.

Tabel 2.177  
Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Pengadaan	91	53	63	79	78
2	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan tanpa kompetitif	Pengadaan	0	831	942	745	901
3	Persentase Jumlah Pengadaanyang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	0	6,38	6,69	10,60	8,66

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Pinrang, 2022

2.3 Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan pada tahun 2019 sebesar 46,93% dan pada tahun 2020 sebesar 34,82%. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 52,63% dimana jumlah belanja langsung yang melalui pengadaan sebesar Rp 184.079.242.386,47.

Tabel 2.178  
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaanTahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Belanja langsung	121.024.815.481	236.913.042.517,90	63.768.674.950	138.590.218.646	184.079.243.386,47
2	Total belanja langsung	Belanja langsung	630.913.035.867	552.024.944.463	574.933.622.837	598.119.361.631	349.771.753.083,00
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan Melalui pengadaan	%	19,18	42,92	27,07	34,82	52,63

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Pinrang, 2022

3. Kepegawaian

3.1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) di Kabupaten Pinrang pada

tahun 2020 sebesar 266,67% dan pada tahun 2021 sebesar 293,38%. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu mulai 2017 sampai tahun 2021, rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pegawai yang memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentu saja hal ini juga tak luput dari dukungan pemerintah daerah yang memfasilitasi para pegawai untuk melanjutkan pendidikan baik dengan beasiswa maupun mandiri.

**Tabel 2.179**  
**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT keatas	Pegawai	1.715	1.733	1.819	1.728	1.728
2	Seluruh jumlah pegawai Dengan pendidikan SMA/kebawah	Pegawai	848	763	735	648	589
3	Rasio Pegawai PendidikanTinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	%	202,24	227,13	247,48	266,67	<b>293,38</b>

Sumber Data:Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

**3.2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2020 sebesar 61,32% dan pada tahun 2021 sebesar 27,92%. Menurunnya rasio pegawai fungsional di tahun 2021 disebabkan adanya penyusunan peta dan analisa jabatan di masing-masing Perangkat Daerah dimana berdasarkan analisa jabatan fungsional yang dibutuhkan. Selain itu terdapat perbedaan metode perhitungan dimana pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pegawai fungsional termasuk jumlah pegawai fungsional umum.

**Tabel 2.180**  
**Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2017- 2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pegawai PNS/Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Pegawai	1.586	1.536	1.536	1.457	647
2	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru Dan tenaga kesehatan)	Pegawai	2.563	2.496	2.554	2.376	2.317
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru Dan tenaga kesehatan)	%	61,88	61,54	60,14	61,32	<b>27,92</b>

Sumber Data: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

3.3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2017-2021

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2020 sebesar 11,74% dan pada tahun 2021 sebesar 29,37%, dimana jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 190 orang dari 647 orang pegawai fungsional (tidak termasuk pegawai fungsional umum).

Tabel 2.181  
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Pegawai	180	189	171	171	190
2	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Pegawai	1.586	1.536	1.536	1.457	647
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,35	12,30	11,13	11,74	29,37

Sumber Data: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

4. Manajemen Keuangan

4.1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tahun 2017-2021

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu 93,51% dan pada tahun 2020 93,71%. Pada tahun 2021 deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD sebesar 94,13%.

Tabel 2.182  
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBDTahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai absolute dari total belanja Dalam realisasi	Rupiah	1.143.410.107.563	1.282.671.059.726,38	1.148.030.804.512	1.188.373.367.238	1.293.820.146.095,00
2	Total belanja APBD dikurangi satu	Rupiah	1.285.718.310.365,85	1.296.910.334.172	1.227.724.924.055,22	1.268.124.083.700,05	1.374.460.808.334,00
3	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	88,93	98,90	93,51	93,71	-5,87

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022

4.2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD diKabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 1,54 dan pada tahun 2020 sebesar 4,23. Pada tahun 2021 deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD sebesar -4,17.

Tabel 2.183  
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD  
dalam APBD Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai absolutdari total PAD dalamrealisasi	Rupiah	118.859.698.609,48	130.651.477.245,38	133.311.262.030,14	131.174.527.320,35	134.066.655.485,33
2	TotalPADdalam APBDdikurangi satu	Rupiah	109.986.809.930	125.995.847.430	131.283.048.492,00	125.849.979.824,00	139.903.324.495,77
3	Deviasirealisasi PADterhadap anggaranPADdalam APBD		8,07	3,70	1,54	4,23	-4,17

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022

4.3 Assets Management Tahun 2017-2021

Untuk manajemen asset Kabupaten Pinrang keempat indikatornya memenuhi syarat.

Tabel 2.184  
Assets Management Tahun 2017 -2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Apakah ada daftar asset tetap?(Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022



4.4 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun  
Sebelumnya

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun  
sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 6,26% dan pada tahun 2020  
sebesar 4,98%.

Tabel 2.185  
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun  
Sebelumnya Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai realisasi SILPA	Rupiah	145.789.520.026,84	77.330.984.013,22	81.555.878.066,05	72.760.417.381,23	51.133.491.619,56
2	Total belanja anggaran Tahun sebelumnya	Rupiah	1.368.107.503.046,75	1.285.718.310.365,85	1.303.598.764.098,84	1.374.026.268.775,22	1.407.654.270.520,05
3	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	10,66	6,01	6,26	5,30	3,63

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

5.1 Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan di  
Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu 103,75% dan pada tahun 2020  
102,42%. Untuk tahun 2021 informasi tentang sumber daya yang tersedia  
untuk pelayanan sebesar 106,23%.

Tabel 2.186  
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	Rupiah			8.009.798.000	3.083.992.250	1.374.460.808.334
2	Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	Rupiah			7.720.355.925	3.011.206.826	1.293.820.146.095
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%			103,75	102,42	106,23

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2022

2. Akses public terhadap informasi keuangan daerah Tahun 2017- 2021

Akses public terhadap informasi keuangan daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 25%. Pada tahun 2021 akses public terhadap informasi keuangan daerah sebesar 58,33%.

Tabel 2.187  
Akses public terhadap informasi keuangan daerah Tahun 2017 -2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen yang dipublikasikan diwebsite pemma	Dokumen	3	3	3	3	7
2	Total jumlah dokumen yang telah dirinci	Dokumen	12	12	12	12	12
3	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	%	25,00	25,00	25,00	25,00	58,33

Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Sebagian besar pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang dipergunakan untuk keperluan konsumsi makanan, dimana rata-rata pengeluaran perkapita untuk sebulan paling tinggi untuk konsumsi makanan, sedangkan yang mengarah ke konsumsi non makanan masih dibawah konsumsi makanan namun konsumsi non makanan telah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.189**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**  
**PerKapita**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9,134,497.03	10,112,173.95	11,043,700.05	11,303,530.70	12,238,913.22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	108,659.43	132,001.19	201,531.92	180,134.17	187,117.07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,172,461.38	1,371,101.34	1,559,350.62	1,576,947.41	1,700,696.02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,853,925.35	6,354,064.13	6,971,094.61	7,211,722.80	7,398,753.71
5. Perubahan Inventori	102,487.38	346,714.13	356,662.97	380,715.94	362,31.82
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(11,468.63)	(228,275.74)	(502,020.22)	(570,038.05)	(129,284.91)
<b>PDRB</b>	16,360,561.94	18,087,778.99	19,630,319.95	20,083,012.97	21,758,576.93

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang, 2022

**2. Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat diukur dari besarnya indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Pada indikator NTP di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif yang disebabkan oleh produktivitas komoditas pertanian khususnya padi sawah yang cenderung turun dikarenakan iklim yang sulit diprediksi serta hasil cetak sawah baru belum optimal produksinya juga harga gabah yang cenderung menurun, sementara harga barang jasa juga cenderung meningkat disebabkan tingkat inflasi walaupun sarana pertanian terutama pupuk yang relatif stabil. Ini menjadikan NTP Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif, namun menunjukan NTP tetap lebih besar dari 100, ini menggambarkan bahwa pendapatan petani masih tinggi dibandingkan pengeluarannya sebesar 105,13% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 NTP Kabupaten Pinrang sebesar 109,79% karena produktivitas pertanian meningkat sedangkan biaya produksi tidak berubah secara signifikan, begitupun dengan harga gabah yang masih hampir sama dengan tahun 2020.

**Tabel 2.190**  
**Nilai Tukar Petani**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Tukar Petani	111,84	110,12	106,91	105,13	109,79

Sumber Data: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, 2022

**3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**

Pola pengeluaran konsumsi menggambarkan proporsi pengeluaran penduduk yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan non pangan. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita cenderung menunjukkan persentase peningkatan, namun hanya pada tahun 2018 sedikit menurun yaitu pada angka 42,28%. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.191**  
**Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.Konsumsi Rumah Tangga	9.134,50	10.112,17	11.043,70	Blm ada data	
2.Konsumsi Non Pangan	7,258.58	4,806.13		Blm ada data	
PDRB	16.360,56	18.087,78	19.630,32		
Proporsi konsumsi non pangan terhadap total PDRB	44.23	42.28			

Sumber Data: BPS Kabupaten Pinrang 2021

**4. Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten**

Indeks Layanan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pinrang merupakan salah satu misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam RPJMD seperti data indeks Layanan infrastruktur Kabupaten Pinrang yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.192**  
**Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Pinrang**  
**Pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks layanan infrastruktur Kabupaten Pinrang	81,26	82,28	85,94	70,2	75,8

Sumber Data:Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang2022

Kabupaten Pinrang yang memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang cukup baik akan tetapi masih terkendala dalam pengembangan infrastruktur karena kondisi topografi yang berada di pegunungan sehingga perkembangan pembangunan di wilayah ini perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan dengan terlebih dahulu mengetahui nilai indeks layanan infrastruktur wilayah dengan memakai beberapa indikator yaitu persentase kemantapan jalan, cakupan irigasi kewenangan kabupaten, persentase ketersediaan sportcenter, persentase rumahtangga berakses air minum, dan persentase pemukiman layak huni dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.193**  
**IndikatorLayanan infrastuktur Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2017 - 2021**

No	Tahun	Indeks Layanan Infrastruktur	Indikator				
			Presentase Kemantapan Jalan x 30%	Presentase Cakupan Irigasi Kewenangan Kabupaten x 20%	Presentase Ketersediaan Sport Center x 10%	Presentase Rumah Tangga yang mengakses air minum x 20%	Presentase Rumah Layak Huni x 20%
1	2021	74,72	61,35x30%= 18,41	70,50x20%= 14,10	41,67x10%= 4,17	95,05x20%= 19,01	95,20x20%= 19,04
2	2020	72,96	65,73x30%= 19,72	66,65x20%= 12,13	33,33x10%= 3,33	93,49x20%= 18,70	93,49x20%= 19,08
3	2019	81,58	95,58x30%= 28,67	60,47x20%= 12,09	33,33x10%= 3,33	93,14x20%= 18,63	93,14x20%= 18,85
4	2018	79,76	93,02x30%= 27,91	57,27x20%= 11,45	33,33x10%= 3,33	90,10x20%= 18,62	90,10x20%= 19,04
5	2017	76,59	83,03x30%= 24,91	56,67x20%= 11,33	33,33x10%= 3,33	90,10x20%= 18,02	90,10x10%= 18,99

SumberData:Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang2022

Dari data indikator diatas dapat dilihat bahwa data ini merupakan data terbaru karena telah dilakukan pemutakhiran data sesuai dengan regulasi dan kondisi di lapangan sehingga data nilai indeks layanan infrastruktur Kabupaten Pinrang mengalami perubahan dari data nilai indeks layanan infrastruktur Kabupaten pinrangyang ada di dalam RPJMD sehingga terdapat pemutakhiran data seperti pada table dibawah ini:

**Tabel 2.194**  
**Indeks Layanan Infrastuktur Kabupaten Pinrang**  
**Tahun2017-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks layanan infrastuktur Kabupaten	76,59	79,76	81,58	72,96	74,72

Sumber data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang,2022

Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten diambil dari pembobotan persentase kemantapan jalan, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase cakupan irigasi kewenangan kabupaten, persentase rumah layak huni dan presentasi ketersediaan sport center. Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 81,58 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 72,96. Hal ini dikarenakan salah satu indikator dalam Indeks Layanan Infrastruktur di Kabupaten Pinrang yaitu persentase kemantapan jalan di kabupaten pinrang mengalami penurunan dari 95,58% menjadi 65,73%. Hal ini disebabkan karena regulasi mengenai kemantapan jalan mengalami perubahan perhitungan. Selain itu dampak pandemi covid19 ditahun 2020 juga sangat berdampak bagi pembangunan infrastruktur karena adanya recofusing anggaran. Akan tetapi beberapa indikator indeks layanan infrastruktur kabupaten pinrang seperti persentase cakupan irigasi, persentase rumah layak huni dan lain sebagainya mengalami peningkatan di tahun 2021 sehingga membuat Indeks Layanan Infrastruktur di Kabupaten Pinrang kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 74,72%.

## 5. Indeks Perkembangan Wilayah

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Dari perkembangan wilayah inilah yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan suatu indikator-indikator dan variabel pembangunan. Secara umum, tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Semakin banyak fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di wilayah tersebut, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya sehingga perkembangan wilayah di daerah tersebut akan semakin maju. Kondisi tersebut dapat dilihat dari padatnya jaringan jalan, semakin luasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja. Untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah dapat dilakukan dengan menghitung Indeks Perkembangan Wilayah menggunakan analisis scalogram dengan menggunakan tiga komponen yakni kependudukan, fasilitas umum dan aksesibilitas wilayah berupa panjang ruas jaringan jalan. Jumlah dari tiga komponen diatas kemudian discoring dengan angka 1 untuk setiap fasilitas yang terpenuhi di wilayah tersebut sehingga menghasilkan angka untuk Indeks Perkembangan Wilayah pada table dibawah ini:



**Tabel 2.36**  
**Indeks Perkembangan Wilayah**  
**Tahun 2017- 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Perkembangan Wilayah (nilai)	56	58	59	78	82

Sumber Data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2022

Dari tabel diatas di Kabupaten Pinrang indeks perkembangan wilayah pada tahun 2019 sebesar 59 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 78. Karena kondisi perekonomian di Kabupaten Pinrang pun telah membaik sehingga Indeks Perkembangan Wilayah Kabupaten Pinrang berkembang menjadi 82. Dengan adanya angka ini maka dapat dilihat bahwa perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pinrang harus dipertahankan dengan memperhatikan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan dan peribadatan. Disamping itu faktor aksesibilitas wilayah yakni kemantapan jalan, panjang lebar ruas jalan serta kondisi jalanan juga sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan di suatu wilayah.

**6. Indeks Layanan Infrastruktur Wilayah Pinrang Utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang)**

Indeks Layanan Infrastruktur Wilayah Pinrang Utara yakni Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang merupakan salah satu misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam RPJMD seperti data indeks Layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang (Pinrang Utara) dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.37**

**Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua Dan Lembang**  
**Pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	45,30	48,50	46,90	28,10	31,60

Kabupaten Pinrang yang memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang cukup baik akan tetapi masih terkendala dalam pengembangan infrastruktur karena kondisi topografi yang berada di pegunungan sehingga perkembangan pembangunan di wilayah ini perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan dengan terlebih dahulu mengetahui nilai indeks layanan infrastruktur wilayah Pinrang Utara dengan memakai beberapa indikator yaitu persentase kemantapan jalan, cakupan irigasi kewenangan kabupaten, persentase

ketersediaan sportcenter, persentase rumah tangga berakses air minum, dan persentase pemukiman layak huni dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.38**  
**Indikator layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua Dan Lembang**  
**Tahun 2017 - 2021**

No	Tahun	Indeks Layanan Infrastrukt ur	Indikator				
			Presentase Kemantapan Jalan x 30%	Presentase Cakupan Irigasi Kewenangan Kabupaten x 20%	Presentase Ketersediaan Sport Center x 10%	Presentase Rumah Tangga yang mengakses air minum x 20%	Presentase Rumah Layak Huni x 20%
1	2021	73,25	49,33 x 30% = 14,80	65,60 x 20% = 13,12	66,67 x 10% = 6,67	96,65 x 20% = 19,33	96,66 x 20%= 19,33
2	2020	68,32	46,50 x 30% = 13,95	63,01 x 20% = 12,60	33,33 x 10% = 3,33	95,10 x 20% = 19,02	97,05x20%= 19,41
3	2019	65,74	46,50 x 30% = 13,95	59,13 x 20% = 11,83	33,33 x 10% = 3,33	86,09 x 20% = 17,22	97,05x20%= 19,60
4	2018	46,90	32,36 x 30% = 9,71	53,65 x 20% = 10,73	33,33 x 10% = 3,33	52,6 x 20% = 10,52	63,05x20%= 12,61
5	2017	48,50	36,03 x 30% = 10,81	52,65 x 20% = 10,53	33,33 x 10% = 3,33	52,1 x 20% = 10,42	67,05x20%= 13,41

Dari data indikator diatas dapat dilihat bahwa data ini merupakan data terbaru karena telah dilakukan pemutakhiran data sesuai dengan regulasi dan kondisi dilapangan sehingga data nilai indeks layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang (Pinrang Utara) mengalami perubahan dari data nilai indeks layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang (Pinrang Utara) yang ada di dalam RPJMD sehingga terdapat pemutakhiran data seperti pada table dibawah ini:

**Tabel 2.39**  
**Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua Dan Lembang**  
**Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	48,50	46,90	65,74	68,32	73,25

Sumber data: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2022

Indeks Layanan Infrastruktur Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang pada tahun 2019 sebesar 65,79dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 68,32 dan tahun 2021 sebesar 73,25. Hal ini dikarenakan beberapa indikator dalam Indeks Layanan Infrastruktur juga mengalami kenaikan seperti presentase kemantapan jalan, presentase cakupan irigasi, rumah layak huni dan presentase rumah berakses air minum.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan beberapa indikator yaitu indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA) dan indeks tutupan hutan (ITH). Pada tahun 2019 IKLH Kabupaten Pinrang diperoleh nilai 68,29 dan pada tahun 2020 diperoleh nilai 68,74. Sedangkan pada tahun 2021 nilai IKLH adalah 67,56.

Tabel 2.193  
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)  
Tahun 2017- 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	72,69	72,79	68,29	68,74	67,56

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2022

8. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Pinrang. Perhitungan tingkat risiko ini dilakukan dengan memerhatikan factor bahaya (Hazard), kerentanan (Vulnerability), dan kapasitas (Capacity). Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 179,20dan pada tahun 2020 sebesar 197,20 kemudian ditahun 2021 sebesar 169,57.

Tabel 2.194  
Indeks Resiko Bencana Tahun 2017- 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Resiko Bencana (nilai)	179,20	179,20	179,20	197,20	169,57

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

9. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 terdapat 536 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 538 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 persentase angka kriminalitas di Kabupaten Pinrang sebesar 80,61 dimana terdapat 521 kasus dan yang sudah tertangani sebanyak 420 kasus.

**Tabel 2.195**  
**Angka Kriminalitas Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	34,98	31,92	71,45	85,90	80,61

Sumber data: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Tabel 2.196

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Pinrang Tahun 2017 - 2021

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja Setiap Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui(>)
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,84	6,91	6,53	0,44	5,04	4,50	Melampaui
2	PDRB per kapita (Juta Rp.)	43,95	48,28	52,05	52,93	53,41	56,23	Belum Tercapai
3	Inflasi	3,43	1,96	2,45	2,37	2,37	2,5	Melampaui
4	Indeks Gini	0,309	0,359	0,336	0,375	0,367	0,345	Belum Tercapai
5	Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan	91,54	91,19	91,54	91,14	91,19	91,44	Belum Tercapai
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,48	8,46	8,81	8,86	8,81	8,56	Belum Tercapai
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,9	70,62	71,12	71,26	71,45	70,85	Melampaui
1.2	KESEJAHTERAAN SOSIAL							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1	Indeks Pendidikan	61,77	62,80	62,89	62,95	63,01	63,15	Belum Tercapai
2	Angka melek huruf	95,05%	95,72%	99,96%	99,99%	100%	100	Belum Tercapai
3	Angka rata-rata lama sekolah	7,54	7,84	7,85	7,86	7,87	7,89	Belum Tercapai
4	Indeks Kesehatan	74,89	75,35	75,98	76,32	76,57	78	Belum Tercapai
5	Angka usia harapan hidup	68,68	68,98	69,39	69,61	69,77	69,45	Melampaui
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,44	95,45	95,35	95,16	95,11	96,24	Belum Tercapai
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,61	61,73	67,92	68,11	68,43	60,41	Melampaui
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,1	60,01	59,07	59,11%	57,78%	60,50	Belum Tercapai
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,41	2,8	2,91	4,19	4,06	3,85	Belum Tercapai
10	Rasio Penduduk Yang Bekerja	96	97,2	97,09	95,81	95,94	96	Belum Tercapai
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,01	83,62	84,75	85,99	86,45	86,25	Melampaui
12	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi	89,20	89,30	89,30	89,50	90,60	89,70	Melamp aui
13	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,20	81,10	82	82,10	81,05	82,30	Belum Tercapai
14	Penguatan Cadangan Pangan	113,12%	141,20%	156,06%	173,06%	269,88	183,062	Melampaui
15	Kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB	25,34	23,56	20,42	20,61	18,60	20,97	Belum Tercapai
16	Kontribusi sector Pertanian (palawija) terhadap PDRB	12,56	12,10	10,42	11,70	9,17	11,95	Belum Tercapai
17	Produksi Sektor Pertanian	645.618 (ton/tahun)	654.329 (ton/tahun)	630.524 (ton/tahun)	638.983 (ton/tahun)	660.252 (ton/tahun)	666.158 (ton/tahun)	Belum Tercapai



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

18	ProduktivitasTanaman Pangan Utama (padi) per hektar	6,10 Ton/ha	6,19 Ton/ha	6 Ton/ha	5,9Ton/Ha	6,08	6	Melamp aui
19	Kontribusi produksi kelompok pertain terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20	Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB	2,63	2,71	2,75	2,8	2,78	2,75	Melampaui
21	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1,63	1,66	1,68	1,55	1,56	1,69	Belum Tercapai
22	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	19,7	24,37	19,91	20,81	22,19	19,75	Melampaui
23	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13,41	13,89	14,63	14,42	14,48	14,50	Belum Tercapai
24	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	6,35	6,09	6,28	6,14	6,16	6,45	Belum Tercapai
25	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	52,44	52,67	58,28	55	Melampaui
26	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	56,98	60,06	61,54	62,86	63,59	63,35	Melampaui
2	PELAYANAN UMUM							
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
1	PENDIDIKAN							
1.1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	64,79%	67,45%	73,50%	92,83%	95,79%	94,62%	Melamp aui
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,66%	99,67%	98,25%	95,28%	95,32%	96,46%	Belum Tercapai
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,55%	94,74%	82,45%	92,06%	98,27%	94,05%	Melamp aui
1.4	Tingkat partisipasi warga Negara usia7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	90,37%	92,05%	92,37%	97,27%	97,02%	97,95%	Belum Tercapai
2	KESEHATAN							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

2.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,08%	0,07	Melampaui
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,21%	94,27%	93,94%	98,47%	100%	100%	Tercapai
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,08%	96,48%	93,20%	100%	100%	100%	Tercapai
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99%	100%	107%	100,13%	100%	100%	Tercapai
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	112,78%	95,18%	100%	69,88%	100%	100%	Tercapai
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53,59%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	-	100%	100%	100%	Tercapai
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	54,80%	87,38%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4,01%	9,67%	3,28%	100%	100%	100%	Tercapai
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	Tercapai
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	36,55%	38,97%	52,08%	64,55%	62%	62,50%	Belum Tercapai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	46,01%	53,49%	58,26%	58,29%	55,00%	58%	Belum Tercapai
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	56,67	57,27	60,47	60,65	93,00	93,4%	Belum Tercapai
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	75,35%	76,48%	77	93,49%	95,05%	100%	Belum Tercapai
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,75%	95,14%	96,9%	97,56%	97,78%	98,19%	Belum Tercapai
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	43,7%	46,59%	56,51%	65,73%	61,35%	71,73%	Belum Tercapai
3.8	Rasio tenaga operator /teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	88,92%	89,90%	94,13%	100%	Belum Tercapai
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	-	17,57%	100%	28,91%	100%	Belum Tercapai
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Tercapai
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikab/kota yang ditangani	1,56%	3,01%	56,63%	49,67%	4,55%	45,50%	Belum Tercapai
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (RumahTidak Layak Huni)	5,03%	4,77%	5,76%	4,62%	4,53%	3,48%	Belum Tercapai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum)	-	-	100%	100%	6,40%	100%	Belum Tercapai
5	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	60%	100%	100%	100%	Tercapai
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	17,07%	43,90%	60,61%	75,76%	100%	76,26%	Melampaui
5.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	408.582 jiwa,12 Kecamatan	401.858 jiwa,12Kecamatan	405.671 jiwa, 12 kecamatan	363.417 jiwa,12 kecamatan	263.689 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa,12kecamatan	Belum Tercapai
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	408.582 jiwa,12 Kecamatan	401.858 jiwa,12Kecamatan	405.671jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan	79.108 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa,12kecamatan	Belum Tercapai
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	408.582 jiwa,12 Kecamatan	401.858 jiwa,12Kecamatan	405.671jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan	292 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa,12kecamatan	Belum Tercapai
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	59,38%	66,39%	61,39%	83,51%	96,12%	83,81%	Melampaui
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	6,37 menit	15 Menit	Melampaui
6	<b>SOSIAL</b>							
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia Terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			100%	100%	100%	100%	Tercapai
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>								
7	<b>TENAGA KERJA</b>							
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1,10	0,91	0,71%	0,92%	80,00%	1,02%	Melampaui

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4,24%	11,44%	3,44%	0,68%	87,49%	1,25%	Melampai
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	7.645,68	7.388,85	7.925,52	7.982,56	155.087,98	8.975,95	Melampai
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	24,87%	26,16%	36,69%	36,69%	74,16%	37,50%	Melampai
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanis pelayanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	55,02%	56,19%	58,1%	51,55%	63,02%	55%	Melampai
<b>8</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	-	0,67%	9,19%	74,38%	10,16%	Melampai
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-	-	0,03%	0,12%	0,07%	0,09	Belum Tercapai
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	0,03%	0,05%	56,42%	0,05	Melampai
<b>9</b>	<b>PANGAN</b>							
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	23,07%	29,30%	32,18%	35,43%	55,29%	36,40%	Melampai
<b>10</b>	<b>PERTANAHAN</b>							
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	-	21,25%	100%	21,25%	Melampai
10.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-	-	-	22,5%	59,60%	22,5%	Melampai
10.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-	-	-	21,18%	100%	21,8%	Melampai
10.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	-	16,6%	40,78%	38,8%	Melampai
10.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	-	21%	100%	21%	Melampai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	-	-	20%	75%	20%	Melampaui
11	LINGKUNGAN HIDUP							
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	72,69%	72,79%	68,29%	68,74%	67,56%	69,25%	Belum Tercapai
11.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di WilayahKab/Kota	93,21%	95%	71,8	57,19%	44,21%	60%	Belum Tercapai
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	77%	85%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
12.1	Perekaman KTP Elektronik	89,30%	97,06%	90,62%	96,91%	99,15%	98%	Melampaui
12.2	Persentase anak usia 0-17tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	-	-	8,28%	26,91%	50,72%	30%	Melampaui
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	87,58%	92,53%	95,84%	96,74%	97,88%	98%	Belum Tercapai
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	-	16,28%	72,09%	100%	73%	Melampaui
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
13.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	12%	39%	56%	56%	10%	60%	Belum Tercapai
13.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	4%	2%	5%	0%	5%	Belum Tercapai
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
14.1	TFR (Angka KelahiranTotal)	2,70	2,68	2,65	2,64	2,61%	2,11	Melamp aui
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,32%	64,56%	64,72%	65,02%	68,05%	93%	Belum Tercapai



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	23,34%	15,47%	11,51%	11,48%	10,76%	11,12%	Belum Tercapai
15	PERHUBUNGAN							
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,3	Melampaui
15.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,44	0,44	0,44	0,44	0,41	0,44	Tercapai
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	100%	15,38%	15,38%	43,75%	20%	Melampaui
16.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86,65%	80,74%	81,15%	90,97%	98,73%	92%	Melampaui
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,13%	14,05%	13,48%	13,10%	19,36%	15%	Melamp aui
17.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0,9%	1,9%	2,3%	8,94%	13,96%	10%	Melampaui
18	PENANAMAN MODAL							
18.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	30,01	12,25	-11,03	1,95%	5,22%	4,76%	Melamp aui
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,10%	0,16%	0,21%	0,52%	15,66%	5,9	Melampaui

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,45%	0,69%	0,83%	2,39%	15,80%	80%	Belum Tercapai
19.3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	38	146	4	TidakAda	2	5	Belum Tercapai
20	STATISTIK							
20.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
21	PERSANDIAN							
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	-	-	-	100%	25	Melampaui
22	KEBUDAYAAN							
22.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%	100	100%	Tercapai
23	PERPUSTAKAAN							
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Tidakada	Tidakada	Tidakada	Tidakada	42,06%	71,20	Belum Tercapai
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	35,79%	34,63%	38,44	30,26%	26,96%	32%	Belum Tercapai
24	KEARSIPAN							
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	58,5%	66,25%	75%	75%	75,18%	77%	Belum Tercapai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	13,33%	15%	33,33%	33,33%	66,67%	33,60%	Melampaui
URUSAN PILIHAN								
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
25.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data:one dataKKP)	58.511,39Ton	65.552,62 Ton	69.475,78 Ton	77.259,41 Ton	80.516,58 ton	80.513,93 Ton	Melampaui
26	PARIWISATA							
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	22,73%	11,11%	16,67%	-100%	11,76%	15,30%	Belum Tercapai
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang keKabupaten/Kota	32,96%	24,36%	13,94%	-88,01%	82,52%	3,22%	Melamp aui
26.3	Tingkat Hunian Akomodasi	9,72%	11,05%	13,15%	12,24%	12,89%	11,25%	Melamp aui
26.4	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,63%	1,66%	1,68%	1,55%	1,56%	1,69%	Belum Tercapai
26.5	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	2,07%	2,12%	2,28%	1,72%	1,56%	1,7%	Belum Tercapai
27	PERTANIAN							
27.1	Produktivitas pertanian per hektar pertahun	6,10 Ton/ha	6,19 Ton/ha	6Ton/ha	5,9Ton/Ha	6,08 ton/ha	6,22Ton/ha	Belum Tercapai
27.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-	-	14,43	9,66%	8,99	7,25%	Melamp aui
28	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

28.1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten /Kota	0	0	0	0	0	100	Belum Tercapai
29	PERDAGANGAN							
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUPToko Swalayan)	100%	100%	100%	92,31%	100%	100%	Tercapai
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	0	0	40,54%	40,34%	44,84%	50%	Belum Tercapai
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandatera sah yang berlaku	19,38%	26,89%	25,55%	63,17%	54,51%	73,1%	Belum Tercapai
30	PERINDUSTRIAN							
30.1	Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	395%	3,03%	-28%	4,11%	567%	4,5%	Melampaui
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	-	-	39,20%	428,64%	45%	Melampaui
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	32,46%	25,06%	15,28%	13,67%	23,95%	50%	Belum Tercapai
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0	0	Tercapai
30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0	0	Tercapai
30.6	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	0	0	0	0	95%	50	Melampaui
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN							
31.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru danTenaga Kesehatan	16,43%	17,53%	19,19%	18,63%	17,16	18,65%	Belum Tercapai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

31.2	Rasio PAD	9,74%	10,19%	10,26%	9,99%	10,24	10,20%	Melampaui
31.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level3	Level3	Level3	Level3	Level3	Level3	Tercapai
31.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level3	Level3	Level3	Level3	Level3	Level3	Tercapai
31.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	72,26%	65,16%	79,61%	81,94%	70,64	82%	Belum Tercapai
31.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
32	PENGADAAN							
32.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0	0	Tercapai
32.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	0	6,38	6,69	10,60%	8,66%	0%	Melampaui
32.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	19,18%	42,92%	27,07%	34,82%	52,63%	31,7%	Melampaui
33	KEPEGAWAIAN							
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	202,24%	227,13%	247,48%	266,67%	293,38%	289,81%	Melampaui
33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,88%	61,54%	60,14%	61,32%	27,92%	61,32%	Belum Tercapai
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,35%	12,30%	11,13%	11,74%	29,37%	7,88%	Melampaui
34	MANAJEMEN KEUANGAN							
34.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	88,93%	98,90%	93,51%	93,71%	-5,87%	-6,16%	Melamp aui
34.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	8,07%	3,70%	1,54%	4,23%	-4,17	5%	Belum Tercapai
34.3	Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	1. Apakah ada daftar asset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
34.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	10,66%	6,01%	6,26%	5,93%	3,63	6,5%	Belum Tercapai
35	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
35.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	-	-	103,75%	102,42%	106,23	100%	Melampaui
35.2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	25%	25%	25%	25%	58,33	50%	Melampaui
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Persentase Pengeluaran konsumsi Pangan perkapita	55,77	57,72		51,41	56,24	51	Melampaui
2	Nilai tukar petani	111,84	110,12	106,91	105,13	109,79	106	Melampaui
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	44,23	42,28		48,59	43,76	49	Melampaui
4	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten (%)	76,59	79,76	81,58	72,96	74,72	78,6	Belum Tercapai
5	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	72,69%	72,79%	68,29%	68,74%	67,56	69,25%	Belum Tercapai
6	Indeks Resiko Bencana	-	-	179,20	197,20	169,57	190	Belum Tercapai
7	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	34,98	31,92	71,45	85,90	80,61	88	Belum Tercapai
8	Indeks Perkembangan Wilayah	56	58	59	78	82	80	Melampaui
9	Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang (%)	48,50	46,90	65,74	68,32	73,25	40	Melampaui





**2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

**2.2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD**

Pemerintah Kabupaten Pinrang melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

- 1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- 2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- 3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**A. Konsistensi Program dan Kegiatan**

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD serta konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD.

Tabel 2.197

Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
4	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
5	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	12	7	7	7	7	7	7	7	5	-	-	5
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
12	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN	13	10	10	10	10	10	10	10	3	-	-	3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
	LINGKUNGAN HIDUP												
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	6	5	5	5	5	5	5	5	1	-	-	1
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
20	DINAS PERIKANAN	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
22	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	7	6	6	6	6	6	6	6	1	-	-	1
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	7	5	5	5	5	5	5	5	2	-	-	2
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-
25	SEKRETARIAT DAERAH	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
26	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	5	4	4	4	4	4	4	4	1	-	-	1
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
30	INSPEKTORAT	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
32	KECAMATAN PALETEANG	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
33	KECAMATAN TIROANG	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
35	KECAMATAN SUPPA	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
37	KECAMATAN LANRISANG	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
38	KECAMATAN PATAMPANUA	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
39	KECAMATAN DUAMPANUA	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
40	KECAMATAN BATULAPPA	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
41	KECAMATAN CEMPA	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
42	KECAMATAN LEMBANG	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
JUMLAH		207	194	194	194	194	194	194	194	11	-	-	11

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

**1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD**

- a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 207 program, sedangkan jumlah program dalam RKPD Tahun 2021 adalah 194 program. Dari 194 program dalam RKPD tersebut, 194 merupakan program RPJMD. Dengan demikian terdapat 13 program merupakan program yang tidak sesuai antara RPJMD dan RKPD. Program yang tidak sesuai tersebut merupakan program RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD Konsistensi antara RPJMD dan RKPD tersebut

**2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD**

- a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 194 program, dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 194 program. Dari sejumlah program dalam RKPD dan Renja-PD tersebut, 194 program diantaranya adalah program yang sama-sama ada dalam kedua dokumen.

**3. Kesesuaian program RKPD dan APBD**

- a. Jumlah program dalam RKPD adalah 194 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 194 program. Dari sejumlah program dalam RKPD dan APBD tersebut, terdapat 194 program yang sesuai antara kedua dokumen. Dengan demikian, tidak terdapat program yang tidak sesuai antara kedua dokumen antara RKPD dan APBD.

**4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD**

- a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 207 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 194 program. Dengan demikian terdapat 13 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen.

Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD, Konsistensi antara RPJMD dan APBD tersebut

**B. Konsistensi Kerangka Pendanaan**

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. Kerangka pendanaan dalam RPJMD dan RKPD serta anggaran dalam APBD untuk tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 2.198 berikut.

**Tabel 2.198**  
**Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021**

No	Uraian	RPJMD*	RKPD**	APBD***
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Daerah	1.293.122.546.796,00	1.285.896.726.119,00	1.301.935.030.431,00
2	Belanja Daerah	1.448.122.546.796,00	1.371.807.109.621,00	1.374.460.808.334,00

Sumber:  
\*) Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD 2019-2024  
\*\*) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan RKPD Tahun 2021  
\*\*\*) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.198 di atas, dapat dijelaskan kondisi perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

- a. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD lebih kecil dari RPJMD.
- b. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD dan RPJMD lebih kecil dari jumlah Pendapatan Daerah dalam APBD.
- c. Adapun Belanja Daearah dalam RKPD dan APBD lebih kecil dari Jumlah Belanja Daerah dalam RPJMD.

Penjabaran pendanaan dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel 2.199 berikut.





Tabel 2. 199

Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD

No Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD Rp	RKPD Rp	% RPJMD	APBD Rp	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) - (3)	(7) = (5) - (4)	(8) = (5) - (3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	397,184,636,931.00	387,377,597,707	102.53	388,821,503,397.00	102.15	-9,807,039,224.00	1,443,905,690.00	-8,363,133,534.00
2	Dinas Kesehatan	157,795,869,213.00	169,395,192,686	93.15	179,881,620,490.00	87.72	11,599,323,473.00	10,486,427,804.00	22,085,751,277.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang	103,542,461,907.00	108,168,532,256	95.72	107,983,952,429.00	95.89	4,626,070,349.00	-184,579,827.00	4,441,490,522.00
4	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi	39,030,507,127.00	32,595,172,665	119.74	33,604,653,443.00	116.15	-6,435,334,462.00	1,009,480,778.00	-5,425,853,684.00
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	186,407,362,607.00	112,141,455,274	166.23	112,115,291,379.00	166.26	-74,265,907,333.00	-26,163,895.00	-74,292,071,228.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12,529,939,106.00	11,729,305,789	106.83	11,718,979,894.00	106.92	-800,633,317.00	-10,325,895.00	-810,959,212.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,996,894,566.00	2,028,016,796	98.47	2,026,370,723.00	98.55	31,122,230.00	-1,646,073.00	29,476,157.00
8	Dinas Sosial	4,348,937,400.00	4,465,927,533	97.38	4,426,844,333.00	98.24	116,990,133.00	-39,083,200.00	77,906,933.00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4,865,800,360.00	4,994,430,201	97.42	4,988,889,365.00	97.53	128,629,841.00	-5,540,836.00	123,089,005.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,411,300,785.00	10,055,496,752	113.48	10,495,998,481.00	108.72	-1,355,804,033.00	440,501,729.00	-915,302,304.00
11	Dinas Ketahanan Pangan	5,114,502,031.00	5,148,122,944	99.35	5,131,503,494.00	99.67	33,620,913.00	-16,619,450.00	17,001,463.00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	16,616,846,510.00	19,566,906,837	84.92	19,551,668,087.00	84.99	2,950,060,327.00	-15,238,750.00	2,934,821,577.00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,665,743,361.00	5,789,697,091	97.86	5,785,319,712.00	97.93	123,953,730.00	-4,377,379.00	119,576,351.00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	77,397,268,677.00	77,709,824,943	99.60	77,705,840,926.00	99.60	312,556,266.00	-3,984,017.00	308,572,249.00
15	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	9,185,903,941.00	8,984,002,882	102.25	8,957,059,770.00	102.55	-201,901,059.00	-26,943,112.00	-228,844,171.00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	9,555,774,878.00	10,089,111,446	94.71	10,109,112,450.00	94.53	533,336,568.00	20,001,004.00	553,337,572.00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3,622,264,572.00	3,873,197,803	93.52	3,886,281,901.00	93.21	250,933,231.00	13,084,098.00	264,017,329.00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,258,539,807.00	5,520,848,991	95.25	5,516,365,726.00	95.33	262,309,184.00	-4,483,265.00	257,825,919.00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4,994,820,552.00	5,177,633,179	96.47	5,217,488,360.00	95.73	182,812,627.00	39,855,181.00	222,667,808.00
20	Dinas Perikanan	12,678,330,466.00	11,661,606,086	108.72	11,917,627,465.00	106.38	-1,016,724,380.00	256,021,379.00	-760,703,001.00
21	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	6,717,738,127.00	6,853,078,608	98.03	6,827,114,146.00	98.40	135,340,481.00	-25,964,462.00	109,376,019.00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	53,484,965,457.00	47,973,679,044	111.49	49,514,081,341.00	108.02	-5,511,286,413.00	1,540,402,297.00	-3,970,884,116.00
23	Dinas Peternakan dan Perkebunan	8,719,874,000.00	8,769,874,000	99.43	8,690,753,496.00	100.34	50,000,000.00	-79,120,504.00	-29,120,504.00
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	7,652,832,064.00	7,570,012,501	101.09	7,527,645,776.00	101.66	-82,819,563.00	-42,366,725.00	-125,186,288.00
25	Sekretariat Daerah	51,902,851,608.00	54,493,151,206	95.25	53,451,436,901.00	97.10	2,590,299,598.00	-1,041,714,305.00	1,548,585,293.00
26	Sekretariat DPRD	40,893,679,945.00	40,774,435,612	100.29	36,559,621,043.00	111.85	-119,244,333.00	-4,214,814,569.00	-4,334,058,902.00
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10,043,030,394.00	9,817,617,584	102.30	9,787,405,855.00	102.61	-225,412,810.00	-30,211,729.00	-255,624,539.00
28	Badan Pengeloan Keuangan dan Pendapatan Daerah	117,623,094,820.00	117,245,728,048	100.32	110,001,709,149.00	106.93	-377,366,772.00	-7,244,018,899.00	-7,621,385,671.00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,634,072,828.00	8,799,009,831	98.13	8,793,256,291.00	98.19	164,937,003.00	-5,753,540.00	159,183,463.00
30	Inspektorat	11,389,873,862.00	11,726,045,232	97.13	11,751,267,788.00	96.92	336,171,370.00	25,222,556.00	361,393,926.00
31	Kecamatan Watang Sawitto	9,049,156,788.00	9,228,028,771	98.06	9,219,233,203.00	98.16	178,871,983.00	-8,795,568.00	170,076,415.00
32	Kecamatan Paleteang	6,983,870,822.00	6,485,129,653	107.69	6,864,648,125.00	101.74	-498,741,169.00	379,518,472.00	-119,222,697.00
33	Kecamatan Tiroang	5,898,679,322.00	6,074,512,314	97.11	6,144,848,126.00	95.99	175,832,992.00	70,335,812.00	246,168,804.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

34	Kecamatan Mattiro Bulu	3,934,637,378.00	3,902,929,126	100.81	3,898,723,336.00	100.92	-31,708,252.00	-4,205,790.00	-35,914,042.00
35	Kecamatan Suppa	3,514,575,237.00	3,567,927,485	98.50	3,561,863,397.00	98.67	53,352,248.00	-6,064,088.00	47,288,160.00
36	Kecamatan Mattiro Sompe	3,785,000,984.00	3,276,099,245	115.53	3,273,122,342.00	115.64	-508,901,739.00	-2,976,903.00	-511,878,642.00
37	Kecamatan Lanrisang	2,833,215,194.00	2,781,179,731	101.87	2,778,382,431.00	101.97	-52,035,463.00	-2,797,300.00	-54,832,763.00
38	Kecamatan Patampanua	5,727,006,508.00	5,651,569,252	101.33	5,646,075,579.00	101.43	-75,437,256.00	-5,493,673.00	-80,930,929.00
39	Kecamatan Duampanua	5,796,764,241.00	5,803,941,414	99.88	5,798,225,136.00	99.97	7,177,173.00	-5,716,278.00	1,460,895.00
40	Kecamatan Batulappa	2,754,290,129.00	2,384,031,806	115.53	2,382,816,961.00	115.59	-370,258,323.00	-1,214,845.00	-371,473,168.00
41	Kecamatan Cempa	3,227,566,008.00	3,128,009,274	103.18	3,124,724,671.00	103.29	-99,556,734.00	-3,284,603.00	-102,841,337.00
42	Kecamatan Lembang	4,001,260,269.00	4,101,413,023	97.56	4,097,111,218.00	97.66	100,152,754.00	-4,301,805.00	95,850,949.00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,350,806,014.00	4,927,627,000	88.29	4,924,370,198.00	88.35	576,820,986.00	-3,256,802.00	573,564,184.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,448,122,546,796.00</b>	<b>1,371,807,109,621.00</b>	<b>105.56</b>	<b>1,374,460,808,334.00</b>	<b>105.36</b>	<b>-76,315,437,175.00</b>	<b>2,653,698,713.00</b>	<b>-73,661,738,462.00</b>

**Keterangan Tabel:**

- Kolom (1) memuat nomor urut.  
Kolom (2) memuat perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.  
Kolom (3) memuat jumlah kerangka pendanaan pada setiap perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 01 Tahun 2021.  
Kolom (4) memuat jumlah pagu indikatif pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Perubahan dan persentasenya dibanding dengan kerangka pendanaan dalam Perubahan RPJMD.  
Kolom (5) memuat jumlah pagu anggaran pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perda APBD Perubahan dan persentasenya dibanding dengan kerangka pendanaan dalam RPJMD.  
Kolom (6) memuat jumlah selisih pagu indikatif RKPD Perubahan dengan kerangka pendanaan Perubahan RPJMD.  
Kolom (7) memuat jumlah selisih pagu APBD Perubahan dengan pagu indikatif RKPD Perubahan.  
Kolom (8) memuat jumlah selisih pagu APBD Perubahan dan kerangka pendanaan Perubahan RPJMD.



RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. RKPD terhadap RPJMD

- a. Jumlah pagu indikatif RKPD lebih kecil dibanding kerangka pendanaan RPJMD (94,73%) dengan total selisih Rp. 76.315.437.175,-( Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah )
- b. Sejumlah 43 perangkat daerah tidak memiliki angka yang sama antara RKPD dan RPJMD, 19 perangkat daerah memperoleh pagu indikatif RKPD yang lebih kecil dari kerangka pendanaan RPJMD, sedangkan sisanya yaitu 24 perangkat daerah memperoleh pagu indikatif RKPD yang lebih besar dari kerangka pendanaan RPJMD.
- c. Penambahan pagu paling besar jumlahnya adalah pada Dinas Kesehatan yaitu sejumlah Rp. 11.599.323.473,- ( Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah ).
- d. Pengurangan pagu paling besar adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu sejumlah Rp. 76.265.907.333,- ( Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

#### 2. APBD terhadap RKPD

- a. Jumlah pagu APBD lebih besar dari pagu RKPD (100,19%), dengan total selisih Rp. 2.653.698.713,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).
- b. Sejumlah 43 perangkat daerah tidak memiliki angka yang sama antara APBD dan RKPD, 37 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dari pagu indikatif RKPD dan 6 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih besar dari pagu indikatif RKPD

- c. Penambahan pagu Indikatif antara APBD dengan RKPD paling besar jumlahnya adalah pada Dinas Kesehatan yaitu sejumlah Rp. 10.486.427.804,- ( Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah).
- d. Sedangkan Pengurangan pagu indikatif APBD dengan RKPD yang paling besar adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu sejumlah Rp 7.244.018.899,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

3. APBD terhadap RPJMD

- a. Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding kerangka pendanaan RPJMD (94,91%), dengan total selisih 73.661.738.462,- ( Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- b. Sejumlah 43 perangkat daerah tidak memiliki angka yang sama antara APBD dan RPJMD, 22 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih besar dari pagu indikatif RPJMD dan 21 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dari pagu indikatif RPJMD
- c. Pengurangan pagu dalam APBD terbesar adalah pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu sejumlah Rp. 74.292.071.228,- ( Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- d. Penambahan pagu dalam APBD yang paling besar adalah pada Dinas Kesehatan yaitu sejumlah Rp. 22.085.751.277,- ( Dua Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah ).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjabaran RPJMD sebagaimana yang diuraikan pada Bab ini, dapat diidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka perencanaan dan penganggaran yang lebih baik di masa mendatang. Diharapkan, dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang baik, perhatian dan proporsi anggaran terhadap bidang urusan dapat lebih proporsional.

### 2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2021

RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Periode 2019-2024. Oleh karena itu, belum terdapat hasil pelaksanaan RPJMD s/d tahun lalu yang akan dianalisis pencapaiannya. Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, sebelum menyajikan capaian RKPD, perlu dikemukakan bagaimana komposisi program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD (yang disebut program prioritas) dan program perangkat daerah (yang disebut program strategis) serta program rutin yang menunjang pencapaian sasaran tersebut

### 2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian Kinerja RKPD

Faktor pendorong dan faktor penghambat diisi oleh setiap SKPD pada baris yang telah disediakan pada format evaluasi hasil Renja SKPD. Baris faktor pendorong diisi dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang mendorong tercapainya suatu target maupun berhasilnya pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sedangkan baris faktor penghambat diisi dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas maupun pelaksanaan kegiatan pada umumnya.

Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

1. Lebih dini diketahui hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan penyempurnaan.
2. Serapan anggaran dapat dioptimalkan untuk menjadikan APBD sebagai penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran.
4. Perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

#### **A. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dihimpun dari seluruh SKPD sesuai dengan yang disampaikan adalah sebagai berikut:



1. Penambahan sarana fasilitas pelayanan masyarakat.
2. Koordinasi SKPD yang baik dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
3. Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerjadilapangan.
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telahditetapkan.
5. Sudah adanya pedoman/dokumen StandarPelayanan/SOP.
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayananprima.
7. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan schedule dan tepat waktu serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulannya, baik pada pelaksanaan rapat- rapat DPRD Kabupaten Pinrang maupun penyelesaian Raperda serta kegiatan kedewanan lainnya termasuk kegiatanpendukung.
8. Anggaran yang disahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebihcepat.
9. Koordinasi yang baik antara instansi dalam menunjang pelaksanaan tugas danfungsi.
10. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/kegiatantersebut.
11. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
12. Adanya regulasi yang sebagai dasar pelaksanaanprogram/kegiatan.

#### **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun2021**

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja SKPD antara lain sebagai berikut:

1. Refocusing Anggaran yang menyebabkan terget pencapaian sulit untuk di raih.
2. Minimnya Fasilitas Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan pada Sektor Pertanian
3. Adanya Pandemi Covid 19 yang berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi proram di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terusmenerus.

2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Badan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan.
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten.
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengankebutuhan.
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf.
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik.
11. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra danRPJMD.

### **C. Kebijakan Pelaksanaan RKPD Masa Yang Akan Datang**

Berdasarkan informasi yang disampaikan OPD sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh kesimpulan terkait dengan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD, faktor penghambat pelaksanaan RKPD, dan tindak lanjut yang diperlukan untuk RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:
  - a. Kualitas SDM yang memadai, memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal.
  - b. Ketersediaan anggaran yang memadai.
  - c. Sarana dan prasarana kantor yang baik dan didukung dengan teknologi dan informasi yang memadai dan mendukung kinerja dilapangan.
  - d. Komitmen pimpinan daerah terhadapprogram.
  - e. Program dan kegiatan yang relevan dan terintegrasinya sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/Kegiatantersebut
  - f. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersusun dengan baik, menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulan
  - g. Koordinasi SKPD yangbaikAnggaran yang disahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan
  - h. kegiatan dapat berjalan lebihcepat
  - i. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:

- a. Kualifikasi dan kuantitas SDM yang belum memadai.
- b. Kerjasama lintas program yang belum tercapai.
- c. Terlambatnya pengesahan anggaran SKPD dan revisi anggaran.
- d. Masalah sosial budaya yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan.
- e. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pembangunan secara maksimal.
- f. Belum adanya komitmen yang kuat bagi pelaksana kegiatan terutama yang ada di Bidang Teknis untuk melaksanakan kegiatan berorientasi hasil berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, dan tidak berpedoman pada schedule yang telah dibuat.
- g. Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi setiap triwulan sebagaimana yang diharapkan.

3. Tindak Lanjut:

- a. Dilakukan Evaluasi Renja dan Renstra sesuai ketentuan (setiap triwulan).
- b. Mengevaluasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah.
- c. Target kinerja Renstra / Renja harus bersifat terukur secara kuantitatif, sehingga prosentase capaian kinerja dapat dihitung/ditetapkan

**2.3 Inovasi Daerah**

Inovasi Daerah merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

**MERPATI GO UMK (PendaMpingan pERizinan JemPut dan Antar graTIs, Gerak mOBile Usaha Mikro dan Kecil)**

Salah satu tujuan Kehadiran DPMPTSP, diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan yang akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Khususnya bagi pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) yang diharapkan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam menjalankan usahanya serta mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan untuk pengembangan usaha serta kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan yang berbunga rendah.

Pemberian kepastian usaha dan pemberdayaan bagi pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil), merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan

memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMK harus terencana, dan menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi dengan menciptakan iklim usaha untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta melakukan pendampingan layanan perizinan berusaha untuk pendukung usaha bagi UMK agar bisa kompetitif dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama disabilitas dan sector perdagangan di pasar-pasar tradisional.

Gagasan adanya MERPATI akan melahirkan pelayanan public yang efektif, efisien dan terpercaya. MERPATI membuat pelayanan ada di depan mata, hanya dengan Telepon dan Whatshap unit PTSP langsung menjemput dan mengantar secara gratis sehingga masyarakat akan dilayani dan dibantu untuk dapatkan izin dan pelayanan pemerintah selalu hadir dan dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan MERPATI adalah (1). Pelayanan perizinan berusaha lebih mendekatkan ke IUMK, (2). Masyarakat akan terhindar dari resiko tertular Covid-19, karena MERPATI langsung menjemput dan mengantar izinnya secara gratis, (3). Tumbuhnya kepercayaan para IUMK karena mempunyai legalitas yang sah, (4) Menciptakan Pemerintahan melayani.

MERPATI telah memberikan dampak positif terhadap efektifitas pelayanan public bagi masyarakat yang mengurus keperluan izin yang tinggal di pedesaan atau tempat yang sulit dijangkau:

- a) Mata rantai pelayanan yang birokratis dan berbelit-belit dapat dipangkas, sehingga dalam waktu singkat keperluan izin dapat dilayani.
- b) Kelompok rentan terpapar Covid-19, seperti; orangtua dan ibu-ibu dapat mengurus keperluan izinnya dengan cepat dan mudah.
- c) Masyarakat dapat mulai berusaha serta mengembangkan usahanya (UMKM), karena *bisnis proses* MERPATI yang sangat mudah dan cepat.

Sumber daya manusia yang terlibat pada implementasi MERPATI berasal dari ASN atau staf honorer di DPMPTS. Dimana Mobile langsung datang ke tempat Keramaian seperti pasar rakyat, jemput rumah bagi disabilitas dan event-event.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) dan pembiayaan yang akan menjamin keberlanjutan implementasi MERPATI adalah dengan cara:

- a) Menetapkan inovasi MERPATI sebagai inovasi daerah melalui Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor: 503/422/2021, Tanggal 03 Februari 2021.

- b) Mendorong harmonisasi dan sinergitas dengan instansi/OPD terkait untuk mendukung system pelayanan terintegrasi dengan pelayanan bidang-bidang lainnya dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
- c) Terbangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).
- d) Tumbuh kesadaran (*awareness*) masyarakat untuk mematuhi kewajiban warganegara untuk mengurus izin kegiatan atau usaha.
- e) Meningkatnya minat masyarakat untuk berusaha serta mengembangkan usaha sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

Kondisi setelah adanya Inovasi MERPATI, antara lain:

- 1. Pelayanan sangat terbuka dan transparan, karena informasi, prosedur dan persyaratan perizinan dapat dilayani langsung di tempat usahanya;
- 2. Pelayanan menghilangkan potensi korupsi, karena tidak ada lagi biaya tambahan atau pungutan liar karena mulai pendaftaran sampai terbitnya izin tanpa perantara dengan transparansi biaya;
- 3. Pelayanan menghilangkan potensi tindak pidana, karena verifikasi dokumen dapat dilakukan melalui *Tanda Tangan Elektronik (TTE)*;
- 4. Pelayanan demokratis, karena tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan perizinan karena masyarakat dapat melakukan pendaftaran tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan atau kelompok berkebutuhan khusus (difabel);

## 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 2.4.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang, dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia Belum Optimal.
3. Belum Optimalnya Partisipasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Perempuan Dalam Pembangunan.
4. Produktivitas dan Potensi Unggulan Daerah Masih Belum Optimal.
5. Ketersediaan Layanan Infrastruktur Belum Optimal dan Belum Merata.
6. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal.

Penjelasan lebih lanjut atas permasalahan pokok pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut

#### **1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pengelolaan Pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang prima sehingga menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dari masalah pokok Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, terdapat beberapa masalah dan akar masalah, antara lain:

##### **a. Belum optimalnya pemerintahan yang akuntabel**

Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel adalah perencanaan serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian kinerja guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah maka dapat dilihat dari nilai AKIP. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia diukur dengan mengevaluasi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang diterapkan oleh Kabupaten. Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang evaluasi atas

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019 adalah 61,54 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B masih belum memenuhi target yaitu nilai A, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan program atau kegiatan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Namun demikian bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir maka realisasi kinerja indicator di tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan. Pada indicator di tahun 2019 capaian realisasi 61,54 dengan persentase 76,92% atau berpredikat “Tinggi”.

Di samping itu, belum maksimalnya penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dimana yang aktif bekerja dan yang kurang aktif bekerja menerima hasil yang sama, turut menjadi penyebab rendahnya etos kerja pegawai. Dari sisi akuntabilitas, ukuran kinerja pegawai kurang jelas, baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran. Paradigma bahwa berkinerja adalah kalau sudah menghabiskan uang, sudah melaksanakan kegiatan, sudah menghasilkan produk masih melekat. Hal ini terlihat dari penggunaan indikator “terlaksananya”, masih banyak digunakan sebagai keluaran (output) suatu kegiatan.

**b. Keterbatasan SDM Aparat Pemerintah Kabupaten Terutama Pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa**

Aparatur Pemerintah merupakan subyek utama dalam pembangunan daerah, beberapa kendala yang dihadapi saat ini adalah masih adanya aparat pemerintah, terutama pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang tidak memahami akan tugas pokok dan fungsinya yang secara langsung berdampak pada pelayanan publik. Disamping itu masih terdapat aparatur khususnya yang berada di kecamatan dan kelurahan / desa yang tidak menguasai teknologi informasi, sedangkan kondisi pada era saat ini penguasaan teknologi informasi merupakan hal yang sangat vital bagi aparatur pemerintah.

**Tabel 2.200 Rumusan Permasalahan  
“Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel	Masih panjangnya prosedur birokrasi pada pelayanan publik
	Masih Kurangnya Kesadaran dan Kedisiplinan Aparatur pemerintahan
Keterbatasan SDM Aparat Pemerintah Kabupaten Terutama Pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Masih rendahnya kinerja aparatur pemerintah
	Minimnya penguasaan teknologi informasi



2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal

Secara teoritis Pembangunan mensyaratkan tersedianya Sumber daya Manusiayang berkualitas. Sumber daya manusia ini berperan penting dalam pelaksanaanpembangunan yang mana sebagai subyek pembangunan harus memiliki keahliantertentuguna mencapaitargetpembangunan.

**Tabel 2.201**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**

NO	Wilayah	Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	69,90	70,62	71,12	71,26	71,45
2	Sulawesi Selatan	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24
3	Nasional	70,81	71,38	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2022

Berdasarkan Tabel di atas IPM Kabupaten Pinrang masih berada dibawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional sehingga perlu meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing. Permasalahan kualitas sumber daya manusia yang terbatas memiliki dampak bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumberdaya manusia tersebut. Dari masalah utama kualitas sumber daya manusia yang terbatas, terdapat beberapa permasalahan yang memicu persoalan utama, antara lain:

a. Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan daerah tersebut. Belum optimalnya pelayanan bidang pendidikansangatberpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Permasalahan pelayanan pendidikan kabupaten pinrang menyangkut kualifikasi guru/tenaga pendidik, distribusi guru / tenaga pendidik yang tidak merata bahkan cenderung minim pada beberapa wilayah di kabupaten pinrang seperti yang di kecamatan batulappa, kecamatan lembang dan kecamatan duampanua begitupun halnya dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah tersebut khususnya wilayah terpencil yang berada di kabupaten pinrang.

Oleh karena itu nilai indeks pendidikan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan di tahun 2020 masih berada dibawah dari nilai Indeks Pendidikan Provinsi pada

tahun 2017 yakni 63,34 sehingga perlu dilakukan pembenahan yang berkelanjutan. Akan tetapi dari nilai tersebut terjadi peningkatan nilai indeks pendidikan di Kabupaten Pinrang dari 62,89 di tahun 2019 meningkat menjadi 62,95 di tahun 2020.

**Tabel 2.202**  
**Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Pinrang	7,54	7,84	7,85	7,86	7,87
Sulawesi Selatan	7,95	8,02	8,26	8,38	8,46
Nasional	8,10	8,17	8,34		8,54

Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka ,2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Rata rata lama sekolah Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga mencapai 7,86 pada tahun 2020, yang berarti penduduk Kabupaten Pinrang rata–rata mengenyam jenjang pendidikan selama 7,86 tahun. Meskipun demikian pencapaian tersebut masih berada di bawah rata-rata lama sekolah propinsi sulawesi selatan yang mencapai 8,29 tahun dan rata-rata lama sekolah nasional yang mencapai 8,34 tahun.

**Tabel 2.203**  
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Pinrang	13,19	13,20	13,22	13,32	13,24
Sulawesi Selatan	13,28	13,34	13,36	13,45	
Nasional	12,85	12,91	12,95		

Sumber:BPS Kabupaten Pinrang, 2022

Berdasarkan tabel pembanding diatas, angka harapan lama sekolah cukuptinggi pada lama jenjang pendidikan yang akan ditempuhnya. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pinrang mencapai 13,22 tahun yang mengindikasikan bahwa seseorang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13–14 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari Angka HarapanLama Sekolah Nasional namun masih berada di bawah Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan.

**b. Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Kesehatan**

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang vital dalam pembangunan daerah. Apalagi di masa pandemic seperti saat ini, segala aspek sangatlah berpengaruh terutama di bidang kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan meningkatkan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas serta posyandu, sebaran distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata khususnya pada wilayah terpencil dan meningkatkan kualifikasi tenaga kesehatan. Masalah di bidang pembangunan kesehatan di kabupaten Pinrang masih membutuhkan perhatian terutama mengenai sarana prasarana kelengkapan alat medis yang tersedia pada rumah sakit dan Puskesmas. Di samping itu masih terdapat masyarakat yang bermukim di wilayah pegunungan yang belum secara maksimal mendapat pelayanan kesehatan seperti di kecamatan lembang, kecamatan batulappa dan kecamatan duampanua.

Di Kabupaten Pinrang nilai Indeks Kesehatan pada tahun 2019 berada pada angka 75,98 dan meningkat sebesar 76,32 di tahun 2020. Akan tetapi nilai ini masih berada dibawah dari target sehingga diperlukan perhatian lebih mengingat pelayanan di bidang kesehatan saat ini sangatlah penting.

**Tabel 2.204**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup**  
**Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Pinrang	68,68	68,98	69,39	69,61	69,77
Sulawesi Selatan	70,34	70,08	70,43	70,57	72,65
Nasional	70,81	71,20	71,34		73,55

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2022

Angka Harapan Hidup Kabupaten Pinrang tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2016 Mencapai 68,55 dan tahun 2019 mencapai 69,39. Jika dibandingkan pencapaian propinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,43 dan Nasional sebesar 71,34 maka Kabupaten Pinrang masih cukup tertinggal.

**Tabel 2.205**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Masih Terbatas”**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Pendidikan	KualitasTenaga Pendidik belum Sepenuhnya terkualifikasi baik
	Distribusi guru / tenaga pendidik yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil
	Keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan pada wilayah terpencil
Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Kesehatan	Minimnya sarana prasarana kesehatan terutama pada wilayah terpencil
	Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil
	Belum meratanya pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat

**3. Belum Optimalnya Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan.**

Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Perempuan dalam Pembangunan memegang peranan penting sebagai pilar demokrasiyang mewujudkan masyarakat yang kuat dan mampu memperjuangkan hak – hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Tujuan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Perempuan atau lembaga non pemerintah ada untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Pinrang. Pembentukan lembaga non pemerintah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah merupakan perwujudan dari demokrasi. Akan tetapi Belum optimalnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan didaerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta tersebut sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan didaerah.

**Tabel 2.206**  
**Lembaga Sosial yang ada di Kabupaten Pinrang**

Indikator	2019	2020	2021
Cakupan Lembaga Sosial yang diakomodir dalam pelaksanaan pembangunan Daerah	168	181	248
Presentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	81	73	77

Sumber: Kantor Badan Kesbang,Pol & Linmas, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 terdapat 168 lembaga sosial yang diakomodir oleh pemerintah dengan presentasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif sekitar 81%. Sedangkan di tahun 2020 jumlah lembaga sosial yang diakomodir oleh pemerintah mengalami peningkatan sebesar 181 tetapi tingkat partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif mengalami penurunan sebesar 73%. Begitupun halnya dengan partisipasi aktif perempuan pada kegiatan pembangunan ekonomi yang diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indicator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauhmana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dimana jumlah lembaga sosialnya mengalami peningkatan akan tetapi partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif mengalami penurunan. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam perumusan masalah yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.207**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Peran Serta Lembaga non Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah”**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya peranan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan	Belum Optimalnya Partisipasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Perempuan dalam Pembangunan di Kabupaten Pinrang

Dari beberapa tabel diatas dapat dilihat bahwa akar masalah dari belum optimalnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dan perempuan terhadap pembangunan masih dirasa kurang. Disamping itu rendahnya partisipasi masyarakat membuat lembaga non pemerintah semakin terbatas. Dengan adanya permasalahan ini maka perlu dilakukan pembenahan dan sosialisasi agar lembaga sosial kemasyarakatan dan perempuan bisa lebih aktif lagi dan berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Pinrang.

**4. Produktivitas dan Potensi Unggulan Daerah Belum Optimal.**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 0,44% ditahun 2020 menjadi 5.04% ditahun 2021. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pinrang naik sebesar 4.6% merupakan hal yang sangat

menggembirakan di tengah pandemi covid-19 yang terjadi dua tahun terakhir ini. Begitupun halnya pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami peningkatan dari 2,07% di tahun 2020 menjadi 3,69% di tahun 2021. Dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dari -0,70% di tahun 2020 menjadi 4.65% di tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Selain tiga komponen utama diatas faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai investasi atau modal serta kewirausahaan yang akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang di tahun 2021 sebesar 5,04% masih lebih baik dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021 yaitu sebesar 4,6%. Hal ini tak lepas dari pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang yang paling besar berada pada Sektor Pertanian sebesar 45,22% yang tidak terlalu terdampak pandemi covid-19. Pada urutan kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan komposisi distribusi sebesar 14.42%. Menduduki peringkat ketiga terbesar dalam memberikan komposisi distribusi bagi PDRB Kabupaten Pinrang adalah Konstruksi sebesar 10,78% sedangkan sektor lainnya memberikan andil yang relatif kecil yaitu pada kisaran dibawah 7%.

Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten pinrang membuat tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,19% di tahun 2020 menjadi 4,06% di tahun 2021 dengan presentase penduduk miskin juga mengalami penurunan walaupun tidak signifikan dari 8,86% di tahun 2020 menjadi 8,81% di tahun 2021. Hal ini terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Pengembangan perekonomian lokal daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia merupakan salah satu cara yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama ini memiliki program – program yang memberdayakan masyarakat dalam perekonomian lokal tapi tidak maksimal implementasinya. Dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing maka sarana dan prasarana yang menunjang perputaran ekonomi khususnya UMKM dan industry kreatif di Kabupaten Pinrang perlu ditingkatkan.

Usaha mikro dan usaha kecil yang ada di Kabupaten Pinrang dari tahun 2016 mengalami peningkatan dari 21.161 usaha menjadi 21.958 usaha di tahun 2020. Hal ini tak lepas dari adanya regulasi pemerintah dalam pendelegasian wewenang untuk izin usaha kepada camat agar memudahkan dalam penambahan maupun penguatan akses terhadap BUMN. Walaupun terjadi peningkatan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang tetapi hal ini belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pengangguran terbuka dan presentase penduduk miskin yang cukup meningkat. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi stagnasi dan tidak terjadi penambahan usaha. Stagnasi ini merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19 yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya sektor usaha mikro (UMKM).

Di Kabupaten Pinrang telah banyak dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berwirausaha namun dalam perjalanannya menemukan beberapa kendala diantaranya kurangnya peralatan produksi yang dimiliki oleh masyarakat untuk menunjang dan membuka usaha secara mandiri yang tersebar hampir diseluruh kecamatan di kabupaten pinrang. Pelaksanaan event atau pameran dalam mempromosikan produk UMKM serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang ekonomi kreatif di kabupaten pinrang juga masih sangat terbatas. Sehingga hal seperti ini dinilai perlu untuk dilakukan secara berkala. Begitupun dengan promosi wisata yang ada di kabupaten pinrang seperti yang ada di kecamatan lembang, kecamatan duampanua, kecamatan cempa, kecamatan lanrisang dan kecamatan suppa. Adapun rumusan masalahnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



**Tabel 2.208**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing masih rendah”**

Permasalahan	Akar Masalah
Peningkatan produksi sektor unggulan pertanian, perikanan dan perkebunan belum optimal	Belum efektifnya pemanfaatan potensi sector pertanian, perikanan dan perkebunan
Potensi Pariwisata belum dikelola dengan maksimal	Beberapa Lokasi Pariwisata Bukan Aset Pemerintah Daerah
	Pembinaan yang masih minim terhadap SDM Pariwisata
	Pengelolaan informasi event pariwisata, promosi dan pemasaran produk pariwisata sebagai daya tarik wisata masih kurang
Peranan Koperasi dan UMKM dalam menunjang perekonomian daerah masih rendah	UMKM belum bisa menyerap banyak tenaga kerja
	Belum optimalnya Pembinaan Koperasi Dan UMKM oleh Pemerintah Daerah
	Kurangnya peralatan produksi yang dimiliki masyarakat untuk menunjang usaha
	Masih terbatasnya pelaksanaan event serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang ekonomi kreatif

**2. Penerapan Teknologi Pertanian yang Perlu di Tingkatkan**

Sektor Pertanian masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRBKabupaten Pinrang untuk tahun 2019 dengan komposisi distribusi sebesar 45.03%.PDRB sektor pertanian tahun 2019 menurut harga berlaku sebesar 8.839.08 (juta). Pada tahun 2020 sektor pertanian sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang yang telah dihantam oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi diseluruh Indonesia bahkan mencapai angka negatif untuk beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi karena PDRB sektor pertanian di Kabupaten Pinrang lebih besar dibanding sektor lain maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang diTahun 2020 masih tetap berada di angka positif walaupun terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi ditahun 2019.

Atas dasar inilah maka diharapkan dengan adanya pendidikan, pelatihan danpengembangan pada sektor pertanian diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Pinrang. Dengan adanya pendidikan, pelatihan dan pengembangan di sektor pertanian ini maka diharapkan dapat menciptakan inovasi untuk meningkatkan produksi sehingga kebutuhan akan pangan

dapat terpenuhi dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di kabupaten pinrang sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan empat tahun terakhir ini. Dimulai dari tahun 2017 dengan produktivitas sebesar 6,24% kemudian menurun ditahun 2018 dan 2019 sebesar 6,24%, lalu menurun lagi sebesar 6,07% ditahun 2019 dan terakhir ditahun 2020 juga menurun sebesar 5,57%. Hal ini disebabkan beberapa lahan baru yang belum optimal berproduksi, begitupun dengan pengaruh iklim yang sulit diprediksi seperti curah hujan yang cukup tinggi yang bisa menyebabkan saluran irigasi meluap dan banjir sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi, begitupun halnya dengan musim kemarau banyak areal persawahan yang berada di ujung saluran irigasi air tidak mendapatkan support air sehingga produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya dapat menurun. Atas dasar inilah maka diharapkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan di sektor pertanian dapat terwujud agar pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Pinrang.

**Tabel 2.209**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Belum Tersedianya Fasilitas Pendidikan, pelatihan dan pengembangan**  
**Pada sector pertanian”**

Permasalahan	Akar Masalah
Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan masih rendah	Penggunaan teknologi tepat guna masih Belum optimal
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian
	Optimalisasi pemanfaatan air irigasi perlu dikelola dengan baik sehingga areal persawahan yang terletak diujung saluran bisa tetap mendapatkan support air begitupun halnya dengan pengelolaan saluran irigasi ketika curah hujan tinggi sehingga tidak meluap dan merendam persawahan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi pertanian
Masih rendahnya SDM pertanian	Sarana Pendidikan jurusan pertanian dan Perikanan masih sangat terbatas
	Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan perkebunan yang belum optimal dan tepat sasaran

**5. Ketersediaan Layanan Infrastruktur Belum Optimal dan Merata**

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.961,77 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan dengan wilayah pesisir seluas 1.457,19 km<sup>2</sup> dan garis pantai yang cukup panjang yakni 101 km serta memiliki wilayah pegunungan yang cukup luas membuat potensi sumber daya alam di Kabupaten Pinrang sangat baik untuk dikembangkan. Akan tetapi dengan kondisi wilayah yang sangat luas tersebut dan dengan kondisi topografi yang berbeda serta keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam pula bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan kesenjangan perkembangan wilayah antar kecamatan terutama wilayah Kabupaten Pinrang bagian utara yang memiliki topografi pegunungan dengan ketinggian wilayah berada diantara 2–1.908 mdpl.

Hal ini menjadikan Pinrang bagian utara memerlukan penanganan khusus dalam hal peningkatan aksesibilitas kepermukiman, sarana kesehatan, dan pendidikan karena postensi luas wilayah dan sumber daya alam dipinrang utara ini terbilang cukup besar sehingga perlu perhatian lebih agar aksesibilitas masyarakat dari tempat produksi ketempat pengolahan atau pusat perdagangan pun kefasilitas kesehatan dan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini masalah yang menyebabkan kesenjangan pembangunan pada Kabupaten Pinrang:

**a. Kualitas prasarana dan sarana Infrastruktur transportasi pada wilayah pegunungan.**

Kondisi wilayah dengan topografi pegunungan dan berbukit memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang relative berat, tentu membutuhkan perhatian dan kesungguhan guna mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sarana/prasarana dalam rangka mendukung mobilitas dan minat masyarakat menggerakkan sektor – sektor produktif, pelaksanaan berbagai layanan public secara cepat, tepat, dan lancar, serta distribusi barang dan jasa terutama dari dan ke pelosok pegunungan yang jauh dan terpencil.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 823,64 km di tahun 2019 menjadi 566,38 km di tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya kondisi jalan yang rusak, rusak sedang dan rusak berat serta perubahan standar klasifikasi jalan yang menyebabkan presentase jalan kabupaten kondisi baik menurun drastis. Terjadi peningkatan panjang jalan kondisi mantap di wilayah Pinrang Utara dari 163,82 km di tahun 2018 menjadi 204,54 km di tahun 2020. Akan tetapi peningkatan panjang jalan kondisi mantap ini masih kurang disbanding dengan total keseluruhan jalan yang ada di wilayah Pinrang Utara yaitu 392,70 km dengan persentase porsi panjang jaringan jalan kualifikasi mantap sebesar 52,08% dari total keseluruhan panjang jalan. Dengan kondisi jalan mantap di wilayah Pinrang Utara yang hanya mencapai setengah dari total panjang jalan diharapkan dapat menjadi perhatian lebih agar aksesibilitas masyarakat di daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan perputaran ekonominya dapat berjalan dengan baik. Di Kabupaten Pinrang beberapa ruas jalan mengalami kerusakan yang menyebabkan aksesibilitas dan distribusi pengangkutan barang serta hasil produksi tidak lancar sehingga menimbulkan biaya produksi lebih tinggi salah satunya akses jalan menuju kecamatan batulappa melalui lome – bila dan dusun paleleng – salu baka kondisinya cukup parah dan sangat sulit untuk dilalui. Di kecamatan duampanua seperti di ruas jalan massila – kaliang, desa maroneng, desa massewae dan kelurahan lampa. Di kecamatan lanrisang yaitu ruas kampung baru, jampue dan tosulo juga perlu dilakukan perbaikan. Di kecamatan mattirobulu yaitu jalan poros alitta – makkawaru akses pengangkut kelapa sawit, jalan poros dolangan – bottae akses industri, jalan poros kariango – lawawoi akses pengangkutan pakan ternak dan jalan poros kariango – bottae untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian ke pabrik pengolahan. Begitupun halnya ruas jalan poros kecamatan cempa dan ruas jalan perbatasan kabupaten sidrap dan kabupaten pinrang yang berada di kecamatan tiroang. Kecamatan suppa juga diperlukan perbaikan untuk mendukung optimalisasi sarana wisata pantai lowita dan wisata lainnya yang ada di kecamatan

suppa. Begitupun halnya di beberapa ruas jalan di kecamatan lembang yang masih perlu dilakukan beberapa perbaikan karenadan pemeliharaan jalan agar aksesibilitas dan distribusi barang dapat berjalan dengan baik.

#### **b. Belum Meratanya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik**

Kondisi wilayah Kabupaten Pinrang yang luas dan dengan topografi yang beraneka ragam menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana public yang memadai. Kondisi ini membuat sarana prasarana public di Kabupaten Pinrang belumlah merata, masih terlihat ketimpangan ketersediaan sarana publik antar wilayah kecamatan yang berada sekitaran pusat pemerintahan kabupaten dengan kecamatan yang letaknya berjauhan dengan pusat pemerintahan kabupaten.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk sangatlah bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari rasio dua tahun terakhir yakni pada tahun 2018 rasio rumah sakit persatuan penduduk berada pada angka 0,0010 % dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,01% kemudian menurun sebesar 0,007% di tahun 2020. Hal ini kemudian menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.

Rasio dan jumlah bangunan sekolah dari tahun ke tahun sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah dari 5 tahun terakhir naik sebesar 309,30% ditahun 2016, kemudian naik 380,27% ditahun 2017, lalu ditahun 2018 sebesar 382,12%, di tahun 2019 sebesar 386,00% dan terakhir 396,55% di tahun 2020. Walaupun rasio ketersediaan sekolah angkanya cenderung meningkat dari tahun ketahun, akan tetapi terdapat stagnasi jumlah bangunan sekolah pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 2,728 bangunan dan tidak mengalami penambahan maupun penurunan jumlah bangunan sekolah. Hal ini dapat terjadi karena berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang. Selain itu, permasalahan pendidikan lainnya mencakup ketimpangan jumlah sekolah yang ada dipusat kota kabupaten dengan kecamatan yang berada jauh dari pusat kota kabupaten padahal jumlah penduduk usia sekolah juga banyak berada dikecamatan yang jaraknya jauh dari kota kabupaten. Penyebaran jumlah bangunan sekolah di setiap kecamatan yang masih belum merata membutuhkan perhatian lebih khususnya wilayah yang sebaran fasilitas pendidikannya masih rendah.

Tabel 2.210

Rumusan Permasalahan

Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada Wilayah pegunungan

Permasalahan	Akar Masalah
Kualitas InfrastrukturJalan dan Perhubungan pada wilayah pegunungan Masih Kurang	Kondisi jalan rusak masih tinggi terutama pada wilayah pegunungan hal ini terjadi diantaranya karena tanah longsor akibat curah hujan tinggi
	Minimnya infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan
Belum Meratanya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik	akses dan jaringan jalan yang masih minim di wilayah pegunungan
	Kepadatan penduduk yang tidak merata
	Faktor ekonomi dan kesenjangan pendapatan antar penduduk

6. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal

Menjaga kestabilan ekosistem lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk saat ini karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Di indonesia permasalahan lingkungan hidup paling sering terjadi karena kondisi iklim dan geografis yang berada digaris khatulistiwa dan lempengan bumi sehingga bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan pencemaran lingkungan sangat sering terjadi. Disamping karena faktor alam, kesadaran masyarakat mengenai lingkungan di Indonesia juga sangatlah rendah sehingga banjir, tanah longsor, abrasi, pencemaran lingkungan dan kebakaran hutan sering terjadi bukan hanya karena faktor alam akan tetapi lebih banyak sumbernya datang dari faktor manusianya yang tidak memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya lingkungan untuk kehidupan kita saat ini dan yang akan datang.

Di Kabupaten Pinrang terdapat 5 jumlah ancaman bencana yang biasa terjadi diantaranya angin kencang, kebakaran, banjir, abrasi dan tanah longsor. Kabupaten Pinrang ditahun 2019 terjadi 65 kali bencana di Kabupaten Pinrang dan meningkat ditahun 2020 menjadi 82 kejadian. Adanya peningkatan kerentanan bencana yang terjadi di Kabupaten Pinrang dua tahun terakhir mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan segala elemen di masyarakat maupun program dan kegiatan untuk menghadapi bencana yang dapat terjadi. Dalam hal ini kesiapsiagaan atau mitigasi bencana di Kabupaten Pinrang perlu ditingkatkan mengingat indeks resiko bencana di Kabupaten Pinrang sangat fluktuatif yakni 179,20 di tahun 2019 dan naik menjadi 197,20 di tahun 2020 dan turun lagi menjadi 169,57 di tahun 2021.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana adalah dengan menjaga kestabilan ekosistem lingkungan dan menumbuhkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk keberlangsungan hidup di masa sekarang dan dimasa yang akan datang. Dalam menjaga ekosistem lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang bertindak dengan membuat regulasi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dan telah dilaksanakan dengan memenuhi presentase tersebut yakni 36,84%. Akan tetapi angka tersebut tidak berubah selama dua tahun terakhir ini yaitu tetap sama diposisi 36,84% ditahun 2019 dan ditahun 2020. Tentu untuk mendapatkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan peranan masyarakat agar serta menjaga ekosistem lingkungan demi kebaikan bersama.

**Tabel 2.211**  
**Isu Lingkungan Eksisting**

No	Permasalahan Lingkungan	Lokasi	Fokus Isu Lingkungan	Keterangan
1	Pengelolaan sampah yang belum optimal	Kecamatan Watang Sawitto, Kec.Tiroang, Paleteang Kec. Duampanua	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Masih terbatasnya jumlah TPS di daerah perkotaan, Jumlah petugas kebersihan yang kurang, Kesadaran masyarakat yang masih lemah, lahan untuk TPS tidak ada sehingga memakai bahu jalan
2	Penanganan sampah di Pasar	Kec. Duampanua, Kec. Mattiro Sompe, Kec. Patampanua (pasarpekkabata, bunging, mt.sompe, teppo)	Belum optimalnya pengelolaan sampah	pengelolaan sampah diluar kawasan perkotaan belum tertangani, belum ada TPS di pasar, jumlah petugas
3	Pencemaran Udara	Di desa malimpung	Pencemaran Udara	Karena bau dari TPA
4	Banjir dilingkungan To'e	Kec. Tiroang desa Toe	Banjir	Rusaknya daerah hidrologi (DAS rusak) sungai akibat penebangan pohon, kesadaran masyarakat memelihara/menjaga tanggul masih kurang, kesadaran masyarakat membuang sampah disungai masih kurang, pergerakan tanah yang labil sehingga mengakibatkan sedimentasi pada daerah aliran sungai yang tinggi



5	Kawasan hutan lindung di Batulappa	Desa kasilarau	Alih Fungsi Lahan	Permukiman berada dikawasan hutan sehingga ada konflik pembangunan infrastruktur, Penetrasi dari aktivitas Pembukaan lahan yang bersentuhan dengan kawasan hutan, Izin pinjam pakai dikawasan batu lappa dan izin pinjam pakai dikawasan lembang (pembangunan PLTA) sampai sekarang belum ada,
6	Penebangan pohon	Watang Sawitto Kec. Paleteang	Penebangan Pohon	Pembersihan/ pemotong pohon oleh masyarakat
7	Pencemaran udara disekitar tempat pabrik penggiling padi	Kec. Lanrisang, Kec Mt.bulu, Kec.Cempa	Pencemaran Udara	Hasil penggilingan sekam padi (gaba) yang mencemari udara disekitar pada musim kering, dan menyebabkan gatal-gatal karena banyak lokasi penggiling berada pada pinggir sungai, tidak ada lokasi tertentu untuk tempat penggilingan padi, penggilingan gaba ada dimana-mana dan tidak teratur/terkendali. Perlu ada solusi untuk mengatasi limbah sekam (teknologi dan tata kelola Pemanfaatan sekam)

No	Permasalahan Lingkungan	Lokasi	Fokus Isu Lingkungan	Keterangan
8	Pembangunan gudang di Kawasan perkotaan	Kel. Coro wali Kec. Watangsawito	Pembangunan Gudang	dibangun oleh masyarakat (pengusaha) yang digunakan untuk material bangunan
9	Aksesibilitas ke kawasan wisata yang belum memadai	Pantai Wakka Kec.Cempa Pantai Lowita Kec.Suppa, Waetuoec Kec. Lanrisang Kec. Lembang Kec.Duampanua	Aksesibilitas	sarana dan prasarana pariwisata yang masih minim, perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan dan Jembatan perlu diperbaiki.
10	alih fungsi lahan pangan (pertanian menjadi pemukiman)	Kec. Watang Sawitto	Alih Fungsi Lahan	lahan pangan pertanian hanya dibuatkan luasan/deliniasi tanpa perlu diperdakan dan hanya termuat dalam RTRW
11	alih fungsi lahan tambak jadi sawah, industri	Kec. Suppa, Kec. Matiro Sompaa	Alih Fungsi Lahan	Masyarakat mengalihfungsikan tergantung prospek keuntungan produksi (dikondisikan), debit air untuk mengalir lahan sawah yang kurang karena mengalir sawah yang semakin luas
12	Wilayah Gunung yang bersertifikat	Gunung Paletang Kec. Paletang	Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Fungsi	tanah gunung yang tengah kota disertifikatkan di keruk untuk kepentingan sepihak (masyarakat yang memiliki sertifikat)

**Tabel 2.212**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan”**

Permasalahan	AkarMasalah
Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya masih rendah	Masih Terbatasnya sarana prasarana Kebersihan pada area–area publik
	Kurangnya Sosialisasi ,himbauan dan gotong royong yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk Menjaga kebersihan
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan
Pengelolaan usaha/kegiatan yang kurang memperhatikan kondisi kestabilan ekosistem lingkungan	Minimnya Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah
	Kerusakan daerah Sempadan Sungai
	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi
	Meningkatnya resiko banjir akibat alih fungsi lahan
	Kerusakan lingkungan akibat aktifitas Penambangan tambang galian c

#### **2.4.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

**Tabel 2.213**  
**Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang**

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN
	Urusan Wajib			
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			
	Pendidikan			
1	Tingkat Partisipasi warna negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,83	Kurangnya partisipasi pendidikanPAUD	Program bantuan operasional sekolah yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK
2	Tingkat Pertisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,28	Belum ratanya mutu pendidikan dasar	
3	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92.06	Belum optimalnya pembinaan kesiswaan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

4	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,27	Kurangnya ketersediaan pendidikanpenyetaraan	
	<b>Kesehatan</b>			
1	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,08%	Rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah kamar kelas masih kurang	Perlu peningkatan kelas RS dan peningkatan jumlah tempat tidur
2	Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	- Masih sering terjadi pembebananbiayatambahan Padamasyarakatmiskin	- Peningkatan ketersediaan obat di RS/balai kesehatan masyarakat
				- Membuat jejaring antara RS dengan penyedia layanan daerah
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Masih adanya angka kematian ibu hamil , ibu bersalin dan bayi baru lahir dan masih rendahnya angka harapan hidup secara nasional	Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir
4	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	100		
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Masih adanya balita penderita gizi kurang dan stunting	Pemantauan status gizi, memberikan informasi tentang status gizi secara berkesinambungan diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan Perbaikan gizi masyarakat
7	Persentase anak usia 0-5 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Kurangnya pelayanan pemeliharaan kesehatan usia produktif	- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan khususnya anak usia pendidikan dasar
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		- Pemeriksaan kesehatan dini untuk mengetahui suatu masalah kesehatan bagi orang usia 15-29 Dan 60 tahun
9	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Kurangnya pelayanan kesehatan hipertensi dan DM sesuai standar yang meliputi pemeriksaan dan monitoring	Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya modifikasi gaya hidup difasilitas kesehatan tingkat pertama dan memberika sosialisasi serta monitoring tentang pengaturan diet seimbang
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		Dibangunnya RS jiwa dan menambah tenaga medis dalam melayani kesehatan jiwa sesuai standar
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Tidak adanya RS yang menampung atau melayani Kesehatan jiwa sesuai standar	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	Kurangnya penanganan dan rendahnya tingkat kesadaran orang terduga TBC	Mensosialisasikan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada orang terduga TBC, cara Pengobatan sesuai standar
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Keterbatasan layanan deteksi dini HIV sesuai standar	Penguatan komitmen fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan tes HIV melalui sosialisasi dan pengarahannya upaya pencapaian target tes HIV
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	64,55	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan rawan Banjir	Dukungan anggaran dan kegiatan APBD tingkat Provinsi dan APBN
2	Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	58,29	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan Pantai abrasi, erosi dan akresi	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,08	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan Daerah Irigasi	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	93,05	rendahnya pembangunan baru, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan perpipaanya itu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan	Tingginya peran serta masyarakat dalam menyediakan SPAM bukan jaringan perpipaan yaitu sumur dangkal, sumur pompa, dan bak penampungan air hujan
				Tersedianya kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM Dan Rencana Induk SPAM
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,56	Belum adanya kebijakan perencanaan SPALD yaitu rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan Teknik terinci	Tersusunnya kebijakan perencanaan SPALD yaitu rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci
6	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	100%	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan IMB rehabilitasi/penambahan	tingginya pemenuhan komitmen pelaku usaha / pemilik bangunan dalam pengurusan IMB baru
7	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	65,73%	Kurangnya koordinasi Pemda dengan penanggungjawab b pengelolaan jalan nasional	Jaringan jalan arteri primer atau Jalan nasional dalam kondisi mantap
8	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89,91%	Kurangnya SDM tenaga operator/teknisi/analisis yang Memiliki sertifikat kompetensi	Pelatihan untuk tenaga operator/teknisi/analisis yang Memiliki sertifikat kompetensi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Lemahnya komunikasi dan informasi pekerjaan konstruksidi Daerah yang dilakukan oleh penyedia melalui APBD Provinsi dan APBD	optimalnya pengawasan pekerjaan konstruksi di Daerah
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	Belum tersedianya anggaran bantuan stimulant rumah layak huni untuk korban bencana	Menganggarkan bantuan stimulant rumah layak huni untuk korban bencana
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	0%	Belum optimalnya penanganan rumah layak huni untuk MBR	Penambahan anggaran perumahan yang sudah dilengkapi PSU
12	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%		
13	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	49,67%	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan ruang khususnya permukiman kumuh	SDM mampu mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang khususnya perumahan kumuh
14	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,62%		
	<b>Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	kurangnya pemberdayaan anggota linmas	Meningkatkan efektifitas kemitraan dengan aparat Penegak hukum..
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75,76	Kurangnya tenaga PPNS	Meningkatnya efektifitas kemitraan dengan dinas/instansi dalam lingkup pemkam dalam pelaksanaan penegakan perda
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	363.417 jiwa	Pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana masih kurang	Pemanfaatan tokoh masyarakat dalam peringatan dini
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	407.236 Jiwa		
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	407.236 Jiwa		
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	84,00		
7	Waktu tanggap (Response time) Penanganan kebakaran	84,00	Kurangnya pos pemadam kebakaran dalam pemenuhan wilayah WMK serta personil kebakaran masih memiliki SDM yang terbatas	Sebagian sarana dan prasarana aparatur sudah tersedia

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1	<b>Sosial</b>  Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	100%	Adanya keterbatasan kemampuan anggaran	terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%		Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Tenaga Kerja</b>			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0%	Perlunya kegiatan pengembangan rencana tenaga kerja	Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan dan pendapatan masyarakat. Terutama masyarakat ekonomi lemah
2	Persentase Tenaga kerja bersertifikat Kompetensi	78,26%	Masih banyaknya Tenaga kerja yang ingin mengembangkan keahliannya belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut	-Dukungan birokrasi Lewat Kebijakan anggaran
3	Tingkat Produktivitas Tenagakerja	21626,45		- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

4	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	63,03	Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Mensosialisasikan kepada perusahaan -perusahaan agar menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanis melayani antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	51,82%	Minimnya layanan Informasi tentang tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	Adanya informasi layanan melalui mekanisme
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,19%	Belum optimalnya ARG dalam APBDDP2KBP3A	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui embaga P2TP2A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instans terkait kabupaten	0,12%	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus Kekerasan terhadap anak	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	53,97%	Indeks pemberdayaan gender meningkat namun relative rendah dibandingkan kondisi Ideal sebesar 100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1	<b>Pangan</b>  Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	45,00	Dengan adanya penurunan pada produksi padi maka akan berdampak pada ketersediaan cadangan pangan kabupaten akan berkurang	Dengan adanya teknik budidaya yang tepat guna akan menghasilkan hasil produksi yang maksimal
	<b>Pertanahan</b>			
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	21,25%	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	22,50%	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	21,18%	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
4	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	16,80%	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	21%	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20%	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru
	<b>Lingkungan Hidup</b>			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%		
2	Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota	57,19%	- Keterbatasan sarana dan prasarana	- Terpenuhinya sarana dan prasaranan
			- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan	- Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	Kurangnya anggaran dan tidak adanya kendaraan operasional	- Penganggaran perjalanan dinas yang memadai
				-Adanya kendaraan operasional
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
1	Perekaman KTP elektronik	96,91%	Kurangnya alat cetak KTP. Hal tersebut dikarenakan mahalnya harga alat cetak sehingga 12 kecamatan yang ada di kabupaten belum ada alat cetak KTP dikecamatan tersebut	Belanja alat cetak KTP dapat dianggarkan di APBD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	26,91%	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan	Sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan dan pencacatan sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	26,91%	Luasnya wilayah kabupaten Pinrang dan beberapa pelayanan masih belum dapat selesai di Kecamatan seperti Kartu Keluarga dan Akta, hal tersebut kendala bagi masyarakat untuk menyelesaikan dokumen kependudukannya	Pelayanan Unit, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK)
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	72,09%	Terdapatnya beberapa wilayah pedesaan yang belum dapat terakses oleh jaringan dengan teknologi informasi dan komunikasi ( e-Governance)	Semua proses layanan public dapat diakses oleh seluruh warganegara secara terintegrasi dengan cepat
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1	Persentase pengentasan desa tertinggal	56,00	Minimnya peran pemerintah kabupaten secara langsung dalam mengintervensi kemajuan perkembangan desa	Pemerintah pusat menjadikan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam prioritas nasional kedua dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada kegiatan prioritas keempat yaitu pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan kawasan transmigrasi.
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,00	Belum adanya desa yang masuk dalam kategori desa Mandiri di Kabupaten Pinrang	
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,64	Menurunnya disparitas TFR antar wilayah dan sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi)	sosialisasi yang terus-menerus dari semua stakeholders agar program KB lebih mudah familier di keluarga pasangan usia subur
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,48%	Fenomena unmet need KB bersifat multi dimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses, serta kualitas pelayanan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,02%	Belum semua klinik KB swasta menyediakan alat kontrasepsi KB	Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB diklinik swasta
	<b>Perhubungan</b>			
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3%	Fasilitas pendukung jaringan jalan masih minim dan belum ada terminal terpadu	Tersedianya terminal terpadu
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,44%	Pelanggaran terhadap aturanberlalu lintas	Pengguna jalan sudah tertib dalam aturan berlalu lintas
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	100%	Kecepatan akses internet down stream dan upstream	Meningkatkan kecepatan akses internet
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15,38%	Keterbukaan informasi belum menjadi skala prioritas pada badan publik/OPD	Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan e-government yang menyeluruh Dan terintegrasi
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	90,97%	Kurangnya dukungan OPD terhadap urgensi keterbukaan informasi public secara online	Dukungan dari pimpinan daerah akan keterbukaan informasi publik

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,10	Kurangnya memahami prinsip-prinsip yang benar dalam berkoperasi	Kerjasamayangbaikantarakopera si dengan dinas koperasi,usaha kecil dan menengah untuk mengupayakan program penyelarasan kemitraan
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	8,93	Kelemahan UMKM dalam merespon persyaratan yang diperlukan untuk proses pemupukan modal dari pihak ketiga	Kapitalisasi modal kerja UMK Mtidak bergantung pada pihak ketiga dalam kaitan polarisasi global
	<b>Penanaman Modal</b>			
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	1,95%	Menjaga kepercayaan penanam modal adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pruden (berhati-hati)	Terbentuknya pusat pelayanan publik di Kabupaten serta adanya paket kebijakan investasi (PAKSI) dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi di Daerah
	<b>Kepemudaandan Olahraga</b>			
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	0,52	Masih rendahnya kreatifitas, dan produktifitas kemampuan kewirausahaan dan daya saing pemuda serta kurang aktifnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Idealisme daya kritis, kreatifitas dan semangat yang dimiliki pemuda dapat diarahkan ke hal-hal positif untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	88,10	Kurangnya fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan untuk berperan serta dalam membentuk karakter masyarakat yang Tangguh dan berprestasi	Meningkatnya pemuda pelopordan organisasi atau kelompok kepemudaan
3	Peningkatan Prestasi olahraga	-	Peningkatan prestasi pemudaan olahraga dianggap masih belum optimal	Dilakukan pembinaan dan pelatihan secara terus-menerus serta apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan/tenaga keolahragaan yang berprestasi Perlu ditingkatkan
	<b>Statistik</b>			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Kurangnya tenaga terampil dalam pengelolaan data statistik sektor	Tersedianya SDM tenaga terampil dalam pengelolaan data statistik sektor
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%		
	<b>Persandian</b>			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	0%	Belum terhubung jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua organisasi perangkat daerah terhubung belum mendapatkan bantuan peralatan sandi dari badan cyber dan sandi negara	Tersedianya jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua organisasi perangkat daerah terhubung belum mendapatkan bantuan peralatan sandi dari badan cyber dan sandi negara
	<b>Kebudayaan</b>			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Kurangnya nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek kemajuan budaya	Kegiatan-kegiatan prioritas kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan
	<b>Perpustakaan</b>			
1	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	0%	Belum adanya minat baca masyarakat	Ketersediaan perpustakaan keliling
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71,26%	Kurangnya promosi gemar membaca	
	<b>Kearsipan</b>			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 danPasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan		Kurang tegasnya pengaturan tentang pendirian organisasi kearsipan	Pengaturan tentang pendirian organisasi kearsipan dapat berdiri sendiri dan tidak digabung dengan perpustakaan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	33,33%	Kesadaran pengelolaan arsip yang ada di keseluruhan belum maksimal	Kearsipan utuh dengan adanya keadaran pengelolaan yang maksimal
	<b>UrusanPilihan</b>			
	<b>Kelautandan Perikanan</b>			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data : one data KKP)	77.285.730 kg	Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha yang disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	Tertatanya kawasan perikanan berdasarkan pasal 35 perda nomor 14 tahun 2012 tentang kawasan peruntukan untuk perikanan tangkap, kawasan untuk peruntukan budidaya perikanan, kawasan peruntukan pengolahan perikanan dan kawasan pelabuhan perikanan
	<b>Pariwisata</b>			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	-100	Kurangnya promosi pariwisata yang dilaksanakan baik didalam negeri maupun luar negeri serta kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang kurang mendukung dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan	- Semakin berkembangnya lembaga industry pariwisata dan biro perjalanan serta untuk mempromosikan dan mendatangkan wisatawan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	73,79	Kualitas nilai produk wisata yang ditawarkan kurang kompetitif sehingga belum mampu mengangkat citra pariwisata daerah ketingkat nasional	- terdapatnya keanekaragaman potensi wisata yang bisa dikembangkan baik wisata alam, buatan maupun budaya
3	Tingkat Hunian Akomodasi	12,24	Industri pariwisata yang belum berkembang khususnya dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya	Giatnya SKPD yang menangani pariwisata menyediakan akomodasi dan fasilitas wisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,55	Peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang masih kurang, hal ini ditandai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang masih rendah	Banyaknya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan asli daerah
5	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	1,72%	Regulasi yang ada kurang mendukung untuk menarik retribusi yang terkait usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

	<b>Pertanian</b>			
1	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	5,90	Penyediaan sarana produksis seperti benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T(tepat waktu, jenis, jumlah, tempat dan harga)	Regulasi dalam mendukung pembangunan tanaman pangan, holtikultura
				Dukungan pemerintah pusat dan provinsi
				Komitmen pimpinan dinas dan jajarannya dalam meningkatkan produks ipertanian
				Ketersediaan sarana dan prasarana
				Ketersediaan anggaran pembangunan pertanian
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	9,66%	Terbatasnya tenaga medik dan paramedik	Penyuluhan dan regulasi
	<b>Kehutanan</b>			
	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
1	Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0%	- Belum ada kebijakan daerah tentang pemanfaatan panas bumi didaerah	Komitmen pemerintah daerah untuk rencana penambangan pembangkit listrik tenaga panas Bumi dengan kapasitas 25 Mwe

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

			- Belum adanya komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Khususnya UMKM/IKM
	<b>Perdagangan</b>			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	92,31%	Belum optimalnya pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha setelah memegang izin usaha melalui OSS	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM/IKM
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	40,34%	Belum optimalnya koordinasi dinas dengan instansi terkait dalam penyaluran dan Ketersediaan pupuk bersubsidi	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	63,16%	Belum optimalnya kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan UTTP	Peningkatan standarnisasi dan pengendalian mutu barang /jasa beredar
	<b>Perindustrian</b>			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	2,74%	Data industri yang diserahkan pada saat pengajuan IUI belum sesuai dengan kondisi lapangan	Mengoptimalkan pengawasan pada pelaku usaha atau perusahaan industri dalam pemenuhan komitmen serta Ketentuan dalam IUI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	39,20%	Kurangnya sosialisasi implementasi RPIP kepada kabupaten/Kota	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM/IKM
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	13,68%	Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha atau perusahaan industri dalam pemenuhan komitmen serta ketentuan dalam IUI	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Rendahnya kesadaran pelaku industri atau perusahaan industri dalam melaporkan perusahaannya apabila mengalami perluasan	Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha atau perusahaan industri
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/Kota	0%	Kurangnya pengawasan kepada pelaku usaha atau perusahaan industri khususnya yang melakukan perluasan industri	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	45%	Belum ada database sumber daya industri	Adanya database yang tersedia pada industri secara lengkap dan terkini

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

	Transmigrasi			
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Perencanaan dan Keuangan			
1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	18,63		
2	Rasio PAD	0,75	Kurangnya komitmen beberapa SKPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai arget	Komitmen pimpinan dan semua staff untuk melaksanakan tugas
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah(SPIP)		Proses Pengelolaan keuangan yang dihasilkan belum optimal	
4	Peningkatan Kapabilitas apara pengawasan intern pemerintah(APIP)		Terbatasnya sumber daya baik Secara kualitas maupun kuantitas	Tercukupinya SDM yang memiliki kapabilitas pengawasan internpemerintah
5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	81,94	Masih banyaknya alokasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sangat berpengaruh terhadap belanja Urusan pemerintahan umum	Tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimal)
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	Masih pelanggaran atau kategori belum tertib administrasi	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

	<b>Pengadaan</b>			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%		
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	10,60%		
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	38,13%		
	<b>Kepegawaian</b>			
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	266,67%	Dalam 12 (dua belas) tahun terakhir penerimaan pegawai dengan tingkat pendidikan Menengah/Dasar kebawah hampir tidak ada sedangkan yang pension dari tingkat pendidikan Menengah/Dasar Tiap tahun ada.	Penerimaan pegawai sudah diutamakan pendidikan minimal D.3 dan juga karena ASN sudah rata-arat mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yang didukung dengan adanya penyesuaian ijazah.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

2	Rasio Pegawai Fungsional (%) ( PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,32%	Dalam pengangkatan jabatan dan kepangkatan adalah terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, ketidak jelasan penyelenggaraan diklat fungsional/uji kompetensi, ketiadaan tim penilai angka kredit diwilayah terdekat.	Setiap pejabat fungsional harus menjamin akuntabilitas Jabatan seperti Pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi Staf yang bertugas sebagai Pejabat fungsional umum.
3	Rasio jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi(%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,74%	Kurangnya minat untuk menduduki jabatan fungsional tertentu dikarenakan persyaratan untuk memenuhi atau menduduki jabatan Tertentu sulit untuk dipenuhi	Diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada ASN untuk menduduki jabatan tertentu
<b>Manajemen keuangan</b>				
1	Deviasi realisasibelanja terhadap belanja total dalam APBD	-5,87	Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD lebih kecil disbanding target Belanja pada APBD	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	20,03		
3	Manajemen Aset	ya	Kurang tertibnya SKPD dalam melakukan inventarisasi terhadap barang /assetSKPD	Adanya pendampingan dari para ahli dalam pengelolaan asset/barang daerah
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,98		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

	Transparansi dan Partisipasi Publik			
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kurangnya dukungan OPD terhadap unregnsi keterbukaan informasi publik	Dukungan dari pimpinan daerah akan keterbukaan informasi publik
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25%	Belum optimalnya jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi yang berbasis elektronik	Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (Simda)

## 2.5 Isu Strategis

Isustrategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 2.5.1. Isu Strategis Global

#### 2.5.1.1. Varian Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang menyebar secara global di awal tahun 2020, dimana virus tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan *Pembatasan Sosial Berskala Besar* terhadap suatu wilayah sehingga segala aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan dan perdagangan sebagian besar dilakukan dirumah. Hal ini tentu memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan perekonomian negara. Adanya pandemi Covid – 19 yang telah berlangsung cukup lama membuat pertumbuhan perekonomian di Indonesia terhambat. Semua aspek lini kehidupan pun ikut terpengaruh dan mengalami penurunan terutama di sektor pariwisata, perdagangan, perindustrian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan investasi.

Di Kabupaten Pinrang, pada akhir tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,19 % dibanding tahun 2019 dimana tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,91%. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pinrang, bahwa pandemic Covid 19 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dan banyak tenaga kerja yang mengalami pengurangan jam kerja yang menyebabkan hilangnya pendapatan dan kurangnya pendapatan pencari kerja. Disektor pariwisata , jumlah pengunjung ditempat pariwisata di Kabupaten Pinrang juga mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 sejak pandemi Covid 19. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung ditempat pariwisata yang ada dikabupaten Pinrang sebanyak 61. 528 orang, namun sejak pandemi Covid 19 yang mengharuskan setiap orang untuk mengurangi aktivitas dan stay at home, jumlah pengunjung pariwisata yang pada tahun 2020 menurun drastis,

jumlah pengunjung pariwisata hanya mencapai 7.379 orang pada akhir tahun 2020. Untuk angka kemiskinan Kabupaten Pinrang, Pada tahun 2020 menunjukkan angka 8,86 dan mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang hanya 8,46.

Begitupun halnya yang terjadi di sektor perindustrian dan perdagangan dengan adanya pandemi covid-19 ini permintaan pasar dan daya beli masyarakat cukup menurun sehingga produksipun mengalami penurunan kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pembatasan kapasitas dan jam kerja sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Kegiatan ekspor impor juga ikut terpengaruh dengan adanya pandemi covid 19. Dimana Negara eksportir yang mengurangi permintaan dan menyebabkan ketidakstabilan nilai impor. Pada Februari 2020 penurunan terjadi karena mulai banyak negara yang mengonfirmasi bahwa warga negaranya terinfeksi Covid-19, sehingga kegiatan impor maupun ekspor dibatasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19. Dan hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat.

#### **2.5.1.2. Pasokan Pangan dan Energi**

Saat ini dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada kemungkinan kenaikan harga pangan dan energy yang signifikan. Harga pangan dunia mencapai rekor tertinggi pada Februari 2022 dengan kenaikan tahunan mencapai 20,70 persen. Saat ini harga komoditas energi dan sumber daya mineral, seperti minyak mentah, *crude palm oil* (CPO), dan komoditas mineral seperti nikel dan batu bara sudah melonjak. Harganya diperkirakan akan semakin melambung seiring pecahnya perang Rusia-Ukraina yang akan membuat permintaan dunia tinggi, sementara pasokan berkurang yang akan meningkatkan inflasi termasuk di Indonesia.

Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah harus memastikan stok kebutuhan pangan tercukupi untuk enam bulan ke depan dan menggalakkan pemanfaatan penggunaan sumberdaya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku yang terkait dengan energi, dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor. Data menunjukkan tahun lalu importasi minyak goreng mencapai 93,3 juta dolar AS atau Rp 1,34 triliun (kurs Rp14.408 per dolar AS). Nilai ini naik 38,34persen dibanding tahun sebelumnya. Impor minyak goreng berasal dari lima negara utama yakni Malaysia, Thailand Australia, Spanyol dan Italia. Pada Januari 2022 impor minyak goreng nabati tercatat sebanyak 4,42 juta kg. Jumlah ini naik 4,37 persen dibanding n Januari 2021 sebanyak 4,23 juta kg, setara dengan 8,2 juta dolar AS atau naik 42,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

## 2.5.2 Isu Strategis Nasional

### 2.5.2.1 Isu Revolusi Industri 4.0

Dunia berkembang begitu pesat, saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani. Kabupaten Pinrang berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Pinrang.

Melalui sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

#### 2.5.2.2 Isu Kemudahan Investasi

Pemerintah Pusat mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut: a. Kondisi Global (Eksternal) Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital; b. Kondisi Nasional (Internal) Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019; c. Permasalahan Ekonomi dan Bisnis. Hal ini dituangkan dalam UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

#### 2.5.2.3 Isu Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan.

Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia.

Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pinrang harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

### **2.5.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **2.5.3.1 Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.**

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. Kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.



### 2.5.3.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut Sulawesi Selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

### 2.5.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah setelah dilakukan analisa terhadap berbagai isu – isu strategis, maka yang menjadi isu strategis 5 tahun ke depan (Periode 2019–2024) adalah:

1. Implementasi e-Government Pada Seluruh Perangkat Daerah
2. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Untuk Semua Lapisan Masyarakat Belum Merata
3. Keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan yang Responsif Gender

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif
5. Minimnya Sarana Infrastruktur pada Wilayah Pegunungan dan Perbatasan.
6. Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Resiko Bencana
7. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Terapan Pertanian.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunannya yang signifikan.

Di Kabupaten Pinrang isu strategis diambil dengan memperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Implementasi e-Government Pada Seluruh Perangkat Daerah

Aparatur Pemerintah merupakan subyek utama dalam pembangunan daerah, beberapa kendala yang dihadapi saat ini adalah masih adanya aparat pemerintah, terutama pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang tidak memahami akan tugas pokok dan fungsinya yang secara langsung berdampak pada pelayanan publik. Disamping itu masih terdapat aparatur yang tidak menguasai teknologi informasi, sedangkan kondisi pada era saat ini penguasaan teknologi informasi merupakan hal yang sangat vital bagi aparatur pemerintah

2. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Untuk Semua Lapisan Masyarakat Secara Merata

Permasalahan kualitas sumber daya manusia yang terbatas memiliki dampak bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah utama kualitas sumber daya manusia yang terbatas, terdapat beberapa permasalahan yang memicu persoalan utama, antara lain: peningkatan pelayanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

3. Keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Yang Responsif Gender Peranan Lembaga sosial masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender serta pembentukan karakter masyarakat lembaga non pemerintah memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan

masyarakat yang kuat dan mampu memperjuangkan hak – hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Lembaga non pemerintah bertujuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Pinrang. Pembentukan lembaga non pemerintah baik itu lembaga sosial masyarakat maupun perempuan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif

Pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Di Kabupaten Pinrang Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan signifikan dari 0,46% ditahun 2020 menjadi 5,04% ditahun 2021 sehingga membuat tingkat pengangguran terbuka menurunwalaupun tidak signifikan dari 4,19% di tahun 2020 menjadi 4,06% di tahun 2021 dengan presentase penduduk miskin juga mengalami penurunan walaupun tidak signifikan dari 8,86% di tahun 2020menjadi 8,81% di tahun 2021. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan akan tetapi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinannya tidak menurun secara signifikan sehingga masih perlu dilakukan beberapa strategi.

#### 5. Minimnya Sarana Infrastruktur Pada Wilayah Pegunungan dan Perbatasan.

Kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publikKondisi wilayah yang sangat luas tersebut dan dengan kondisi topografi yang berbeda serta keberagamansumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam pula bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan kesenjangan perkembangan wilayah antar kecamatan terutama wilayah Kabupaten Pinrang bagian utara yang memiliki topografi pegunungan dengan ketinggian wilayah Berada diantara 2–1.908 mdpl. Hal ini menjadikan Pinrang bagian utara memerlukan penanganan khusus dalam hal peningkatan aksesibilitas ke permukiman, sarana kesehatan, dan pendidikan karena potensi luas wilayah dan sumber daya alam di Pinrang Utara ini terbilang cukup besar sehingga perlu perhatian lebih agar aksesibilitas masyarakat dari tempat produksi ke tempat pengolahan atau pusat perdagangan maupun ke fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat berjalan dengan lancar.

#### 6. Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Resiko Bencana.

Mitigasi Bencana dan peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupAdanya peningkatan kerentanan bencana yang terjadi di Kabupaten Pinrang dua tahun terakhir mengharuskan Pemerintah untuk

mempersiapkan segala elemen di masyarakat maupun program dan kegiatan untuk menghadapi bencana yang dapat terjadi. Dalam hal ini kesiapsiagaan atau mitigasi bencana di Kabupaten Pinrang perlu ditingkatkan mengingat indeks resiko bencana di Kabupaten Pinrang relative tinggi yakni 162,5 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 205 di tahun 2020.

#### 7. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Terapan Pertanian

Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk. Adanya pendidikan, pelatihan dan pengembangan pada sektor pertanian diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Pinrang. Dengan adanya pendidikan, pelatihan dan pengembangan di sektor pertanian ini maka diharapkan dapat menciptakan inovasi untuk meningkatkan produksi sehingga kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Tema pembangunan Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan Isu Strategis Kabupaten Pinrang, sehingga tema pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah

**“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia”.**

Berdasarkan tema pembangunan diatas dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan maka prioritas pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Pinrang adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
3. Penguatan Aksesibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang inklusif.
5. Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Terhadap Bencana.

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit atau daya dukung bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah sehingga prioritas pembangunan kabupaten pinrang tahun 2023 meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber daya manusia yang berdaya saing adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu meningkatkan daya saing suatu daerah. Salah satu cara atau strategi dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu : membangun sistem rekrutmen dan seleksi, sistem penempatan, sistem penilaian kinerja, peningkatan kompetensi SDM,, sistem pendidikan dan pelatihan, perubahan budaya kerja, sistem penggajian, dan pengembangan Sistem Informasi SDM. Daya saing ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada.

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik atau e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik sesuai dengan Pepres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Penguatan Aksesibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Penguatan wilayah dan infrastruktur merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan khususnya wilayah yang berada di daerah pegunungan dan perbatasan.

4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang inklusif.

Peningkatan komoditi unggulan daerah dengan memaksimalkan potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya agar produktivitas dan potensi unggulan daerah bisa tercapai sesuai dengan target. Di kabupaten Pinrang potensi unggulan ini terdiri dari beberapa sektor salah satunya di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan perdagangan.

5. Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan. Partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan secara aktif dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Di kabupaten pinrang jumlah lembaga

masyarakat yang ada masih belum sebanding dengan tingkat partisipasi aktif dalam pembangunan sehingga masih perlu lagi dilakukan sosialisasi ataupun gerakan untuk menumbuhkan kesadaran dalam bermasyarakat .

6. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Terhadap Bencana.

Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, dimana sekitar 80 persen dari total bencana yang terjadi di Indonesia bersumber dari perubahan iklim sehingga pembangunan kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan guna mengurangi resiko terhadap bencana yang bisa ditimbulkan akibat perubahan iklim. Salah satunya dengan peningkatan indeks lingkungan hidup serta ruang terbuka hijau.

2.5.5 Kesesuaian Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024, Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) dan Rancangan RPJMN (2020-2024)

Berikut ini disajikan Kesesuaian isu Strategis RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024, Propinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) Dan Rancangan RPJMN (2020-2024) sebagai berikut :

Tabel 2.244  
Kesesuaian Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024, Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) dan Rancangan RPJMN (2020-2024)

ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN 2019-2024	ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI 2018-2023	ISU STRATEGIS RPJMN 2020-2024
1. Implementasi e-Government pada seluruh perangkat daerah	2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi selatan	7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan public
2. Pelayanan Pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat secara merata	1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
3. Keterlibatan lembaga sosial masyarakat dalam pembangunanyang responsif gender	5. Keberadaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas	4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
4. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif	4. Pemerataan pendapatan bagi warga Sulawesi selatan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
5. Minimnya sarana infrastruktur pada wilayah pegunungan dan perbatasan	3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan
6. Potensi kerusakan lingkungan hidup dan potensi bencana	6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan, bencana, dan perubahan iklim
7. Pengembangan teknologi terapan pertanian	7. Revitalisasi paradigma pengelolaan komoditi (petik, olah,jual)	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi & pelayanan dasar

## 2.6 Capaian Indikator Pembangunan

### 2.6.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan dan isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi focus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target dijadikan sebagai *baseline* yang mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Sehingga dengan sendirinya permasalahan dan isu strategis diterjemahkan dari indicator yang belum mencapai target tersebut. Adapun pada periode RPJMD selanjutnya indikator TPB yang tidak mencapai target dapat berbeda sesuai dengan hasil kajian pencapaian TPB, dan menjadi focus pada kesempatan lain. Sementara untuk indicator TPB yang telah mencapai target, belum dilaksanakan dan belum ada data bukan berarti diabaikan, namun tetap diperhatikan dalam pencapaiannya ke depan, dilaksanakan dan diupayakan pemenuhan datanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Pinrang 2019–2024, 17 tujuan dalam TPB /SDG's ditetapkan 11 tujuan yang menjadi fokus perhatian pada RPJMD 2019–2024.

Selain menetapkan isu strategis, berdasarkan hasil kajian capaian TPB di Kabupaten Pinrang, maka ditetapkan juga skala prioritas. Skala prioritas dimaksudkan untuk mengarahkan prioritas pembangunan di Kabupaten Pinrang sehingga mendapatkan perhatian yang lebih dalam hal penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan penganggarnya. Kriteria pada penetapan skala prioritas daerah didasarkan pada pertimbangan besarnya GAP indikator TPB antara capaian dan target, standar pelayanan minimal (SPM) dan keterkaitan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



Tabel 2.214  
Isu dan Sasaran Prioritas Hasil Kajian Pencapaian TPB

TUJUANTPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISUPERIORITAS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk dimanapun	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan	Belum meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada 12 Kecamatan	Belum berakhirnya kemiskinan dalam segala entuk
	Mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dann guncangan ekonomi sosial, lingkungan, dan bencana.	Belum menurunnya indeks risiko bencana pada kawasan perkotaan	
	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, Kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, Termasuk keuangan mikro.	Belum tercapainya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah menjadi 100%.	
		Belum tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak menjadi 100%.	
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangandan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menghilangka segalabentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Masih tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil	Masih terjadinya kasus kelaparan, belum tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta belum meningkatnya pelaksanaan pertanian berkelanjutan
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Belum tersedianya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau untuk semua.	Belum terwujudnya Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mengakhiri epidemic AIDS, uberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Belum menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk.	Belum terjaminnya kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan Seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.		
		Belum tercapainya imunisasi dasar lengkap pada bayi.	
		Belum menurunnya angka kematian bayi per1000 kelahiran hidup.	
	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Belum meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	
		Belum menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi.	
		Belum menurunnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas	
	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari70 per 100.000 kelahiran hidup.	Belum menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Belum tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak menjadi 100%.	Belum terjaminnya Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Belum tercapainya akses terhadap layanan air minum layak menjadi 100%	
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin bahwa semua anak Perempuan dan laki-laki menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang Relevan dan efektif.	Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat menjadi 114,09%.  Belum tercapainya APKSMP/MTs/ sederajat menjadi 106,94%.	Belum terjaminya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta belum meningkatnya Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa permasalahan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang belum mencapai target nasional dikarenakan masih terdapatnya indikator TPB yang belum dicapai. Untuk itu indikator TPB yang belum mencapai target tersebut akan dibuatkan alternatif skenario pencapaian TPB-nya. Hasil perumusan alternatif skenario tersebut akan diikuti dengan rumusan-rumusan kebijakan, rencana dan program yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Adapun 44 indikator TPB yang belum mencapai target tersebut diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.215: CAPAIAN INDIKATOR  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2016-2021

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	2016	Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan SDGs01: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	8,46	8,44	8,79	8,45	8,31	8,81
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	90	91	92	93	95	95
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja	%	85,01	86,29	86,86	79,75	79,75	79,10
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%		100	100	100	100	
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	RT		10.518	9.542	8.900		
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi,serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	82,5	83,7	88,4	89,5	87	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR							
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	99,62	99,66	99,67	99,80	99,00	95,32%
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	94,31	94,55	94,74	95	98,32	98,26%
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Disperindage m	%	92,74	93,80	94,65	95,05	95,79	96,65
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	PM	892	300	0	2	1	0,25
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana..	BPBD	Rupiah	2.907.000.000	5.418.860.000	2.304.000.000	4.504.000.000	1.595.000.000	387.000.000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	KK		20	28	118	79	
<b>Tujuan SDGs02:MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN</b>									
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	0,58	0,8	2,7	6,2	4,8	5,88
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	0
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	14,33	16,99	34,6	10,97	8,72	8,25
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan N	%	14,9	14,7	14,4	9,76	9,6	8,59
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	3,09	3,25	3,05	2,44	2,05	2,71
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	10,9	11,02	9,6	11,86	7,66	0,14
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	58	66,1	66,4	68,03	72,27	74,3
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan	PPH	88,7	89,2	89,3	89,3	89,3	90,6
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian, Bappeda	Ha	44.861	44.861	44.861	44.861	44.861	43.615,93
<b>Tujuan SDGs03: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA</b>									
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu(AKI).	Dinas Kesehatan	Per/100.000	73,75	58,04	59,35	83,43	67,72	54
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	96,48	93,75	95,39	93,10	97,23	100
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	96,48	93,75	95,39	93,10	97,23	100
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup ) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Per/1000	1,47	0,43	0,74	0,27	0,14	0,53
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Per/1000	5,75	5,51	5,19	3,75	3,25	0,56
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Per/1000	1,33	0,43	0,74	0,28	0,27	0
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	0,014	0,011	0,008	0,011	0,010	0,034
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per /100.000	131,1	153,5	159,9	182,2	106,2	194,5
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Per /1000	0,22	0,19	0,16	0,19	0,15	0,17



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan	Kabupaten	1	1	1	1	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Kabupaten	1	1	1	1	1	1
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Dinas Kesehatan	%	9,3	9,1	9,1	9	9	9
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	37,6	37,2	36,9	36,6	36,6	18,7
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18tahun.	Dinas Kesehatan	%	22,2	21,9	21,8	19,8	19,9	0,13
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan	%	0	0	0	1.067	0	0
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	kabupaten	1	1	1	1	1	1
3,7	Pada tahun 2030, menjaminak sesuai versal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas P2KBP3A	%	61,8	64,3	64,6	64,7	65,02	68,05
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas P2KBP3A	%	61,8	64,3	64,6	64,7	65,02	68,05
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas P2KBP3A	%	13,6	14,7	16,7	16,3	18,17	19,09

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%						43
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P2KBP3A	%						2,61
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Jiwa	205	262	292	314	302	310
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN).	Dinas Kesehatan	Jiwa	205.197	262.062	292.422	313.810	301.982	128.743
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	%	0	0	0	0	0	0
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Frame work Conventionon Tobacco Control WHO diseluruh Negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada pendudukumur ≥ 15tahun.	Dinas Kesehatan	%	9,3	9,1	9,1	9	9	8,9
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang theTRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksindiPuskesmas.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya Negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	1,93	1,99	2,25	2	4,67	2,42
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUKSEMUA									
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	98	98	98	98	98	98
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	23,53	13,62	16,1	71,95	88,95	91,92
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	3,51	47,37	5,57	73,68	70,18	73,68
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	109,37	100,14	100,07	110,56	100,04	103.8%
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	100,68	101,93	103,33	105,98	100,06	81.23%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15tahun.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	8,7	8,75	8,8	9,01	9,07	13,24%
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	60,5	64,79	67,45	71,21	73,50	77,85
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anakdalamkondisirentan.								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1)SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%						
	SD = Perempuan /Laki-lakiX100		%	90,6	91,55	92,8	93,05	93,81	95,32
	SMP = Perempuan/Laki-lakiX100		%	94	95	98,87	99	99,78	98,26
	SMA, SMK, SLB = Perempuan/Laki-laki X 100		%	100	101	102,55	103,5	104,65	
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan,inklusif dan efekti fbagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagasiswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar perjenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%						
	SD=304/323X100		%	92	93	93	94	94	96
	SMP=52/58X100		%	87	88	88	89	89	92
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di Negara berkembang, terutama negara kurang berkembang,dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK,SD,SMP yang bersertifikat pendidik.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%		92,56	92,65	50	38,47	
	Persentase Guru PAUD Bersertifikat		%		86,5	86,5	33,4	32,18	23,24%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

	Persentase Guru SD Bersertifikat		%		95,5	95,5	54,7	41,52	55,00%
	Persentase Guru SMP Bersertifikat		%		95,7	95,7	61,6	41,71	64,06%
Tujuan SDGs05: MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P2KBP3A	Program				1	1	1
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DinasP2K BP3A	%				0,03%	0,01	0,01
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DinasP2K BP3A	%				0,03%	0,03	0,03
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DinasP2K BP3A	%				0,02%	0,01	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DinasP2K BP3A	%				83,33%	90	84
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas P2KBP3A	%					0,17	0,15
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas P2KBP3A	%					21,9	20

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%					4,43	43
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas P2KBP3A	%					10	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	Dinas P2KBP3A	%					6,25	30
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas P2KBP3A	%	16,3	15,4	15,5	11,5	11,48	10,76
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas P2KBP3A	%	61,8	64,3	64,6	64,7	65,02	68,05
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	%	52	54	55	56	65	94,07
<b>Tujuan SDGs06: MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA</b>									
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki Akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR							
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR							
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan					108	108	109



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	%	15	20	25	30	40	109
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Parameter Kualitas Air Sungai	65	68,33	70	70	70	0
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu disemua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	PSDA	web	1	1	1	1	1	0
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	PSDA	Sungai	1	1	1	1	1	1
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PSDA	Lembaga	0	0	27	80	170	300
<b>Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA</b>									
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun dinegara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita.	BPS	Persen	6,62	7,08	6,24	5,81	0,44	5,04
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Ribu Rupiah	39.783	43.953	48.288	52.053	52.930	53.412
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektornon-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja	%	37.24	32.22	29.44	27.87	27.87	72,44

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja	%	37.44	35.11	29.84	33.17	33.17	24,14
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) kelayakan keuangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	%	61,51	59,66	65,27	79,57	91,00	92%
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja	Rp/Jam	14.063	15.625	16.549	17.877	19.399	19.399
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja	%	19.37	64.80	55.10	34.00	41.33	58,97
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, Dinas Tenaga Kerja	%	4,85	4,41	2,80	2,91	4,19	4,06
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja	%	08.59	32.39	16.28	23.86	10.87	31,68
<b>Target SDGs08: 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</b>									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	0.83	0.76	-	-	-	-
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	%	-	1,68	1,6	1,68	9,73	1,57

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	-	-	30	35	-	19
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	-	43.423	54.000	61.528	7.379	13.468
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	%	4,23%	4,09%	9,33	26,23	66%	53,19%
<b>Tujuan SDGs 09: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI</b>									
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan focus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	dermaga	4	4	4	4	4	13
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	dermaga	1	1	1	1	1	1
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya dinegara kurang berkembang.								
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur	DisPerinfage m	%	8,25	8,25	2,80	10,17	-1,05	5,55
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industry manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja	%	24.14	32.73	34.24	37.54	37.54	24,23
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet dinegara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	%	52	54	55	56	65	68,02
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	%	52	54	55	56	65	94,07
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	%	45	50	51	65	75	68,02
<b>Tujuan SDGs10: MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTAR NEGARA</b>									
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS (Dinsos)		0,38	0,309	0,359	0,336	0,375	0,367
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS (Dinsos)	%	8,46	8,44	8,79	8,45	8,31	8,81
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD					19	4	2
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dina PMD				35	16	12	10
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	Desa	0	0	0	0	0	0
<b>Tujuan SDGs11: MENJADIKAN Kota DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>									
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak,aman,terjangkau,dan pelayanan dasar,serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Lingkungan Hidup							
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas PUPR							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Dinas PUPR							
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Per 100.000/Orang	892	300	0	2	1	0,25
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	0	0	0	1	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	2.907.000.000	5.418.860.000	2.304.000.000	4.504.000.000	1.595.000.000	387.000.000
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	28.549,14
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<b>Tujuan SDGs 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN</b>									
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	81,026.5m <sup>3</sup>	135,676.33m <sup>3</sup>	863.907kg	27,098.18Ton	7.047,69
<b>Tujuan SDGs 13: MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA</b>									
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Per 100.000/orang	89	892	300	0	2	0,25
<b>Tujuan SDGs 14: MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>									
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	0	1	1	1	1	0
<b>Tujuan SDGs 14: MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>									
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Perikanan	orang	-	1.458	2.432	1.131	896	409
<b>Tujuan SDGs 15: MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI</b>									
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup	dokumen	0	0	0	0	0	0
<b>Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAN AKSES KEADILAN UNTUKS SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN</b>									
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus	DM	DM	DM	DM	DM	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	%	DM	DM	DM	DM	DM	
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah	%	87,05	88,93	93,09	93,51	94,57	94,13
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota).	Ortala	%	18,45	31,65	12,01	5,4	2,46	1,15
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA (Pembangunan)	%	14,65	8,73	16,01	11,33	15,17	44,02
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	BB (nilai 71,54)	CC (nilai 55,4)	CC (nilai 50,58)	CC (nilai 52,44)	Belum terbit	CC (nilai 58,28)
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representative di setiap tingkatan.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan diDewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas P2KBP3A	%				10%	10%	30
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan dilembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas P2KBP3A	%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	30
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil,menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98	97	97	100	99	100
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	85	88	93	96	97	100
16,10	Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	43	43	43	43	43	44
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
Tujuan SDGs 17: MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah	Persentase	0,77	0,73	0,77	0,68	0,75	0,62
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah	Persentase	0,15	0,15	0,14	0,17	0,16	0,16

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang di danai oleh pajak domestik.	Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah	Persentase	7,09	0,01	6,86	9,55	8,94	9,75
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya ditingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo	%	45	50	51	65	75	Belum ada data
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo	%	45	50	51	65	75	Belum ada data
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.*	BPS	Persen	-		100	100	98,92	93,42
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Persen	-	-	90	100	86,67	96,88

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik dinegara berkembang.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS	-	ada	ada	ada	ada	ada	
	jumlah kelahiran			61	347	766	1029	310	
	Jumlah kematian			934	523	1280	1766	635	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistic melalui website.	BPS	Pengunjung	...	8.715	8.404	11.857	12.952	10.941
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)*	BPS	%	-	-	100	100	95,24	100

### 2.6.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diposisikan untuk menjawab isu – isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mencakup Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut.

Salah satu Sasaran Nasional yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Pendidikan yang tertuang dalam rata –rata lama sekolah, Kesehatan yang tertuang dalam Angka Harapan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yaitu Pengurangan Kawasan Kumuh serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Ketersediaan Akses Air Minum.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

7. Pelayanan Kesehatan Balita
8. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
9. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
10. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
12. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
13. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
14. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
15. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
16. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
17. Penyediaan&rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota
18. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
19. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
20. Pelayanan informasi rawan bencana
21. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
22. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
23. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
24. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
25. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti
26. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti
27. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
28. Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap&pasca bencana bagi korban bencana kab/kota

## **1. Bidang Urusan Pendidikan**

### **• Pendidikan Dasar**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya 100%, namun pada tahun 2019 turun menjadi 77,27%, tahun 2020 naik menjadi 92,53% dan tahun 2021 menjadi 96,30%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.216**  
**Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs) Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	100	100	77,27	92,53	96,30

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Pendidikan Kesetaraan**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs) di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya 100% sedangkan pada tahun 2019 menjadi 81,61% dan tahun 2020 naik menjadi 97,27%, akan tetapi pada tahun 2021 turun lagi menjadi 97%. Data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.217**  
**Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs) Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/Mi,SMP/MTs)	100%	100	100	81,61	97,27	97

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Pendidikan Anak Usia Dini**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya meningkat namun pada tahun 2019 menurun menjadi 73,50% dan tahun 2020 74,28% serta mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 95,78%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.218**  
**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	95,60	96,01	73,50	74,28	95,78

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

2. Bidang Urusan Kesehatan

- **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 90,31% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 100% data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.219**  
**Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97	98,14	94	90,31	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 90,73% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.220**  
**Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	95	96,48	93,1	90,73	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 105% melebihi target nasional, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 91,23% dan naik lagi ditahun 2021 menjadi 100%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.221**  
**Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100	106,40	105	91,23	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Pelayanan Kesehatan Balita**

Dalam kurun waktu 2017-2021Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 95,63% dan naik di tahun 2021 menjadi 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.222**  
**Persentase Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94	94,51	93,43	95,63	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang mencapai 100% namun pada tahun 2020 menurun menjadi 73% kemudian naik lagi menjadi 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.223**  
**Persentase Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100	100	100	73	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**

Dalam kurun waktu 2017-2020 Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang mencapai 100%, kecuali pada tahun 2020 mencapai 97% dan naik lagi ditahun 2021 menjadi 100%. Data tersebut dapat dilihat pada table berikut

**Tabel 2.224**  
**Persentase Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100	100	100	97	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 90,36% dan naik ditahun 2021 menjadi 100%,data tersebutdapat dilihatpada table berikut.

**Tabel 2.225**  
**Persentase Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	78%	95,38%	94%	90,36%	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**  
Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 94% dan di tahun 2021 naik menjadi 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.226**  
**Persentase Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara Penderita hipertensi yang Mendapatkan layanan kesehatan	100%	74,40%	92,50%	91%	94%	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**  
Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 83,21% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 100%.

**Tabel 2.227**  
**Persentase Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	0	0	100	83,21	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 96,98% dan pada tahun 2021 sebesar 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.228**  
**Persentase Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,90 %	100%	100%	96,98 %	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 100%, namun menurun menjadi 91,88% pada tahun 2020 dan naik lagi pada tahun 2021 sebesar 100%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.229**  
**Persentase Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	91,88 %	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

• **Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Pinrang pada tahun 2018 sebesar 89,69% dan pada tahun 2021 sebesar 97,76% dan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.230**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	87,40%	89,69%			97,76

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Dalam kurun waktu 2017-20201 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 96,99% kemudian naik pada tahun 2020 menjadi 97,56% dan turun pada tahun 2021 menjadi 96,62%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.231**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestic Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah domestik	100%	82,22%	84%	96,99	97,56	96,62

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

- **Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kabupaten Pinrang belum ada, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.232**  
**Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh Rumah layak huni	100%	-	-	-	-	100%

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Pinrang belum ada, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.233**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah Yang layak huni Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang Layak huni	100%	-	-	-	-	100%

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

5. Trantibunlinmas

• Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada di Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan pada tahun 2021 telah mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.234**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perdadadan perkada	100%	80%	90%	90%	90%	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Dalam kurun waktu 2017-2021Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 90% dan pada tahun 2021 sebesar 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.235**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	85%	90%	90%		100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 85% dan ditahun 2021 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.



**Tabel 2.236**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	85%	85%	85%		100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**  
Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 60%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.237**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	60%	60%	60%	60%	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**  
Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 65%, tahun 2020 sebesar 84% dan pada tahun 2021 sebesar 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.238**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
PersentaseJumlahWarga Negarayang memperolehlayananpenyelamatan dan Evakuasikorbankebakaran	100%	65%	60%	61,39%	84%	100

Sumber: Satpol PP, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

6. Sosial

- **Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti**

Dalam kurun waktu 2017-2021Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2017-2018 belum ada dan pada tahun 2019-2021 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.239**  
**Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial Diluar panti	100%	-	-	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- **Rehabilitasi social dasar anak telantar diluar panti**

Dalam kurun waktu 2017-2021Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2019 belum ada dan pada tahun 2020 dan 2021mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.240**  
**Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah anak telantaryang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100%	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti**

Dalam kurun waktu 2017-2021Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2017-2018 belum ada dan pada tahun 2019-2021 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.241**  
**Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial Diluar panti	100%	-	-	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

• **Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti**

Dalam kurun waktu 2017-2021Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2019 belum ada, namun pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.242**  
**Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti Tahun 2017- 2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial Dasar tuna social diluar panti	100%	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

- **Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota**

Dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebesar 100%, dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.243**  
**Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social Tahun 2017-2021**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial	100%	-	-	-	-	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2022

**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**  
**DAERAH TAHUN 2023**

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perkembangan serta kondisi serta arah kebijakan perekonomian global, nasional dan provinsi secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah tidak terkecuali Kabupaten Pinrang. Perekonomian global sebagai influencer utama dalam pembangunan ekonomi nasional serta perekonomian daerah tidak dapat dihindari pangaruhnya. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dan mengantisipasi perubahan serta perkembangan perekonomian global dengan harapan perekonomian daerah tidak mengalami guncangan menghadapi perubahan yang terjadi secara global maupun nasional.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran serta Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kekuasaan dalam menyusun kebijakan – kebijakan untuk memperlancar interaksi ekonomi antar pelaku ekonomi daerah. Pada Hakekatnya Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan Pemerintah dan Masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan

masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi yang dirumuskan secara berkala dan berkesinambungan dari tahun ke tahun yang disesuaikan dan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten. Untuk tahun 2023 Kabupaten pinrang telah merumuskan dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu – isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten.

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 di tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,65% sedangkan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pinrang berada di posisi 5,04%.

Beberapa skenario telah disusun dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur dikelola melalui system padat karya yang diharapkan dapat berimplikasi secara langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang dapat menstimulus roda perputaran ekonomi.

Berdasarkan sumber yang diambil melalui data capaian indikator ekonomi makro serta pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mempercepat potensi pemulihan ekonomi tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun 2023 yaitu : Pertumbuhan ekonomi 6,42%; PDRB Per Kapita (adhb) Rp. 64,22 Juta; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,06%; Gini Rasio 0,315; Tingkat Kemiskinan 7,37%; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,35;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Pinrang yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, diarahkan pada **“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia”**, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik Berbasis Elektronik
3. Penguatan Aksesibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang inklusif.
5. Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Terhadap Bencana.

### **3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah**

#### **3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah**

Perekonomian Kabupaten Pinrang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Hal ini didasarkan dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai hal tersebut antara lain memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM serta sector industry-industri kecil yang diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang berimplikasi pada peningkatan perputaran uang sehingga mendorong pemulihan ekonomi.

Selaras dengan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2023 yaitu **Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia**. Untuk mencapai tema pembangunan



dimaksud maka Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pinrang akan dipacu melalui :

- 1) Peningkatan Infrastruktur sector Pertanian dan Perikanan sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi;
- 2) Pembangunan Infrastuktur aksesibilitas untuk memperlancar arus distribusi produk unggulan daerah; dan
- 3) Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi untuk memacu perkembangan sector usaha ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian selain pembangunan ekonomi Kabupaten Pinrang kedepan adalah aspek lingkungan. Eksploitasi Sumber Daya Alam secara berlebihan dapat merusak stabilitas dan keseimbangan lingkungan. Selain itu antisipasi terhadap perubahan iklim yang ekstrem dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan kedepan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat ekonomi terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat/pendapatan per kapita.

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2022 dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menjadi indikator pendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Pinrang pada tahun 2023 antara lain : Hasil

Produksi sector pertanian dan perikanan pinrang tetap stabil bahkan pada saat pandemic covid-19, Sektor Usaha berbasis Teknologi dan Informasi mengalami peningkatan, serta pertumbuhan usaha konsumtif seperti bidang kuliner tumbuh pesat dan Iklim Usaha UMKM mulai bergeliat kembali sehingga memacu peningkatan konsumsi rumah tangga serta berlangsungnya proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan kerja dan usaha bidang konstruksi.

### 3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Pandemi COVID-19 yang hingga kini telah merenggut Jutaan nyawa di seluruh dunia menjadi tantangan utama yang menyebabkan pemulihan ekonomi tidak merata, menghambat pertumbuhan ekonomi dunia, kesetaraan, keberlanjutan dan kemakmuran di dalam dan antar negara. Kewaspadaan karena perkembangan varian baru saat ini, dan rendahnya Vaksinasi mengakibatkan tingginya tingkat penularan oleh varian baru, oleh sebab itu semua Negara harus bertindak cepat untuk menanganinya.

Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas system keuangan, hal tersebut terjadi karena pandemic covid 19 membatasi aktivitas masyarakat sehingga daya beli tertekan dan perekonomian terganggu. Tingkat keberhutangan (*leverage*) meningkat

sejak pandemi baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah dan kerentanan likuiditas.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat

telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprakirakan kenaikan *Fed Funds Rate* lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps. Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

#### **3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional**

COVID-19 membuat tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, Pemerintah pun telah berupaya menghentikan penyebaran wabah tersebut di dalam negeri. Salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Daerah pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta yang dimulai sejak Jumat, 10 April 2020. Hingga pertengahan Mei 2020, terdapat empat provinsi dan 12 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB. Proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2023 diperkirakan masih berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Masa pandemic COVID-19 yang belum berakhir, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan ekonomi dan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan masih mempengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi antar subsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu

tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan learning loss dan earnings penalty. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN 2020– 2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 3,69 % (C to C) . Kemudian pada tahun 2022 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,7-6,0 % sedangkan tahun 2023 sebesar 5,3 – 5,9 %. Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat Upper-Middle Income Countries. Sehingga kedepan pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitas investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem Online Single Submission terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin Bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.

Pemerintah pun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2023, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pandemic Covid-19 masih akan mewarnai tahun depan dan proses pengendalian Covid19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity. Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

**3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan**

Perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan II tumbuh signifikan sebesar 7,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang tercatat kontraksi 0,21% (yoy). Perbaikan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang *rebound* seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Sejalan dengan keyakinan dan ekspektasi masyarakat yang terjaga, kinerja investasi juga meningkat seiring prospek permintaan komoditas ekspor yang terjaga serta masih kuatnya permintaan perumahan lokal, khususnya segmen subsidi. Meningkatnya mobilitas dan permintaan masyarakat mendorong kinerja Lapangan Usaha Transportasi, Perdagangan, dan Industri Pengolahan tumbuh tinggi.

Ekonomi Sulawesi Selatan diperkirakan tetap tumbuh positif pada triwulan III 2021 meski relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Salah satu faktor yang memicu perlambatan adalah penerapan PPKM untuk

memutus rantai penyebaran kasus COVID-19 varian Delta. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Pulihnya perekonomian diperkirakan disumbang oleh perbaikan konsumsi dan investasi yang didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat pasca implementasi kebijakan pembatasan aktivitas. Secara sektoral, pertumbuhan terutama disumbang oleh kinerja Lapangan Usaha Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Transportasi yang pulih setelah terkontraksi dalam pada tahun 2020. Di sisi lain, meningkatnya produksi pertanian seiring dengan upaya peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produksi budidaya juga mendukung kinerja pertanian. Adapun penerapan PPKM level 4 diperkirakan menahan pemulihan ekonomi dengan *magnitude* yang terbatas.

Pemulihan konsumsi masyarakat diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dan mendorong peningkatan inflasi. Tingkat inflasi untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, tetapi tetap berada dalam rentang sasaran  $3,0 \pm 1,0\%$  (yoy). Terjaganya inflasi didukung upaya stabilitasi harga oleh TPID dalam koridor 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

#### **3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah**

Kondisi perekonomian Daerah pada tahun 2021 semakin membaik dan menjadi momentum pemulihan. Meski demikian, masih ada beberapa tantangan dan ketidakpastian yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Daerah. Salah satu tantangan Perekonomian Daerah yaitu masih belum berakhirnya masa pandemic Covid – 19 yang mengakibatkan masih terbatasnya ruang gerak dalam melaksanakan aktivitas meskipun sudah tidak terlalu signifikan namun masih mempengaruhi beberapa sector di Kabupaten Pinrang terutama pada sektor – sektor berikut ini : 1) Sektor Kontruksi; 2) sektor

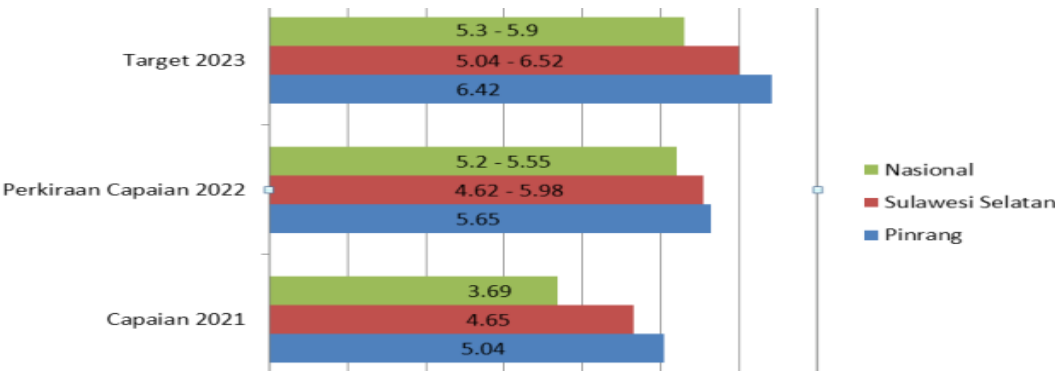
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; 3) sektor Real Estate; 4) sector Jasa Keuangan.

Di masa pandemic ini, keberhasilan program vaksinasi adalah formula penting bagi pemulihan ekonomi kabupaten Pinrang. Hal itu menegaskan bahwa tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa ada pemulihan pandemic. Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 semata, tetapi juga menjadi factor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi dari daerah, provinsi hingga nasional.

3.1.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dengan melihat kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang yang masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka di tahun 2022 Kabupaten Pinrang memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen, Sulawesi Selatan menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98 – 7,60 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 – 9,00 persen. Sementara untuk di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang ditargetkan sebesar 6,42 persen, Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,04 – 6,52 persen dan Nasional ditargetkan sebesar 5,3 – 5,9 persen.

Grafik 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2021, Perkiraan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023



Sumber data: BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKPD 2023 diolah oleh Bappelitbangda tahun 2022



Jika dilihat Dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 2,28 persen. Diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,01 persen, kemudian Industri Pengolahan 0,34 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,27 persen. Sementara Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	Sumber Pertumbuhan		
					2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	0,28	5,13	1,55	0,12	2,28
B.	Pertambangan dan Penggalian	9,30	2,25	5,95	0,21	0,05	0,14
C.	Industri Pengolahan	10,17	-1,05	5,55	0,61	-0,07	0,34
D.	Pengadaan Listrik, Gas	11,38	4,46	6,71	0,01	0,01	0,01
E.	Pengadaan Air	2,45	5,84	4,58	0,00	0,00	0,00
F.	Konstruksi	11,60	0,89	-0,19	1,07	0,09	-0,02
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,29	-1,05	6,61	1,41	-0,16	1,01
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,11	-11,58	9,16	0,29	-0,34	0,24
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,73	-10,45	8,11	0,09	-0,10	0,07
J.	Informasi dan Komunikasi	10,96	13,41	6,86	0,33	0,42	0,24
K.	Jasa Keuangan	2,19	0,34	4,77	0,04	0,01	0,09
L.	Real Estate	5,70	4,58	2,33	0,18	0,14	0,08
M, N.	Jasa Perusahaan	7,05	-7,97	5,30	0,01	-0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	7,30	1,55	7,00	0,28	0,06	0,27

P.	Jasa Pendidikan	8,36	5,70	3,31	0,26	0,18	0,11
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,71	9,23	6,78	0,13	0,13	0,10
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	6,17	-11,08	8,16	0,05	-0,09	0,06
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6,53	0,44	5,04	6,53	0,44	5,04

Sumber data: BPS Kab. Pinrang 2022

Struktur PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Pinrang masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 45,90 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,58 persen; konstruksi sebesar 10,29 persen dan industri pengolahan sebesar 6,09 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Pinrang mencapai 77,67 persen.

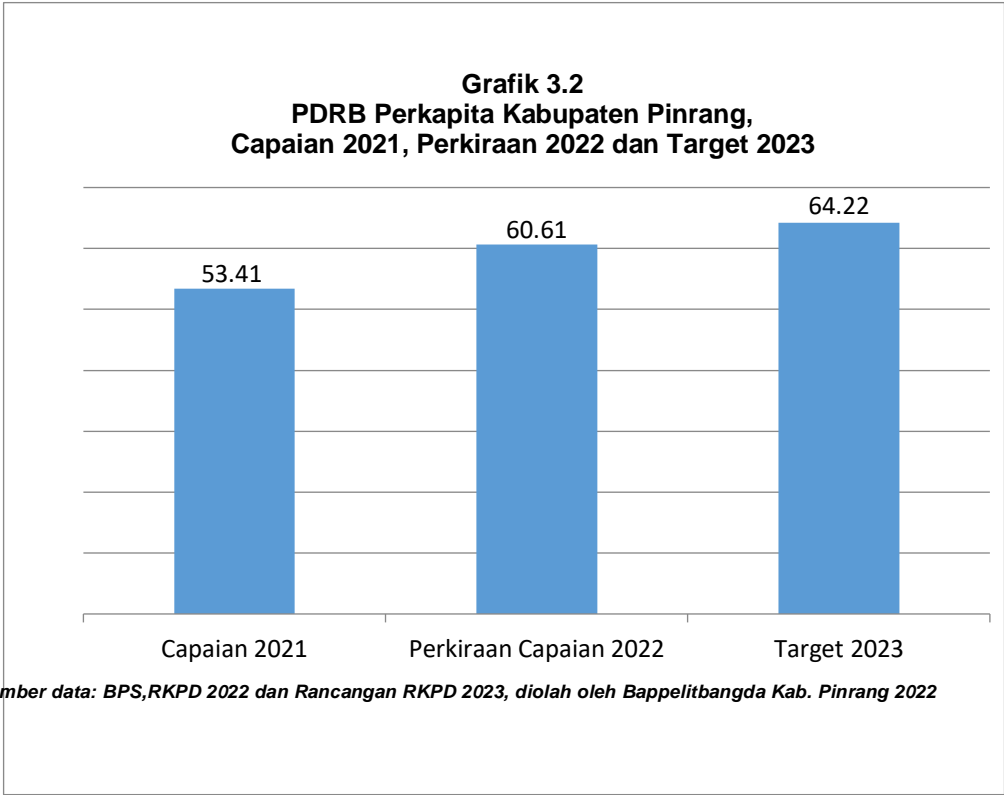
**Tabel 3.2**  
**Struktur PDRB Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 -2021**

Lapangan Usaha		Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,03	45,22	45,90
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,75	2,80	2,78
C.	Industri Pengolahan	6,28	6,14	6,09
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air	0,00	0,00	0,00
F.	Konstruksi	10,85	10,78	10,29
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,63	14,42	14,48
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,65	2,31	2,42
I.	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	0,97	0,87	0,89
J.	Informasi dan Komunikasi	2,36	2,59	2,57
K.	Jasa Keuangan	2,05	2,01	2,02
L.	Real Estate	3,17	3,32	3,17

M, N.	Jasa Perusahaan	0,11	0,10	0,10
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	4,05	4,08	4,07
P.	Jasa Pendidikan	2,94	3,09	2,93
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,33	1,49	1,53
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	0,76	0,67	0,68
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kab. Pinrang 2022

Sedangkan Salah satu sasaran dalam melaksanakan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita, walaupun angka yang dihasilkan belum dapat menggambarkan pendapatan masyarakat secara nyata dan merata karena angka tersebut merupakan rata – rata dari keseluruhan penduduk. PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Pinrang Tahun 2021 mencapai 53,41 juta rupiah dan pada tahun 2022, ditargetkan mencapai PDRB Perkapita sebesar 60,61 juta Rupiah kemudian untuk tahun 2023 ditargetkan 64,22 persen

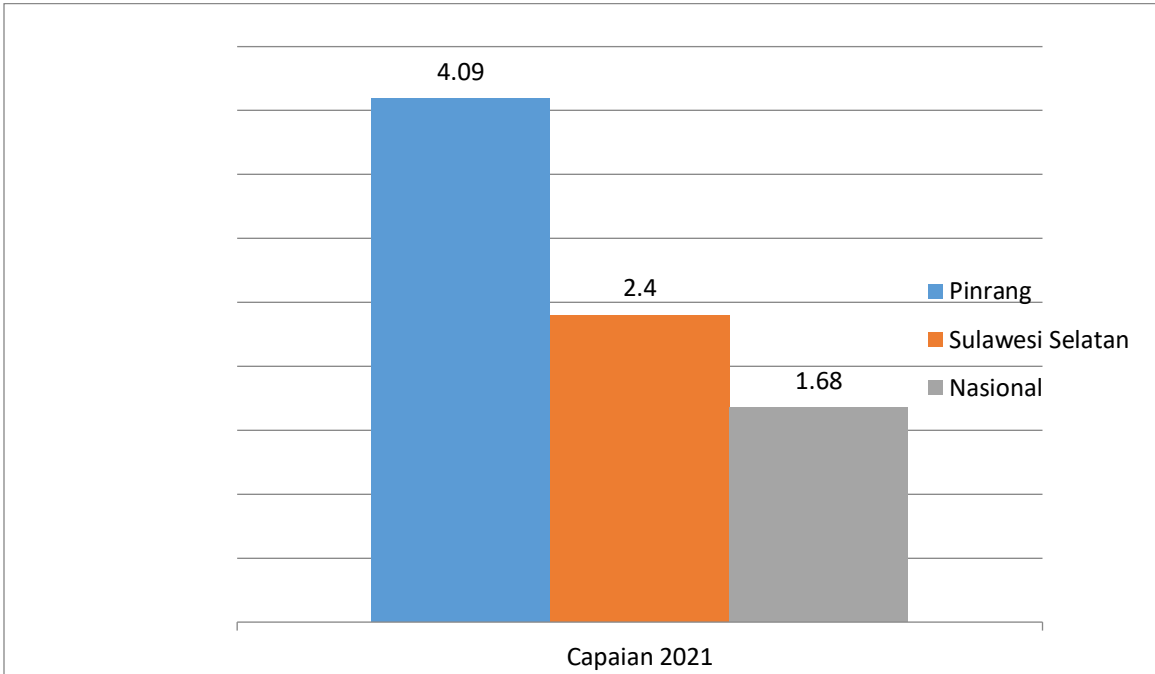




### **3.1.1.5.2 Inflasi**

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Pada tahun 2021, inflasi Kabupaten Pinrang sebesar (4,09) persen lebih tinggi dibandingkan provinsi Sulawesi Selatan (2,04 persen) dan Nasional (1,68 persen). Rendahnya tekanan inflasi di tahun 2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID19 yang terjadi sejak minggu ke-3 di Maret 2021 menambah jumlah angka pengangguran dan menurunkan sumber pendapatan masyarakat yang berakibat penurunan daya beli. Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

**Grafik 3.3**  
Perbandingan Inflasi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2021

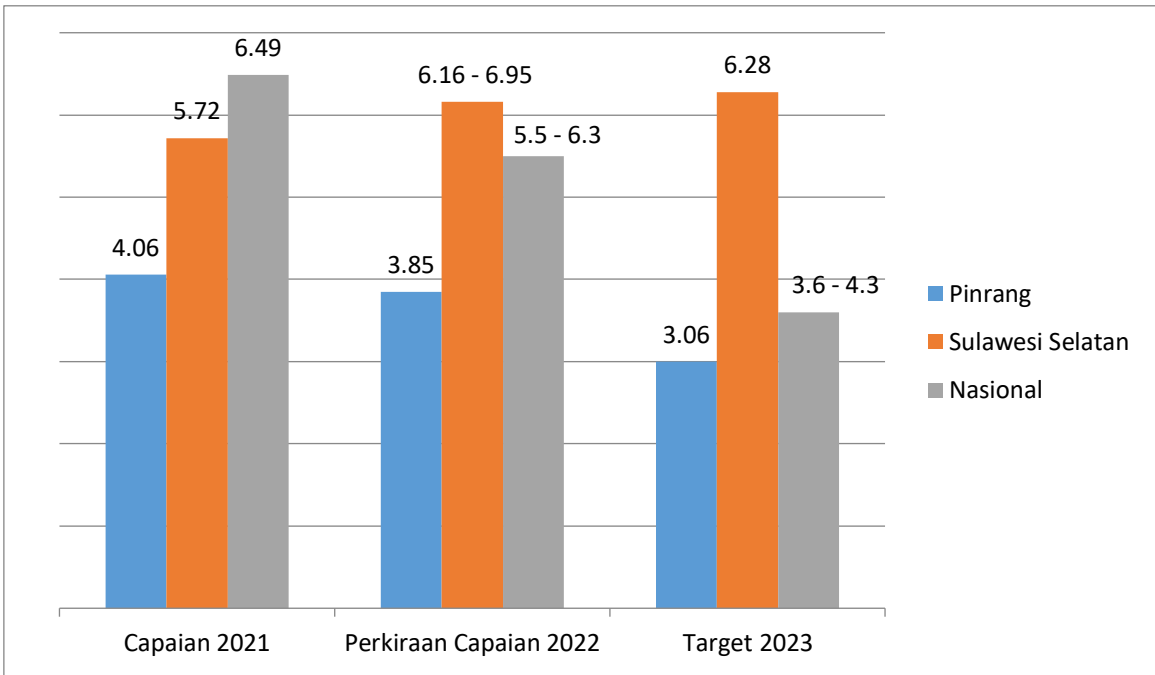


Sumber data: BPS dan Rancangan RKPD 2023, diolah oleh Bappelitbangda Kab. Pinrang Tahun 2022

3.1.1.5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pandemi Covid-19, tidak hanya menimbulkan masalah pada bidang kesehatan, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak tidak terkecuali sektor perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada akhir tahun 2021. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang. Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang di tahun 2022 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka dengan 3,85 persen atau lebih rendah dari capaian di tahun 2021 yang mencapai 4,06 persen dan lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi selatan sebesar 5,72 persen serta Nasional sebesar 6,49 persen. Sementara Kabupaten Pinrang untuk tahun 2023, tingkat Pengangguran terbuka di targetkan sebesar 3,06persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,28 persen dan Nasional sebesar 5,3 – 6,0 persen

**Grafik 3.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023**



Sumber data: BPS dan Rancangan RKPD 2023, diolah oleh Bappelitbangda Kab. Pinrang Tahun 2022

#### 3.1.1.5.4 Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pinrang pada bulan Maret 2021 sebesar 33,51 ribu, Jumlah ini menurun sebesar 0,05 ribu jiwa atau sebanyak 50 jiwa dibandingkan Maret 2020 dan 1,66 ribu jiwa dibandingkan kondisi pada Maret 2019. Secara umum, pada periode Maret 2017 - Maret 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang masih fluktuatif, baik dari sisi jumlah penduduk maupun persentase. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada Maret 2020 dan terendah terjadi pada Maret 2017 dan Maret 2019. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 salah satunya dipicu oleh peningkatan luas panen tanaman pangan terutama padi yang berpengaruh pada produksi yang dihasilkan. Luas panen padi pada periode April 2020 - Maret 2021 meningkat sebesar 13,59 persen dibandingkan luas panen padi pada periode April 2019 - Maret 2020 yaitu luas sekitar 77.161 Ha. Hal ini tentu memberikan dampak pada

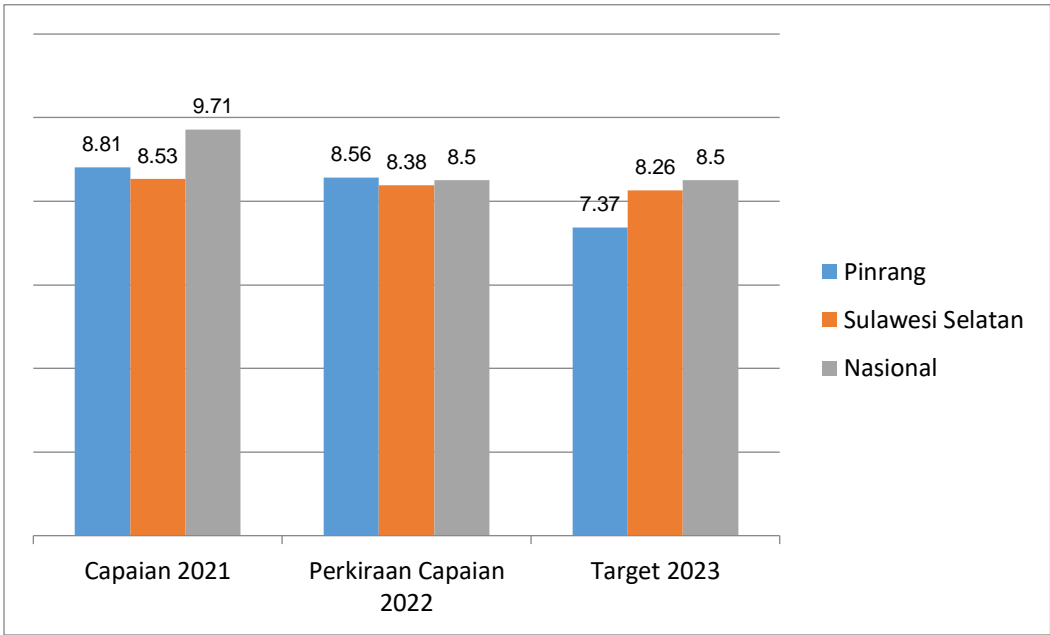


penghasilan dan konsumsi penduduk Kabupaten Pinrang yang sebagian besar bermata pencarian di Sektor Pertanian.

Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 di prediksi akan mencapai 8,56 persen. Namun pada tahun 2023, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan membaik, maka Pemerintah Pinrang menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 7,37 persen atau dibawah target Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Nasional yaitu 8,38 – 9,19 persen dan Nasional sebesar 8,5 – 9,0 persen.

Grafik 3.5

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023



Sumber data: BPS dan Rancangan RKPD 2023, diolah oleh Bappelitbangda Kab. Pinrang Tahun 2022

3.1.1.5.5 Indeks Gini

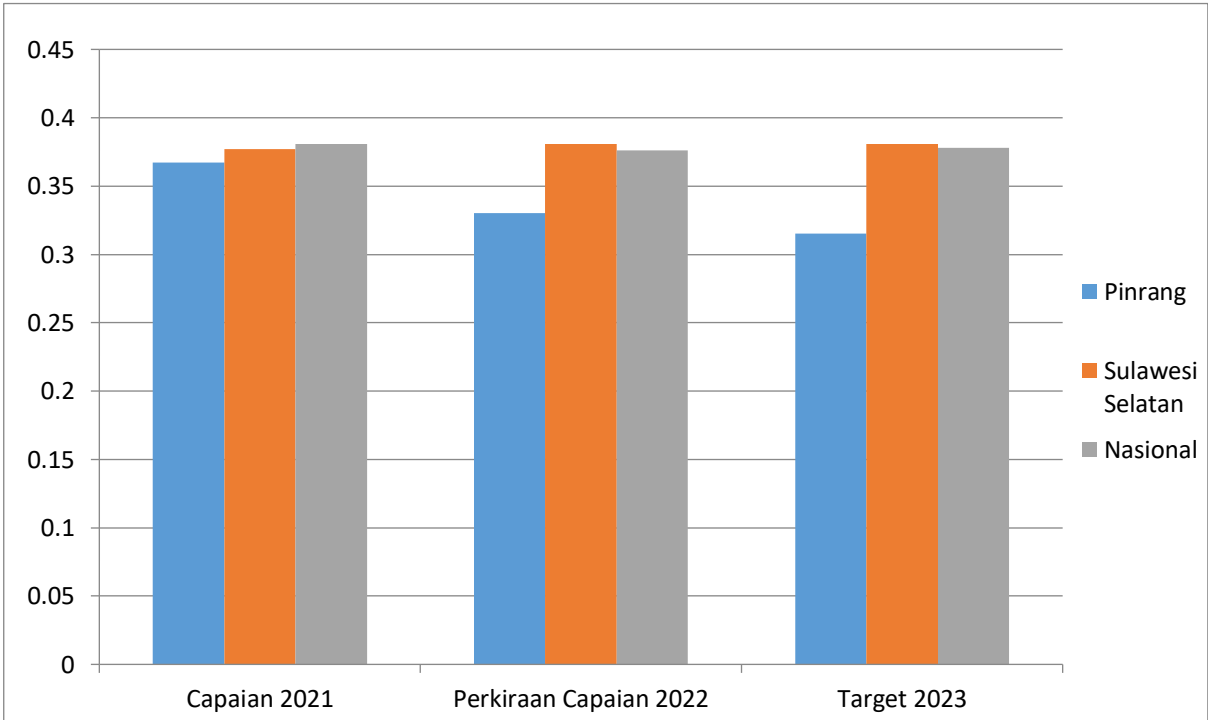
Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur ketimpangan. Nilai Indeks Gini berkisar antar 0 – 1. Semakin tinggi nilai indeks gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,375 atau berada di bawah capaian angka propinsi Sulawesi Selatan yaitu 0,389 dan

capaian angka nasional yaitu 0,385. Untuk tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Pinrang mencapai 0,367 dan di tahun yang sama Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 0,377 dan Nasional indeks gini Indonesia capaian 0,381. Sedangkan Tahun 2022 diprediksi mencapai 0,330 dan di Tahun yang sama Propinsi Sulawesi Selatan memprediksi 0,381 dan Nasional Indeks Gini Indonesia diprediksi capaian 0,376 – 0,378 Sementara untuk tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Pinrang ditargetkan mencapai 0,315, sedang Sulawesi Selatan 0,381 dan Nasional 0,378.

Grafik 3.6

Gini Rasio Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Nasional  
Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023



Sumber data: BPS dan Rancangan RKPD 2023, diolah oleh Bappelitbangda Kab. Pinrang Tahun 2022

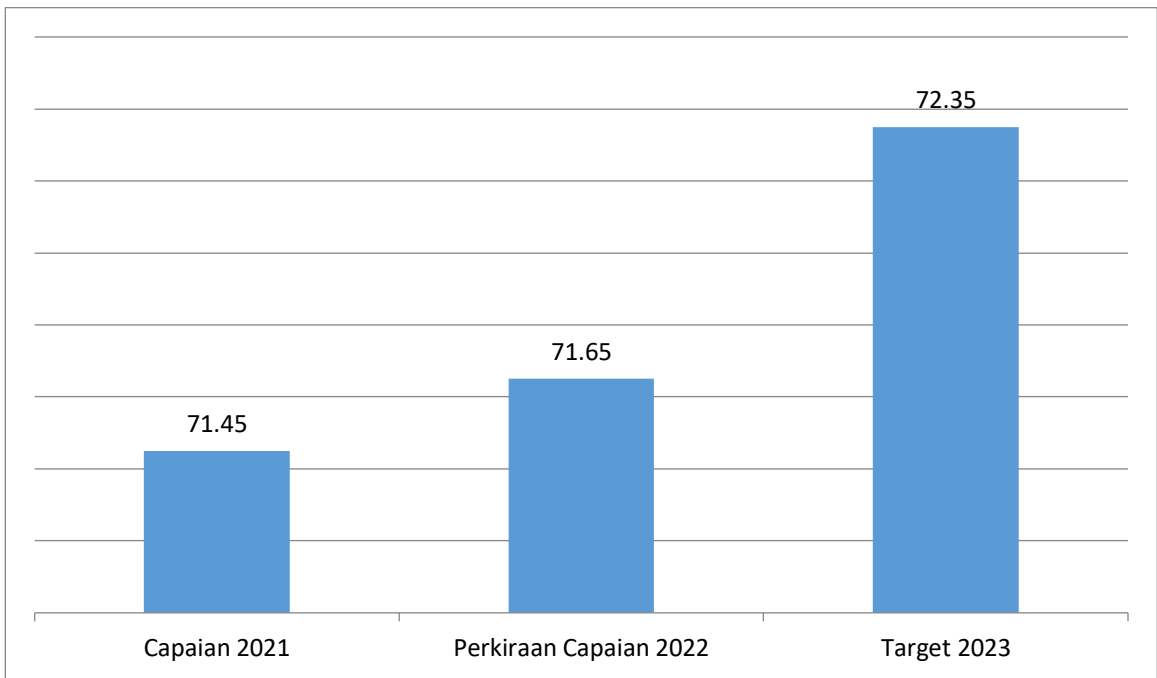
3.1.1.5.6 Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan aspek yang sangat penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Indikator dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dalam

upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah wilayah atau negara tergolong dalam wilayah atau negara maju, berkembang atau terbelakang.

Pada Tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Pinrang sebesar 71,45 persen, Diprediksi pada tahun 2022 nilai IPM Kabupaten Pinrang dapat mencapai 71,65 persen dan ditargetkan pada tahun 2023 nilai IPM Kabupaten Pinrang sebesar 72,35 persen.

**Grafik 3.7**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pinrang**  
**Realisasi Tahun 2020 – 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023**



Sumber data: BPS dan Rancangan RKPD 2023, diolah oleh Bappelitbangda Kab. Pinrang Tahun 2022

**3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023**

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2023, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kesehatan serta memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana / prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
2. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi
5. Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kewirausahaan guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan
7. Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian

- 8. Meningkatkan produksi tanaman pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah
- 9. meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan
- 10. Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, kestiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan
- 11. Peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.
- 12. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
- 13. Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana.

Tabel 3.3  
Target Indikator Makro Kabupaten Pinrang Tahun 2023

No	Indikator Makro Kabupaten Pinrang	Target Kinerja Tahun 2023		
		P- RPJMD Kabupaten Pinrang	RKPD Sulawesi Selatan	RKPD Kabupaten Pinrang
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,20	4,57 – 6,09	6,42
2	PDRB Perkapita	64,22	-	64,22
3	Tingkat Pengangguran	3,23	3,06	3,06
4	Gini Ratio	0,325	0,321	0,315
5	Kemiskinan	8,36	8,37	7,37
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,00	71,84	72,35

Sumber data : Pinrang dalam angka 2021 dan data olahan bappeliitbangda

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan

menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran / belanja public. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor social pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan



berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2022 di Kabupaten Pinrang diarahkan untuk:

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara:
  - (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah,
  - (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
- d. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2018, yaitu:
  - (1) Meningkatnya pelayanan publik, penyelenggaraan *good governance*, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM;
  - (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai budaya.
  - (3) Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan sosial dasar masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;

- (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata;
- (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat *self assessment*, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah. Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

### **3.2.1.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang**

Pandemi Covid - 19 belum berakhir hingga tahun 2022, Pemerintah Pusat dan Daerah berharap agar Perekonomian memasuki masa pemulihan pada tahun 2023 yang akan datang namun tetap menjaga dan mempersiapkan langkah apabila pandemi masih terus berlanjut. Masa pemulihan ekonomi ini tentunya diharapkan turut berdampak positif terhadap perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2023. Sementara itu Pemerintah Pusat menyusun Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini berarti terdapat perubahan fundamental dalam pola pemungutan Pendapatan Daerah yang juga akan berdampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah.

Dikaitkan dengan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019 – 2024, kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Asumsi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuka peluang sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten, akan mendorong kemampuan daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi

bagi masyarakat. Sehingga melalui capaian-capaian indikator-indikator makro ekonomi daerah tersebut, mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang untuk periode 2019 - 2024 ke depan.

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kabupaten Pinrang bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berikut ini disajikan data realisasi dan proyeksi target pendapatan periode 2021 – 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

Tabel 3.4  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2024

PP 12/2019		Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target RPJMD	Proyeksi RKPD	Target RPJMD
No Rekening	Uraian (Sesuai PP 12/2019)			2023	2023	2024
4	Pendapatan Daerah	1,272,417,859,811.33	1,323,728,855,144.00	1,419,835,291,436.00	1,405,014,142,371	1,436,137,115,292
4.1	Pendapatan Asli Daerah	134,066,655,485.33	138,723,468,320.00	151,163,428,935.00	143,605,257,488	155,195,174,869
4.1.01	Pajak Daerah	35,439,158,745.00	35,159,864,000.00	39,073,842,200.00	42,981,226,420	41,119,744,333
4.1.02	Restribusi Daerah	2,558,134,604.00	3,588,000,000.00	3,598,072,800.00	3,957,880,080	3,652,043,892
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	8,170,957,229.00	7,729,102,620.00	8,461,013,935.00	8,037,963,238	8,587,929,144
4.1.04	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah	87,898,404,907.33	92,246,501,700.00	100,030,500,000.00	97,029,585,000	101,835,457,500
4.2	Pendapatan Transfer	1,080,037,744,405.00	1,181,291,942,824.00	1,207,774,862,501.00	1,203,848,287,501	1,219,131,485,423
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,006,479,710,276.00	1,121,086,763,000.00	1,129,243,362,501.00	1,129,243,362,501	1,139,422,012,923
4.2.01.01	Dana Perimbangan	909,026,705,876.00	1,048,374,599,000.00	1,031,019,432,501.00	1,092,207,715,138	1,039,724,723,973
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum	685,331,224,249.00	677,825,338,000.00	745,188,365,225.00	707,928,946,964	750,516,190,693

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

4.2.01.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	23,895,614,249.00	16,389,728,000.00	16,859,792,250.00	16,016,802,638	17,112,689,133
4.2.01.01.01.02	Dana Alokasi Umum	661,435,610,000.00	661,435,610,000.00	728,328,572,975.00	691,912,144,326	733,403,501,560
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>223,695,481,627.00</b>	<b>370,549,261,000.00</b>	<b>285,831,067,276.00</b>	<b>384,278,768,174</b>	<b>289,208,533,280</b>
4.2.01.01.02.01	Dana Alokasi Khusus	89,064,370,665.00	174,850,375,000.00	126,983,807,150.00	177,777,330,010	128,948,564,255
4.2.01.01.02.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	134,631,110,962.00	195,698,886,000.00	158,847,260,126.00	206,501,438,164	160,259,969,025
<b>4.2.01.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>27,713,245,000.00</b>	<b>10,730,536,000.00</b>	<b>28,000,000,000.00</b>	<b>26,600,000,000</b>	<b>28,420,000,000</b>
<b>4.2.01.03</b>	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>4.2.01.04</b>	<b>Dana Keistimewaan</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>69,739,759,400.00</b>	<b>61,981,628,000.00</b>	70,223,930,000.00	<b>66,712,733,500</b>	71,277,288,950
<b>4.2.02</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>73,558,034,129.00</b>	<b>60,205,179,824.00</b>	<b>78,531,500,000.00</b>	<b>74,604,925,000</b>	<b>79,709,472,500</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	59,702,535,129.00	55,962,779,824.00	67,925,500,000.00	64,529,225,000	68,944,382,500
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13,855,499,000.00	4,242,400,000.00	10,606,000,000.00	4,772,700,000	10,765,090,000
<b>4.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>58,313,459,921.00</b>	<b>3,713,444,000.00</b>	<b>60,897,000,000.00</b>	<b>57,560,597,382</b>	<b>61,810,455,000</b>
4.3.01	Hibah	58,313,459,921.00	3,713,444,000.00	4,500,000,000.00	4,275,000,000	4,567,500,000
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-		-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	56,397,000,000.00	53,285,597,382	57,242,955,000



### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan Bupati tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pinrang Tahun 2022 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan

memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

#### **3.2.2.1 Belanja Operasi**

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

##### **1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

## **2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

## **3) Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **4) Belanja Subsidi**

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantorakuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

- e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **3.2.2.4 Belanja Transfer**

#### **1) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten / Kota**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah

yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya.

Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

## **2) Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2023 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

Tabel 3.5  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pinrang Tahun 2021 – 2024

PP 12/2019		Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target RPJMD	Estimasi RKPD	Target RPJMD
No Rekening	Uraian (Sesuai PP 12/2019)			2023	2023	2024
5	Belanja Daerah	1,293,820,146,095.00	1,373,728,855,144.00	1,454,835,291,436.00	1,440,014,142,371.00	1,471,137,115,292.00
5.1	Belanja Operasi	1,000,443,815,908.00	1,012,161,354,847.00	1,015,333,830,102.00	1,022,609,237,040.00	1,029,275,324,951.00
5.1.1	Belanja Pegawai	584,646,504,506.00	580,172,209,341.00	622,394,132,368.00	626,337,082,293	634,548,750,442.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	315,506,103,026.00	327,599,300,407.00	288,651,858,700.00	291,984,315,713	289,743,155,167.00
5.1.5	Belanja Hibah	98,231,208,376.00	104,389,845,099.00	101,553,136,037.00	101,553,136,037	102,180,348,771.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,060,000,000.00	0	2,734,702,997.00	2,734,702,997	2,803,070,571.00
5.2	Belanja Modal	155,359,754,689.00	218,928,552,097.00	286,554,643,174.00	272,226,911,015	288,017,337,684.75
5.2.01	Belanja Modal Tanah	587,162,945.00	190,000,000.00		-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,245,681,385.00	73,737,524,000.00		-	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,182,386,564.00	61,538,217,001.00		-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90,064,756,265.00	82,289,161,096.00		-	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,279,767,530.00	1,022,850,000.00		-	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	150,800,000.00	286,554,643,174.00	272,226,911,015	288,017,337,684.75
5.3	Belanja Tidak Terduga	1,848,145,800.00	9,000,000,000.00	10,250,000,000.00	9,737,500,000	10,506,250,000.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1,848,145,800.00	9,000,000,000.00	10,250,000,000.00	9,737,500,000	10,506,250,000.00
5.4	Belanja Transfer	136,168,429,698.00	133,638,948,200.00	142,696,818,160.00	135,440,494,316	143,338,202,656.00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	0	3,874,786,400.00	2,133,595,750.00	2,133,595,750	2,185,899,686.25
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	136,168,429,698.00	129,764,161,800.00	140,563,222,410.00	133,306,898,566	141,152,302,970.00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.440.014.142.371,00** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.022.609.237.040,00**, Belanja Modal sebesar **Rp. 272.226.911.015,00** , Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 9.737.500.000,00**, serta Belanja Transfer sebesar **Rp. 135.440.494.316,00**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2023.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 226.934.375.512,00** atau **15,75%** dari total belanja sebesar **Rp. 1.440.014.142.371,00** dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Terhadap Urusan Wajib  
mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2023

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	92.027.719.857	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133.926.434.096	Dinas Kesehatan

3	Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.430.724.249	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	6.291.450.007	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	2.071.240.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.487.485.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.239.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	438.665.000	Dinas Sosial

Kerangka pendanaan yang merupakan perspektif rencana penganggaran untuk tahun depan, sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hal ini diawali dengan target asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah. Belanja Daerah sebesar Rp. **1.440.014.142.371,00** digunakan untuk membiayai program yang telah dikaitkan dengan prioritas daerah seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

Tabel 3.8

Program Terkait Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan  Kabupaten	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	
				Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional	
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindak Lanjuti	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki STANDAR DAN SOP	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	Bappelitbangda
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan E - Government	KominfoSandi
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

				Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi	
				Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	DPMPTSP
3.	Penguatan Aksesibilitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur disetiap Kecamatan Terutama Di Wilayah Pegunungan dan Perbatasan Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	PSDA

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	
4.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan yang Inklusif	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman Holtikultura utama ( cabe ) per tahun (ton)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar per tahun (ton/ha)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	
		Meningkatnya lapangan kerja/usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	Dinas Sosial
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani Penerima Bantuan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	
5.	Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	KESBANGPOL
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Terlestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	
		Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	KESBANGPOL
		Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	DP2KBP3A

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

6.	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian LB3 Yang Dilakukan Sesuai Analisa Kebutuhan	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	
		Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Dinas Sosial

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, telah ditetapkan proyeksi pagu belanja perangkat daerah tahun 2023 yang mana nomenklatur perangkat daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tabel 3.9  
Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun  
2023

NO.	OPD	Pagu 2023
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	426,899,680,340.00
2	DINAS KESEHATAN	173,007,363,931.00
3	RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG	104,364,664,249.00
4	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	31,510,510,308.00
5	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	87,491,775,132.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11,987,374,378.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,962,264,472.00
8	DINAS SOSIAL	5,225,245,881.00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5,683,400,956.00
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11,792,155,545.00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5,546,975,237.00
12	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	34,550,962,400.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,745,400,654.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	78,153,980,584.00
15	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	10,647,446,666.00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	8,510,220,694.00
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	5,561,286,091.00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6,719,548,805.00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6,227,725,508.00
20	DINAS PERIKANAN	9,841,059,008.00



21	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	9,596,460,269.00
22	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	38,868,571,641.00
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	9,721,490,129.00
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10,580,184,514.00
25	SEKRETARIAT DAERAH	49,617,166,807.00
26	SEKRETARIAT DPRD	43,139,029,455.00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11,160,136,106.00
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	134,564,114,844.00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9,321,637,378.00
30	INSPEKTORAT	13,321,752,627.00
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	10,763,024,160.00
32	KECAMATAN PALETEANG	8,640,790,004.00
33	KECAMATAN TIROANG	7,407,152,344.00
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	4,116,619,228.00
35	KECAMATAN SUPPA	4,810,717,575.00
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	3,643,911,396.00
37	KECAMATAN LANRISANG	3,239,690,448.00
38	KECAMATAN PATAMPANUA	6,794,652,272.00
39	KECAMATAN DUAMPANUA	7,318,173,862.00
40	KECAMATAN BATULAPPA	3,845,956,788.00
41	KECAMATAN LEMBANG	5,405,210,322.00
42	KECAMATAN CEMPA	3,964,750,822.00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,743,908,541.00
	TOTAL	1,440,014,142,371.00

Pada tanggal 25 – 27 September 2015 berlangsung Sidang Umum PBB yang dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Sidang itu akan menyepakati adopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk periode 2015 – 2030. Tujuan Pembangunan berkelanjutan ini akan menggantikan Millenium Development Goals (MDG).

Dalam upaya pencapaian target TPB / SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian dan Keselarasan TPB / SDGs dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam mendukung pencapaian tersebut, Kabupaten pinrang telah mengalokasikan sejumlah anggaran pada program – program yang mendukung pencapaian target – target TPB / SDGs. Alokasi Anggaran tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program  
Pembangunan Daerah  
Terhadap Tujuan TPB / SDGs  
Tahun 2023

NO	TUJUAN SDGS	PROGRAM		PAGU
1	Tanpa Kemiskinan Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	41.889.000
		2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	438.665.000
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	170,294,000
		4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	94,395,000
		5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	133,933,484,096
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7,430,724,249
		7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6,291,450,007
		8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	92,027,719,857
		9	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	507,759,000
		10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	877,420,200
		11	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	191,843,000
		12	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,196,348,000
2	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	374,950,000
		2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	34,804,000
		3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	887,750,000
		4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135,850,000
		5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ProgramTelahdigunakandi Tujuan1
		8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19,712,820,000

3	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ProgramTelahdigunakandi Tujuan 2
		4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	133,933,484,096
		5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	324,213,000
		6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,503,720,000
		7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6,226,643,576
4	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ProgramTelahdigunakandi Tujuan 1
		2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	ProgramTelahdigunakandi Tujuan 1
		3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,389,024,670
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,573,005,000
5	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	213,465,000
		2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	49,900,000
		3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	ProgramTelahdigunakandi Tujuan 3
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	961,899,000
6	MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	ProgramTelahdigunakandi Tujuan 1
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	ProgramTelahdigunakandi Tujuan 1
		3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ProgramTelahdigunakandi Tujuan 2
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19,562,554,430
		5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4,208,687,000
		6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Telah digunakan di Tujuan 1

7	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA	1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,629,575,700
		2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	88,573,600
		3	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	8,225,000
		4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	247,796,900
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	137,959,000
		7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	77,279,000
		8	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	227,744,000
		9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	112,130,000
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	41,176,000
8	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI	1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	134,736,530
		2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,301,276,000
		3	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	26,662,100
		4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,733,499,000
		5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	57,350,000
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	224,570,000
		7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	117,017,500
		8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	5,340,000
		9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,514,190,000
		10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	10,800,000
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,086,599,308
		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	48,164,897,098
		13	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	102,914,100
		14	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Telah digunakan di Tujuan 1

9	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA	1	PROGRAM PENATAAN DESA	184,470,000
		2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	48,634,000
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	72,507,089,802
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Program Telah digunakan di Tujuan 5
		5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8,829,017,930
10	MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2,071,240,000
		3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,120,000,000
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN,	7,761,815,000
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	648,236,682
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25,000,000
		7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	390,949,900
11	MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program Telah digunakan di Tujuan 10
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Program Telah digunakan di Tujuan 10
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Telah digunakan di Tujuan 6
		4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	125,000,000
12	MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program Telah digunakan di Tujuan 1
		2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Program Telah digunakan di Tujuan 6
		3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	501,775,000
		4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30,000,000
13	MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	400,000,000
		2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Telah digunakan di Tujuan 12
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN	Program Telah digunakan di Tujuan 6

14	MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN	1	ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,487,485,000
		2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	132,655,061,834
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,739,825,000
		4	ROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	437,100,000
		5	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,019,464,400
		6	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	111,766,000
		7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	92,101,600
		8	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76,340,000
		9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program Telah digunakan di Tujuan 7
		10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	754,669,707,539
		11	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15,752,926,400
		12	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program Telah digunakan di Tujuan 5
15	MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program Telahdigunakan di Tujuan 14
		2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2,720,250,000
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76,340,000
		4	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	111,766,000

### 3.2.3 Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan

Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas **Penerimaan Pembiayaan Daerah** yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

Tabel 3.11  
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan  
Kabupaten Pinrang

PP 12/2019		Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target RPJMD	Estimasi RKPD	Target RPJMD
No Rekening	Uraian (Sesuai PP 12/2019)			2023	2023	2024
6	Pembiayaan	51.133.491.619,56	50,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	51.133.491.619,56	50,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

#### **3.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan menunjukkan kapasitas riil kemampuan kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah, baik berupa program pembangunan daerah maupun berupa program perangkat daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan daerah dan kewajiban daerah untuk belanja tidak langsung dan pengeluaran wajib daerah. Peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih besar dari pertumbuhan belanja daerah.

Mendasarkan pada proyeksi pendapatan pada tabel sebelumnya, Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah di prioritaskan pada pemenuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Operasi antara lain terdiri belanja pegawai, belanja bunga, belanja tambahan penghasilan PNS, dan belanja hibah sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang.

Tabl 3.12  
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2020 -2024 (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
1	Pendapatan	1,272,417,859,811.33	1,323,728,855,144.00	1,405,014,142,371.00
2	Pencarian Dana Cadangan (Sesuai perda)	-	-	-
3	Sisal Lebih Riil Perhitungan Anggaran	51.133.491.619,56	50,000,000,000.00	35,000,000,000.00
4	Total Penerimaan	1,323,551,351,430.89	1,373,728,855,144.00	1,440,014,142,371.00
	Dikurangi:			
5	Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer	722,663,080,004.00	722,811,157,541.00	771,515,076,608.70
6	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan		600.888.271.427,00	650,917,697,603.00	668,499,065,762.30

Sumber : Hasil Proyeksi tim penyusun

Diperkirakan dengan kebijakan pembiayaan defisit yang akan ditempuh akan mendorong upaya nyata pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang bersumber dari dalam daerah maupun yang bersumber dari luar daerah. Kebijakan tersebut diharapkan akan mendatangkan penerimaan daerah untuk alokasi pengeluaran pembiayaan daerah setiap tahunnya. Artinya, selain berupa pendapatan daerah, pemerintah daerah juga akan memperoleh sumber penerimaan dari penerimaan pembiayaan, sehingga diharapkan total penerimaan daerah akan meningkat dari hanya Rp

1,323 trilyun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1,440 trilyun pada tahun 2023.

**Tabel 3.13**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Rupiah)**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	600.888.271.427,00	650.917.697.603.00	668.499.065.762.30
2	Prioritas I	360.532.962.856 ,00	390.550.618.562 ,00	401.099.439.45 ,38
3	Prioritas II	240.355.308.571 ,00	260.367.079.041 ,00	267.399.626.305,80

Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori dua prioritas. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Belanja untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah dimasukkan dalam Prioritas I disebabkan karena Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumusan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2019 – 2024.

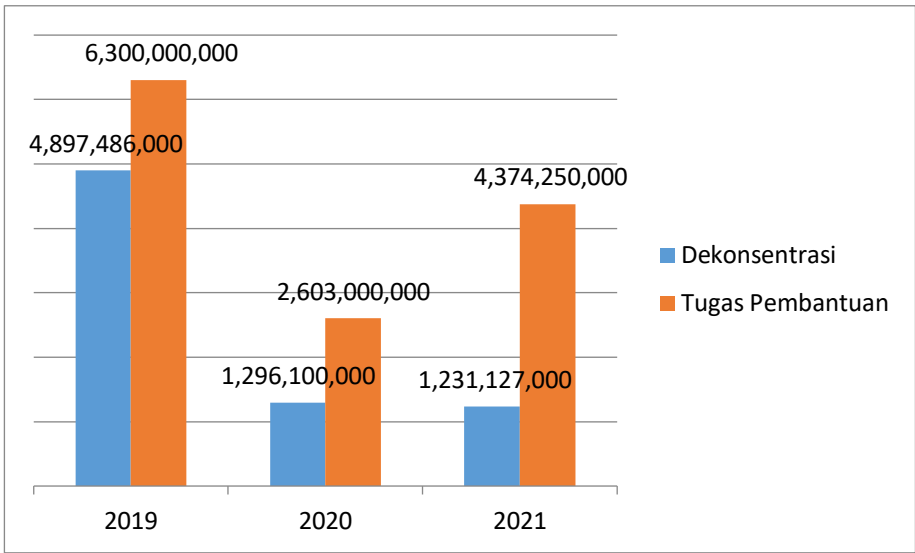
**3.2.5 Pendanaan Pembangunan Lainnya**

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Pinrang mendorong Pemerintah Daerah Pinrang untuk mencari alternative pendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain dana APBN. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota

Grafik 3. 8

Alokasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  
Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2021 (Milyar Rupiah)



Sumber : Hasil Tim Penyusun

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal- eksternal.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rancangan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah.

Visi dari Bupati Terpilih periode 2019 – 2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”**.

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 mengandung Lima substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera”, “Religius”, “Harmonis”, “Mandiri” dan Tangguh mengelola Potensi Daerah”. Adapun kandungan dari Lima pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan visi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang Yang Sejahtera, religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi daerah	Masyarakat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masyarakat Miskin Berkurang</li><li>• Derajat Kesehatan Meningkat</li><li>• Meningkatnya Jumlah masyarakat Terdidik</li><li>• Kemudahan dalam mengakses Pelayanan Publik</li></ul>
	Masyarakat Religius	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atmosfir Kehidupan Kerohanian masyarakat bersama ,Pemda lebih bersinergi</li><li>• meningkatnya kualitas iman, akhlak dan moralitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari</li></ul>
	Masyarakat Harmonis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya Ketentraman Hidup masyarakat</li><li>• Masyarakat memiliki sifat Kebersamaan, Kesetia Kawanannya Sosial, Rukun dan toleransi</li><li>• Masyarakat Mencintai Kearifan Budaya dan lingkungan alam kehidupannya</li></ul>
	Masyarakat Mandiri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keswadayaan Masyarakat</li><li>• Pengelolaan Optimal dalam Mengelola Potensi Unggulan daerah pada Subsektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan</li></ul>
	Tangguh Mengelola Potensi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemampuan Beradaptasi terhadap perubahan</li><li>• Peningkatan Pengelolaan subsektor potensial lainnya.</li><li>• Pengelolaan Potensi SDA yang ramah lingkungan</li></ul>

“Masyarakat sejahtera” adalah Sebagai tujuan utama pembangunan yang hendak dicapai, maka Pemerintahan Kabupaten berkewajiban menghadirkan tindakan nyata membangun kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik sehingga 5 tahun kedepan jumlah masyarakat miskin berkurang, produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat, jumlah masyarakat terdidik meningkat, derajat kesehatan masyarakat meningkat, akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan makin mudah, serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat makin membaik. Demikian pula halnya dengan kesejahteraan seluruh jajaran aparat pemerintahan pada semua tingkatan.

Wujud kesejahteraan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang dalam trend positif secara berkelanjutan.Tingkat capaian ini terus tumbuh dan meningkat lebih berkualitas dari periode pembangunan sebelumnya (2014-2019)

dan pada periode 2019-2024 diharapkan terus berkembang secara partisipatif dan mandiri berkat tata kelola pemerintahan, kualitas sumberdaya masyarakat, sinergi kelembagaan masyarakat dan pemerintah, serta iklim usaha yang semakin baik. Inisiatif utama perwujudan kesejahteraan ini berasal dari masyarakat sebagai subyek utama pembangunan serta peran pemerintah yang secara konsisten dan konsekuen berperan sebagai pelayan, fasilitator, dan dinamisator pembangunan.

“Masyarakat religius” Bertujuan bahwa 5 tahun ke depan diharapkan akan tercipta atmosfir kehidupan kerohanian masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Pinrang yang semakin bernilai Ketaqwaan, Amal dan Ibadah sebagai buah dari meningkatnya kualitas iman, akhlak dan moralitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Masyarakat Harmonis” bermakna terwujudnya ketenteraman hidup masyarakat karena terbangunnya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap kebersamaan, persaudaraan, kepedulian, kesetiakawanan sosial, rukun dan toleran serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.

“Masyarakat Mandiri” bermakna Bahwa pembangunan Kabupaten Pinrang 5 tahun ke depan akan menciptakan kondisi bagi munculnya prakarsa-prakarsa masyarakat, keswadayaan, semangat gotong-royong, kemampuan beradaptasi serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial-ekonomi-ekologi.

“Tangguh Mengelola Potensi Daerah” merupakan Faktor penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang 5 tahun ke depan adalah kesiapan serta kesungguhan Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah pada sub-sektor Pertanian (Beras, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Perkebunan (Kopi dan Kakao), Perikanan (Ikan, Udang dan Rumput Laut) dan Peternakan (Sapi dan Kambing) disamping sub-sektor potensial lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Guna mewujudkan dan mendukung Visi Kab. Pinrang , telah ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah. Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 4.2



Tabel 4.2  
Perumusan Penjelasan Misi  
RPJMD Kabupaten Pinrang

MISI	PENJELASAN MISI	POKOK VISI
1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.	Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau <i>electronic governance</i> (e-governance).	Masyarakat Harmonis
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari perbaikan kualitas manusia secara khusus dan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.	Masyarakat Sejahtera
3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus	Misi ini mencakup upaya pokok peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Pinrang. Penguatan peran lembaga sosial-kemasyarakatan tersebut juga diarahkan untuk pembentukan karakter masyarakat beriman dan bertakwa serta harmonis.	Masyarakat Harmonis
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.	Masyarakat Sejahtera
5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur	Misi ini mencakup upaya pokok dalam optimalisasi pengelolaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik terutama untuk mengatasi	Tangguh Mengelola Potensi

dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.	ketertinggalan di wilayah pegunungan Pinrang Utara yang meliputi kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang. Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana publik tersebut juga diarahkan untuk mendukung kinerja pelayanan dasar serta memperlancar konektivitas wilayah.	
Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya tersebut mencakup upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah dan limbah, penanggulangan bencana, serta adaptasi perubahan iklim.	Tangguh Mengelola Potensi
Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam pengembangan pendidikan terapan untuk kompetensi SDM bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan guna peningkatan kinerja agribisnis berbasis agropolitan dan minapolitan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pendidikan terapan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Pinrang sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional dan pengembangan ekonomi komoditas unggulan.	Masyarakat Mandiri

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masingmasing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isuisu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu - isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART – C. Target tujuan dan sasaran tahun 2023 menjadi landasan RKPD 2023 disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang dan Target Kinerja Tahun 2023

Tujuan dan Sasaran Misi					Kondisi	Asumsi Capaian	Target RPJMD
No	Uraian Tujuan, Sasaran dan Misi	No	Indikator	Satuan Indikator			
					2021	2022	2023
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah							
Misi 1	Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.						
	Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan						
	1	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)		Nilai	58,28	60	65
	01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik					
		1	Nilai SAKIP Kab. Pinrang	Nilai	63,59	65	67
	02	Meningkatnya kualitas pelayanan public					
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	Nilai dan Predikat	86,45	87,35	88,2
Misi 2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan						
	Tujuan 2 : Mewujudkan kualitas manusia yang berdaya saing						
	2	Indeks Pembangunan Manusia		Nilai	71,45	71,65	72
	03	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia					
		3	Indeks Pendidikan	Nilai	63,01	63,4	63,65
		4	Indeks Kesehatan	Nilai	76,57	77,35	77,85

Misi 3	Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus							
	Tujuan 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat							
		3	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			N.A	42,5	45
	04	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan						
			5	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	%	77,01	80	82
	05	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis						
			6	Presentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	80,61	90	92
	06	Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan						
			7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,43	69 (IDG)	75,61 (IDG)
Misi 4	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan							
	Tujuan 4 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata							
		4	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan		%	8,81	8,56	8,36
		5	Gini Ratio		Nilai	0,367	0,33	0,325
	07	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan						
			8	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	5,65	5,2
	08	Meningkatnya lapangan kerja/usaha						
			9	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,06	3,85	3,23
Misi 5	Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.							
	Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik							

		7	Indeks Perkembangan Wilayah	Nilai	82	83,5	85
	09	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah					
			10	Indeks Layanan Infrastruktur	%	74,72	84,5
			11	Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang)	%	73,25	53
Misi 6	Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim						
	Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan						
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	67,56	68,75	70,2
	10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					
			12	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	36,84	36,84
	11	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana					
			13	Indeks Resiko Bencana	Nilai	169,57	175
Misi 7	Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan						
.	Tujuan 7 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan						
		8	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar	Ton / Ha	6,08	6,15	6,17
	12	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian					
			14	Persentase Kelompok tani kelas Madya	%	4,43	6
	13	Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan					
			15	Penguatan cadangan pangan	%	269,88	198,62%

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan propinsi Sulawesi Selatan.

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tema Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah **“Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”** dan Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Pemantapan Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Penguatan Infrastruktur Wilayah
3. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan
4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
5. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia
6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Hilirisasi Komoditas
7. Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup

#### 4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah perencanaan tahunan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dan mengacu pada Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan serta Prioritas Nasional. Prioritas Pembangunan Daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah setelah dilakukan analisa terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah, maka yang menjadi isu strategis RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah :

1. Implementasi e-Government pada seluruh Perangkat Daerah
2. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk semua lapisan masyarakat secara merata
3. Keterlibatan lembaga sosial Masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
4. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif
5. Minimnya sarana infrastruktur pada wilayah pegunungan dan perbatasan
6. Potensi kerusakan lingkungan hidup dan resiko bencana
7. Pengembangan Inovasi dan teknologi terapan pertanian

Tema pembangunan Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan Isu Strategis Kabupaten Pinrang, sehingga Tema Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah

**“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia”.**

Tema Pembangunan Kabupaten Pinrang Merupakan Hasil Rumusan dari Tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan, Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 beserta penjelasannya sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Keterkaitan Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**



Tema Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2023 **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”** mendorong sektor produktif untuk melakukan transformasi sehingga sektor-sektor tertentu bisa terus meningkat seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan berkurang dan Investasi meningkat, Selain itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023. Seperti, peningkatan kualitas sumber daya manusia utamanya dalam bidang kesehatan dan pendidikan, percepatan penghapusan kemiskinan, Kemudian pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, Dalam sektor ekonomi hijau ada pembangunan rendah karbon dan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur dasar termasuk antara lain adalah air bersih dan sanitasi.

Begitupun halnya dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengangkat tema **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”** meliputi, pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter dengan prioritas pembangunan nasional seperti, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan infrastruktur wilayah, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, penurunan kesenjangan sosial ekonomi, pembangunan manusia,



pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah dan eksistensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan potensi aset yang ada.

Hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 yakni **“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia”**. Dimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Pinrang berupaya memanfaatkan teknologi secara maksimal dan sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur untuk menunjang pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Dengan cara Penerapan Sistem pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan, Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kesehatan serta peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, Peningkatan kapasitas pengolahan hasil untuk nilai tambah produk unggulan daerah, pemanfaatan teknologi pertanian, optimalisasi peningkatan infrastruktur terutama di wilayah pinrang utara, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pembinaan kewirausahaan, peningkatan kinerja pengolahan sistem persampahan, optimalisasi peran serta perempuan dan lembaga masyarakat serta modernisasi pelayanan satu pintu dan pelayanan publik.

Berdasarkan tema pembangunan diatas, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan pembangunan daerah dan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan maka prioritas pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Pinrang adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik Berbasis Elektronik
3. Penguatan Aksesibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang inklusif.
5. Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Terhadap Bencana

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Pinrang dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
1	1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Implementasi e-Government pada seluruh Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)
				Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang
				Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
2	2.Pembangunan Sumber Daya Manusia Belum Optimal	2. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk semua lapisan masyarakat secara merata	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Tujuan 2: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia
				Sasaran 3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan  Indeks Kesehatan
3	3.Belum optimalnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan, dan perempuan dalam pembangunan	3. Keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Daerah yang responsif gender	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan.	Tujuan 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif
				Sasaran 5 : Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani
				Sasaran 6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4	4. Produktivitas dan Potensi Unggulan daerah Belum Optimal	4. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Tujuan 4 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
					Indeks Gini
				Sasaran 7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi
				Sasaran 8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka
				Tujuan 7 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar)
				Sasaran 12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya
				Sasaran 13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan
		7. Pengembangan Inovasi dan teknologi terapan pertanian			

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

4	5.Ketersediaan layanan infrastruktur belum optimal dan belum merata	5. Minimnya sarana infrastruktur pada wilayah pegunungan dan perbatasan	3. Penguatan aksesibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pra-sarana publik	Indeks Perkembangan Wilayah
				Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
					Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )
5	6. Pembangunan Kualitas lingkungan hidup belum optimal	6. Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Resiko Bencana	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				Sasaran 10 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana

Prioritas Pembangunan tahun 2023 merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023 yang berkorelasi dengan pencapaian Indikator Kinerja berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang periode 2019 - 2024. Dalam rangka mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

Tabel 4.5  
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023	Tujuan / Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target	
					RKPD 2023	P-RPJMD
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Tujuan 2: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,35	72
		Sasaran 3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	63,65	63,65
			Indeks Kesehatan	Indeks	77,85	77,85
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Indeks	62	65
		Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	Nilai	67	67
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	Indeks	88,2	88,2
3	Penguatan Akseibilitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur disetiap Kecamatan Terutama Di Wilayah Pegunungan dan Perbatasan Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pra-sarana publik	Indeks Perkembangan Wilayah	Indeks	85	85
		Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	84,5	84,5

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

			Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )	Indeks	75,25	53
4	<b>Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang Inklusif</b>	<b>Tujuan 4 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata</b>	<b>Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan</b>	Persentase	<b>7,37</b>	<b>8,36</b>
			Indeks Gini	Indeks	0,315	0,325
		Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,42	5,2
		Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,06	3,23
		<b>Tujuan 7 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan</b>	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar)	Angka	6,26 ton/ha	6,17 ton/ha
		Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	Persentase	5,50%	6%
		Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	Persentase	280%	198,56%

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

5	<b>Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan</b>	<b>Tujuan 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat</b>	<b>Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>	Indeks	<b>45</b>	<b>45</b>
		Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	Persentase	82	82
		Sasaran 5 : Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Persentase	92	92
		Sasaran 6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,61 (IDG)	75,61 (IDG)
6	<b>Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup serta Adaptasi Terhadap Bencana</b>	<b>Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	Indeks	<b>69</b>	<b>70,2</b>
		Sasaran 10 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase	36,84	36,84
		Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163,25	175



Keselaran antara Prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 dengan sasaran pembangunan Kabupaten Pinrang telah terjalin dengan mencakup dari seluruh prioritas dan sasaran tersebut sehingga target RPJMD tahun 2023 juga sinkron dengan target RKPD tahun 2023.

4.2.4. Keselaran Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, maka hubungan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional tahun 2023 sebagaimana pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Keselaran Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7
3	Penguatan akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5
4	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1
		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2
5	Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4
6	Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6

Mengacu Pada Keselaran Tema, dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana pada tabel 4.7 sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

Tabel 4.7

Keselaran Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan Berkualitas	(a) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (b) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (c) harapan lama sekolah;
		Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan			
			Indeks Kesehatan		Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	a. menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Perbaikan tata Kelola dan Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik			
3	Penguatan aksesibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pra-sarana publik	Indeks Perkembangan Wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur			
			Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )			Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %); peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
4	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan  Indeks Gini	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan timur Indonesia (KTI)	PDRB KTI Persentase Penduduk Miskin KTI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

		Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi			
		Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka			
		Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar)			
		Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya			
		Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan			
				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, Investasi, Ekspor, dan daya saing perekonomian	(a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun,(i) pertumbuhan investasi (PMTB),
5	Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan.	Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			
		Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian	Indeks Pembangunan Masyarakat

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani		Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
6	Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
		Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana			

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, dapat terlihat bahwa sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan sasaran pembangunan nasional 2023.

Adapun sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Nasional tahun 2023, Maka Kabupaten Pinrang menetapkan Program Pembangunan Daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagaimana pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Dukungan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Program Prioritas Nasional

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	1	Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Terbarukan (Ebt)	1	Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
				2	Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Bnabati		
				3	Peningkatan Pelaksanaan Konservasi Dan Efisiensi Energi		
				4	Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik		
				5	Pengembangan Industri Pendukung Ebt		
		2	Peningkatan Kualitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Perumbuhan Ekonomi	1	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindungi (Kumulatif)		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
				2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
				3	Penyediaan Air Untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
				4	Penyediaan Air Baku Untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
				5	Pemeliharaan, Pemulihan Dan Konserfasi Sumber Daya Air Dan Ekosistemnya Termasuk Revitalisasi Danau Dan Infrastruktur Hijau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
				6	Pengembangan Waduk Multi Guna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
		3	Peningkatan Ketersediaan, Akses	1	Peningkatan Kualitas Komsumsi, Keamanan, Fortifikasi Dan Biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

			Dan Kualitas Komsumsi Pangan	2	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan Untuk Menjaga Stabilitas	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
					Pasokan Dan Harga Kebutuhan Pokok	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				3	Peningkatan Produktifitas Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (Sdm) Pertanian, Perikanan Dan Kepastian Pasar	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perikanan; Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Peternakan dan Perkebunan
				4	Peningkatan Keberlanjutan Prodiktivitas Sumber Daya Pertanian, Dan Digitalisasi Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Peternakan dan Perkebunan
				5	Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, Dan Kelautan	1	Peningkatan Pengelolaan Wilayah Penyelolaan Perikanan (Wpp) Dan Tata Ruang Laut Dan Rencana Zonasi Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut		Dinas Perikanan
				2	Peningkatan Ekosistem Kelautan Dan Pemanfaatan Jasa Kelautan		
				3	Peningkatan Produksi, Produktifitas, Standarisasi Mutu Dan Nilai Tambah Produk Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				4	Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, Dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha Dan Daya Saing	
				5	Peningkatan Sdm Dan Riset Kemaritiman Dan Kelautan Serta Databaase Kelautan Perikanan		
		5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah	1	Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Menengah Besar	Program Pengembangan Umkm; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
<b>No.</b>	<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Program Prioritas Nasional</b>		<b>Kegiatan Prioritas Nasional</b>		<b>Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>
			(Umkm) Dan Koperasi	2	Peningkatan Kapasitas Usaha Dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Program Pengembangan Umkm; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				3	Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, Dan Inovasi Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				4	Peningkatan Penciptaan Start-Up Dan Peluang Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	
				5	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Program Pengembangan Umkm	
		6	Peningkatatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Insdustrialisasi	1	Peningkatan Industri Pengelolaan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, Dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
				2	Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter Dan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

					Kawasan Industri Terutama Di Luar Jawa		
				3	Peningkatan Daya Saing Destinasi Dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Pariwisata Alam, Yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				4	Peningkatran Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Dan Usaha Kreatif Dan Digital	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				5	Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				6	Pengembangan Industri Halal	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	1	Peningkatan Diversifikasi Nilai Tambah, Dan Daya Saing Produk Ekspor Dan Jasa	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
				2	Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor		
				3	Pengelolaan Impor		
				4	Peningkatan Kandungan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah Yang Efektif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				5	Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produk Global	Program Pengembangan Ekspor	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				6	Peningkatan Citra Dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas Dan Destinasi Brending, Dan Produk Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata;Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				7	Peningkatan Efektifitas Preferential Trader Agreement (Pta)/ Free Trade Agreement (Fta)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) Dan Diplomasi Ekonomi	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		8	Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi	1	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				2	Otimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Industri 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
				3	Peningkatan Sistem Logistik Dan Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
				4	Peningkatan Penerapan Praaktik Berkelanjutan Di Industri Pengolahan	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
					Pariwisata		
				5	Reformasi Fiskal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				6	Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dan Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1	Pengembangan Wilayah Sumatra				
		5	Pengembangan Wilayah Sulawesi	1	Pengembangan Kawasan Strategis	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya; Program Pengembangan Permukiman; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; Kecamatan
				2	Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan PraSarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan; Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Peternakan dan Perkebunan Perkebunan; Dinas Kelautan Dan Perikanan
				3	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
				4	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, Dan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				5	Kelembagaan Dan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan	1	Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1	Percepatan Cakupan Administarsi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				2	Integritas Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
	Berdaya Saing			3	Pendampingan Dan Layanan Terpadu	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				4	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				2	Bantuan Sosial Dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Rehabilitasi Sosial	
				3	Perlindungan Sosial Adatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				4	Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
		3	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (Kb) Dan Kesehatan Reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan Keluarga Berencana Kb	Dinas Kesehatan; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				3	Peningkatan Pengendalian Penyakit		
				4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				5	Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

						Upaya Kesehatan Masyarakat	
		4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	Peningkatan Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				2	Afirmasi Askes Dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3	Peningkatan Pengelolaan Dan Penempatan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				4	Penjamin Mutu Kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
				5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
		5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda	1	Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				3	Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		6	Pengentasan Kemiskinan	1	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga		
				2	Keperantaraan Usaha Dan Dampak Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				3	Reforma Agraria		
				4	Perhutanan Sosial		
<b>No.</b>	<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Program Prioritas Nasional</b>		<b>Kegiatan Prioritas Nasional</b>		<b>Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>
		7	Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing	1	Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri		
				2	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas		
				3	Peningkatan Kapabilitas Iptek Dan Penciptaan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				4	Prestasi Olah Raga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalias Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	1	Revolusi Mental Dalam Sistem Pendidikan Untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja Gotong Royong, Dan Budi Pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, Dan Responsif		
				3	Revolusi Mental Dalam Sistem Sosial Untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas Dan Peran Keluarga Dalam Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter		
				4	Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Revolusi Mental		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				5	Pembangunan Dan Pemberdayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila		
				6	Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Dan Patriotisme		
<b>No.</b>	<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Program Prioritas Nasional</b>	<b>Kegiatan Prioritas Nasional</b>			<b>Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>5</b>	<b>6</b>
		2	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	1	Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2	Pengembangan Dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Untuk Memperkuat Karakter Bangsa Dan Kesejahteraan Rakyat		
				3	Perlindungan Hak Kebudayaan Dan Ekspresi Budaya Untuk Memperkuat Budaya Yang Inklusif		
				4	Pengembangan Diplomasi Budaya Untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia Dalam Perkembangan Peradaban Dunia		
				5	Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan		
		3	Memperkuat Modernisasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, Dan Harmoni Sosial	1	Penguatan Cara Pandang, Sikap, Dan Praktik Beragama Dalam Prespektif Jalan Tengah Untuk Memantapkan Persaudaraan Dan Kebersamaan Dikalangan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; Sekretariat Daerah
				2	Penguatan Harmini Dan Kerukunan Umat Beragama		



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				3	Penyelarasan Relasi Agama Dan Budaya		
				4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan		
				5	Pengembagngan Ekonomi Dan Sumber Daya Keagammaan		
		4	Peningkatab Budaya Literasi, Inovasi, Dan Kreatifitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan Dan	1	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
				2	Pengembangan, Pembinaan, Dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Dan Aksara Daerah, Serta Sastra		
<b>No.</b>	<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Program Prioritas Nasional</b>		<b>Kegiatan Prioritas Nasional</b>		<b>Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>
			Berkarakter	3	Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas Dan Daya Cipta	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				4	Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi Dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1	Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

				2	Penyediaan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Dan Aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM; PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
				3	Pengelolaan Air Tanah Dan Air Baku Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
				4	Keselamatan Dan Keamanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Llj	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
				5	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				6	Waduk Multipurpose Dan Modernisasi Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	2	Infrastruktur Ekonomi		1	Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
				2	Konektivitas Keretaapi		Dinas Perhubungan dan Pertanahan
				3	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	
				5	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Llj	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		3	Infrastruktur Perkotaan	1	Transportasi Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llj)	Dinas Perhubungan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				2	Infrastruktur Dan Ekosistem Tik Perkotaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				3	Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau Di Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		4	Energi Ketenaga Listrik	1	Keberlanjutan Penyediaan Energi Dan Ketenagalistrikan		
				2	Akses Dan Keterjangkauan Energi Dan Ketenagalistrikan		
				3	Kecukupan Penyediaan Energi Dan Tenaga Listrik		
		5	Transformasi Digital	1	Penuntasan Infrastruktur Tik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				2	Pemanfaatan Infrastruktur Tik		
				3	Fasilitas Pendukung Transformasi Digital		
		1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
				2	Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		
				3	Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				4	Penguatan Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	1	Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2	Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		3	Pembangunan Rendah Karbon	1	Pembangunan Energi Berkelanjutan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
				2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan		
				3	Pengelolaan Limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
				4	Pengembangan Industri Hijau		
				5	Rendah Karbon Pesisir Dan Laut		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Konsolidasi Demokrasi	1	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Penguatan Kesetaraan Dan Kebebasan		
No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (Pn)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1	Penguatan Integritas Nkri Dan Perlindungan Wni Di Luar Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		3	Penegakan Hukum Nasional	1	Penataan Regulasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Program Penyelenggaraan Pengawasan  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah  Inspektorat  Sekretariat Daerah
				2	Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata		
				3	Penguatan Sistem Anti Korupsi		
				4	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan		
		4	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	1	Penguatan Inplementasi Manajemen Asn Berbasis Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah; Seluruh Perangkat Daerah
				3	Penataan Kelembagaan Dan Proses Bisnis		
				4	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				3	Penguatan Keamanan Dan Ketahanan Siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

4.2.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas  
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kabupaten Pinrang adalah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, maka hubungan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebagaimana pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah  
Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi  
Sulawesi Selatan Tahun 2023

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Propinsi	No. PP
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	5
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	1
3	Penguatan akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Penguatan infrastruktur wilayah	2
4	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	3
		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	6
		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	4
5	Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	5
6	Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	7

Mengacu Pada Keselarasan Tema, dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebagaimana pada tabel 4.10 sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

Tabel 4.10

Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang				Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Tujuan : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	IPM
		Sasaran : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan
					Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
			Indeks Kesehatan		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
					Meningkatnya aktualisas nilai- nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
		Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

3	Penguatan aksesibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pra-sarana publik	Indeks Perkembangan Wilayah	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson
		Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
			Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )			
4	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Tujuan 4 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan	PDRB Perkapita ADHB
			Indeks Gini		masyarakat secara merata	Tingkat Kemiskinan
		Sasaran 7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi			
		Sasaran 8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran terbuka
		Tujuan 7 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar)		Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
		Sasaran 12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		Sasaran 13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini
5	Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Tujuan 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatnya aktualisas nilai- nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas
		Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif			
		Sasaran 5 : Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Sasaran 6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
6	Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH
		Sasaran 10 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)
		Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana			

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, dapat terlihat bahwa sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan sasaran Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan 2023.

Adapun sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, Maka Kabupaten Pinrang menetapkan Program Pembangunan Daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagaimana pada tabel 4.11 sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

Tabel 4.11

Dukungan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Program Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan

No	Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023	Program Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Tahun 2023	
					Target	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3		4	5	6
1	Pemantapan Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindak Lanjuti	85%	4.739.825.000,00
		2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki STANDAR DAN SOP	50%	437.100.000,00
		3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100%	902.682.000,00
		4	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan E - Government	100%	3.463.780.000,00
		5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	89,01%	998.656.655,00
				Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi	75,00%	
				Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	0,75	
		6	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database	100%	1.493.000.000,00
		7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	176.000.000,00
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah	8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	91,30%	206.500.000,00
		9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	4,76%	273.636.000,00
		1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	3.530.000.000,00
		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80%	19.562.554.430,00
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	7.430.724.249,00
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,42%	6.291.450.007,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

3	Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,30%	8.955.574.728,00
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	98,26%	48.164.897.098,00
		1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai Berbasis Kompetensi	2,50%	247.796.900,00
		2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60%	88.573.600,00
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	100%	112.130.000,00
		4	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0,0192 Rasio	2.218.127.500,00
		5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi	100%	60.373.000,00
		6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	42%	1.733.499.000,00
		7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	70%	72.507.089.802,00
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun Pemberdayaan	100%	17.091.593.750,00
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100%	438.665.000,00
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	100%	221.181.000,00
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100%	41.889.000,00
		4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54%	6.226.643.576,00
		5	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	100%	70.555.000,00
		6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing	100%	47.581.000,00
		7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan kuantitas produk usaha koperasi	100%	75.450.000,00
		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	8.067.344.808,00
5	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	50.326.862.834,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	28.176.671.555,00
				Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	5.456.840.660,00
		2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	53,00%	507.759.000,00
		3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	133.926.434.096,00
		4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	100%	2.503.720.000,00
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional	100%	170.294.000,00
		6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	97,58 Indeks	213.465.000,00
		7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perlindungan perempuan	100%	49.900.000,00
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	90%	961.899.000,00
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terlestariannya cagar budaya	100%	1.253.654.240,00
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional	80%	645.541.000,00
		11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	90%	1.573.005.000,00
6	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Hilirisasi Komoditas	12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	24 CabOr	1.137.200.000,00
		1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman Holtikultura utama ( cabe ) per tahun (ton)	2.149	2.427.040.700,00
		2		Persentase Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	8,50%	1.638.945.440,00
		3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar per tahun (ton/ha)	6,26	19.712.820.000,00
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap	15,672,11 Ton	373.371.500,00
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	71,828,56 Ton	3.141.952.317,00
7	Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	1235,6 Ton	499.435.000,00
		1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan	75%	7.650.000.000,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	70,20%	5.415.000.000,00
	3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian LB3 Yang Dilakukan Sesuai Analisa Kebutuhan	100%	50.000.000,00
	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	100%	400.000.000,00
	5	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	84,33%	2.239.000.000,00
	6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	100,00%	2.071.276.416,00
	7	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100,00%	816.497.806,00
			Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00%	
			Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	
	8	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	191.843.000,00
	9	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	75%	648.236.682,00

#### 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang maka strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kesehatan serta memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana / prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan**

Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing dapat dilakukan dengan Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan, memperhatikan distribusi sebaran tenaga pendidik dan kesehatan pada wilayah kabupaten pinrang dan kebutuhan sarana / prasarana pendidikan dan kesehatan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan berdasarkan analisa dapat ditempuh dengan cara :

- a. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melakukan rehabilitasi sesuai dengan kondisi fisik Sekolah
- b. Menganalisa kebutuhan fasilitas pendidikan suatu wilayah dengan mempertimbangkan rasio antara jumlah fasilitas pendidikan yang telah tersedia (Sekolah/Ruang Kelas) dengan jumlah usia wajib belajar pada wilayah tertentu
- c. Pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan didasari oleh hasil analisa antara fasilitas kesehatan yang tersedia dengan jumlah pasien yang tertangani dan yang dirujuk tiap tahunnya.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tidak merata pada tiap wilayah kabupaten pinrang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan Bimbingan Teknis Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan Profesi masing – masing
- b. Membandingkan data sebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan pada tiap wilayah dengan melakukan subsidi silang dimana wilayah yang berlebihan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatannya dialihkan untuk ditempatkan



pada wilayah – wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

**2. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan**

Untuk Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan maka Pemerintah melakukan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Dalam Mendorong Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah :

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur
- b. Penataan dan penguatan kelembagaan
- c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah
- d. Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- e. Implementasi e-government

**3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik.**

Peranan Pemerintahan Kewilayahan ( Kecamatan dan Kelurahan ) perlu dioptimalkan guna Meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik beberapa hal dilakukan untuk meningkatkan antara lain :

- a. Peningkatan layanan publik dengan cara ketersediaan sarana dan prasarana / fasilitas umum yang memadai
- b. Pelimpahan sebagian wewenang kepada kelurahan dalam hal pelayanan publik

**4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi**

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Untuk Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan sarana/pra-sarana publik yang terintegrasi sehingga Penguatan Aksesibilitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur disetiap Kecamatan Terutama Di Wilayah Pegunungan dan Perbatasan perlu dilakukan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Membangun Konektivitas antara pusat – pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil

kepada pusat pertumbuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah Kecamatan.

- b. Mengoptimalkan kualitas jalan guna melancarkan distribusi produksi ke pusat perekonomian.
- c. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi kewenangan kabupaten.
- d. Pemenuhan Kebutuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan pemukiman khususnya daerah rawan air.

**5. Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan**

Dalam rangka mencapai laju pertumbuhan ekonomi, mengingat kontribusi terbesar struktur PDRB kabupaten pinrang adalah sektor pertanian, Sektor Perdagangan dan Sektor Konstruksi maka perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah yang lebih diprioritaskan pada komoditas pertanian dan Perdagangan. Sementara Distribusi Persentase PDRB tahun 2021 menunjukkan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,68 %. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pariwisata sangat kecil kontribusinya terhadap PDRB kabupaten pinrang. Diharapkan dengan adanya pembenahan pada sektor Pariwisata sehingga dapat memajukan Industri Ekonomi Kreatif. Adapun Beberapa Hal yang Perlu Dilakukan adalah :

- a. Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian seperti Peningkatan Jalan Usaha Tani, Peningkatan Jaringan Irigasi Usaha Tani, serta Pengadaan Alat Mesin Pertanian yang didistribusikan pada Kelompok – Kelompok Tani.
- b. Pencegahan Penyakit Hewan Menular dengan mengoptimalkan tenaga kesehatan hewan untuk melakukan vaksinasi dan memberikan pembinaan kepada kelompok ternak.
- c. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
- d. Melakukan Pendampingan Perizinan Jemput dan Antar Gratis guna mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha UMKM.
- e. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif dengan menggalakkan pelaksanaan event sebagai promosi guna menjaring pangsa pasar regional Sulawesi Selatan

**6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kewirausahaan guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan**

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka, maka perlu dilakukan pelatihan terhadap calon tenaga kerja yang dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan peralatan kerja pada calon tenaga kerja yang sudah dilatih. Dalam hal meminimalisir bantuan tidak tepat sasaran maka diperlukan sinergitas antara Dinas Tenaga Kerja dengan Perangkat Daerah Pemberi Bantuan.

**7. Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian**

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia pada sektor pertanian maka dapat diselenggarakan sekolah lapang terpadu yang mana dalam kegiatan tersebut, penyuluh – penyuluh pertanian dapat mengajarkan, mengarahkan serta mengimplementasikan teknologi pertanian pada kelompok – kelompok tani guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani atau masyarakat.

**8. Meningkatkan produksi tanaman pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah**

Untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan maka perlu dilakukan upaya dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan ketersediaan sarana prasarana pasca panen. Dalam upaya meningkatkan produksi, penggunaan bibit unggul dan pemakaian pupuk yang tepat sangat berpengaruh. Dalam hal ini pengawasan ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting untuk dilaksanakan guna menekan biaya produksi petani. Selain faktor produksi, ketersediaan sarana prasarana pasca panen dibutuhkan untuk meningkatkan nilai ekonomis serta berfungsi sebagai sarana penyimpanan cadangan pangan

**9. meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan peranannya dalam pembangunan**

Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat serta Peningkatan Nilai Wawasan Kebangsaan dengan Optimalisasi Partisipasi Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Organisasi Kepemudaan dan Kaum Perempuan Dalam Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan guna Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan

**10. Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, kestiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan**

Pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik apabila situasi ketentraman dan kedamaian sosial daerah tersebut dalam kondisi baik. Dalam mewujudkan situasi tersebut maka karakter moral, akhlak, budaya, kesetiakawanan sosial musti diperkuat dengan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. meningkatkan peranan tokoh agama, guru agama serta Lembaga Keagamaan untuk membangun hubungan yang harmonis guna mewujudkan kehidupan yang saling menghormati serta menjaga kerukunan antar umat beragama.
- b. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai stakeholder dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal

**11. Peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta berperan aktif dalam pembangunan dengan cara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan**

Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. meningkatkan kapasitas untuk kebijakan publik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi profesional perempuan agar lebih banyak berkiprah dalam kebijakan publik, terutama tugas dalam perspektif gender.
- b. Keterwakilan perempuan dalam penentu kebijakan misal padqa presentase kursi di legislatif
- c. Peran serta PKK yang melibatkan kaum perempuan dalam suatu wilayah dalam aktivitasnya
- d. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan, Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Penurunan Pekerja Anak, pencegahan perkawinan usia dini

**12. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan**

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan serta Peningkatan Sistem Kinerja Pengolahan Persampahan dan Pemukiman Layak Huni Serta Penguatan Mitigasi Bencana dan Kebakaran untuk Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan

pembangunan berkelanjutan guna Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

**13. Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana**

Dalam Upaya melakukan penanganan bencana hal yang perlu diperhatikan adalah mitigasi bencana dengan membuat peta wilayah rawan bencana, kesiapsiagaan dalam merespon kejadian bencana dan pemulihan pasca bencana.

Beberapa hal perlu dilakukan dalam penanggulangan bencana antara lain :

- a. Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Tim Sar (Rescue), Anggota Pemadam Kebakaran dan Warga di Wilayah Rawan Bencana
- c. Penyediaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi Kejadian bencana

**Tabel 4.12**  
**Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah**

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2023	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Strategi	Penjelasan Strategi
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan serta Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing dapat dilakukan dengan Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan, memperhatikan distribusi sebaran tenaga pendidik dan kesehatan pada wilayah kabupaten pinrang dan kebutuhan sarana/prasarana pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	Untuk Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan maka Pemerintah melakukan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Dalam Mendorong Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik.	Peranan Pemerintahan Kewilayahan ( Kecamatan dan Kelurahan ) perlu dioptimalkan guna Meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

3. Penguatan Aksebilitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur disetiap Kecamatan Terutama Di Wilayah Pegunungan dan Perbatasan Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik.	Untuk Mengurangi Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Untuk Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan sarana/prasarana publik yang terintegrasi sehingga Penguatan Aksebilitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur disetiap Kecamatan Terutama Di Wilayah Pegunungan dan Perbatasan perlu dilakukan
4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang Inklusif	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Kontribusi terbesar struktur PDRB kabupaten pinrang adalah sektor pertanian, Sektor Perdagangan dan Sektor Konstruksi maka perlu dilakukan upaya peningkatan produksi komoditas unggulan daerah Sementara Distribusi Persentase PDRB tahun 2021 menunjukkan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,68 %. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pariwisata sangat kecil kontribusinya terhadap PDRB kabupaten pinrang sehingga perlu ditingkatkan agar dapat memajukan Industri Ekonomi Kreatif.
	Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kewirausahaan guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan	Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka, maka perlu dilakukan pelatihan terhadap calon tenaga kerja yang dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan peralatan kerja pada calon tenaga kerja yang sudah dilatih. Dalam hal meminimalisir bantuan tidak tepat sasaran maka diperlukan sinergitas antara Dinas Tenaga Kerja dengan Perangkat Daerah Pemberi Bantuan
	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian	Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia pada sektor pertanian maka dapat diselenggarakan sekolah lapang terpadu yang mana dalam kegiatan tersebut, penyuluh – penyuluh pertanian dapat mengajarkan, mengarahkan serta mengimplementasikan teknologi pertanian pada kelompok – kelompok tani.
	Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah	Untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan maka perlu dilakukan upaya dalam peningkatan produksi tanaman pangan dari ketersediaan sarana prasarana pasca panen. Dalam upaya meningkatkan produksi, penggunaan bibit unggul dan pemakaian pupuk yang tepat sangat berpengaruh. Dalam hal ini pengawasan ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting untuk dilaksanakan guna menekan biaya produksi petani. Selain faktor produksi, ketersediaan sarana prasarana pasca panen dibutuhkan untuk meningkatkan nilai ekonomis serta berfungsi sebagai sarana penyimpanan cadangan pangan

5. Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat serta Peningkatan Nilai Wawasan Kebangsaan dengan Optimalisasi Partisipasi Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Organisasi Kepemudaan dan Kaum Perempuan Dalam Pembangunan Daerah
	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, kestiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan	Pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik apabila situasi ketentraman dan kedamaian sosial daerah tersebut dalam kondisi baik. Dalam mewujudkan situasi tersebut maka karakter moral, akhlak, budaya, kesetiakawanan sosial musti diperkuat
	Sasaran-6: Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta berperan aktif dalam pembangunan dengan cara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan	Peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan dengan cara memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk kaum perempuan berkarya

6. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup serta Adaptasi Terhadap Bencana	Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan serta Peningkatan Sistem Kinerja Pengolahan Persampahan dan Pemukiman Layak Huni Serta Penguatan Mitigasi Bencana dan Kebakaran untuk Meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan guna Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
	Sasaran-11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana	Dalam Upaya melakukan penanganan bencana hal yang perlu diperhatikan adalah mitigasi bencana dengan membuat peta wilayah rawan bencana, kesiap siagaan dalam merespon kejadian bencana dan pemulihan pasca bencana

Adapun Arah kebijakan merupakan suatu bentuk upaya konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan



Tabel 4.13  
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2023	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Arah Kebijakan 2023	Penjelasan Arah Kebijakan
1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan serta Peningkatan sarana prasarana kesehatan guna menjamin mutu pelayanan kesehatan	Untuk meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat maka dimulai dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kesehatan serta pemeliharaan sarana dan prasarananya
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	Akuntabilitas dan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam tata kelola pemerintahan
	Sasaran-2: Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik pada level kecamatan dan desa	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan inovasi dan modernisasi sistem satu pintu dengan pemanfaatan teknologi dan informasi
3. Penguatan Akseibilitas Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur di setiap Kecamatan Terutama di Wilayah Pegunungan dan Perbatasan Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Optimalisasi pemeliharaan infrastruktur diseluruh kecamatan terutama pada wilayah pegunungan dan perbatasan.	peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur secara merata baik didaerah pegunungan, tepi pantai maupun di sektor perkotaan
4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang Inklusif	Sasaran-7: Meningkatnya prouktivitas komoditas unggulan	Peningkatan kapasitas Pengolahan hasil untuk nilai tambah produk-produk unggulan daerah	Peningkatan produktivitas unggulan yang berdaya saing bagi pemulihan iklim usaha bagi sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata
	Sasaran-8: Meningkatkan lapangan kerja/usaha	Peningkatan penyerapan tenaga kerja serta pembinaan kewirausahaan terutama bagi masyarakat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)	Sosialisasi dan pelatihan kompetensi ketenagakerjaan dalam meningkatkan SDM dan kemampuan dalam mengolah potensi yang ada khususnya di dunia usaha dan dunia industri
	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Penguatan koordinasi dan pemanfaatan pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tekonologi pertanian terapan	pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat meningkatkan aplikasi teknologi terapan
	Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Pemeliharaan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah	Pemanfaatan teknologi pertanian serta pengendalian dan pengawasan distribusi peredaran tanaman pangan
5. Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Optimalisasi partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi / Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah	Peran lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga adat, organisasi sosial, politik dan kepemudaan dalam pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif dalam Pembangunan
	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tatanan kehidupan masyarakat	Kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmonis serta berkarakter dan berwawasan kebangsaan
	Sasaran-6: Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Optimalisasi peran serta perempuan dalam kepemimpinan serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.	Peran perempuan dalam pembangunan dengan melibatkan dalam pengambilan keputusan serta program-program pembangunan yaitu pemberdayaan perempuan
6. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup serta Adaptasi Terhadap Bencana	Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Peningkatan kinerja sistem pengelolaan persampahan dan pembangunan prasarana - sarana permukiman layak huni	Penguatan sistem dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup seperti pengolahan persampahan



	Sasaran-11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	peningkatan sarana prasarana - penguatan mitigasi bencana dan kebakaran	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana mitigasi bencana
--	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang sebagaimana tabel berikut :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

**TABEL 4.14  
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023	Tujuan / Sasaran/ Pembangunan Pembangunan Kabupaten Pinrang	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Rp.	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	<b>Tujuan 2: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing</b>	Indeks Pembangunan Manusia		72,35		
		Sasaran 3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan		63,65		
			Indeks Kesehatan		77,85		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100%	5.093.645.176,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		100%	48.375.159.045,00	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama		100%	21.908.469.947,00	

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

			Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100%	5.010.000.000,00	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik		53,00%	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		100%	171.599.433.712,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan		100%	27.270.953.425,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional		100%	19.395.439.000,00	DINAS KESEHATAN
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	<b>Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan</b>	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)		62		
		Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang		67		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindak Lanjuti		85%	5.246.703.635,00	Inspektorat

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki STANDAR DAN SOP		50%	486.035.402,90	Inspektorat
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik		100%	893.000.000,00	Bappelitbangda
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan E - Government		100%	3.463.780.000,00	KOMINFOSANDI
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN		89,01%	1.218.364.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang
			Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi		75,00%		
			Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik		75,00%		
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik		88,2		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database		100%	1.493.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		100%	172.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat		91,30%	206.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten		4,76%	186.000.000,00	DPMPTSP
3	Penguatan Aksesibilitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur disetiap Kecamatan Terutama Di Wilayah Pegunungan dan Perbatasan Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	<b>Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pa- sarana publik</b>	Indeks Perkembangan Wilayah		85		
		Sasaran 9 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur		84,5		
			Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )		75,25		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100%	3.530.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		93,80%	30.133.397.106,00	PSDA
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		100%	6.868.837.786,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		98,81%	6.270.197.093,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		3,30%	10.956.235.293,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		82,77%	68.561.048.582,62	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan yang Inklusif	<b>Tujuan 4 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata</b>	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan		7,37		
			Indeks Gini		0,315		
		Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi		6,42		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman Holtikultura utama ( cabe ) per tahun (ton)		2.149	2.500.325.650,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun		8,50%	1.502.401.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar per tahun (ton/ha)		6,26	34.845.325.705,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

			Persentase Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun		8,50%	130.000.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap		15,672,11 Ton	2.425.000.000,00	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		71,828,56 Ton	3.888.000.000,00	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi		1235,6 Ton	494.000.000,00	Dinas Perikanan
		Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka		3,06		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai Berbasis Kompetensi		2,50%	301.155.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.		60%	84.125.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro		100%	230.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial		100%	202.000.000,00	Dinas Sosial
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI		42%	1.270.342.154,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		<b>Tujuan 7 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan</b>	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar)		6,26 ton/ha		
		Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya		6%		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani Penerima Bantuan		25	1.365.806.400,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan		280%		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota		70%	380.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )		38%	1.272.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
5	Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam pembangunan	<b>Tujuan 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat</b>	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		45		
		Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif		82		



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan		100%	1.160.000.000,00	KESBANGPOL
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Terlestarikan		100%	1.300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan		90%	911.936.000,00	
		Sasaran 5 : Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani		92		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara		100%	1.584.810.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		100%	370.000.000,00	KESBANGPOL
		Sasaran 6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		75,61 (IDG)		
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender		97,58	129.300.000,00	DP2KBP3A

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

6	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi	<b>Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		69		
		Sasaran 10 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)		36,84		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan		75%	6.636.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		70,20%	285.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian LB3 Yang Dilakukan Sesuai Analisa Kebutuhan		100%	35.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI		100%	390.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana		175		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		84,33%	2.076.900.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota		100,00%	2.310.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana		100,00%	227.629.091,00	Dinas Sosial
			Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100,00%		
			Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100,00%		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100%	245.000.000,00	

#### 4.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 – 27 September 2015 berlangsung Sidang Umum PBB yang dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Sidang itu akan menyepakati adopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk periode 2015 – 2030. Tujuan Pembangunan berkelanjutan ini akan menggantikan Millenium Development Goals (MDG). Dokumen itu berisi 17 tujuan antara lain :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini disajikan tabel keterkaitan antara Prioritas Daerah dengan 17 tujuan dalam SDGs :

**Tabel 4.15**  
**Keterkaitan SDGs dengan prioritas daerah dan sasaran daerah**

No	Tujuan SDGs	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan 2023
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang inklusif.	Meningkatnya lapangan kerja/usaha
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang inklusif.	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat

No	Tujuan SDGs	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan 2023
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan.	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Terhadap Bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang inklusif.	Meningkatnya lapangan kerja/usaha
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah

10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah yang inklusif.	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Terhadap Bencana.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Terhadap Bencana.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Adaptasi Terhadap Bencana.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan.	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik

4.6 Integrasi SPM

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, menyatakan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkanyang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsipkesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan,kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.Dalam mandat penyelenggaraan SPM Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mem-prioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yg berkaitan dengan Pelayanan Dasar yg berpedoman pd SPM yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingatkan bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasaryang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataanruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman,ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial. Selain itu,penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi pentingmengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitandengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerahkabupaten/kota.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materimuatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu PelayananDasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM,pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

Tabel 4.16  
Materi Muatan SPM

No	Jenis SPM	Muatan SPM		
		Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar.
1	Pendidikan	pendidikan anak usia dini;	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) Tata cara pemenuhan standar	Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
		pendidikan dasar; dan	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) Tata cara pemenuhan standar	Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
		pendidikan kesetaraan.	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) Tata cara pemenuhan standar	usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.
2	Kesehatan	pelayanan kesehatan ibu hamil;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Kepada semua ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerjanya tersebut dalam kurun waktu satu tahun
		pelayanan kesehatan ibu bersalin;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Kepada semua ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerjanya tersebut dalam kurun waktu satu tahun
		pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun



		elayanan kesehatan balita;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Semua balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
		elayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
		elayanan kesehatan pada usia produktif;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
		elayanan kesehatan pada usia lanjut;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
		elayanan kesehatan penderita hipertensi;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
		elayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
		elayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
		elayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
		elayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus),	a). Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b). standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c). petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
3	Pekerjaan Umum	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan	1) Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa; 2) Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar.	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
		penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestic.	Setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.
4	Perumahan Rakyat	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan	a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan b) Kualitas Barang/Jasa	Setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam.

		fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan b) Kualitas Barang/Jasa	Setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta; b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai; c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	a) Standar operasional prosedur Satpol PP; b) Standar sarana prasarana Satpol PP; c) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan d) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kabupaten/kota serta Perkada dengan kriteria : a) yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau b) berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada
		pelayanan informasi rawan bencana;	a) Prosedur operasional penanggulangan bencana; b) Sarana prasarana penanggulangan bencana; c) Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan d) Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	Setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota
		pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	a) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi; b) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; c) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota
			dan evakuasi; d) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia; e) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan f) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.	
		pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan		yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
		pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.		
6	Sosial	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Pantli Sosial;	Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.	Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan: a) Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Pantli Sosial;
		b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Pantli Sosial;		b) Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Pantli Sosial;

		c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;		c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
		d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan		d) Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
		e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.		e) Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

Tabel 4.17  
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

PENDIDIKAN

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

KESEHATAN

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

PEKERJAAN UMUM

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

PERUMAHAN RAKYAT

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

TRANTIBUMLINMAS

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun
Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

SOSIAL

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Batas Waktu Capaian
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

RKPD Kabupaten Pinrang mengusung Standar Pelayanan Minimal dalam salah satu prioritas pembangunannya, Berikut ini disajikan keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2022 dengan Standart Pelayanan Minimal sebagai berikut :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

**Tabel 4.18**

**Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dengan Standart Pelayanan Minimal**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun (SD/MI/SDLB)	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB)	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		APK Paket A APK Paket B	Paket A = 100 % Paket B = 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Melek Huruf (AMH)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		APK Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Usia SD yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Usia Lanjut (USILA) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit Tuberkulosis (TB) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		% Warga Negara Penderita Penyakit HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur yang menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum	100%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
pemenuhan pelayanan dasar							
					Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan pengelolaan air minum dan limbah	100%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik dalam rangka meminimalisir potensi bencana serta siaga penanggulangan bencana	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	% Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		% Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Tingkat Waktu Tanggap (Respond Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	55,46%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Distribusi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yng lebih merata, Perluasan Lapangan Kerja dan	Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	% anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

Prioritas	Sasaran Pembangunan	Jenis Pelayanan dasar (SPM)	Indikator Pencapaian	Program Prioritas	Capaian	Target	Perangkat daerah
Pengentasan Kemiskinan							
		rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		% warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		% warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		% warga negara atau gelandangan dan pengemis penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Penanganan Bencana	% warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial

#### **4.7 Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pinrang**

Pokok – pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2022 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pokok – pokok pikiran DPRD merupakan saran dan masukan dari DPRD pada rencana Pembangunan Daerah. Saran dan Masukan dari DPRD menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Mekanisme pengusulan pokok – pokok pikiran DPRD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pokok – pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan
2. Pokok – pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD
3. Pokok – pokok pikiran DPRD tersebut selanjutnya di verifikasi oleh Sekretariat DPRD, Lalu hasil verifikasi tersebut ditindak lanjuti oleh Bappelitbangda untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing – masing

Adapun pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Pinrang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan
2. Peningkatan kualitas dan sarana prasarana kesehatan masyarakat
3. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian
4. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
5. Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.



**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1 Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan menunjukkan kapasitas riil kemampuan kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah, baik berupa program pembangunan daerah maupun berupa program perangkat daerah.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada BAB III disajikan bahwa Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar **Rp. 1.405.014.142.371,-** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 143.605.257.488,-** dan Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 1.203.848.287.501,-** serta Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 57.560.597.382,-**. Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai Program / Kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah sebesar **Rp. 1.440.014.142.371,-**

Tabel 5.1

Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023

No Rekening	Uraian	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.440.014.142.371</b>	1.471.137.115.292
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.022.609.237.040</b>	1.029.275.324.951
5.1.1	Belanja Pegawai	626.337.082.293	634.548.750.442
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	291.984.315.713	289.743.155.167
5.1.5	Belanja Hibah	101.553.136.037	102.180.348.771
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.734.702.997	2.803.070.571
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>272.226.911.015</b>	288.017.337.685
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	272.226.911.015	288.017.337.685
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>9.737.500.000</b>	10.506.250.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.737.500.000	10.506.250.000
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>135440.494.316</b>	143.338.202.656
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	2.133.595.750	2.185.899.686
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	133.306.898.566	141.152.302.970

## 5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan propinsi Sulawesi Selatan.

Tema pembangunan Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan Isu Strategis Kabupaten Pinrang, sehingga tema pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah **“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia”**. Berdasarkan tema pembangunan tersebut maka disusun prioritas daerah yang terdiri atas 6 prioritas.



Tabel 5.2  
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Pembangunan Kabupaten Pinrang	Program Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
						Target		Target		
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5			6	7	8
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	(3) Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	8.067.344.808,00	100%	6.059.680.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	50.326.862.834,00	100%	78.716.372.220	
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	28.176.671.555,00	100%	49.335.381.780	
					Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	5.456.840.660,00	100%	8.382.620.000	
			2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	53,00%	507.759.000,00	53,00%	1.119.250.000	

			3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	133.926.434.096,00	100%	133.926.434.096,00	DINAS KESEHATAN
			4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	100%	2.503.720.000,00	100%	10.437.000.000	
			5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional	100%	170.294.000,00	100%	413.000.000	
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindak Lanjuti	85%	4.739.825.000,00	85%	5657729450	Inspektorat
			2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki STANDAR DAN SOP	50%	437.100.000,00	50%	539487475	
			3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100%	902.682.000,00	100%	905.075.000,00	Bappelitbangda

			4	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan E - Government	100%	3.463.780.000,00		4.580.000.000,00	KOMINFOSANDI
			5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	89,01%	998.656.655,00	89,01%	1.048.708.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang
					Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi	75,00%		75,00%		
					Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	0,75		0,75		
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database	100%	1.493.000.000,00	100%	1622000000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	176.000.000,00	100%	182.000.000,00	
			3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	91,30%	206.500.000,00	91,30%	255.000.000,00	
			4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	4,76%	273.636.000,00	4,76%	347.500.000,00	DPMPTSP

3	Penguatan Akseibilitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur disetiap Kecamatan Terutama Di Wilayah Pegunungan dan Perbatasan Guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	3.530.000.000,00	100%	3.530.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80%	19.562.554.430,00	93,80%	8.125.000.000,00	PSDA
			3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	7.430.724.249,00	100%	7.995.721.564,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
			4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,42%	6.291.450.007,00	99,42%	7.227.216.802,00	
			5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,30%	8.955.574.728,00	3,30%	12.161.748.822,00	
			6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	98,26%	48.164.897.098,00	98,26%	63.174.698.000,00	

4	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Komoditi Unggulan Daerah Yang Inklusif	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman Holtikultura utama ( cabe ) per tahun (ton)	2.149	2.427.040.700,00	2.149	1.959.910.400,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			2		Persentase Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Pernakan dan Perkebunan per tahun	8,50%	1.638.945.440,00	9%	3.282.000.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar per tahun (ton/ha)	6,26	19.712.820.000,00	6,26	25.088.373.225,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap	15,672,11 Ton	373.371.500,00	15,672,11 Ton	2.400.000.000,00	Dinas Perikanan
			5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	71,828,56 Ton	3.141.952.317,00	71,828,56 Ton	2.791.700.000,00	
			6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsums	1235,6 Ton	499.435.000,00	1235,6 Ton	617.300.000,00	
		Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai Berkbasis Kompetensi	2,50%	247.796.900,00	2,50%	301155000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60%	88.573.600,00	60%	86.625.000,00	

			3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	100%	112.130.000,00	100%	112.130.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang		
			4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100%	438.665.000,00	100%	438.665.000,00	Dinas Sosial		
			5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	42%	1.733.499.000,00	42%	1.733.499.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		
		Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani Penerima Bantuan	25	1.767.398.500,00	25	1.767.398.500,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	70%	380.000.000,00	70%	5.010.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan		
			2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38%	887.750.000,00	38%	875.000.000,00			

5	Peningkatan Partisipasi Lembaga Sosial Masyarakat dan Perempuan Dalam Pembangunan	Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	100%	1.010.044.000,00	100%	1160000000	KESBANGPOL
			2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Terlestarikan	100%	1.253.654.240,00	100%	1185800000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	90%	961.899.000,00	90%	961.899.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Sasaran 5 : Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	95%	1.487.485.000,00	95%	1785575000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			2	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	299.050.000,00	100%	370.000.000,00	KESBANGPOL

		Sasaran 6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	97,58	213.465.000,00	97,58	213.465.000,00	DP2KBP3A
6	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup serta Adaptasi Terhadap Bencana	Sasaran 10 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan	75%	7.650.000.000,00	75%	8150000000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	70,20%	5.415.000.000,00	70,20%	5215000000	
			3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian LB3 Yang Dilakukan Sesuai Analisa Kebutuhan	100%	50.000.000,00	100%	60.000.000,00	
			4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	100%	400.000.000,00	100%	300.000.000,00	
		Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	84,33%	2.239.000.000,00	84,33%	2.147.900.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



			2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%	2.071.276.416,00	100,00%	4.320.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100,00%	816.497.806,00	100,00%	816.497.806,00	Badan Penanggulangan Bencana
					Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00%		100,00%		
					Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%		100,00%		
			4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	191.843.000,00	100%	191.843.000,00	Dinas Sosial

**5.3 Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**

Perumusan Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam beberapa Urusan dan Unsur pemerintahan antara lain 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, dan urusan Bidang sosial. Untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, pertanian, lingkungan hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 8 (Delapan) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi, disamping urusan tersebut berdasarkan permendagri 90 Tahun 2019 ditambah dengan 5 (lima) unsur antara lain Unsur Pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (Enam) unsur yaitu Perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengelolaan Perbatasan dan Pengelolaan Penghubung. Untuk unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah Inspektorat Daerah, serta Unsur pemerintahan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Secara rinci rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				424,957,228,230						536,848,868,001		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	332,421,756,243							100 %	393,235,564,001	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	541,699,765							100 %	567,920,000	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	70,486,115	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 2 Dokumen	77,440,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	34,953,220	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	31,460,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19,804,475	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	14,520,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15,195,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	14,520,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,450,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	15,730,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	124,356,955	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Laporan	136,730,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	259,454,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Laporan	277,520,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	97 %	328,655,819,028						97 %	387,882,440,000		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3394 Orang/b	327,448,444,828	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3394 Orang/b	387,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	257,207,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	314,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	908,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	314,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,081,600	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	25,410,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	12 Laporan	21,285,600	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	27,830,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang tersusun tepat waktu	100 %	95,370,725						100 %	83,490,000	
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	95,370,725	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	83,490,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %	668,135,010						100 %	568,700,000	
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	67,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	150 Paket	70,180,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	100,959,590	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	42,350,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	249,675,420	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	274,670,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	22 Orang	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	22 Orang	181,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	609,550,375						100 %	829,814,000	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	57,810,375	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Paket	26,620,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Paket	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	101,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Paket	108,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	135,540,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	45 Dokumen	206,910,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	472,384,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100 %	562,800,000						100 %	1,617,900,000	
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	183,300,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Unit	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	301,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	50 Unit	363,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	28,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	55 Unit	605,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	332,548,560						100 %	537,190,000	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	203,773,560	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	385,990,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	128,775,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	151,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	955,832,780						100 %	1,148,110,001	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	113,130,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Unit	158,510,001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 47 Unit	58,300,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Unit 47 Unit	131,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit 1 Unit	18,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Unit 1 Unit	5,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	756,402,780	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Unit	720,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Unit	133,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional		Daerah			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	92,027,719,857				99,31 % 98,01 % 98,20 % 98,82 %	142,494,054,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD Yang Terakreditasi Minimal B	87 %	50,326,862,834				87 %	78,716,372,220			
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	1,999,974,400	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	8 Ruang	2,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	400,044,015	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	10 Unit	1,694,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	7,762,655,864	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	30 Ruang	18,150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1,000,183,950	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	4 Ruang	544,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	17 Paket	990,350,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	17 Paket	1,089,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	327 Satuan Pendidikan	100,479,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	327 Satuan Pendidikan	123,420,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	327 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	303,900,980	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	327 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	332,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	160 Peserta Didik	347,526,625	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	160 Peserta Didik	393,250,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang	92,366,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	100 Orang	122,210,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 100 Orang	254,299,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	0 Orang 100 Orang	181,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	327 Satuan Pendidikan	168,943,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	327 Satuan Pendidikan	2,033,262,220	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	327 Satuan Pendidikan	36,734,300,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	327 Satuan Pendidikan	46,827,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0 Orang 327 Orang	171,840,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 7 - 12 Tahun	0 Orang 327 Orang	421,080,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP Yang Terakreditasi Minimal B	73.68 %	28,176,671,555						73.68 %	49,335,381,780	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	221,735,790	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	8 Unit	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	10,668,910,240	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	15 Ruang	9,963,140,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	221,735,790	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	7 Ruang	10,617,273,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	400,073,580	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	5 Unit	665,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	440,050,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	8 Paket	484,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	9 Paket	400,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	9 Paket	665,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	40499 Peserta Didik	43,007,085	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	40499 Peserta Didik	65,340,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	58 Satuan Pendidikan	74,034,070	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	58 Satuan Pendidikan	302,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	160 Peserta Didik	454,509,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	160 Peserta Didik	435,479,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	58 Satuan Pendidikan	62,716,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	58 Satuan Pendidikan	248,050,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	58 Satuan Pendidikan	15,189,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia 13 - 15 Tahun	58 Satuan Pendidikan	21,189,299,780	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD Yang terakreditasi	95 %	8,067,344,808						95 %	6,059,680,000	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	884,166,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia Dini	3 Unit	1,210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	604,272,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia Dini	3 Unit	605,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	559,292,938	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia Dini	3 Unit	605,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	550,400,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia Dini	5 Paket	605,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang 100 Orang	182,628,650	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia Dini	0 Orang 100 Orang	60,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	223 Satuan Pendidikan	902,348,220	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia Dini	223 Satuan Pendidikan	121,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	223 Satuan Pendidikan	4,384,237,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Anak Usia Dini	223 Satuan Pendidikan	2,853,180,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH) 15-24	100 %	5,456,840,660						100 %	8,382,620,000	
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket 3 Paket	68,993,260	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	0 Paket 3 Paket	60,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan 22 Satuan Pendidikan	1,826,365,400	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	0 Satuan Pendidikan 22 Satuan Pendidikan	4,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan 22 Satuan Pendidikan	243,470,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	0 Satuan Pendidikan 22 Satuan Pendidikan	133,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21 Satuan Pendidikan	3,318,012,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	21 Satuan Pendidikan	4,189,020,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	50 %	507,759,000						50 %	1,119,250,000		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Kependidikan yang lulus pelatihan untuk bidang tugasny	90 %	507,759,000						90 %	1,119,250,000		
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	0 Dokumen 4 Dokumen	322,946,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Tenaga Pendidik	0 Dokumen 4 Dokumen	998,250,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	0 Laporan 12 Laporan	184,813,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tenaga Pendidik	0 Laporan 12 Laporan	121,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		125,417,879,988								214,720,150,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	49,888,126,728						100 %	65,036,550,000	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang terselesaikan Tepat waktu	100 %	200,870,600						100 %	155,100,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,400,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	9,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,950,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,090,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,575,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	9,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	25,180,600	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	142,475,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Laporan	85,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	45,358,261,128						100 %	59,363,400,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang/bulan	44,652,674,128	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	650 Orang/bulan	58,500,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	17,417,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	27,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	592,020,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	750,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	39,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	71,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	36,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Asset terselesaikan tepat waktu	1 laporan	11,900,000						1 laporan	15,200,000	
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11,900,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	15,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian dibuat tepat waktu	2 dokumen	439,540,000						2 dokumen	305,000,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	97,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	200 Paket	105,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	4,980,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	37,060,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	48,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	300,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Orang	135,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	400,338,000						100 %	379,700,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,988,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	26,100,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	40 Dokumen	33,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	55,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	44,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	314,450,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	241,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan dinas, Peralatan dan Mesin lainnya	100 %	378,200,000						100 %	1,520,000,000	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	191,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Unit	51,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	187,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Umum kantor terpenuhi	100 %	261,200,000						100 %	365,650,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	230,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	290,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	31,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	39,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang yang terpelihara	100 %	2,837,817,000						100 %	2,932,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	157,330,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	50 Unit	176,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Unit	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,675,287,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	2,750,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	72,531,526,260						100 %	138,255,100,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang baik	100 %	30,964,904,110						100 %	79,802,000,000	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	2,158,704,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Unit	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1,149,474,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Unit	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	2,675,287,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	5 Unit	800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1,720,842,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	2 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	10,635,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	5 Unit	23,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	4,845,358,110	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	17 Unit	18,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	5,550,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Paket	5,040,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	2,000,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Paket	6,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	80,375,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	10 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	149,364,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Paket	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	41,462,498,150						100 %	52,027,600,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7215 Orang	1,609,670,980	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	7215 Orang	2,140,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6726 Orang	334,670,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	6726 Orang	102,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6740 Orang	369,920,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	6740 Orang	510,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12587 Orang	2,773,682,380	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	12587 Orang	2,310,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69404 Orang	1,749,215,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	69404 Orang	1,830,000,000	Dinas Kesehatan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	232011 Oran	g 996,670,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	232011 Oran	990,000,000 <sup>9</sup>	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54247 Orang	607,871,880	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	54247 Orang	690,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69870 Orang	297,570,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	69870 Orang	245,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9078 Orang	212,824,060	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	9078 Orang	170,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1037 Orang	142,070,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1037 Orang	280,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	629 Orang	347,970,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	629 Orang	420,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7531 Orang	281,180,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	7531 Orang	330,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1,773,267,990	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	867,364,700	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,250,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	777,900,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	580,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1,002,615,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,470,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	2,146,577,610	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	2,900,000,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	245,580,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	340,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	912,165,800	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	680,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1037 Orang	23,845,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1037 Orang	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan terselenggaranya playanan kesehatan jiwa dan NAPZA	0 Orang 1 Paket	245,620,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	0 Orang 1 Paket	190,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	36,660,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	43,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1,844,622,950	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	2,680,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	20,442,004,800	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	25,800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	239,870,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	75,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18 Unit	205,800,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	18 Unit	454,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	62,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Unit	78,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	87286 Keluar	ga 913,290,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	87286 Keluar	ga 110,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dokumen Standarisasi data informasi pelayanan kesehatan yang disusun tepat waktu	1 dokumen	44,124,000						1 dokumen	6,416,500,000	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	44,124,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	51,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Izin Rumah sakit Kelas C dan D dan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten	18 PKM/RS	60,000,000						18 PKM/RS	9,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit	60,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	17 Unit	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	100 %	2,503,720,000						100 %	10,437,000,000	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan	12 kecamatan	16,830,000						12 kecamatan	22,000,000	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	16,830,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	17 PKM	2,486,890,000						17 PKM	10,350,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	2,486,890,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	550 Orang	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %	324,213,000						100 %	578,500,000	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian izin apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	12 kecamatan	49,980,000						12 kecamatan	118,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	32,640,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	41,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	103 Sarana	17,340,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	103 Sarana	22,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.02		<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	Tersedianya sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan	12 kecamatan	34,000,000						12 kecamatan	49,000,000	
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	34,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	49,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Terlaksananya kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	12 kecamatan	115,325,000						12 kecamatan	152,000,000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	115,325,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	152,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	12 kecamatan	124,908,000						12 kecamatan	154,000,000		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan terselenggaranya post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	0 Unit 1 Paket	124,908,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	0 Unit 1 Paket	154,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional	100 %	170,294,000					100 %	413,000,000			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan advokasi,pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten kota	100 %	170,294,000					100 %	413,000,000			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	170,294,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	413,000,000	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						104,364,664,249				143,620,248,562		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	90,552,190,356					100 %	94,495,749,464			
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang terselesaikan Tepat waktu	100 %	54,260,000					100 %	59,402,233			
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,820,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen	6,820,000	Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,155,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	3,887,975	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,205,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,413,377	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,155,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	3,887,975	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,205,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,413,377	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30,720,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Laporan	29,033,715	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	31,220,157,796						100 %	28,634,633,325	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bu	lan 29,221,057,796	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	348 Orang/bu	lan 26,584,427,509	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1,982,760,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	2,031,585,570	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,670,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	9,047,422	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	7,670,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	9,572,824	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Asset terselesaikan tepat waktu	1 laporan	3,410,000						1 laporan	3,183,936	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3,410,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	3,183,936	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian dibuat tepat waktu	2 dokumen	159,645,000						2 dokumen	157,771,219	
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	9,645,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	6,010,599	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	12 Orang	150,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Orang	151,760,620	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	326,520,000						100 %	430,077,728	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	41,520,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	30 Dokumen	46,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 Laporan	261,577,728	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan dinas, Peralatan dan Mesin lainnya	100 %	1,661,200,000						100 %	1,998,175,123	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	460,100,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	151,600,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	4 Unit	271,810,350	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	583,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	9 Unit	298.667,250	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	466,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	10 Unit	927,697,523	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Umum kantor terpenuhi	100 %	2,097,247,560						100 %	2,175,195,900	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,197,247,560	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	1,247,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	927,270,900	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang yang terpelihara	100 %	29,750,000						100 %	37,310,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	29,750,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	19 Unit	37,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase meningkatnya pelayanan BLUD	100 %	55,000,000,000						100 %	61,000,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	55,000,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit Kerja	61,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan	100 % 100 %	13,812,473,893						100 % 100 %	49,124,499,098	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang baik	100 %	13,762,473,893						100 %	49,069,499,098	
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Gedung	583,060,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	3 Gedung	679,715,838	Dinas Kesehatan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	974,740,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	12,004,673,893	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	13,128,433,260	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Paket	200,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	52,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Izin Rumah sakit Kelas C dan D dan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten	18 PKM/RS	50,000,000						18 PKM/RS	55,000,000	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 RS	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 RS	55,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										34,950,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	22,589,483,943						100 %	34,950,000,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang baik	100 %	16,989,483,943						100 %	29,000,000,000	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	6,717,440,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bungi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Unit	23,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	10,272,043,943		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Unit	6,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	5,000,000,000						100 %	5,300,000,000	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	5,000,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bungi	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	5,300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Izin Rumah sakit Kelas C dan D dan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten	18 PKM/RS	600,000,000						18 PKM/RS	650,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	600,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bungi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Unit	650,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,000,000,000		2,100,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	2,000,000,000						100 %	2,100,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	2,000,000,000						100 %	2,100,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2,000,000,000	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	2,100,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							600,000,000		630,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	600,000,000						100 %	630,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	600,000,000						100 %	630,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	600,000,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	630,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,650,000,000				2,800,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	2,650,000,000						100 %	2,800,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	2,650,000,000						100 %	2,800,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2,650,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	2,800,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,150,000,000				1,200,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,150,000,000						100 %	1,200,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,150,000,000						100 %	1,200,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,150,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,100,000,000				1,150,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,100,000,000						100 %	1,150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,100,000,000						100 %	1,150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,100,000,000	Kab. Pinrang, Lansirang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,150,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,600,000,000				1,680,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,600,000,000						100 %	1,680,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,600,000,000						100 %	1,680,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,600,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,680,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,200,000,000				1,260,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,200,000,000						100 %	1,260,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,200,000,000						100 %	1,260,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,200,000,000	Kab. Pinrang, Paletang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,260,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,250,000,000				2,360,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	2,250,000,000						100 %	2,360,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	2,250,000,000						100 %	2,360,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2,250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	2,360,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,750,000,000				1,830,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,750,000,000						100 %	1,830,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,750,000,000						100 %	1,830,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,750,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,830,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,000,000,000		1,050,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,000,000,000						100 %	1,050,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,000,000,000						100 %	1,050,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,050,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,300,000,000		1,365,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,300,000,000						100 %	1,365,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,300,000,000						100 %	1,365,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,300,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,365,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,100,000,000		2,200,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	2,100,000,000						100 %	2,200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	2,100,000,000						100 %	2,200,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2,100,000,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,750,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,650,000,000						100 %	1,750,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,650,000,000						100 %	1,750,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,650,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,750,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,600,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,550,000,000						100 %	1,600,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,550,000,000						100 %	1,600,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,550,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,260,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,200,000,000						100 %	1,260,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,200,000,000						100 %	1,260,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,200,000,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,260,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						650,000,000				685,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	650,000,000						100 %	685,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	650,000,000						100 %	685,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	650,000,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	685,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,250,000,000				1,300,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan	100 %	1,250,000,000						100 %	1,300,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan	100 %	1,250,000,000						100 %	1,300,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,250,000,000		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN						87,491,775,132				113,705,242,734	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06 %	12,280,215,660						82,06 %	13,838,169,112	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	52,725,000						100 %	240,941,613	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,875,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	65,297,529	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	7,229,992	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,975,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	8,075,177	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,500,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	6,746,839	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,375,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	7,079,589	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	14,560,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	17 Laporan	14,108,600	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1,440,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	132,403,887	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya laporan administrasi keuangan sesuai target dan berkualitas	99 %	6,863,653,663						99 %	8,569,393,017	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersusun tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan 73 Orang/bul	an 5,965,095,878	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan 73 Orang/bul	an 7,453,955,787	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	285,351,785	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	166,698,433	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase terpenuhinya laporan administrasi keuangan sesuai target dan berkualitas	12 Dokumen 98.2 %	570,500,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen 98.2 %	892,151,598	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16,220,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	18,128,220	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	17 Laporan	26,486,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	17 Laporan	38,458,979	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase laporan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang sesuai analisa jumlah kebutuhan	100 %	<b>6,680,000</b>						100 %	<b>8,481,132</b>	
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,380,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	2,554,189	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5,300,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	5,926,943	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai aturan	100 %	<b>284,569,995</b>						100 %	<b>296,232,397</b>	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	65,200,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	71,386,567	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	19,370,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	24,104,410	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30 Orang	199,999,995	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	30 Orang	200,741,420	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	100 %	<b>481,115,000</b>						100 %	<b>541,174,852</b>	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	19,798,625	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,015,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	7,763,058	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	19,500,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	21,402,480	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	52,100,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	19,975,761	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	300,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	94 Laporan	336,194,628	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	95,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	121,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	1,131,831,000						100 %	1,072,621,483	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 kendaraan 1 Unit	966,947,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 kendaraan 1 Unit	96,800,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit 16 Unit	19,150,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	16 unit 16 Unit	60,500,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	109,554,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	28 Unit	300,140,500	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Sarana 2 Unit	36,180,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Sarana 2 Unit	615,180,983	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	1,197,879,000						100 %	448,714,248	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terdistribusi secara efektif dan efisien	12 Laporan 1056 Surat	1,050,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan 1056 Surat	15,972,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik sesuai kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Bangunan 12 Laporan	155,424,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 Bangunan 12 Laporan	166,562,213	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor sesuai analisa kebutuhan	12 Laporan 32 laporan	1,041,405,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan 32 laporan	266,180,035	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	2,261,762,002						100 %	2,660,610,370	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah laporan pemenuhan jasa pemeliharaan n, biaya pemeliharaaa n, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	31 Unit 12 Laporan	1,634,412,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	31 Unit 12 Laporan	2,234,878,773	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Laporan 122 Unit	240,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan 122 Unit	314,023,429	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	281,600,002	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	4 Unit	39,355,008	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	105,750,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	4 Unit	72,353,160	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	7,430,724,249					100 %	7,995,721,564		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100 % 100 %	7,430,724,249					100 % 100 %	7,995,721,564		
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen JAKSTRADA yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan teknis SPAM Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	42,850,000	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	363,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkata n/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah izin yang diberika Jumlah kerja sama penyel pemerintah Pusat dan Pe Jumlah kerja sama penyel pemerintah Pusat dan Pe Jumlah Konsultasi Superv Pembangunan/Peningkat SPAM	1 Izin 1 Perjanjian 17 Perjanjian 3 Dokumen	381,560,000	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Izin 1 Perjanjian 17 Perjanjian 3 Dokumen	417,335,050	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	40 Liter/Detik	1,654,494,230	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	40 Liter/Detik	110,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 Liter/Detik	1,651,454,024	Kab. Pinrang, Suppa, Maritengngae Kab. Pinrang, Duampanua, Kaliang Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	10 Liter/Detik	110,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	150 SR	3,700,365,995	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	150 SR	110,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	75 %	648,236,682						75 %	1,803,907,149	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan TPA Regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	9.31 Ha	648,236,682						9.31 Ha	1,803,907,149	
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	69,355,000	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	363,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Luas TPA Regional yang dibangun direhabilitasi	36953 Rumah Tangga 11 Ha	578,881,682	Kab. Pinrang, Patampanua, Malimpung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	36953 Rumah Tangga 11 Ha	1,330,907,149	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99 %	6,291,450,007					99 %	7,227,216,802		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja Persentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T Persentase rumah tinggal bersanitasi	87.42 % 6.3 % 0.44 % 99.42 %	6,291,450,007					87.42 % 6.3 % 0.44 % 99.42 %	7,227,216,802		
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	343,850,007	Kab. Pinrang, Paiteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	363,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	100 Rumah Tangga	5,000,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	100 Rumah Tangga	110,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	650 Rumah 14 Unit	39,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	650 Rumah 14 Unit	261,807,700	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	450 Rumah 450 Rumah Tangga	884,400,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	450 Rumah 450 Rumah Tangga	6,245,789,102	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	5520 Rumah Tangga 5520 Rumah 5520 Rumah 100 % 100 %	24,200,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	5520 Rumah Tangga 5520 Rumah 5520 Rumah 100 % 100 %	26,620,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,30 %	8,955,574,728						3,30 %	12,161,748,822	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Daerah yang Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	80.98 %	8,955,574,728						80.98 %	12,161,748,822	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pinrang, Paletang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	363,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	56950 M	7,535,544,728	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	56950 M	9,173,200,410	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	207000 M	1,120,030,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	207000 M	2,515,548,412	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	0,06 Rasio	25,000,000						0,06 Rasio	624,771,359	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permukiman di kawasan strategis daerah yang telah tertata	70 %	25,000,000						70 %	624,771,359	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen teknis infastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Jumlah permukiman di Kawasan strategis daerah yang dibangun Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Permukima 3 Sistem Jaringan	n 25,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen 1 Permukima 3 Sistem Jaringan	n 624,771,359	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100 %	390,949,900						100 %	253,065,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0.075 Rasio	390,949,900						0.075 Rasio	253,065,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	250 IMB 3 Dokumen 0.00083 Rasio	390,949,900	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	250 IMB 3 Dokumen 0.00083 Rasio	153,065,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0,0192 Rasio	2,218,127,500						0,0192 Rasio	5,338,233,523	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di Daerah	80.58 %	2,218,127,500						80.58 %	5,338,233,523	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	130,831,119	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Penerangan jalan umum yang terpasang	3 Gedung 2 Kawasan 624 Unit	832,625,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	3 Gedung 2 Kawasan 624 Unit	3,720,198,240	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara	2 Bangunan 1 Kawasan 2671 Unit	1,260,502,500	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	2 Bangunan 1 Kawasan 2671 Unit	1,487,204,164	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	98 %	48,164,897,098						98 %	63,174,698,000	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94.2 % 0 % 94.2 %	48,164,897,098						94.2 % 0 % 94.2 %	63,174,698,000	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	181,500,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen teknis leger jalan Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Persentase sempadan jalan yang dipakai pada bangunan rumah tiiangang kaki lima atau	1 Dokumen 1 Dokumen 52.83 % 0.58 %	123,350,200	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen 1 Dokumen 52.83 % 0.58 %	77,198,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20 KM	7,540,350,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	20 KM	35,000,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.1 KM	28,882,000,005	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	0.1 KM	110,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang dipelihara	8.82 KM 5 Km	1,369,576,663	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	8.82 KM 5 Km	21,000,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	3.5 KM 35.39 Km	1,798,620,229	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	3.5 KM 35.39 Km	900,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	70 M	3,538,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	70 M	4,800,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	430 M	4,813,000,001	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	430 M	665,500,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	100 %	1,086,599,308						100 %	1,287,711,403	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai aturan	80 %	451,284,308						80 %	722,404,243	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350,000,000	Kab. Pinrang, Paiteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	601,329,828	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi TKPRD yang dikeluarkan	1 Dokumen 4 Rekomenda	si 58,834,308	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen 4 Rekomenda	si 66,050,875	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	3 Dokumen	42,450,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	3 Dokumen	55,023,540	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata guna lahan sesuai RTRW yang disusun	77 %	129,775,000					77 %	399,300,000		
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Guna Lahan sesuai RTRW	1 Dokumen 3 Dokumen	129,775,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen 3 Dokumen	399,300,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0.2305 Rasio	425,940,000					0.2305 Rasio	48,400,000		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	231,910,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	18,150,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	194,030,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	30,250,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0 %	79,600,000					0 %	117,607,160		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah penertiban dan penegakan hukum pelanggaran bidang penataan ruang	1 Dokumen 4 Kasus	55,800,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen 4 Kasus	93,170,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	1 Dokumen 0 Ha	23,800,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen 0 Ha	24,437,160	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN						31,510,510,308			35,952,514,285		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	11,735,033,878						100 %	11,992,514,285	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan yang diselesaikan	9 0	80,057,000						9 0	82,573,991	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23,976,000	Semua Kab/Kota, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	27,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12,058,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	9,774,765	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,245,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	7,033,950	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,390,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	6,500,340	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,802,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	7,155,225	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan dokumen yang diselesaikan	1 dokumen	15,039,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	16,900,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang diselesaikan	2 laporan	6,547,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 laporan	8,209,711	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan Persentase ATK dan honor yang dibayarkan	2 laporan 107 pegawai 2 item	9,432,122,538						2 laporan 107 pegawai 2 item	9,489,497,395	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	103 orang	8,373,207,938	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	103 orang	8,507,436,452	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah item ATK yang diadakan Jumlah tenaga teknis yang dipekerjakan SPPD ASN UPTD	38 item 3 orang 160 kali	337,474,600	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	38 item 3 orang 160 kali	374,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pelaksanaan transaksi keuangan	14 jasa	683,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	14 jasa	569,473,443	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12,700,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	17,640,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	25,050,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	20,947,500	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian perangkat daerah	6 laporan	378,875,000						6 laporan	353,365,968	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 pasang 120 pasang	87,200,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN	160 pasang 120 pasang	82,618,594	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	28,130,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN	6 Dokumen	41,893,346	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13,545,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN	1 Dokumen	8,354,028	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN	15 Orang	220,500,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan per-UU- an yang diadakan Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diselesaikan	32 bahan bacaan 100 persen	398,939,700						32 bahan bacaan 100 persen	392,535,699	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	81 buah	5,521,700	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	81 buah	7,040,014	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 buah	5,048,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	34 buah	6,657,391	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 buah	7,050,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	21 buah	8,398,294	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 Dokumen	31,320,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	32 Dokumen	39,690,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	30 sppd	350,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	30 sppd	330,750,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,086,292,000							1,015,363,894	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	60,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Unit	99,225,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Unit	44,100,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan AC, printer dsb Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit 2 Unit	84,090,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 unit 2 Unit	102,160,406	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	892,202,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	750,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Jumlah surat yang didistribusikan Persentase jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	25 unit 2500 surat 100 persen	151,197,640						25 unit 2500 surat 100 persen	159,177,338	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	6601 surat	18,395,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	6601 surat	14,883,750	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon dan listrik setiap bulannya	12 bulan	110,537,640	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	120,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa telepon dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 item 0 Laporan	22,265,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	4 item 0 Laporan	24,293,588	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan peralatan, mesin dan sarpras yang diadakan	25 unit	207,550,000						25 unit	500,000,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM pemeliharaan kendaraan dinas pejabat STNK escavator STNK kendaraan dinas	12000 liter 2 unit 3 unit 39 unit	202,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12000 liter 2 unit 3 unit 39 unit	250,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah servis AC dan komputer	20 Unit 20 unit	4,650,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 Unit 20 unit	250,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,80 %	19,562,554,430						93,80 %	23,580,000,000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan & pembangunan sungai dan Pantai	95 %	7,302,606,000						95 %	8,125,000,000	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	106,370,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	815,095,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	3 Unit	350,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah unit air baku yang terbangun Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	2 paket 440 M	642,040,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	2 paket 440 M	470,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	150 m	14,340,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	150 m	165,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruks
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	130 KM	5,187,044,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	130 KM	5,500,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	51,695,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	423,005,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	50 Orang	85,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 dokumen	53,530,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	3 dokumen	75,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota.asitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	9,487,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	75 Orang	60,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan dan pengembangan Sistem Irigasi	100 %	12,259,948,430						100 %	15,455,000,000	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2.6 KM	2,398,544,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	2.6 KM	3,500,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3.2 KM	2,422,320,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	3.2 KM	3,500,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	448,275,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	3 Bendung	420,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	2000 KM	4,590,265,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	2000 KM	5,200,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	1 Kawasan	512,551,900	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	1 Kawasan	60,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	800 M	607,216,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	800 M	820,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	4 Unit	1,246,460,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	4 Unit	220,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	2 DI	19,220,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	2 DI	65,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	1 Kawasan	15,096,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	1 Kawasan	20,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	95100 %	212,922,000						95100 %	380,000,000	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelatihan tenaga trampil konstruksi	100 %	75,722,000						100 %	85,000,000	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang	65,232,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan aparatur	30 Orang	70,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Dokumen	10,490,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan aparatur	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota	100 %	27,600,000						100 %	150,000,000	
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	2 Dokumen	27,600,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan aparatur	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil & kecil)	100 %	35,410,000					100 %	85,000,000	
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	30 Orang	24,430,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan aparatur	30 Orang	25,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	11	2.03	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional	50 Orang	10,980,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan aparatur	50 Orang	60,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 %	74,190,000					100 %	60,000,000	
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50 Orang	74,190,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan aparatur	50 Orang	60,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN		13,021,276,416							15,470,000,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	100 %	2,071,276,416					100 %	4,320,000,000	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota sesuai analisis kebutuhan	100 %	61,276,416					100 %	100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	51,276,416	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	1,800,000,000						100 %	4,000,000,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	800 Unit Rumah	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	800 Unit Rumah	2,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	50 Unit Rumah	300,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	50 Unit Rumah	2,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	50,000,000						100 %	50,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	50,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan dokumen terkait Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang tersusun sesuai analisa kebutuhan	100 %	160,000,000						100 %	170,000,000	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	150,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	10,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	39,40 %	2,120,000,000						39,40 %	2,120,000,000	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pemenuhan dokumen terkait Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman yang tersusun sesuai analisa kebutuhan	100 %	150,000,000						100 %	150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidu
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	50,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.02		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Persentase pemenuhan dokumen rencana strategis peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas di bawah 10Ha sesuai analisa kebutuhan	100 %	<b>160,000,000</b>					100 %	<b>160,000,000</b>		
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	10,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.03		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10Ha sesuai analisa kebutuhan	100 %	<b>1,810,000,000</b>					100 %	<b>1,810,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	0 Unit Rumah	1,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	500,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	5,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,59 %	5,300,000,000						1,59 %	5,500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan peningkatan kualitas rumah sesuai analisa kebutuhan	100 %	5,300,000,000						100 %	5,500,000,000	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	300,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	50 Unit Rumah	500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	5,000,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	3,530,000,000						100 %	3,530,000,000	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan	100 %	3,530,000,000						100 %	3,530,000,000	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	46 Lokasi	3,500,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	46 Lokasi	3,500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	10,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN											13,323,711,027	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,260,889,378						100 %	9,390,236,027		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	21,820,000						100 %	27,965,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	7,260,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparat	0 Dokumen 2 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,915,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparat	1 Dokumen	2,590,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,540,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparat	1 Dokumen	2,290,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,490,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparat	1 Dokumen	1,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,865,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparat	1 Dokumen	1,715,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3,780,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparat	3 Laporan	3,240,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparat	2 Laporan	1,730,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	100 %	7,051,292,378						100 %	8,272,465,027	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bul	an 6,733,683,018	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	86 Orang/bul	an 7,941,550,027	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	107,489,360	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	116,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	201,920,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	206,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,130,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	3,940,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	4,070,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	4,575,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 %	15,810,000						100 %	21,500,000	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	730,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	1,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15,080,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumberdaya Aparatur yang mencapai Nilai SKP baik	100 %	202,810,000						100 %	183,950,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	73,100,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Paket	73,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	9,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Orang	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	100 %	226,750,000						100 %	223,500,000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,530,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Paket	8,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	5,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 Dokumen	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	30 Laporan	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	95 %	60,500,000						95 %	140,000,000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	61,968,000						100 %	79,356,000	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	2,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Laporan	3,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46,608,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	58,356,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13,320,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	18,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	95 %	619,939,000						95 %	441,500,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	413,439,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Unit	377,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 10 Unit	6,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Unit 10 Unit	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	95 %	1,487,485,000						95 %	1,785,575,000	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan tranitbum dalam Wilayah Kab.Pinrang	95 %	1,392,825,000						95 %	1,681,575,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10 Kasus	1,329,405,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Kasus	1,355,575,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus 10 Kasus	52,580,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	0 Kasus 10 Kasus	56,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,840,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan Peraturan Daerah dalam Wilayah Kab. Pinrang	100 %	94,660,000						100 %	104,000,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	52,640,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	4 Laporan	54,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	42,020,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	4 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	84 %	2,239,000,000						84 %	2,147,900,000			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	95 %	2,239,000,000						95 %	2,147,900,000			
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	2,141,600,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat	12 Laporan	1,988,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	97,400,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat	5 Unit	99,900,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN						3,962,264,472							0
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,145,766,666							100 %	0		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu sesuai aturan	100 %	38,200,000							100 %	0		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	6,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	0 Dokumen 2 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,700,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	3 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	2 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 bulan	1,754,846,666						12 bulan	0	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bul	1,291,046,666	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	11 Orang/bul	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55 Dokumen	200,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur	55 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	1 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	2 Laporan	6,300,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	2 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laopran rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	5 laporan	14,200,000						5 laporan	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	14,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	2 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bulan	280,660,000						12 bulan	0	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	30,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	50 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	5 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	660,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	11 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	11 Orang	200,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur	11 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum perangkat daerah	12 bulan	269,160,000						12 bulan	0	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	2,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	9 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	15 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	15,660,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	20 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah	3 unit	100,000,000						3 unit	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	2 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7 org/bulan	120,500,000						7 org/bulan	0	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	30 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	35,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur	3 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	35,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	8 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang terpelihara	12 unit	568,200,000						12 unit	0	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	6 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	13,700,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	17 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur	2 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	8 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	816,497,806						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah daerah rawan bencana yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	12 kecamatan	20,547,806						12 kecamatan	0		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	5 Dokumen	20,547,806		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur dan masyarakat	5 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah daerah yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12 kecamatan	450,550,000						12 kecamatan	0	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		aparatur dan masyarakat	50 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana yang terlaksana	12 bulan	100,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur dan masyarakat	12 bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	150,550,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur dan masyarakat	15 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah wilayah yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban	12 kecamatan	345,400,000						12 kecamatan	0	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	100,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur dan masyarakat	12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 kecamatan	45,400,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur dan masyarakat	12 kecamatan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 kecamatan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	aparatur dan masyarakat	12 kecamatan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5,225,245,881							4,622,601,816	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,141,397,881						100 %	3,512,651,816	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan	100 %	14,670,000						100 %	15,648,000	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,015,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	3,375,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	1,455,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	1,543,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	1,470,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	1,543,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,455,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	1,543,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5,880,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	6,174,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,395,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	1,470,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	3,096,315,881						100 %	3,045,628,816	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bul	2,839,645,881	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	32 Orang/bul	2,779,737,816	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	75,741,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	181,480,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	184,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	2,790,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	3,200,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	4 Laporan	2,400,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	2,950,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD	100 %	15,870,000						100 %	12,600,000	
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,140,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	12,600,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	14,730,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100 %	121,675,000						100 %	122,200,000	
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	10,075,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 Dokumen	22,200,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	13,600,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	12 Orang	98,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum SKPD	100 %	253,910,000						100 %	89,575,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	7,875,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37,750,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	52,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	4,200,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	9,660,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Dokumen	10,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	175,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	80 Laporan	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	259,500,000						100 %	67,500,000	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	139,700,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	52,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	99,800,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Unit	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD	100 %	99,542,000						100 %	94,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66,792,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	63,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32,750,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	31,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah SKPD	100 %	279,915,000						100 %	65,000,000	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	114,925,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	11 Unit	65,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14,990,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	100 %	221,181,000						100 %	777,600,000	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan	100 %	221,181,000						100 %	777,600,000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	12 Orang	18,720,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	12 Orang 100 %	53,186,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Orang 100 %	680,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	40 Keluarga 100 %	73,535,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	40 Keluarga 100 %	42,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	45,600,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 Lembaga	0	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	30,140,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Sertifikat	55,600,000	Dinas Sosial
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan WNI Migran	100 %	6,000,000						100 %	6,300,000	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilaksanakan	100 %	6,000,000						100 %	6,300,000	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	6,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	5 Orang	6,300,000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	100 %	438,665,000						100 %	326,050,000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan	100 %	237,440,000						100 %	326,050,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	57,165,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	63,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	47,155,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	50 Orang	52,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	56,245,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	15 Orang	52,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8,250,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Orang	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	6,650,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	5,775,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	4,275,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	5,775,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	5,100,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	6,300,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	3,780,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	4,200,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	7,920,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	11,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	30,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4,250,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6,650,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	100 %	201,225,000						100 %	0	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	7,490,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	20,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	57,090,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	47,240,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	50 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	14,140,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	5 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	4,675,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	15 Orang	0	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	4,785,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	7,265,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5,100,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	50 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	2,550,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	8,250,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	5 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	7,650,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14,990,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100 %	41,889,000						100 %	0	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar yang terlaksana	100 %	27,363,000						100 %	0	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,467,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Orang	0	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	14,260,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,636,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	100 %	14,526,000						100 %	0	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12 Kecamatan	3,400,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5 Keluarga	7,440,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	5 Keluarga	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	1,986,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Keluarga	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	1,700,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	5 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	191,843,000						100 %	0	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	100 %	121,093,000						100 %	0	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35,548,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	50 Orang	0	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	46,555,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	50 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	18,990,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	10,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 Kecamatan	0	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	10,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota yang terlaksana	100 %	70,750,000						100 %	0	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	10,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 Kampung	0	Dinas Sosial
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60,750,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	50 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	184,270,000						100 %	0	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terlaksana	100 %	184,270,000						100 %	0	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah						
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	10 Makam	84,270,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	10 Makam	0	Dinas Sosial	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						5,577,837,956					5,987,064,005	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	5,138,847,456							100 %	5,494,889,005	
2	07	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	100 %	36,880,000							100 %	35,450,000	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14,395,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	2 Dokumen	10,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,850,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Dokumen	5,960,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,990,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Dokumen	5,230,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,300,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Dokumen	3,300,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,180,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Dokumen	4,230,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,165,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	4 Laporan	6,230,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	4,285,318,076						100 %	4,344,172,705		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bul	3,911,256,616	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	45 Orang/bul	3,989,419,905	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67,482,460	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Dokumen	76,852,800	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	298,619,100	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Dokumen	270,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,264,900	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Laporan	6,265,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	4 Laporan	1,695,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	4 Laporan	1,635,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan dan aset yang akuntabel	100 %	1,440,000						100 %	1,600,000	
2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,440,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	2 Laporan	1,600,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang mencapai nilai SKP Baik dan Kelengka Lainnya	100 %	171,090,000						100 %	141,600,000	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	46,400,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Paket	47,600,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	9,690,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	3 Dokumen	14,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	115,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	10 Orang	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat Daerah	100 %	189,865,000						100 %	138,792,300	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,105,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	4 Paket	2,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11,760,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Dokumen	12,250,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	175,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	100 Laporan	115,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi	100 %	119,739,500						100 %	570,000,000	
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	43,040,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	2 Unit	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	7,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	5 Unit	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	69,199,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	7 Unit	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	85,625,380						100 %	87,774,000	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55 Laporan	10,050,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	55 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61,249,380	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Laporan	61,274,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14,326,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Laporan	16,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	100 %	248,889,500						100 %	175,500,000	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	60,869,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	11 Unit	60,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	14,420,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	26 Unit	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	173,600,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Unit	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	1,05 %	8,225,000						1,05 %	10,000,000	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase penyusunan RTK yang terpenuhi	100 %	8,225,000						100 %	10,000,000	
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	10 Perusahaa	8,225,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	0	10 Perusahaa	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	2,50 %	247,796,900						2,50 %	301,155,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	100 %	199,465,800						100 %	250,155,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	157,565,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		80 Orang	200,155,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 Unit	41,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		6 Unit	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga pelatihan Kerja swasta yang dibina	100 %	24,970,100						100 %	25,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	42 Lembaga	24,970,100	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		42 Lembaga	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase produktivitas perusahaan kecil yang terdata	15 %	7,270,000						15 %	10,000,000	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaa	7,270,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	0	20 Perusahaa	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Alumni Lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan yang kompeten	55 %	16,091,000						55 %	10,000,000	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	16,091,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	60 %	88,573,600						60 %	86,625,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang terlayani	100 %	39,739,200						100 %	39,000,000	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	800 Orang	8,020,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		800 Orang	7,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	11,430,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		50 Orang	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	20,289,200	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		20 Orang	22,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase LPTKS yang mendapatkan Ijin	100 %	8,500,000						100 %	8,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	3 Lembaga	8,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	0	3 Lembaga	8,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase penyebarluasan informasi pasar kerja yang disebarkan secara online	100 %	21,605,000						100 %	24,125,000	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	21,605,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	0	200 Orang	24,125,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase PMI (Pra dan purna Penempatan) yang terlindungi	80 %	18,729,400						80 %	15,000,000	
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	18,729,400	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		20 Orang	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	65 %	94,395,000						65 %	94,395,000	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan PP dan PKB	30 %	48,620,000						30 %	37,875,000	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	29,540,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		5 Perusahaan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	7,875,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		1 Perusahaan	9,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	11,205,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		4 Laporan	18,875,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100 %	45,775,000						100 %	56,520,000	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	10,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		4 Perkara	24,520,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 Perkara	12,790,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		2 Perkara	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	22,985,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		50 Orang	24,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			263,365,000							33,030,000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	97,58 Indeks	213,465,000						97,58 Indeks	33,030,000	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	44 OPD	104,575,000						44 OPD	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	104,575,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Aparatur dan Masyarakat	1 Perangkat Daerah	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			47,650,000							33,030,000	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Organisasi	47,650,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan		6 Organisasi	33,030,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan	5 Kelompok	61,240,000						5 Kelompok	0	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	61,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perlindungan perempuan	100 100%	49,900,000						100 100%	0	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kekerasan terhadap perempuan	12 bulan	49,900,000						12 bulan	0	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kebijakan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	12 Kecamatan	49,900,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	aparatur dan masyarakat	12 Kecamatan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB											



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		5,546,975,237								11,385,000,000	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,113,621,237						100 %	5,320,000,000	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	16,500,000						100 Persen	50,000,000	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	3,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 2 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	2,739,945,237						100 Persen	4,265,000,000	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu	27 Orang/bul	2,565,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	27 Orang/bul	4,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	26 Jenis	36,924,237		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	26 Jenis	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa admistrasi keuangan dan perencanaan yang terbayarkan tepat waktu	12 Orang	133,491,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Orang	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian pelayanan urusan pemerintah daerah1	100 Persen	<b>22,800,000</b>						100 Persen	<b>20,000,000</b>	
2	09	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan Barang yang terbayarkan tepat waktu	2 Orang	22,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Orang	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	<b>220,860,000</b>						100 Persen	<b>270,000,000</b>	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	50 Paket	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	11,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan sesuai analisa kebutuhan	15 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Orang	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	<b>199,140,000</b>						100 Persen	<b>245,000,000</b>	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penggandaan Dokumen sesuai analisa kebutuhan	100 %	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	100 %	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar dan Majalah yang Disediakan	24 Buah	17,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	24 Buah	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	27 Pegawai	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	27 Pegawai	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	406,186,000						100 Persen	100,000,000	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	406,186,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	100 %	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan daerah	100 Persen	90,780,000						100 Persen	100,000,000	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan	10 Orang	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Orang	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	59,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	19,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	417,410,000						100 Persen	270,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	56,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	8 Unit	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	25,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	13 Unit	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	336,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	2 Unit	374,950,000						2 Unit	5,010,000,000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Yang dibangun Sesuai dengan kebutuhan	2 Kelompok	374,950,000						2 Kelompok	5,010,000,000	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang Tersedia Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2 Unit 0 Unit	361,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	2 Unit 0 Unit	5,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	13,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	38,10 %	887,750,000						38,10 %	875,000,000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada Kegiatan Perberasan dan pemantauan Data Disetiap Penggilingan	16 Pegawai	394,800,000						16 Pegawai	335,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	164,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	2 Laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	85,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Laporan	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10 Dokumen	144,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	10 Dokumen	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan	100 Persen	197,000,000						100 Persen	210,000,000	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Ton	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	15 Ton	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15 Ton	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	15 Ton	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan	100 Persen	9,175,000						100 Persen	10,000,000	
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	9,175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04				91 Skor	286,775,000						91 Skor	320,000,000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berkualitas Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	264,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Laporan	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	11,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang tertangani	100 %	135,850,000						100 %	80,000,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyaluran Cadangan Pangan Pada Suatu Wilayah Yang Tertangani	12 Pegawai	77,200,000						12 Pegawai	70,000,000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	77,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan pangan pada Satu Wilayah Yang tertangani	16 Pegawai	58,650,000						16 Pegawai	10,000,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	58,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95 %	34,804,000						95 %	100,000,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	100 Persen	34,804,000						100 Persen	100,000,000	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	29,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5,704,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1,563,038,125							2,550,000,000	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	65,5 %	1,563,038,125						65,5 %	1,600,000,000	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Terbayarkan Tepat Waktu	5 Paket	1,563,038,125						5 Paket	1,600,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,563,038,125	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	1,600,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											21,683,499,703	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7,264,685,984							100 %	7,458,499,703	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	84,000,000							100 %	95,000,000	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terpenuhi	100 %	5,269,685,984						100 %	5,398,499,703		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	4,890,685,984	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Petugas Lapangan/Kebersihan	57 Orang/bulan	4,988,499,703	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Petugas Lapangan/Kebersihan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	250,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Petugas Lapangan/Kebersihan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Petugas Lapangan/Kebersihan	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme SKPD	18 Laporan	4,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Petugas Lapangan/Kebersihan	18 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100 %	5,000,000						100 %	5,000,000		
2	11	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian yang disusun sesuai analisa kebutuhan	100 %	260,000,000						100 %	260,000,000		
2	11	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	250,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	20 Orang	250,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	430,000,000						100 %	450,000,000	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Paket	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Paket	20,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 Paket	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	15,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	15 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	355,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan	400,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase asset yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	341,000,000						100 %	570,000,000	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	71,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	400,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Unit	20,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	240,000,000						100 %	240,000,000	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	85,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	635,000,000						100 %	440,000,000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	135,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	100 Unit	140,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	100,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup	100 %	450,000,000						100 %	450,000,000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Penyusunan Dokumen RPPLH	100 %	150,000,000						100 %	150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penyusunan KLHS Kabupaten	100 0	300,000,000						100 0	300,000,000	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat dan Aparatur	0 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	70,2 %	5,415,000,000						70,2 %	5,215,000,000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan (tanah,air,udara)	100 %	5,415,000,000						100 %	5,215,000,000	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	5,000,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat dan Media (air,tanah, udara)	1 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	15,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat dan Media (air,tanah, udara)	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	400,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat dan Media (air,tanah, udara)	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	100 %	400,000,000						100 %	300,000,000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ruang terbuka Hijau dengan kondisi baik	100 %	400,000,000						100 %	300,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.2 Ha	400,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Petugas Lapangan dan Masyarakat	8.2 Ha	300,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian LB3 yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan	100 %	50,000,000						100 %	60,000,000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Limbah B3 yang terlaksana	100 %	25,000,000						100 %	30,000,000	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	25,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Para Pelaku usaha dan/atau kegiatan	1 Laporan	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 yang terlaksana	100 %	25,000,000						100 %	30,000,000	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Para Pelaku usaha dan/atau Kegiatan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100 %	15,000,000						100 %	15,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sesuai analisa kebutuhan	100 0	15,000,000					100 0	15,000,000		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Para Pelaku usaha dan/atau Kegiatan	5 Laporan	15,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 %	255,000,000						100 %	5,000,000	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA terkait dengan PPLH	100 %	255,000,000						100 %	5,000,000	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	255,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat Hukum Adat (MHA)	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup	100 %	30,000,000						100 %	30,000,000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	30,000,000						100 %	30,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga	30,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat	1 Lembaga	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten	100 %	7,650,000,000						100 %	8,150,000,000			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang ditangani dan tertangani	100 %	7,650,000,000						100 %	8,150,000,000			
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12 Laporan	2,500,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat dan Petugas Lapangan/Keb ersihan	12 Laporan	2,500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	20374.14 ton	5,000,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat dan Petugas Lapangan/Keb ersihan	20374.14 ton	5,500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	50,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat dan Petugas Lapangan/Keb ersihan	1 Kelompok	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	100,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan kualitas lingkungan hidup serta adaptasi terhadap bencana	Masyarakat dan Petugas Lapangan/Keb ersihan	3 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI						6,745,400,654						7,963,000,000	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	4,869,900,654						100 %	5,904,000,000			
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	53,200,000						100 %	73,000,000			
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	11,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	5 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	9,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	6 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	6,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	5 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Jenis 1 Dokumen 135 Dos	6,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 Laporan	17,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen hasil evaluasi yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	5 Jenis 1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Jenis 1 Dokumen	9,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji pegawai dan pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana tepat waktu dan sesuai aturan	95 %	3,218,700,654						95 %	4,263,000,000	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bul	2,995,700,654	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	32 Orang/bul	4,000,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN jumlah makan minum rapat yang tersedia sesuai analisa kebutuhan jumlah makan minum tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	15 Jenis 82 orang 800 dos 250 orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	15 Jenis 82 orang 800 dos 250 orang	88,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Laporan	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	15 Laporan	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	15 Laporan	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang dan asset daerah yang terinventaris sesuai aturan yang berlaku	95 %	27,000,000						95 %	40,000,000	
2	12	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin sesuai aturan yang berlaku	95 %	211,500,000						95 %	185,000,000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	60 Paket	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Bimtek 0 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Bimtek 0 Orang	120,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	90 %	271,000,000						90 %	276,000,000	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	1 Paket	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	1 Paket	9,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	2 Paket	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	26 Dokumen	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	26 Dokumen	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	8,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	2 Paket	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	188,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	100 Laporan	180,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	215,000,000						90 %	220,000,000	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	45,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	70,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 Unit	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Unit	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah yang terbayarkan tepat wa ktu	90 %	<b>405,500,000</b>						90 %	<b>455,000,000</b>	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	12 Laporan	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bangunan pemerintah yang fasilitas komunikasi, sumber daya air, listrik, internet yang terpenuhi sesuai analisa kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 gedung 0 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	1 gedung 0 Laporan	250,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	12 Laporan	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	90 %	<b>468,000,000</b>						90 %	<b>392,000,000</b>	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	85,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	6 Unit	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aplikasi yang terupgrade sesuai versi yang berlaku Jumlah Pemeliharaan Komputer yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Aplikasi 15 Unit	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	1 Aplikasi 15 Unit	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	1 Unit	250,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	27 Unit	22,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang terdaftar dalam database	100 %	1,493,000,000						100 %	1,622,000,000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase tertibnya administrasi kependudukan kepemilikan KK, KTP , SKPWNl	100 %	1,493,000,000						100 %	1,622,000,000	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100 Dokumen	11,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	100 Dokumen	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	100 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	100 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	1000 Orang	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	1000 Orang	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	380,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	12 Laporan	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Dokum	85,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	10000 Dokum	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil	100 %	176,000,000						100 %	182,000,000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	100 %	176,000,000						100 %	182,000,000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100 Dokumen	32,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	100 Dokumen	32,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	12 Layanan	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	91,3% %	206,500,000						91,3% %	255,000,000		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat	89 %	171,500,000						89 %	210,000,000		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah perangkat siak yang terpelihara	5 Jenis 1 aplikasi	41,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	5 Jenis 1 aplikasi	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia sesuai analisa Kebutuhan Jumlah makan minum lembur yang tersedia sesuai analisis kebutuhan Jumlah Perjalanan Dinas ke Kecamatan yang terbayarkan tepat waktu	12 Jenis 216 dos 50 kali	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	12 Jenis 216 dos 50 kali	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat	100 %	35,000,000						100 %	45,000,000		
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	50 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Publik	50 Dokumen	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN						78,153,980,584					15,000,000	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,451,887,782							100 %	15,000,000	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	116,195,000							100 %	5,000,000	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja,Renja Perubahan,Renstra dan Renstra Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan Tepat Waktu	4 Dokumen	70,045,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	4 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,650,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	4,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun sesuai aturan dan Tepat Waktu	4 Dokumen	11,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	4 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Dokumen	14,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	3,308,145,282						100 %	10,000,000	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji yang tepat waktu	0 Orang/bula 12 Bulan	2,884,291,012		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	aparat	0 Orang/bula 12 Bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	42,379,270		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparat	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang tersedia tepat waktu	12 Dokumen	363,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	aparat	12 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	9,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	aparat	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/Semest yang tersusun tepat waktu	3 Laporan	8,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	aparatur	3 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,750,000						100 %	0	
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	2,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	153,925,000						100 %	0	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga	44 Pasang	20,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	44 Pasang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan ANJAB, EVJAB, dan SKJ yang tersusun sesuai aturan tepat waktu	3 Dokumen	31,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen SKP tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	2,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang ditingkatkan Sumber dayanya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang 0 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	20 Orang 0 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	378,022,500						100 %	0	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan sesuai analisis kebutuhan	1 Paket	4,938,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Komputer	34 Buah	3,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	34 Buah	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	6,332,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	2 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Pengandaan yang diadakan sesuai analisis Kebutuhan	4 Paket	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	4 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah dan Tabloid	45 buah	19,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	45 buah	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material untuk pameran pembangunan	4 Paket	7,412,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	4 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah	12 Bulan	320,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	163,800,000						100 %	0	
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas	2 Unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	2 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Meja dan Kursi Kerja	10 Buah	7,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	10 Buah	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan cetak, Komputer PC dan Laptop Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (AC dan Sound System)	10 Unit 3 Unit	86,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	10 Unit 3 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	72,330,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan jasa telepon,internet,air dan listrik yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	68,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur		0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	256,720,000						100 %	0	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis Kebutuhan	6 Unit	129,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	6 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18 Unit	10,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	18 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor	1 Paket	116,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Terselenggaranya penataan Desa	100 %	184,470,000						100 %	0	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	69 Orang	184,470,000						69 Orang	0	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang akan di mekarkan Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa 0 Desa	85,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	2 Desa 0 Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti sosialisasi Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	69 Orang 0 Desa	99,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	69 Orang 0 Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kerjasama Desa	12 Desa	48,634,000						12 Desa	0	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	12 Desa	48,634,000						12 Desa	0	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	0 Dokumen 3 Kawasan	48,634,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	0 Dokumen 3 Kawasan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	70 %	72,507,089,802						70 %	0	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	72,507,089,802						100 %	0	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang terdaftar sebagai Peserta	612 Orang	1,207,634,016		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	612 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Naskah Rancangan Perbub yang tersusun dan tersosialisasi	0 Dokumen 11 Perbub	178,887,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	0 Dokumen 11 Perbub	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Desa dan masyarakat yang dilatih Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	355 Orang 0 Dokumen	199,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	355 Orang 0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0 Dokumen	69,337,260,476		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang dibina/Evaluasi Pengelolaan,Administrasi Keuangan Desa,Profil Desa dan administrasi Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	69 Desa 0 Dokumen	116,523,870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	69 Desa 0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Aparatur Desa/Masyarakat yang mengikuti pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik desa Jumlah Aparatur Desa/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan/Penguatan Administrasi dan Pelaporan BUMDESMA Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BUMDESMA terbaik tingkat kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Monitoring Kawasan BUMDESMA Jumlah Penerima Bantuan Bagi Kelompok Usaha Mikro	69 Orang 24 Orang 9 Kecamatan 0 Dokumen 9 Kecamatan 44 Kelompok	507,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	69 Orang 24 Orang 9 Kecamatan 0 Dokumen 9 Kecamatan 44 Kelompok	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	9 Desa	498,607,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	9 Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	142 Orang 0 Dokumen	261,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	142 Orang 0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0 Dokumen	80,672,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	13 Desa 0 Dokumen	118,335,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccorralele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	13 Desa 0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	90 %	961,899,000							90 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa	90 %	961,899,000								
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Pelatihan Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Pelatihan Jumlah Lembaga Adat yang mengikuti pelatihan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah LPM yang mengikuti Pelatihan Jumlah RT/RW yang mengikuti Pelatihan	100 Orang 138 Orang 100 Orang 0 Lembaga 100 Orang 100 Orang	294,857,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	100 Orang 138 Orang 100 Orang 0 Lembaga 100 Orang 100 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0 Dokumen 100 Orang	58,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	0 Dokumen 100 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Gelar TTG Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 kali 0 Laporan	128,987,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 kali 0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan LINMAS untuk pengamanan Pilkades	100 Orang	79,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	100 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Pengerak PKK yang ditingkatkan Kapasitasnya	12 Kecamatan	400,055,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Kecamatan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			11,528,790,545						17,000,000		
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan	100 %	5,171,251,969						100 %	0	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	12 Dokumen	126,060,000						12 Dokumen	0	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	44,100,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	1 dokumen	7,350,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKPA yang Tersusun	1 dokumen	9,180,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	1 dokumen	7,350,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPPA yang Tersusun	1 dokumen	9,180,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LKJIP, dan perjanjian Kinerja yang Tersusun	3 dokumen	25,970,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi renstra dan Evaluasi Renja yang Tersusun	2 dokumen	22,930,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan yg tersusun	5 dokumen	3,849,712,289						5 dokumen	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praklraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bul	3,510,757,529	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	40 Orang/bul	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	145,044,760	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Aparatur	4 Dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Honorarium PA, KPA, PPTK, Honorarium Administrasi yang Terbayarkan Tepat Waktu	0 Dokumen 12 bulan	174,100,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 12 bulan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	1 laporan	6,750,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 laporan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	1 laporan	13,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 laporan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan Aset yang lebih transparan dan akuntabilitas	2 Dokumen	17,617,500						2 Dokumen	0	
2	14	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Aset yang Tersusun	0 Laporan 1 dokumen	17,617,500	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Laporan 1 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mewujudkan Managemen Kepegawaian yang Berkualitas	12 Bulan	160,650,000						12 Bulan	0	
2	14	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Penyusunan ANJAB dan EVJAB yang Tersusun	0 Dokumen 2 dokumen	10,650,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 2 dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Yang Terlaksana	12 bulan	150,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan jasa Administrasi dalam Penyelenggaraan Managemen dan Operasional Kantor	12 Bulan	474,722,000						12 Bulan	0	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Kantor Yang Tersedia	4 Jenis	2,072,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Jenis	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan	7 unit	27,290,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 unit	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Exemplar Minat Baca Aparatur	13 Exemplar	12,240,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	13 Exemplar	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Terintegritas dan sesuai Analisa Kebutuhan Yang Terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan 0 Laporan	433,120,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan 0 Laporan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bagi Aparatur	2 Unit	164,743,500						2 Unit	0	
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Meja Kerja	0 Unit 2 unit	9,186,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Unit 2 unit	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	155,557,500	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Dukungan Administrasi dalam Penyelenggaraan Managemen dan Operasional Kantor	12 Bulan	82,786,680						12 Bulan	0	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Tersedia	12 bulan	82,786,680	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, AC dan Komputer	12 Bulan	294,960,000						12 Bulan	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pajak dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional terproses setiap Tahun, BBM, Service Kendaraan Dinas, Honorarium Supir	0 Unit 12 bulan	290,410,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Unit 12 bulan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	10 unit	4,550,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 unit	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total) TFR(Angka Kelahiran Total)	2,08 % 2.08 %	130,895,000							2,08 % 2.08 %	0	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	laju pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.71 %	14,900,000							0.71 %	0	
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Sosialisasi laju pertumbuhan penduduk yang Terlaksana	0 Organisasi 12 Kecamatan	14,900,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	0 Organisasi 12 Kecamatan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	12 Kecamatan	115,995,000							12 Kecamatan	0	
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Pengumpulan dan Pengolahan data pelayanan KB/KS/dan PP	12 Kecamatan	73,995,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	12 Kecamatan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Pembinaan Tribina, BKB, BKR, BKL, dan UPPKS, Pelatihan Kader Keluarga Balita, Pemberdayaan PKK	0 Laporan 12 Kecamatan	42,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	0 Laporan 12 Kecamatan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,54 %	6,226,643,576						10,54 %	0	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang Terpapar isi Pesan Program KKBPk (Advokasi dan KIE)	98 %	40,200,000						98 %	0	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah promosi KB dan KIE melalui media yang terlaksana	0 Dokumen 12 bulan	40,200,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen 12 bulan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	98 %	6,186,443,576						98 %	0	
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	240 Orang	50,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Aparatur dan Masyarakat	240 Orang	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 Kecamatan 0 Orang	28,550,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	12 Kecamatan 0 Orang	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Peningkatan pelayanan KB ke setiap pelosok desa	0 Dokumen 12 Kecamatan	5,924,195,976	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen 12 Kecamatan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Tersedia Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	100 persen 0 Unit	72,647,600	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 persen 0 Unit	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaring dan jejaringnya yang Terlaksana	0 Laporan 12 Kecamatan	43,550,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	0 Laporan 12 Kecamatan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terlaksana Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	12 Kecamatan 0 Orang	66,700,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	12 Kecamatan 0 Orang	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			9,084,408,541							9,458,408,541	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,058,408,541						100 %	7,349,408,541	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Tersusun Tepat Waktu	12 Dokumen	42,000,000						12 Dokumen	48,500,000	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	24,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran Yang Terealisasi Tepat Waktu dan Kinerja Administrasi Keuangan Yang Terarah	17 Laporan	5,610,908,541						17 Laporan	5,627,908,541	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,015,908,541	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	5,015,908,541	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	340,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	350,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Laporan	235,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	14 Laporan	240,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	14 Dokumen	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	14 Dokumen	16,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jasa Pengelolaan Barang dan Asset Yang Terbayarkan Tepat Waktu Serta Pengelolaan Barang dan Asset yang Tersusun Tepat Waktu	9 unit	<b>70,000,000</b>						9 unit	<b>75,000,000</b>	
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	70,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	4 Dokumen	75,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Pegawai daerah Yang Terlaksana Secara Efektif dan Efesien	61 Pegawai	<b>319,000,000</b>						61 Pegawai	<b>345,000,000</b>	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Pegawai	129,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	69 Pegawai	140,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Ls	20,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Ls	25,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30 Pegawai	170,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	30 Pegawai	180,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Publik Sesuai Analisa Kebutuhan	13 Jenis	<b>349,500,000</b>						13 Jenis	<b>367,000,000</b>	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Gedung	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	3 Gedung	18,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Buah	8,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	50 Buah	9,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37 Bacaan	56,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	37 Bacaan	58,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Kegiatan	20,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Kegiatan	22,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	12 Bulan	260,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Fasilitas Umum Kantor Tersedia Secara Optimal	6 Paket	<b>130,000,000</b>						6 Paket	<b>140,000,000</b>	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	130,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat dan Aparatur	10 Unit	140,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor Yang Terlaksana Sesuai Kebutuhan	7 Jenis	<b>207,000,000</b>						7 Jenis	<b>221,000,000</b>	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat dan Aparatur	1 Laporan	15,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	110,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat dan Aparatur	1 Laporan	120,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat dan Aparatur	1 Laporan	42,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	43,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat dan Aparatur	1 Laporan	44,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Umum Kantor Tersedia Secara Optimal	6 Paket	270,000,000						6 Paket	455,000,000	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	230,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	14 Unit	240,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	40,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	14 Unit	45,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Publik Yang Terpakai Sesuai Kebutuhan	6 Jenis	60,000,000						6 Jenis	70,000,000	
2	15	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	60,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	70,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,44 Rasio 1,3 Rasio	1,847,000,000						0,44 Rasio 1,3 Rasio	1,912,000,000	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpakai Sesuai Kebutuhahn	37 Buah	348,000,000						37 Buah	364,000,000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	165,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	14 Unit	170,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150 Unit	60,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	150 Unit	70,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150 Unit	123,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	150 Unit	124,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tife-C Yang Terpakai Sesuai Kebutuhan	1 Jenis	50,000,000						1 Jenis	55,000,000	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	6 Unit	50,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	6 Unit	55,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kendaraan Yang Terpakai Sesuai Kebutuhan	6 Paket	392,000,000						6 Paket	413,000,000	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 Unit	130,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	7 Unit	140,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	210,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	62,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	12 Unit	63,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Terlaksana Sesuai Kebutuhan	5 Paket	97,000,000						5 Paket	100,000,000	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	150 Unit	75,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	150 Unit	76,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	22,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	24,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Honorer yang digaji dan Terdaftar sesuai Kebutuhan	130 Orang	790,000,000						130 Orang	800,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	790,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	800,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	02	2.14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Yang Terlaksana sesuai Kebutuhan	4 Kegiatan	<b>170,000,000</b>						4 Kegiatan	<b>180,000,000</b>	
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	170,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	3 Laporan	180,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga	100 %	<b>179,000,000</b>						100 %	<b>197,000,000</b>	
2	15	03	2.04		<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penerbitan Izin Yang Melayani Trayek Dalam Kab/Kota	4 Paket	<b>11,000,000</b>						4 Paket	<b>13,000,000</b>	
2	15	03	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	7,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	4,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	2 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyeberangan dan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Terlayani Sesuai Kebutuhan	1 Rute	38,000,000						1 Rute	44,000,000	
2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	8,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	2 Dokumen	9,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	30,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat dan Aparatur	2 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Izin Usaha Perawatan Kapal Yang Diterbitkan Sesuai Kebutuhan	4 Kegiatan	130,000,000						4 Kegiatan	140,000,000	
2	15	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	130,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	140,000,000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN			8,372,450,694						14,222,000,000		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,350,924,694						100 %	6,292,000,000	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggar dan evaluasi kinerja	13 Dokumen	39,029,000						13 Dokumen	120,000,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 3 Dokumen	6,949,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 3 Dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,911,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,870,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,143,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,836,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11,150,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6,170,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	3,452,664,694						1 Laporan	3,955,000,000	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bul	2,972,668,694	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	38 Orang/bul	3,500,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	106,014,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	361,602,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,310,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	6,070,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Asset tersusun Tepat waktu	2 Laporan	2,891,000						2 Laporan	10,000,000	
2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,311,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,580,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	87,510,000						12 Bulan	315,000,000	
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	12,510,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 Dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	75,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 Orang	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum SKPD	12 Bulan	135,280,000						12 Bulan	392,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	21,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	27,780,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	537,255,000						12 bulan	385,000,000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	204,640,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	332,615,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Pakai	44 Unit	96,295,000						44 Unit	370,000,000	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	61,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	34,795,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 Unit	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	94 %	1,301,276,000						94 %	3,350,000,000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Informasi Yang di Publis	400 Informas	1,301,276,000						400 Informas	3,350,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	11,190,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	3,790,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	112,240,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0 Dokumen 1 Dokumen	33,210,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	1,116,508,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	5 Layanan	2,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	24,338,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan e- government	100 %	2,720,250,000						100 %	4,580,000,000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah SKPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh diskominfosandi	84 SKPD	2,505,690,000						84 SKPD	3,065,000,000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	84 Unit	2,505,690,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	84 Unit	3,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi Publik dan Pemerintahan yang dimanfaatkan	29 Alikasi	214,560,000						29 Alikasi	1,515,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	214,560,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aratur dan Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,						5,561,286,091				5,745,069,359	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,163,654,091						100 %	5,380,185,359	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah	100 %	45,211,000						100 %	53,178,300	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21,145,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	18,470,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,716,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	5,828,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,100,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	2,110,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,210,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,270,300	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,460,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9,580,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	10,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3,240,339,601						100 %	3,248,566,609	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bul	2,947,306,001	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	30 Orang/bul	3,006,089,109	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	94,461,600	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	68,227,500	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	194,352,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	171,600,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,220,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	2,650,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	147,370,000						100 %	102,375,000	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	15,750,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5,720,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	5,545,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Dokumen	1,080,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	100,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Orang	80,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	275,854,000						100 %	157,213,000	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,154,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	5,163,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 Dokumen	20,700,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	28 Dokumen	18,780,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	40 Laporan	120,484,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan analisa kebutuhan	100 %	1,200,040,000						100 %	1,540,000,000	
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	43,040,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Unit	0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	109,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	8 Unit	40,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 0 Unit	1,048,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit 0 Unit	1,500,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	101,094,490						100 %	96,450,950	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	72,734,490	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	24 Laporan	75,722,950	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	2,203,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18,560,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	18,525,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	100 %	153,745,000						100 %	182,401,500	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	81,745,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 Unit	112,801,500	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	13,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Unit	13,600,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	59,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	56,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	100 %	50,740,000						100 %	57,006,000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa diawasi dalam lingkup kabupaten Pinrang	100 %	50,740,000						100 %	57,006,000	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	32,580,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	50 Unit Usaha	35,005,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	50 Unit Usaha	18,160,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	50 Unit Usaha	22,001,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	100 Koperasi	70,555,000						100 Koperasi	58,360,000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	100 %	70,555,000						100 %	58,360,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit Usaha	32,655,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis daerah yang inklusif	Masyarakat	60 Unit Usaha	23,755,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	3 Unit Usaha	37,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	3 Unit Usaha	34,605,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing	100 %	47,581,000						100 %	70,533,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Koperasi yang dilaksanakan	100 %	47,581,000						100 %	70,533,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	47,581,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis daerah yang inklusif	Masyarakat	50 Orang	70,533,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan kuantitas produk usaha koperasi	100 %	75,450,000						100 %	29,529,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kuantitas produk usaha koperasi	100 %	75,450,000						100 %	29,529,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	75,450,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis daerah yang inklusif	Masyarakat	50 Unit Usaha	29,529,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	100 %	112,130,000						100 %	107,780,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	100 %	112,130,000						100 %	107,780,000	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100 Dokumen	12,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	100 Dokumen	12,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	27,190,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	50 Unit Usaha	27,190,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	30,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	50 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10 Orang	42,940,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	10 Orang	38,590,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang	100 %	41,176,000						100 %	41,676,000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang	100 %	41,176,000						100 %	41,676,000	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha	41,176,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	50 Unit Usaha	41,676,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6,719,548,805		6,470,201,296			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5,644,094,805						100 %	5,393,701,296	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	6 Dokumen	55,625,000						6 Dokumen	41,800,000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	10,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 2 Dokumen	8,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,265,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	24,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 Laporan	9,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan.	100 %	4,324,228,405						100 %	3,948,853,296	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bul	3,397,843,405		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	36 Orang/bul	3,278,653,296	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 item	425,258,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	7 item	530,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Jasa	481,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	18 Jasa	125,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	5,607,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		aparatur	12 Laporan	2,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	1 Laporan	7,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	4 Laporan	5,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	4 Laporan	5,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan SKPD	100 %	13,500,000						100 %	19,773,000	
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		aparat		19,773,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Disiplin Mematuhi Aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Keterampilannya	100 %	145,455,000						100 %	222,170,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	137 Pasang	13,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	137 Pasang	46,410,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Kegiatan	6,655,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	8 Kegiatan	6,760,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6 Bimtek	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	6 Bimtek	169,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana Sesuai Analisa Kebutuhan	3 paket	198,580,000						3 paket	229,840,000	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparat	1 Paket	13,520,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Jenis Barang	13,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatus	8 Jenis Barang	13,520,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatus	55 Laporan	202,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan barang	70 %	<b>490,200,000</b>						70 %	<b>377,600,000</b>	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Jenis Barang	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatus	5 Jenis Barang	25,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis Barang	363,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatus	5 Jenis Barang	152,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket pekerjaan	105,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatus	2 Paket pekerjaan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Jasa Umum Kantor	100 %	<b>133,805,000</b>						100 %	<b>355,665,000</b>	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rekening	100,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Rekening	55,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Jenis	32,885,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Jenis	300,165,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Analisa Kebutuhan	3 Kendaraan Dinas	<b>282,701,400</b>						3 Kendaraan Dinas	<b>198,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Kendaraan Dinas	80,501,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	4 Kendaraan Dinas	86,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis Barang	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	4 Jenis Barang	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket pekerjaan	166,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	3 Paket pekerjaan	92,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	2357 Investas	66,040,000						2357 Investas	75,000,000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Investasi Daerah	1 Paket Pekerjaan	66,040,000						1 Paket Pekerjaan	75,000,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	66,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur dan Investor	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	2900 Perizina	489,925,000						2900 Perizina	455,000,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah	6 Kegiatan	489,925,000						6 Kegiatan	455,000,000	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	43,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Investor	2 Dokumen	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen 4 Dokumen/p	446625000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur dan Investor	0 Dokumen 4 Dokumen/p	420000000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang	4,76 %	273,636,000						4,76 %	347,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perizinan Penanaman Modal Yang Akuntabel	100 %	273,636,000						100 %	347,500,000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Pelaku Usaha 1800 Non Usaha 2900 pelaku usaha	189,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur,Pelak u usaha dan Masyarakat	0 Pelaku Usaha 1800 Non Usaha 2900 pelaku usaha	142,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	5 Kegiatan Usaha	84,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur,Pelak u usaha dan Masyarakat	5 Kegiatan Usaha	76,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal	2.042.064.013	49,700,000						2.042.064.013	89,000,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan	49,700,000						10 Kegiatan	89,000,000	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	70 Pelaku Usaha	49,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur, Pelaku Usaha dan Masyarkat	70 Pelaku Usaha	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota	90 %	196,153,000						90 %	110,000,000		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat/Daerah Kabupaten/Kota	100 %	196,153,000						100 %	110,000,000		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	196,153,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur,Pelak u usaha dan Masyarakat	12 Dokumen	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN											7,691,718,600	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,412,573,269						100 %	5,169,924,600		
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	100 %	17,502,150						100 %	25,000,000		
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24,506,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	30,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	28943860	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	20000000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,918,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,649,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	16,843,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Laporan	17,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	4,088,702,444						81 Nilai	3,663,066,600	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bul	3,485,351,184	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	65 Orang/bul	3,321,152,600	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	96,336,060	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Dokumen	49,401,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	489,935,200	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Dokumen	273,023,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9,640,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	9,715,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	7,440,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Laporan	9,775,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	7,384,750						81 Nilai	12,321,000	
2	19	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3,761,875	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,107,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3,622,875	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	4,107,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	193,497,000						81 Nilai	186,961,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	24,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	65 Paket	19,669,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	16,487,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Dokumen	5,764,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	3,010,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Dokumen	5,764,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	150,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 Orang	150,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	364,765,075						81 Nilai	319,648,000	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,100,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Paket	5,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	28,675,075	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Paket	5,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	12,600,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Dokumen	12,148,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	37,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 Paket	28,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	275,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	150 Laporan	250,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3,640,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	4,500,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Buah	916,306,000					3 Buah	350,000,000		
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	697,806,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Unit	200,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	63,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Unit	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	155,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	134,838,000					81 Nilai	179,750,000		
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	7,650,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Laporan	2,750,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	80,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	6,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Laporan	7,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	32,738,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	90,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	627,300,000					81 Nilai	395,000,000		
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	115,700,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Unit	80,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	11,600,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Unit	15,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	350,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	150,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	150,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	90 %	1,573,005,000						90 %	1,255,465,000		
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Potensi Kepemudaan Yang termutakhirkan	1 Laporan	1,023,005,000						1 Laporan	1,055,465,000		
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	35 Orang	23,190,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Organisasi Kepemudaan	35 Orang	90,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	29,640,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Organisasi Kepemudaan	60 Orang	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	35 Orang	22,190,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Organisasi Kepemudaan	35 Orang	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	70 Orang	947,985,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Organisasi Kepemudaan	70 Orang	765,465,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan	70 %	550,000,000						70 %	200,000,000	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	10 Dokumen	550,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Organisasi Kepemudaan	10 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	24 Cabor	1,137,200,000						24 Cabor	865,000,000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan	50 Atlet	47,377,000						50 Atlet	100,000,000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	47,377,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Atlet	4 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	972,322,000						2 Kegiatan	325,000,000	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	110,480,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	572,042,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	60 Orang	289,800,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	60 Orang	125,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabor yang dibina dan dikembangkan	5 Atlet/Cabor	104,124,000						5 Atlet/Cabor	240,000,000	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	44,600,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Atlet/Cabor	50 Orang	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	10 Pelatda	30,800,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Atlet/Cabor	10 Pelatda	80,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	25 Orang	20,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Atlet/Cabor	25 Orang	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	8,724,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Atlet/Cabor	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	65 %	13,377,000						65 %	200,000,000	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Unit	13,377,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Atlet/Cabor	6 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keterpuhuan prinsip dasar kepramukaan	100 %	30,700,000						100 %	401,329,000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Yang Dibina	14 organisasi	30,700,000						14 organisasi	401,329,000	
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	15,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Organisasi Pramuka	40 Orang	60,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	15,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Organisasi Pramuka	3 Unit	1,200,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			76,340,000							600,000,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Pinrang	100 %	76,340,000						100 %	600,000,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data statistik Sektoral terintegrasi	45 SKPD	76,340,000						45 SKPD	600,000,000	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah data /informasi pembangunan daerah yang tersedia dalam bentuk buku Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10 item 1 Kegiatan	25,830,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 item 1 Kegiatan	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun Jumlah Meta Data Statistik Sektoral yang tersedia dalam aplikasi	45 Dokumen 45 SKPD	50,510,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	45 Dokumen 45 SKPD	150,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			61,430,000							652,000,000		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan informasi	100 %	61,430,000						100 %	652,000,000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Memiliki sistem Keamanan data dan Informasi	45 SKPD	61,430,000						45 SKPD	652,000,000		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	61,430,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	365,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1,942,445,240							2,071,520,000		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terlestarikannya cagar budaya	100 %	1,253,654,240						100 %	1,185,800,000		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah benda dan situs budaya yang dipelihara/ dilestarikan	47 Benda	641,593,240						47 Benda	726,000,000		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek 1 Objek	341,436,240	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	0 Objek 1 Objek	484,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	300,157,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	200 Orang	242,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase kesenian daerah dan nilai budaya kearifan lokal kebudayaan yang dimanfaatkan	80 %	356,585,000						80 %	217,800,000		
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	31 Objek	356,585,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	31 Objek	217,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan SDM kebudayaan	100 %	255,476,000						100 %	242,000,000		
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60 Orang	255,476,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Lembaga Adat	60 Orang	242,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional	80 %	645,541,000						80 %	798,600,000		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	80 %	645,541,000						80 %	798,600,000		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	200 Orang	645,541,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat Seni	200 Orang	798,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	100 %	43,250,000						100 %	87,120,000		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah koleksi museum	16 Koleksi	43,250,000						16 Koleksi	87,120,000		
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	43,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	87,120,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5,952,038,228			6,136,958,019			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	4,544,449,308						50 %	4,515,958,019		
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggar dan evaluasi perangkat kerja daerah yang tersedi	100 %	94,680,000						100 %	83,500,000		
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Dokumen	29,295,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	26,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah				
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	8,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang terusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	8,885,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	8,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD yang terusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	9,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersusun sesuai aturan dann tepat waktu	3 Laporan	21,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Laporan	18,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturandan tepat waktu	2 Dokumen	10,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	9,500,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3,644,718,748						100 %	3,634,518,019	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan seacara tepat waktu	12 Bulan	3,389,518,098	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	3,389,518,019	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah Cetak penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah iuran jaminan kesehatan Non ASN yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah makan minum Rapat/Tamu yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan 12 Bulan 30 Non ASN 12 Bulan	43,256,750	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 12 Bulan 30 Non ASN 12 Bulan	37,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan secara tepat waktu	19 jasa	185,263,900	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	19 jasa	185,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	1 Laporan	9,750,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	8,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran tersusun secara akurat dan tepat waktu	1 Laporan	16,930,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	15,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	23,330,000						100 %	21,500,000	
2	23	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBK- SKPD yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	1 Laporan	4,430,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	3,500,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengurus barang dan asset yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah laporan barang dan asset yang tersusun secara akurat dan tepat waktu	2 jasa 1 Laporan	18,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 jasa 1 Laporan	18,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	219,550,000						100 %	231,000,000	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju batik layanan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Pakaian olah raga yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	66 Baju 66 pasang	52,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	66 Baju 66 pasang	55,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	16,750,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	16,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Implementasi peraturan perundang-undangan	15 ASN	150,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 ASN	160,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	249,236,500						100 %	245,740,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia sesuai aturan dan tepat waktu	12 Bulan	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	9,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	7,796,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	7,500,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan /surat kabar bulletin yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	16,440,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	9,240,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan bahan material pameran yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Paket	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	20,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan secara efektif dan efisien	20 kegiatan	200,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 kegiatan	200,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	50 %	41,000,000						50 %	45,000,000	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	4 unit	41,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 unit	45,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	171,864,060						100 %	152,700,000	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusikan secara tepat waktu	200 surat	4,724,060	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	200 surat	2,700,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iuran rekening telepon yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah iuran TV kabel yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah rekening listrik yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	118,380,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah iuran retribusi sampah yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah jasa Front office yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah jasa pembersih yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan 12 Bulan 2 jasa 4 jasa	48,760,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	12 Bulan 12 Bulan 2 jasa 4 jasa	50,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,070,000						100 %	102,000,000	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM ,Oli ,Suku cadang dan service kendaraan mobil Dinas /Operasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan Jumlah jasa sopir kendaraan mobil dinas yang terbayarak secara tepat waktu Jumlah unit kendaraan dinas /operasional yang laik jalan	12 Bulan 1 jasa 7 unit	86,120,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 1 jasa 7 unit	85,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	13,950,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	17,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34 %	1,389,024,670						34 %	1,571,000,000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang memiliki pengunjung	45 %	478,255,610						45 %	517,000,000	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah bahan pustaka yang direstorasi Jumlah judul bahan pustaka yang dialihmediakan dalam bentuk digital	200 Eksampla 80 Buah	17,502,150	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	200 Eksampla 80 Buah	25,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.01	02	Pengembangan perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan dititik layanan Terpeliharanyan aplikasi pengolahan perpustakaan	5000 pemust 1 Unit	24,506,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	5000 pemust 1 Unit	30,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan bahan pustaka koleksi budaya nusantara dan koleksi konten lokal yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 Eksampla	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralalie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 Eksampla	70,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina dan diasistensi tentang pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar perpustakaan Terlaksananya Lomba Perpustakaan Sekolah/Desa	12 Perpustaka sekolah 12 Perpustaka	28943860	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	12 Perpustaka sekolah 12 Perpustaka	20000000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimbingan teknis tenaga perpustakaan /pustakawan	30 peserta	20,840,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	30 peserta	40,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan bahan pustaka (buku Umum )untuk perpustakaan umum daerah	2000 Eksamp	300,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	2000 Eksamp	300,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	2000 Eksamp	16,843,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	2000 Eksamp	17,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perpustakaan yang tersedia	1 Database	19,619,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Database	15,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	73.15 Nilai	910,769,060						73.15 Nilai	1,054,000,000	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah jasa petugas layanan perpustakaan yang terbayarkan secara tepat waktu Jumlah kunjungan layanan perpustakaan keliling dititik layanan	12 Bulan 80 Kunjungan	199,259,060	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	12 Bulan 80 Kunjungan	160,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah taman baca yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah taman baca yang direhab sesuai analisa kebutuhan	1 unit 1 unit	600,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 unit 1 unit	700,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba bercerita Tingkat SD sekabupaten Pinrang Terlaksananya survey nilai tingkat kegemaran membaca	50 Siswa SD 1 kegiatan	64,215,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	50 Siswa SD 1 kegiatan	67,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Desa Replikasi yang diberikan bimbingan teknis SPP dan TIK Jumlah Perpustakaan Desa yang dibina sebagai pusat berkegiatan masyarakat	2 Perpustakaa Desa 8 Perpustakaa Desa	20270000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	2 Perpustakaa Desa 8 Perpustakaa Desa	22000000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praklraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ekspo perpustakaan	1 kegiatan	27,025,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 kegiatan	105,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan	5 %	18,564,250						5 %	50,000,000	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	5 %	12,613,800						5 %	40,000,000	
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan dalam bentuk elektronik Jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan ditemukan	10 Naskah kuno 5 Naskah Kuno	12,613,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	10 Naskah kuno 5 Naskah Kuno	40,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dialihmediakan dalam bentuk elektronik	50 Eksamplar	5,950,450						50 Eksamplar	10,000,000	
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah bahan pustaka koleksi budaya nusantara yang dikelola	10 Eksamplar	5,950,450	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	10 Eksamplar	10,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			275,687,280							275,000,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	80 %	139,529,750						80 %	144,000,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola	75 %	59,658,000						75 %	60,000,000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang diklasifikasi sesuai dengan pola klasifikasi arsip	8500 Arsip	22,386,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	8500 Arsip	19,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah data arsip yang terpelihara keamanannya dari hama dan serangga	1 Depot arsip	14,040,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Depot arsip	17,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip OPD/Desa/kelurahan (Lembaga Pemrintah Jyang diawasi pelaksanaan pengelolaan/penataan secara prosedural dan sistematis	15 Lembaga pemerintah	23,232,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Lembaga pemerintah	24,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang terkelola	50 %	26,790,000						50 %	30,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah data arsip OPD dan sekolah yang dikumpulkan	10 Lembar Arsip	11,630,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	10 Lembar Arsip	13,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah dokumen/arsip statis yang diakuisisi	10 Lembar Arsip	15,160,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	10 Lembar Arsip	17,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	02	2.03		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Presentase data arsip yang dimasukan dalam JIKN dan SIKN	23 %	<b>53,081,750</b>						23 %	<b>54,000,000</b>	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah daftar arsip dimasukan dalam JIKN Jumlah sarana layanan informasi kearsipan yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Daftar Arsip 2 Sarana	3,397,843,405	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Daftar Arsip 2 Sarana	3,278,653,296	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/Desa/Kelurahan(Lem Pemerintah)yang diasiste dan dibina tentang tata k arsip yang sesuai standar kearsipan	15 Lembaga Pemerintah	30,700,750	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	15 Lembaga Pemerintah	30,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	37 %	<b>136,157,530</b>						37 %	<b>131,000,000</b>	
2	24	03	2.01		<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	5 %	<b>95,945,530</b>						5 %	<b>90,000,000</b>	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah OPD/Desa/Kelurahan(Lem Pemerintah)yang dimone untuk penilaian arsip yan akan dimusnahkan	15 Lembaga Pemerintah	23,258,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Lembaga Pemerintah	25,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah data arsip OPD/Desa/Kelurahan yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun yang harus dimusnahkan Jumlah Peraturan Bupati (Perbup)tentang kearsipan yang terusun sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	15 Lembaga Pemerintah 2 Perbup	72,687,530	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Lembaga Pemerintah 2 Perbup	65,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	03	2.04		<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi dan alih media yang sesuai NSPK	100 %	<b>40,212,000</b>						100 %	<b>41,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang disahkan(Autentifikasi arsip)sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku	100879 Arsip	25,452,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	100879 Arsip	24,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang dialihmediakan dalam bentuk elektronik	40000 Arsip	14,760,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	40000 Arsip	17,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						9,841,059,008				12,418,824,525	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,826,300,191						100 %	6,609,824,525	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen DPA yang disusun tepat waktu Dokumen LKIP, IKM, LPPD, PK Dokumen RKA yang disusun Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	64,826,900						1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	185,000,000	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	2 Dokumen	33,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,198,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Aparatur	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,255,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Dokumen	27,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,614,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,648,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Dokumen	23,000,000	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12,535,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	4 Laporan	38,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4,676,400	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	2 Laporan	23,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	17 laporan	4,779,508,791							17 laporan	5,245,000,000	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bul	4,427,084,291	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	47 Orang/bul	4,780,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	57,256,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	4 Dokumen	110,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	269,592,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	12 Dokumen	285,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9,328,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	1 Laporan	35,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	17 Laporan	16,248,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	17 Laporan	35,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	13,386,000							1 dokumen	19,000,000	
3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	66,040,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Perikanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	25	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11,760,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Laporan	11,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	60 paket	149,160,500						60 paket	228,000,000	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	489,925,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	60 Paket	455,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tertatanya data administrasi kepegawaian	3 Dokumen 3 laporan	24,590,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	3 Dokumen 3 laporan	15,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,420,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Dokumen	33,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	446625000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	20 Orang	420000000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	324,148,000						1 laporan	360,500,000	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat komponen istalasi listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis 0 Paket	4,540,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	3 Jenis 0 Paket	11,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,788,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Paket	11,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14,820,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Dokumen	16,500,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	144,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Laporan	138,000,000	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	144,800,000						6 unit	138,000,000	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	120,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	6 Unit	88,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	24,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	4 Unit	50,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan 36 rekening	202,865,000						1 laporan 36 rekening	255,000,000	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170,490,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Laporan	200,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32,375,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Laporan	55,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	147,605,000						15 unit	179,324,525	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	120,175,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	47 Unit	121,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	10 Unit	6,050,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	1,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	20 Unit	21,754,695	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15,930,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	15 Unit	30,519,830	Dinas Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap	15672 Ton	373,371,500						15672 Ton	2,400,000,000	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia	4 laporan	225,841,500						4 laporan	2,240,000,000	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	55,875,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik ( Nelayan)	4 Dokumen	40,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	7 Unit	109,317,500	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik ( Nelayan)	7 Unit	1,000,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	70 Unit	60,649,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik ( Nelayan)	70 Unit	1,200,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 kelompok	109,796,500						10 kelompok	100,000,000	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120 Orang	72,697,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Nelayan)	120 Orang	60,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	37,099,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Nelayan)	10 Kelompok	40,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	37,733,500						1 Layanan	60,000,000	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	37,733,500	Kab. Pinrang, Suppa, Wiringtasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Pelaku usaha perikanan	1 Layanan	60,000,000	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya	71828 Ton	3,141,952,317						71828 Ton	2,791,700,000	
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	6 izin	26,044,000						6 izin	50,000,000	
3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	10 Rekomend	26,044,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Pembudidaya)	10 Rekomend	50,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 kelompok	645,290,000						10 kelompok	763,000,000	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok	162,922,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik ( Pembudidaya)	12 Kelompok	103,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	27,408,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik ( Pembudidaya)	10 Kelompok	60,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	454,960,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik ( Pembudidaya)	15 Kelompok	600,000,000	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1 dokumen	2,470,618,317						1 dokumen	1,978,700,000	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	49,261,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Pembudidaya)	4 Dokumen	60,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1,430,837,817		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Pembudidaya)	2 Unit	540,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	609,180,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Pembudidaya)	5 Unit	847,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	25,934,500	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Pembudidaya)	1 Dokumen	90,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3 Orang	133,528,200	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Pembudidaya)	3 Orang	96,800,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	10 Ha	37,438,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Pembudidaya)	10 Ha	42,400,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Orang	184,438,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Publik (Pembudidaya)	10 Orang	302,500,000	Dinas Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	1235 Ton	499,435,000						1235 Ton	617,300,000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar pengolahan hasil perikanan bagi usaha mikro dan kecil yang diterbitkankro dan kec	9 Izin	175,415,500						9 Izin	48,400,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi usaha dan pemasaran yang tersedia	4 laporan	175,415,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	0	4 laporan	48,400,000	Dinas Perikanan
3	25	06		2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha pengolah dan pemasar yang dibina	8 Kelompok	65,332,000						8 Kelompok	108,900,000	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklashar yang mendapat bimbingan dan penerapan persyaratan pengolahan dan pemasaran	8 kelompok	65,332,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		8 kelompok	108,900,000	Dinas Perikanan
3	25	06		2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan yang diadakan	8 Jenis	258,687,500						8 Jenis	460,000,000	
3	25	06		2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	22 Pelaku Usaha	258,687,500	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan Kab. Pinrang, Lansirang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	22 Pelaku Usaha	460,000,000	Dinas Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			442,982,000						1,814,500,000		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan	75,000 Orang	77,279,000						75,000 Orang	979,500,000	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya Tarik wisata baru yang dikelola	6 lokasi wisata	25,500,000						6 lokasi wisata	158,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	25,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur dan Masyarakat	3 Dokumen	18,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata yang diunggulkan	4 kawasan strategis	40,000,000						4 kawasan strategis	590,000,000	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	40,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Unit	250,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengajuan tanda daftar usaha pariwisata yang ditindaklanjuti	26 jasa	11,779,000						26 jasa	11,500,000	
3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	22 Dokumen	11,779,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur/Masy arakat	22 Dokumen	11,500,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	1,72 %	227,744,000						1,72 %	177,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang terpublikasikan di dalam dan di luar negeri	4 Destinasi	227,744,000						4 Destinasi	177,000,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	217,104,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	2 Dokumen	120,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	10,640,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi SDM pariwisata	100 %	137,959,000						100 %	258,000,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang terlaksana	2 Kegiatan	96,925,000						2 Kegiatan	223,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Kompetensinya	40 Orang	28,015,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur dan Masyarakat	40 Orang	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 Orang	31,160,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur dan Masyarakat	40 Orang	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	37,750,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Aparatur dan Masyarakat	3 Dokumen	9,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan pengembangan kompetensi sdm pariwisata	1 Pelatihan	41,034,000						1 Pelatihan	35,000,000	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	41,034,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	40 Orang	35,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						38,868,571,641				44,390,846,221	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	14,356,859,441						100 %	15,392,962,596	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	74 Poin	141,900,000						74 Poin	161,546,800	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	53,665,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	2 Dokumen	46,590,200	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,880,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	1 Dokumen	8,641,600	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,880,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	1 Dokumen	9,130,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,570,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	1 Dokumen	9,120,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,580,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	1 Dokumen	9,120,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	43,090,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	6 Dokumen	72,775,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	21,235,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	2 Laporan	6,170,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	9 Paket	12,552,295,456						9 Paket	13,695,983,296	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang	11,592,172,681	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	132 Orang	12,887,328,496	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	510,487,775	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 Laporan	306,904,800	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	433,125,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 Dokumen	474,090,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	9,940,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	1 Dokumen	18,540,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	6,570,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 Laporan	9,120,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	4 laporan	120,657,565						4 laporan	57,103,000	
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	13,055,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	2 Laporan	7,090,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	107,602,565	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	1 Laporan	48,013,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumberdaya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %	347,705,000						100 %	334,354,800	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Orang	148,600,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	200 Orang	150,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	49,105,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 Dokumen	34,380,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	150,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	25 Orang	126,090,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	399,059,150						100 %	273,666,000	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	19,739,150	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	8 paket	4,516,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	5,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	6 paket	8,450,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	43 Dokumen	23,820,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	43 Dokumen	23,340,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	350,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	21 Laporan	236,360,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang yang tersedia	10 unit	79,565,000						10 unit	109,550,000	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	15,565,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	3 paket	45,800,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	64,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 unit	57,750,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	3 Paket	432,144,620						3 Paket	294,739,810		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,940,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 Laporan	13,370,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	319,104,620	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 Laporan	199,780,810	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96,100,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 Laporan	81,589,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	3 Paket	283,532,650						3 Paket	466,018,890		
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	263,952,650	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	21 unit	231,452,650	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	19,580,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	APARATUR	12 unit	19,580,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)	2149 Ton	2,427,040,700						2149 Ton	1,959,910,400		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Utama (cabe merah) per tahun (%)	1 %	2,427,040,700						1 %	1,959,910,400		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	1,667,620,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	12 Laporan	1,200,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	759,420,700	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	12 Laporan	759,910,400	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	6,26 Ton/Ha	19,712,820,000						6,26 Ton/Ha	25,088,373,225	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan Utama (Padi) (Ton)	671262 Ton	2,778,705,000						671262 Ton	994,355,000	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	1,243,700,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	1 Dokumen	994,355,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	1,535,005,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	12 Laporan	0	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Produksi Tanaman Palawija (Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar) (Ton)	109787 Ton	16,934,115,000						109787 Ton	24,094,018,225	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)Yang Terbangun Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	60 unit 60 unit	4,382,357,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	60 unit 60 unit	2,000,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	122 unit	7,883,988,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	122 unit	13,342,022,408	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	45 unit	4,667,770,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	45 unit	8,219,879,540	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)	4345113 Rup	501,495,000						4345113 Rup	462,951,600	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan Bencana	100 %	501,495,000						100 %	462,951,600	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan pengendalian dan penanggulangan bencana sesuai dengan analisis kebutuhan	107313 Ha	422,840,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	107313 Ha	401,568,100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	107313 Ha	78,655,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	107313 Ha	61,383,500	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	108 %	102,958,000						108 %	120,842,000	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah uslan izin yang terselesaikan (%)	100 %	102,958,000						100 %	120,842,000	
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	5,858,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	12 Dokumen	8,738,500	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	76,440,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	12 Dokumen	71,933,500	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	12 Laporan	20,660,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	12 Laporan	40,170,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompoktani penerima bantuan (%)	25 %	1,767,398,500						25 %	1,365,806,400	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan terhadap jumlah kelompoktani per tahun (%)	100 %	1,767,398,500						100 %	1,365,806,400	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 unit	531,939,600	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseblilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	12 unit	397,418,400	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	420 unit	310,810,900	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseblilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	420 unit	195,728,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12 unit	924,648,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseblilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	APARATUR DAN NON APARATUR	12 unit	772,660,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						9,635,908,249				19,921,313,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6,705,218,559						100 %	10,164,113,000	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	114,114,000						100 %	639,556,000	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22,517,000	Kab. Pinrang, Mattiro Bulu, Padaidi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	25,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,031,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,977,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	190,352,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,256,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	190,352,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	21,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	47,571,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Laporan	190,352,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	11,016,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Laporan	7,500,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan urusan pemerintahan daerah	100 %	3,397,843,405						100 %	3,278,653,296	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan sesuai ketentuan dan tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 55 Orang/bul	4971494599		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 55 Orang/bul	5263732000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyeddaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	91,599,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Dokumen	78,100,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	216,400,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Dokumen	272,245,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,835,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	8,500,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	5,145,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	9,500,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prensentase ketercapaian pelayanan Administrasi barang Milik Daerah	100 %	15,884,000						100 %	20,850,000	
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,319,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	14,565,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Laporan	18,850,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian daerah yang terlaksana	12 bulan	240,572,000						12 bulan	486,368,000	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	60,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	55 Paket	122,500,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	7,418,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	12,500,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	22,404,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Dokumen	90,296,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 Orang	261,072,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum	100 %	224,853,300						100 %	648,360,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,157,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Paket	10,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Paket	33,580,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Paket	7,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	22,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	17 Dokumen	34,686,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	20,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 Laporan	543,094,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketercapaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	100 %	537,000,000						100 %	1,450,000,000	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	385,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	750,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	81,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Unit	350,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Unit	350,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	134,185,000						100 %	176,757,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	7,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Laporan	5,691,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	66,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Laporan	75,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah paket penyediaan alat kebersihan kantor	12 bulan 4 Orang 3 Laporan 3 Paket	28,745,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan 4 Orang 3 Laporan 3 Paket	39,817,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	147,136,000						100 %	1,110,145,000	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	489,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	18 Unit	455,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	18 Unit	73,125,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27			02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun	9 %	1,638,945,440						9 %	3,282,000,000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Presentase Meningkatnya Mutu dan Niali Tambah	25 %	446625000						25 %	420000000	
3	27			02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Meningkatnya Mutu dan Nilai Tambah	5 Laporan 25 %	216,570,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarajkat dan Kelompok Tani Perkebunan	5 Laporan 25 %	735,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan unggulan	2 %	701,394,000						2 %	1,396,000,000	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	7 VUB	289,855,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat dan Kelompok Tani Perkebunan	7 VUB	546,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	310,949,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat dan Kelompok Tani Perkebunan	5 Dokumen	425,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	275,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat dan Kelompok Tani Perkebunan	5 Dokumen	744,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibi ternak dan tanaman pakan ternak	90 %	275,270,000						90 %	744,000,000	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	5 Laporan	135,496,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat Peternak	5 Laporan	357,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	3 Laporan	139,774,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat Peternak	3 Laporan	387,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya jumlah ternak layak bibit yang dibudidayakan	50 %	445,711,000						50 %	407,000,000	
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	0 Ton 25 Ton	318,814,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Kelompok Peternak	0 Ton 25 Ton	317,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	5 Laporan	126,897,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Kelompok Peternak	5 Laporan	90,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	4 %	753,226,650						4 %	1,570,200,000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase menurunnya prevalence penyakit Helminthiasis dan Brucellosis	2 %	419,871,250						2 %	630,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ketersediaan vaksin ST19 dan antrax yang tersedia Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 paket 0 Laporan 5 Laporan	238,251,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Kelompok Peternak	2 paket 0 Laporan 5 Laporan	415,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan vaksin AI dan Obat Vitamin Ternak Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 paket 0 Laporan 10 Laporan	181,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Kelompok Peternak	2 paket 0 Laporan 10 Laporan	215,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Kesejahteraan pada Hewan	20 %	50,868,000						20 %	314,000,000	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	50,868,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peternak dan kelompok usaha peternakan	3 Laporan	57,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan petugas peternakan dan kesehatan hewan	12 bulan	272,127,400						12 bulan	521,000,000	
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah ketersedian obat/bahan kimia dan bahan material laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	5 Paket 0 Laporan 5 Laporan	51,460,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat Peternak dan Petugas peternakan	5 Paket 0 Laporan 5 Laporan	171,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan medik veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 bulan 0 Laporan 10 Laporan	220,667,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat Peternak dan Petugas peternakan	12 bulan 0 Laporan 10 Laporan	350,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Kualitas Produk Hewan	40 %	10,360,000						40 %	105,200,000	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemeriksaan ante mortem dan post mortem yang dilaksanakan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2200 ekor 0 Laporan 1 Laporan	10,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peternak dan kelompok usaha peternakan	2200 ekor 0 Laporan 1 Laporan	105,200,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan	4 %	85,497,600						4 %	105,000,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengendalian serangan hama OPT	100 %	85,497,600						100 %	105,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Anggota kelompok tani yang ikut pendampingan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	90 Orang 0 Ha 10 Ha	85,497,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Kelompok Tani Perkebunan	90 Orang 0 Ha 10 Ha	105,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Sumber Daya Petani Perkebunan dan Peternakan	30 %	453,020,000						30 %	750,000,000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Presentase meningkatnya jumlah cakupan binaan kelompok tani	30 %	453,020,000						30 %	750,000,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 klp	453,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Kelompok Tani Perkebunan dan Peternakan	30 klp	750,000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							85,581,880			65,000,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			32,500,000							10,000,000	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			32,500,000							0	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	32,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		2 Unit	0	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			53,081,880							55,000,000	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			53,081,880							55,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 Laporan	53,081,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		4 Laporan	55.000,000	Dinas Peternakan dan Perkebunan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA						4,490,000				5,820,000		
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota	100 %	4,490,000						100 %	5,820,000		
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota	100 %	4,490,000						100 %	5,820,000		
3	29	05	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	4,490,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Dokumen	5,820,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2,164,438,600				1,538,823,269		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	80 %	26,662,100						80 %	38,702,140		
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat pembelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	100 %	19,262,100						100 %	30,224,140		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	19,262,100	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	3 Dokumen	30,224,140	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang telah memiliki izin sesuai aturan	25 %	7,400,000						25 %	8,478,000		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	7 Dokumen	7,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	7 Dokumen	8,478,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	42 %	1,733,499,000						42 %	1,270,342,154		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana perdagangan sesuai analisa kebutuhan	86.76 %	889,780,000						86.76 %	548,283,154		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	889,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	7 Unit	548,283,154	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pasar rakyat yang dikelola dengan standar mutu pasar sehat	95.83 %	843,719,000						95.83 %	722,059,000	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	17,502,150	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	24,506,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	12 Dokumen	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu	<9 %	50,000,000						<9 %	70,000,000	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting yang disampaikan tepat waktu	100 %	28943860						100 %	20000000	
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48 Laporan	17,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	48 Laporan	18,830,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			20,750,000							22,770,000	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 Laporan	20,750,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	48 Laporan	22,770,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	60 %	19,000,000						60 %	20,825,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	19,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	12 Laporan	20,825,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)	-406,67 Milya	224,570,000						-406,67 Milya	35,739,000	
3	30	05		2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk lokal yang dipromosikan sebagai produk komoditi bernilai ekspor	90.38 %	224,570,000						90.38 %	35,739,000	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	31,750,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	20 Pelaku Usaha	29,189,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4 Pelaku Usaha	192,820,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	4 Pelaku Usaha	6,550,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur	67 %	117,017,500						67 %	126,114,975	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92.42 %	117,017,500						92.42 %	126,114,975	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1914 Unit	62,942,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1914 Unit	66,659,975	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	680 Orang	54,075,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	680 Orang	59,455,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang diperdagangkan di Toko Swalayan	1,5 %	5,340,000						1,5 %	5,500,000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pemenuhan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai analisa kebutuhan	76 %	5,340,000						76 %	5,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	5,340,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	20 UMKM	5,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			8,411,255,914							6,958,986,639		
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	100 %	6,869,315,914							100 %	6,502,614,262	
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100 %	41,445,000							100 %	41,575,500	
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	26,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	1 Dokumen	25,950,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,665,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	1 Dokumen	2,665,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	1 Dokumen	3,290,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,655,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	1 Dokumen	2,931,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,255,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	1 Dokumen	3,619,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	3,120,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	18 Laporan	3,120,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	96 %	5,100,477,714							96 %	5,078,598,922	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bul	4,766,585,894		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/PNS	53 Orang/bul	4,843,625,922	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	123,891,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/PNS	4 Dokumen	88,363,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	197,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/PNS	48 Dokumen	134,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/PNS	1 Laporan	7,350,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	18 Laporan	5,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/PNS	18 Laporan	5,060,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang	100 %	16,725,000						100 %	38,643,000	
3	31	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/PNS	1 Laporan	38,643,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah sesuai aturan	100 %	8,250,000						100 %	8,270,000	
3	31	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	8,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	12 Dokumen	8,270,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100 %	177,300,000						100 %	147,300,000	
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	27,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN /PNS	1 Paket	27,300,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	24 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN /PNS	24 Orang	120,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	90 %	489,565,000						90 %	352,779,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,235,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN / PNS	1 Paket	5,245,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung	5 item	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN / PNS	5 item	5,315,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	59,350,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN / PNS	5 Paket	49,350,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	14,580,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN / PNS	12 Dokumen	11,760,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN / PNS	85 Laporan	206,109,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN / PNS	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	80 %	293,920,000						80 %	289,688,800	
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	80,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	4 Unit	80,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	11 Unit	49,870,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	11 Unit	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	51,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	2 Paket	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	103,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	12 Unit	103,300,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	8,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	4 Unit	6,388,800	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	260,535,000						100 %	201,400,000	
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	12 Laporan	7,200,900	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,630,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	12 Laporan	18,824,100	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	222,655,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	12 Laporan	175,375,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	80 %	481,098,200						80 %	344,359,040	
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	196,348,200	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	26 Unit	163,640,200	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	45,650,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	35 Unit	20,720,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	209,100,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	2 Unit	150,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN/ PNS	1 Unit	9,998,840	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60 %	1,514,190,000						60 %	415,422,377	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	11 %	1,514,190,000						11 %	415,422,377	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	14,845,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Dokumen	10,750,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	212,710,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	20 Dokumen	45,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100 Dokumen	1,250,385,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	100 Dokumen	321,989,377	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	11,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	1 Dokumen	12,683,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	7 %	16,950,000						7 %	29,050,000	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90 %	16,950,000						90 %	29,050,000	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	530 Dokumen	11,150,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	530 Dokumen	22,230,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Dokumen	5,800,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	500 Dokumen	6,820,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	60 %	10,800,000						60 %	11,900,000	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pemegang IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI dalam penyampaian data ke SIINas	20 %	10,800,000						20 %	11,900,000	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	219 Dokumen	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	219 Dokumen	5,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	436 Dokumen	5,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif	Masyarakat	436 Dokumen	6,900,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi yang terpenuhi	100 %	20,110,000						100 %	20,000,000	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah Kab/Kota yang terserap	100 %	20,110,000						100 %	20,000,000	
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	20,110,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		100 Kepala Keluarga	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi	100 %	60,373,000						100 %	0	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan pemukiman Yang Mandiri	2 %	60,373,000						2 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	60,373,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis komoditi unggulan daerah yang inklusif		2 Satuan Permukiman	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			49,514,252,707							55,359,162,238	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	39,055,659,077						100 %	44,747,862,238	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	21 0	399,845,200						21 0	282,740,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	149,140,140	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	90,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	32,055,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	25,650,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17,407,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	22,550,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14,809,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	16,700,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,738,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	23,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan/dok	umen 138,710,060	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 Laporan/dok	umen 70,220,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan/dok	29,986,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan/dok	34,120,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen terkait administrasi keuangan yang tersusun sesuai aturan	5 0	15,143,736,751						5 0	17,380,460,000	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bu	11,452,843,221	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	156 Orang/bu	15,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156 Dokumen	1,608,786,300	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	156 Dokumen	1,722,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7550 Dokume	2,023,565,900	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7550 Dokume	629,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28,751,530	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	16,880,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	4 Laporan	29,789,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	12,580,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan terkait administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	2 0	74,892,000						2 0	40,900,000	
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	105 rencana	1,630,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	105 rencana	3,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73,262,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	37,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan	4 0	521,306,650						4 0	595,030,000	
4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	1,996,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	7,500,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	69,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Paket	170,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	9,793,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	7,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	19,105,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	21,530,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13,470,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	23,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	270 Orang	127,942,650	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	270 Orang	115,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	42 Orang	280,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	42 Orang	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terkait administrasi umum yang tersedia	9 0	3,090,840,000						9 0	4,647,000,000	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	230,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	450,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	67,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	140,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	496,650,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	805,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	250,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Paket	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	266,820,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,658,840,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	2,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1,030,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	2,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan terkait barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	2 0	951,500,000						2 0	2,000,000,000	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	650,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Unit	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	97,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Paket	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	204,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 Unit	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	4 0	11,578,086,970						4 0	12,979,732,238	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	10,868,186,970	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Laporan	11,129,732,238	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	562,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	540,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	130,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	1,210,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	4 0	3,889,512,500						4 0	2,837,000,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	83 kendaraan	1,824,950,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	83 kendaraan	1,950,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 mebel/Unit	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 mebel/Unit	12,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 peralatan/U	73,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 peralatan/U	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung/un	1,981,562,500	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 gedung/un	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi terkait administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	4 0	889,912,946						4 0	902,000,000	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bula	167,512,946	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Orang/bula	180,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	72,400,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Paket	148,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Orang	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bula	600,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Orang/Bula	524,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tersedia	4 0	1,250,000,000						4 0	1,616,000,000	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	840,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	1,110,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	224,570,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	35,739,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	80,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	86,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen/laporan terkait penataan organisasi yang tersusun	21 0	573,594,060						21 0	521,000,000	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8 Dokumen	155,347,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	8 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan	119,670,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 Laporan	185,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	89,017,060	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Dokumen	112,000,000	Sekretariat Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	110,410,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	32,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	99,150,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	92,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi terkait pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	3 0	692,432,000						3 0	930,000,000	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	169,821,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	260,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	93,425,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	429,186,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	595,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	8,829,017,930						100 %	8,531,300,000	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen/laporan terkait administrasi tata pemerintahan yang tersusun	5 0	364,996,880						5 0	480,500,000	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	158,210,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Dokumen	215,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	106,939,880	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	135,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	99,847,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	130,500,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen/laporan terkait pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang tersusun	2 0	7,855,281,400						2 0	6,854,800,000	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	7,397,755,400	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	6,730,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	45,847,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	71,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	411,679,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	53,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang tersedia	2 0	4,766,585,894						2 0	4,843,625,922	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 produk hukum	384,005,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	500 produk hukum	370,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	121,912,650	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Kasus	325,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 produk hukum	32,967,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	500 produk hukum	46,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama daerah yang tersedia	2 0	69,855,000						2 0	454,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	47,057,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	430,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	22,798,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	24,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	1,629,575,700						100 %	2,080,000,000	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen/laporan terkait pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun	4 0	324,084,000						4 0	562,000,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	159,784,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	87,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	129,030,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	333,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	30,770,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	42,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	4,500,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen/laporan terkait pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersusun	3 0	358,944,000						3 0	296,000,000	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	74,599,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	101,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan/dok	183,515,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan/dok	120,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan/dok	100,830,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan/dok	75,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tersedia	2 0	769,369,000						2 0	1,110,000,000		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	125 Dokumen	568,572,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	125 Dokumen	770,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	125 Dokumen	103,486,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	125 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	97,311,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	200 Orang	140,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen terkait pemantauan kebijakan sumber daya alam yang tersusun	3 0	177,178,700						3 0	112,000,000		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	157,128,700	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	8,580,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	42,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	11,470,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN						102,914,100				240,000,000		
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota	90 %	102,914,100							90 %	240,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah data terkait pelaksanaan kewilayahan perbatasan yang tersedia	3 0	102,914,100						3 0	240,000,000	
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	102,914,100	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	240,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	02				SEKRETARIAT DPRD						43,139,029,455			43,139,029,455		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	27,386,103,055						100 %	26,773,113,910	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6 laporan	39,838,000						6 laporan	70,608,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	18,860,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	5 Dokumen	23,040,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20,978,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	3 Laporan	7,568,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	4,012,362,667						12 bulan	3,602,381,067	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bul	3,179,514,867	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	38 Orang/bul	3,179,514,867	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 kegiatan	21,452,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 kegiatan	21,894,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	801,875,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Dokumen	391,412,200	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,520,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Laporan	8,560,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1 Laporan	1,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	terlaksananya pengamanan barang milik daerah	2 kegiatan	<b>175,000,000</b>						2 kegiatan	<b>230,000,000</b>	
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	175,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	<b>302,296,800</b>						100 %	<b>898,160,000</b>	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	117 pasang	40,950,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	117 pasang	40,950,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	8,910,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	2 Dokumen	7,210,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40 Orang	2,436,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	40 Orang	600,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang	250,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	20 Orang	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	terselenggaranya administrasi umum	12 bulan	<b>1,199,590,000</b>						12 bulan	<b>1,176,091,000</b>	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Paket	20,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,010,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Paket	1,216,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	39 Dokumen	374,080,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	39 Dokumen	372,600,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	296,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Laporan	257,275,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Laporan	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik daerah	12 bulan	94,440,000						12 bulan	175,000,000	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	94,440,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Unit	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	456,072,750						100 %	892,582,904	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	109,156,730	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Laporan	109,211,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	29,986,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	2 Laporan	34,120,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	46,687,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 Laporan	456,362,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	100 %	11,452,843,221						100 %	15,000,000,000	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	502,055,450	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	40 Unit	300,606,350	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit 1 Unit	2,023,565,900	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	0 Unit 1 Unit	629,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 50 Unit	42,370,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	0 Unit 50 Unit	41,720,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	710,320,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD	1 paket	260,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	19,330,466,088						100 %	18,611,718,539	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 orang	18,627,466,088	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 orang	17,923,718,539	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	240 pasang	503,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan Anggota DPRD	240 pasang	488,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	200,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang	200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya layanan administrasi DPRD	12 bulan	511,291,300						12 bulan	501,746,050	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	35,880,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	29,612,600	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	5,485,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	4,493,450	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	52,420,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	44,420,000	Sekretariat DPRD



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	417,505,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket	423,220,000	Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100 %	15,752,926,400						100 %	16,365,915,545	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %	1,168,209,000						100 %	1,153,866,520	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	5,666,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	4,660,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	847,570,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	17 Dokumen	818,070,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	189,940,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	178,940,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	122,880,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	122,843,520	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2,153,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	29,353,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	6 kegiatan	371,322,300						6 kegiatan	351,072,300	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	15,665,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	2 Dokumen	12,415,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	16,760,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	2 Dokumen	15,260,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	148,507,300	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	143,507,300	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	153,330,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	150,330,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0 Dokumen 1 Dokumen	12,020,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	0 Dokumen 1 Dokumen	9,520,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	25,040,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	20,040,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	terlaksananya pengawasan pemerintahan	12 bulan	157,016,500						12 bulan	144,598,100	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	23,090,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Laporan	19,240,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	9,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Laporan	7,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	11,878,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Laporan	9,578,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	11,970,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Laporan	9,470,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	10,953,400	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Laporan	9,435,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	11,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	8,750,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	9,720,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	7,720,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1,824,950,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	1,950,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	persentase meningkatnya kapasitas DPRD	100 %	937,565,400						100 %	1,344,860,400		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya bimbingan teknis DPRD	1 Kegiatan	73,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Kegiatan	75,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi dewan yang tersedia	13 kegiatan	1,981,562,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Pimpinan dan anggota DPRD	13 kegiatan	800,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	terlaksananya pengadaan kelompok pakar dan tim ahli	1 kegiatan	13,360,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Pimpinan dan anggota DPRD	1 kegiatan	320,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	167,512,946	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	180,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terlaksana	100 %	2,074,280,400						100 %	2,006,833,850		
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	8,270,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	1 Dokumen	10,080,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	2,056,010,400	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	1 Dokumen	1,986,803,850	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	terlaksananya pelaksanaan dan pengawasan kode etik	12 bulan	22,250,000						12 bulan	35,500,000		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	22,250,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Anggota dan Pimpinan DPRD	1 Laporan	8,750,000	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	terlaksananya fasilitasi pembahasan kerja sama	2 kegiatan	4,500,000						2 kegiatan	30,765,625	
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	4,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	terfasilitasinya tugas DPRD dengan baik	12 bulan	11,017,782,800						12 bulan	11,298,418,750	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	11,000,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	11,250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1,636,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Laporan	1,900,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	16,146,800	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pimpinan dan anggota DPRD	1 Dokumen	15,000,000	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01				PERENCANAAN			9,450,089,576							9,117,845,812	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,351,059,576						100 %	5,452,554,419	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang dibuat tepat waktu	100 %	91,663,000						100 %	65,748,000	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17,154,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,984,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	7,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9,020,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	7,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,189,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8,204,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	4,248,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	33,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	21,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6,212,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	12,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang dibuat tepat waktu	100 %	4,163,410,726						100 %	4,362,259,312	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji yang terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 0 Orang/bula	3,744,736,526	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 0 Orang/bula	3,959,759,312	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat kelengkapan komputer yang tersedia Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah makan minum rapat yang tersedia Jumlah penggandaan/fotocopy yang tersedia Jumlah premi asuransi BPJS ketenagakerjaan yang terbayarkan	2 Jenis 37 jenis 0 Dokumen 500 dos 15000 lembar 16 orang	65,174,300	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Jenis 37 jenis 0 Dokumen 500 dos 15000 lembar 16 orang	62,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0 Dokumen 32 Jasa	294,801,900	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 32 Jasa	294,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	0 Laporan 1 Laporan	16,703,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Laporan 1 Laporan	11,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	13 Laporan	41,995,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	13 Laporan	35,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100 %	8,092,000						100 %	7,000,000	
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang dan aset yang tersusun Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan 0 Laporan	8,092,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan 0 Laporan	7,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang memiliki nilai SKP Baik	100 %	229,777,000						100 %	180,000,000	
5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	27,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Paket	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	37,777,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	150,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Orang	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kantor yang dilaksanakan	100 %	364,162,000						100 %	371,616,750	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,950,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,592,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Paket	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	25,560,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	24 Dokumen	26,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	14,060,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	20,616,750	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	300,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	220 Laporan	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	95,301,250						100 %	154,715,857	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	44,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor yang tersedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Jenis 0 Unit	16,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Jenis 0 Unit	37,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis 0 Unit	34,801,250	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 Jenis 0 Unit	77,715,857	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa layanan kantor yang terpenuhi	100 %	225,078,600						100 %	185,214,500	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang tersedia	0 Laporan 300 surat	23,238,600	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Laporan 300 surat	15,214,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iuran TV Kabel yang terbayarkan Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening kawat faksimile/internet yang terbayarkan Jumlah rekening layanan telepon yang terbayarkan	1 iuran 6 orang 0 Laporan 1 rekening 1 rekening	104,580,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 iuran 6 orang 0 Laporan 1 rekening 1 rekening	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	97,260,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	173,575,000						100 %	126,000,000	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan bakar minyak/gas yang tersedia Jumlah jasa sopir yang terbayarkan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan Jumlah STNK untuk kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	2240 Liter 1 Kali 0 Unit 6 Unit 11 Unit	83,950,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2240 Liter 1 Kali 0 Unit 6 Unit 11 Unit	81,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang terpelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Jenis 0 Unit	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Jenis 0 Unit	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis 0 Unit	4,625,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 jenis 0 Unit	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0 Unit 1 gedung	75,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Unit 1 gedung	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100 %	902,682,000						100 %	905,075,000	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	100 %	664,790,000						100 %	564,000,000	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen 0 Dokumen	68,132,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatut dan masyarakat	1 Dokumen 0 Dokumen	31,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan	0 Berita Acara 1 kegiatan	19,372,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatut dan masyarakat	0 Berita Acara 1 kegiatan	36,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah kegiatan forum SKPD/lintas SKPD yang dilaksanakan	0 Berita Acara 1 Kegiatan	143,149,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatut dan masyarakat	0 Berita Acara 1 Kegiatan	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	104,182,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatut dan masyarakat	1 Berita Acara	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang tersedia Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen 0 Usulan	48,577,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatut dan masyarakat	1 Dokumen 0 Usulan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perenca Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD Jumlah dokumen perenca pembangunan daerah ya ditetapkan	0 Dokumen 2 Dokumen	281,378,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatut dan masyarakat	0 Dokumen 2 Dokumen	182,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	76,910,000						100 %	137,075,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Analisis	4,760,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	5 Analisis	33,075,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah aplikasi data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Aplikasi 43 Orang	22,100,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Aplikasi 43 Orang	52,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	50,050,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Buku	52,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah indikator program yang memenuhi target	86 %	160,982,000						86 %	204,000,000	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	48,385,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	54,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah yang tersusun Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Dokumen 1 Kerja Sama	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen 1 Kerja Sama	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	102,597,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	3,196,348,000						100 %	2,760,216,393	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Yang Digunakan	100 %	849,775,000						100 %	632,494,370	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah laporan kemiskinan dan SDGs yang tersusun	0 Dokumen 2 Laporan	260,952,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen 2 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	11,021,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	14,222,250	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring bidang pemerintahan yang tersusun Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan 0 Laporan	69,832,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan 0 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan/dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 0 Laporan	43,075,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen 0 Laporan	210,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah laporan perencanaan bidang pembangunan yang tersusun	0 Dokumen 1 Laporan	198,005,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen 1 Laporan	40,272,120	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Kali 0 Laporan	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Kali 0 Laporan	13,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah laporan monitoring bidang pembangunan manusia	0 Laporan 2 Laporan	41,560,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	0 Laporan 2 Laporan	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan bidang pembangunan manusia yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan 0 Laporan	210,330,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan 0 Laporan	140,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang digunakan	100 %	1,105,729,000						100 %	906,452,023	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen informasi pembangunan Kabupaten Pinrang Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak rokok Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 buku 1 Laporan 0 Dokumen	405,841,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 buku 1 Laporan 0 Dokumen	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan bidang perekonomian yang disusun Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen 0 Laporan	16,311,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen 0 Laporan	17,184,668	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen/laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen 0 Laporan	15,652,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen 0 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan 0 Laporan	377,110,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan 0 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi dan movev pembangunan ekonomi kreatif Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen 0 Dokumen	162,014,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen 0 Dokumen	112,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang diasistensi Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen 0 Laporan	28,390,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen 0 Laporan	17,267,355	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	57,749,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen dan peta pengembangan kawasan agropolitan yang tersusun Jumlah dokumen pengembangan ekonomi kreatif Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 dokumen 1 dokumen 0 Laporan	42,662,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 dokumen 1 dokumen 0 Laporan	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilauahan yang digunakan	100 %	1,240,844,000						100 %	1,221,270,000	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	877,917,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	1 Dokumen	240,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	19,556,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	5 Perangkat Daerah	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	20,240,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	5 Perangkat Daerah	12,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan DAK yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan 0 Laporan	94,509,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	4 Laporan 0 Laporan	95,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan terkait kewilayahan yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Dokumen 0 Laporan	40,282,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	3 Dokumen 0 Laporan	340,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait bidang kewilayahan	0 Laporan 4 Kali	20,770,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	0 Laporan 4 Kali	13,770,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan data terkait perumahan dan permukiman yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan 0 Laporan	167,570,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Masyarakat	5 Laporan 0 Laporan	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	02				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02				KEUANGAN										199,276,666,685	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			46,305,814,088							35,325,058,650	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			103,214,594							103,926,773	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang berhasil disusun tepat waktu	3 Dokumen	35,665,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		3 Dokume	35,911,089	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rencana kerja yang berhasil disusun tepat waktu Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	12,228,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Dokume 0 Dokume	n n 12,312,373	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen rencana kerja perubahan yang berhasil disusun tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	8,865,300	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Dokume 1 Dokume	n n 8,926,470	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan anggaran yang berhasil disusun tepat waktu	1 Dokumen	9,680,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Dokume	n 9,747,295	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran yang berhasil disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	12,829,294	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Dokume 0 Dokume	n n 12,917,816	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang berhasil disusun tepat waktu	3 Dokumen	11,718,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		3 Dokume	n 11,799,357	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja yang berhasil disusun tepat waktu dan sesuai aturan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 0 Laporan	12,228,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Dokume 0 Laporan	n 12,312,373	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44,306,379,494							33,311,428,662	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase jumlah ASN pada SKPD BKuD yang dibayarkan gajinya dalam kurun waktu 1 Tahun	0 Orang/bu 100 %	lan 43,389,279,494	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Orang/b 100 %	ulan 32,388,000,673	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi terkait pelaksanaan tugas ASN terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100 %	132,470,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	133,384,043	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase proses pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100 %	611,400,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	615,618,660	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan akhir tahun SKPD tersusun dengan baik dan tepat waktu	1 Dokumen	12,228,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Dokume	12,312,373	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Bulanan Triwulanan dan semesteran tersusun dengan baik dan tepat waktu	17 Dokumen	161,002,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		17 Dokumen	162,112,913	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			39,231,500							39,502,197	
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan barang milik Daerah SKPD terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	2 Dokumen	12,228,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		2 Dokume	12,312,373	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang milik Daerah SKPD yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	1 Dokumen	27,003,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Dokume	27,189,824	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			244,560,000							246,247,463	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pengadaan pakaian batik dan pakaian olahraga terealisasi dengan baik	100 %	35,665,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	35,911,088	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen terkait dengan administrasi kepegawaian berhasil disusun dengan baik dan tepat waktu	3 Dokumen	20,380,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		3 Dokume	20,520,622	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pegawai yang dapat dimonitoring, dievaluasi dan nilai kinerjanya	100 %	10,190,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale			2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	10,260,311	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang berhasil disosialisasikan	1 Paket	25,475,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Paket	25,650,777	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase bimbingan teknis peraturan perundang-undangan yang dalam skala prioritas dapat dilaksanakan/diikuti dengan baik	0 Orang 90 %	152,850,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Orang 90 %	153,904,665	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			303,000,000							305,490,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi dengan baik	0 Paket 100 %	8,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Paket 100 %	8,152,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase keterpenuhan atas kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	25,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	25,475,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah event yang berhasil diikuti/dilaksanakan dengan baik	1 event	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 event	15,103,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase keterpenuhan atas kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi SKPD	100 %	255,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	256,759,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			392,700,000							395,409,630	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda dua yang berhasil diadakan	1 Unit	25,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Unit	25,172,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Persentase keterpenuhan atas kebutuhan mebel	0 Unit 100 %	12,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Unit 100 %	12,082,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase keterpenuhan atas kebutuhan peralatan dan mesin lainnya	100 %	203,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	205,206,220	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Presentase ketersediaan Software pendukung/Aplikasi dalam pengelolaan Keuangan yang akuntabel	100 %	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	50,345,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keterpenuhan atas sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor	100 %	101,900,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	102,603,110	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553,826,500							557,647,902	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat surat masuk dan keluar terregistraasi secara baik dan sesuai penatausahaan kearsipan	0 Laporan 1000 Surat	25,475,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Laporan 1000 Surat	25,650,777	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase terbayarkannya tagihan atas pemakaian kebutuhan listrik, komunikasi dan sumber daya air	100 %	499,310,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	502,755,239	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa/tenaga pembersih yang selalu siap dalam menjamin kebersihan taman dan taman	4 Orang	29,041,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		4 Orang	29,241,886	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			362,902,000							365,406,023	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat dalam cakupan pemeliharaan dan laik jalan	35 Kendaraan	152,850,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		35 Kendaraan	153,904,665	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase kecakupan atas pemeliharaan peralatan/perlengkapan dan mesin lainnya	0 Unit 100 %	28,532,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Unit 100 %	28,728,870	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Asset tak berwujud dalam kondisi yang baik dan beroperasi secara normal	100 %	81,520,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	82,082,488	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dalam kondisi yang terpelihara dan laik pakai	100 %	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	50,345,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan Prasarana gedung Kantor dalam kondisi baik	100 %	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	50,345,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			85,825,515,756							161,428,251,858	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1,070,475,000							1,077,861,276	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS tersusun tepat waktu	2 Dokumen	61,140,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		2 Dokume	61,561,866	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS tersusun tepat waktu	2 Dokumen	40,760,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		2 Dokume	41,041,244	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang dapat diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	43 SKPD	14,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		43 SKPD	14,096,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang dapat diverifikasi secara akurat dan tepat waktu	43 Perubah RKA SKPD	12,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		43 Perubah RKA SKPD	12,082,800	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang dapat diverifikasi tepat waktu dan akurat	43 DPA SKPD	26,494,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		43 DPA SKPD	26,676,808	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang dapat diverifikasi tepat waktu dan akurat	43 DPPA SKPD	23,437,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		43 DPPA SKPD	23,598,715	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penetapan APBD tepat Waktu (30 Nov )	30 Novemb	306,719,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		30 Novem	308,835,361	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait APBD Perubahan tersusun tepat waktu	2 Dokumen	265,959,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		2 Dokume	267,794,117	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah dokumen terkait penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran tersusun dengan baik dan tepat waktu	0 Dokumen 2 Dokumen	319,966,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Dokume 2 Dokume	322,173,765	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1,062,722,756							1,067,329,043	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Kas Daerah terlaksana secara benar dan tepat waktu	100 %	89,855,256	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	90,475,258	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah SKPD yang dapat diverifikasi pengajuan SPDnya	0 Dokumen 43 SKPD	181,891,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Dokume 43 SKPD	183,146,551	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah SKPD yang dapat proses penatausahaan Pembiayaannya dalam kurun 1 tahun Anggaran	0 Dokumen 43 SKPD	685,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Dokume 43 SKPD	687,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang berhasil diverifikasi penatausahaan keuangannya secara benar dan tepat waktu	43 SKPD	105,976,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		43 SKPD	106,707,234	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2,162,318,000							77,190,504,539	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	umlah SKPD yang dalam koordinasi dan penataan pelaksanaan akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	44 SKPD	213,990,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	44 SKPD	215,466,531	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	jumlah SKPD yang dapat direkonsiliasi dan diverifikasi secara benar laporan keuangannya	44 SKPD	334,232,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	44 SKPD	336,538,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, triwulanan, dan Semesteran terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	0 Laporan 17 Dokumen	334,232,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	0 Laporan 17 Dokumen	336,538,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat dikonsolidasi dengan baik	100 %	152,850,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	100 %	153,904,665	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD terselesaikan tepat waktu (31 Maret)	31 maret	752,531,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	31 maret	75,772,396,735	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah SKPD yang dapat dianalisa secara benar dan akurat Laporan Pertanggungjawabannya	43 SKPD	203,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	43 SKPD	203,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pencatatan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan SKPD yang memenuhi standar akuntansi Pemerintah	100 %	84,067,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	100 %	84,647,565	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD di Kabupaten yang dpat dibina dalam pengelolaan Keuangan	19 Unit Kerja	86,615,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		19 Unit Kerja	87,212,643	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			81,520,000,000							82,082,488,000	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran bantuan keuangan dapat tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu	100 %	81,520,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	82,082,488,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			10,000,000							10,069,000	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Dokume	10,069,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			772,402,000							777,731,570	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			772,402,000							777,731,570	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen tentang standar harga yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	2 Dokumen	59,102,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		2 Dokume	59,509,803	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dapat menyusun RKBUnya selesai tepat waktu dan terverifikasi dengan baik	44 SKPD	21,399,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		44 SKPD	21,546,653	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan Inventaris barang Kabupaten tersusun dengan baik	1 Dokumen	120,242,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Dokume	121,071,669	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Persentase barang/aset milik daerah terlindungi secara administrasi dan fisik	0 Laporan 100 %	240,484,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Laporan 100 %	242,143,339	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik dalam pengawasan dan pengendalian yang benar dan sesuai ketentuan	100 %	23,437,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	23,598,715	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase tingkat akurasi dokumen Laporan terkait pemanfaatan, pemindahtanganan, pemindahan dan penghapusan barang milik daerah tersajikan dengan akurat	80 %	44,836,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		80 %	45,145,368	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang berhasil menyusun laporan barang milik daerah tepat waktu	44 SKPD	262,902,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		44 SKPD	264,716,023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1,660,383,000							1,745,624,607	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1,660,383,000							1,745,624,607	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah perencanaan terkait pengelolaan Pajak daerah yang berhasil dilaksanakan dengan baik	1 Paket/dok	12,737,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		1 Paket/dok	12,825,388	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Produk Hukum terkait dengan pengelolaan pajak yang berhasil disusun dengan baik	0 Dokumen 1 Dokumen	1,019,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Dokumen 1 Dokumen	10,260,311	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah lokasi yang menjadi titik penyebarluasan informasi terkait pajak daerah	0 Laporan 12 Kecama	21,399,000 tan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Laporan 12 Kecama	21,546,653 tan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Persentase jumlah sarana/prasarana terkait perpajakan dalam rencana pengadaan terlaksana dengan baik	0 Unit 100 %	256,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Unit 100 %	257,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase atas permohonan pendataan dan pendaftaran objek pajak terselesaikan dengan tuntas	100 %	51,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	89,264,705	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Persentase pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak terpelihara dengan aman (Database dan scanner)	0 Laporan 100 %	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Laporan 100 %	30,780,933	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Persentase jumlah permohonan wajib pajak daerah berhasil ditetapkan	0 Dokumen 100 %	455,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Dokumen 100 %	457,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Persentase permohonan pelayanan dan konsultasi terkait pajak daerah berhasil diselesaikan/difasilitasi	0 Layanan 100 %	265,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Layanan 100 %	267,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase verifikasi atas dokumen pelaporan pajak daerah daerah terselesaikan dengan baik dan akurat	100 %	22,927,500	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		100 %	23,085,699	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Persentase /penagihan/pemungutan pajak daerah yang tertagih/terrealisasi naik dari tahun sebelumnya	0 Dokumen 5 %	541,900,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Dokume 5 %	n 558,160,918	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Persentase jumlah pajak berada dalam pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan	0 Dokumen 100 %	18,200,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan		0 Dokume 100 %	n 18,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN			6,905,304,378							7,350,802,344			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,906,647,723						100 %	6,302,093,844			
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang tersedia	100 %	62,870,000						100 %	25,672,000			
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,841,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	3 Dokumen	4,185,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	3,790,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen yang RKA-SKPD perubahan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1 Dokumen	8,055,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	4,540,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang DPA-SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1 Dokumen	8,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	2,940,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang DPA-SKPD Perubahan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	1 Dokumen	6,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	3,439,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu	4 Laporan	21,029,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	4 Laporan	6,778,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan dan laporan keuangan yang tersedia	100 %	4,265,630,973						100 %	4,634,636,719	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	3,977,564,973		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	45 Orang	4,375,864,219	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	82,484,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	8 Dokumen	78,228,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	171,834,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Dokumen	167,926,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,045,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Laporan	8,248,500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	12 Laporan	18,703,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Laporan	4,370,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jasa layanan dan laporan pengelolaan barang milik daerah	100 %	26,121,000						100 %	39,375,000	
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	26,121,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Laporan	39,375,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	627,592,000						100 %	757,853,500	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 Pasang	52,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	58 Pasang	26,325,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10,722,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Dokumen	61,897,500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	24,377,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Dokumen	24,775,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	280 Orang	135,777,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	280 Orang	240,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	32,481,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Laporan	32,428,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	225 Orang	28,794,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	225 Orang	32,428,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	151,305,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	10 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang	41,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	98 Orang	40,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	15 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			288,545,000							269,730,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Paket	6,591,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,045,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Paket	11,123,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Dokumen	2,016,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	160 Laporan	250,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah/asset yang bertambah/tersedia	15 Unit/Buah	182,018,750						15 Unit/Buah	165,000,000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	5 Paket	15,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	149,018,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	10 Unit	150,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	222,195,000						100 %	201,826,625	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Laporan	14,245,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Laporan	128,991,625	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	12 Laporan	58,590,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah, tersedia dan layak pakai untuk menunjang urusan/kegiatan dan pekerjaan	100 %	231,675,000						100 %	208,000,000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	160,187,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	18 Unit	155,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Paket	3,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	42,447,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	7 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Unit	15,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	75 % 75 % 79,01 %	998,656,655						75 % 75 % 79,01 %	1,048,708,500		
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					260,071,530							289,310,500	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	250 Dokumen	213,883,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	250 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5349 Dokume	46,188,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	5349 Dokume	39,310,500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			498,454,125							440,000,000		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	79,105,375		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	5 Dokumen	127,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 SK KP	197,011,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1000 SK KP	206,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	7 Dokumen	222,337,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	7 Dokumen	107,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			184,983,000							175,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	33,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	2 Dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	151,903,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	2 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			55,148,000							144,398,000				
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	31,491,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	1 Dokumen	130,398,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	11 Laporan	23,657,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	11 Laporan	14,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2,416,333,000								2,320,000,000			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manejerial dan fungsional	95 %	2,416,333,000									95 %	2,320,000,000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2,416,333,000										2,320,000,000	
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang	1,545,393,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	40 Orang	1,180,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	870,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0	2 Laporan	1,140,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,710,046,530								1,000,000,000			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder	100 %	1,710,046,530									100 %	1,000,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	233,350,000						88 %	225,000,000	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Data	20,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Data	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomenda	213,350,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	3 Rekomenda	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	563,046,000						88 %	115,000,000	
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	175,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	144,166,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	243,880,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	88 %	541,363,530						88 %	300,000,000	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	98,400,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	242,963,530	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	45 %	372,287,000						45 %	360,000,000		
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	137,920,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah lomba kretivitas dan inovasi masyarakat yang diselenggarakan	1 Laporan 1 lomba	88,735,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan 1 lomba	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	94,862,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	50,770,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			13,321,752,627								13,965,911,121	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	8,144,827,627						50 %	7,768,694,196		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	31,360,000						100 %	28,973,725		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31,360,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Dokumen	7,706,475	Inspektorat	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	6,063,549,628						100 %	6,037,901,021		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bul	5,789,962,628		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	65 Orang/bul	5,809,083,803	Inspektorat
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	118,187,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	58,837,118	Inspektorat
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	153,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	166,082,800	Inspektorat
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	1,940,400	Inspektorat
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/Semest SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest SKPD	2 Laporan	1,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	1,956,900	Inspektorat
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13,600,000						100 %	19,919,200	
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	13,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	13,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 %	438,175,000						100 %	565,916,350	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 pasang	28,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	65 pasang	24,696,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	13,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	28,157,850	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Kegiatan	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	22 Kegiatan	265,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Kegiatan	21,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	2 Kegiatan	55,125,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	40 orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	40 orang	192,937,500	Inspektorat
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	284,765,000						100 %	391,290,000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	5,512,500	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Paket	16,500,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Kegiatan	19,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	15 Kegiatan	26,500,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis	15,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	5 jenis	55,125,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Kegiatan	245,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	55 Kegiatan	275,525,000	Inspektorat
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang yang tersedia	100 %	1,015,209,999						100 %	370,000,000	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	88,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	278,649,999		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Unit	150,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	648,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	220,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	156,718,000						100 %	217,758,900	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1430 Laporan	2,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1430 Laporan	3,832,500	Inspektorat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	91,728,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	24 Laporan	161,834,400	Inspektorat
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Laporan	52,092,000	Inspektorat
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	141,450,000						100 %	136,935,000	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	99,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	27 Unit	54,999,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	12 Unit	26,250,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	aparatur	2 Paket	39,186,000	Inspektorat
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	4,739,825,000						85 %	5,657,729,450	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	85 %	4,505,765,000						85 %	5,075,484,850	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	71 Laporan	1,756,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	71 Laporan	1,990,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	70 Laporan	1,404,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	70 Laporan	1,450,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 lhp	97,525,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 lhp	365,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 LHP	156,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	8 LHP	375,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 LHP	390,100,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 LHP	450,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakata	224,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Kesepakata	270,780,600	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	476,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	174,704,250	Inspektorat
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	85 %	234,060,000						85 %	582,244,600	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 LHP	234,060,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	24 LHP	582,244,600	Inspektorat
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	437,100,000						50 %	539,487,475	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	34,000,000						50 %	16,195,725	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomenda	26,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Rekomenda	9,095,625	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	1 Rekomenda	7,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Rekomenda	7,100,100	Inspektorat	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	50 %	403,100,000						50 %	523,291,750		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 perangkat daerah	78,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 perangkat daerah	105,000,000	Inspektorat	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	91,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	43 perangkat daerah	235,053,000	Inspektorat	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	156,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 Kegiatan	100,000,000	Inspektorat	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 OPD	78,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	43 OPD	83,238,750	Inspektorat	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN			4,521,139,360							4,480,139,360		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,521,139,360						100 %	4,480,139,360		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	6 Kegiatan	17,625,000						6 Kegiatan	11,985,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	3 Kegiatan	14,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	3 Kegiatan	8,985,000	Kecamatan Watang Sawitto	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Kegiatan	2,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	3 Kegiatan	3,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	4,056,154,360						1 Tahun	4,048,419,960	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3,880,662,160	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Tahun	3,880,662,160	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	74,080,200	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	1 Tahun	33,340,500	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			95,412,000					Aparatur		125,877,300	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Tahun	3,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Tahun	4,070,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Tahun	2,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Tahun	4,470,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	14,400,000						12 Bulan	7,800,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Persentase barang dan aset daerah yang terinventarisasi sesuai aturan yang berlaku	12 Bulan	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	12 Bulan	7,800,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	65,000,000						100 %	85,415,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 %	75,140,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	1 Tahun	153,400,000						1 Tahun	50,680,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawitto, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan kantor	1 Tahun	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	2,500,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Tahun	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	680,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksanaan sesuai kebutuhan	1 Tahun	126,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	32,500,000	Kecamatan Watang Sawitto



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	26,500,000					100 %	79,360,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	52,550,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16,500,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	1 Unit	26,810,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	32,810,000					12 Bulan	16,414,400		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80000000	12 Bulan	25,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	8,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	7,010,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	9 Laporan	8,414,400	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	155,250,000					100 %	180,065,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	25,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	100 %	39,759,000	Kecamatan Watang Sawitto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	100 %	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	140,306,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						780,016,850					817,016,850	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	152,038,600						100 %	167,038,600		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	101,866,600						1 Tahun	79,608,900		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	18,826,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	16,670,250	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	83,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	62,938,650	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000						100 %	25,137,500		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 %	20,000,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	1 Tahun	1,200,000						1 Tahun	20,680,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	680,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	18,800,000						100 %	23,405,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Bentengnge	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	8,172,000						12 Bulan	8,207,200	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	100 %	3,672,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	4,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,207,200	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	627,978,250						50 %	649,978,250	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	627,978,250						100 %	649,978,250	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	100 %	577,978,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	100 %	599,978,250	Kecamatan Watang Sawitto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	100 %	50,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN						780,366,850			817,366,850		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	152,388,600						100 %	167,388,600	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	91,941,120						1 Tahun	79,608,900	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	14,541,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Tahun	16,670,250	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	77,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Tahun	62,938,650	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	5,218,730						100 %	25,137,500	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	5,218,730		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 %	5,137,500	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	1 Tahun	27,640,000						1 Tahun	20,680,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawitto, Penrang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	680,000	Kecamatan Watang Sawitto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	17,088,750						100 %	23,405,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	17,088,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	13,405,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	10,500,000						12 Bulan	8,207,200	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	4,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,207,200	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	627,978,250						50 %	649,978,250	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	627,978,250						100 %	649,978,250	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	577,978,250	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	599,978,250	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Penrang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN						780,016,850	817,016,850				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	152,038,600						100 %	167,038,600	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	87,043,600						1 Tahun	79,608,900	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	14,793,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	16,670,250	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	72,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	62,938,650	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000						100 %	25,137,500	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 %	20,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	1 Tahun	2,220,000						1 Tahun	20,680,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Tahun	2,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	680,000	Kecamatan Watang Sawitto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	23,000,000					100 %	23,405,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	13,405,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	8,100,000					12 Bulan	8,207,200	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	4,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,207,200	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	9,675,000					100 %	10,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	100 %	9,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	100 %	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	627,978,250						50 %	649,978,250	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	627,978,250						100 %	649,978,250	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	577,978,250	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Unit	599,978,250	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Salo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN										817,016,850	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	152,038,600						100 %	167,038,600	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	105,108,600						1 Tahun	79,608,900	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	14,708,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	16,670,250	Kecamatan Watang Sawitto



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	90,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	62,938,650	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	1 Tahun	29,280,000						1 Tahun	20,680,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	680,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	22,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	7,500,000						100 %	23,405,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	13,405,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	10,150,000						12 Bulan	8,207,200	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	4,000,000	Kecamatan Watang Sawitto		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	4,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,207,200	Kecamatan Watang Sawitto		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	627,978,250						50 %	649,978,250			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	627,978,250						100 %	649,978,250			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	577,978,250	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Unit	599,978,250	Kecamatan Watang Sawitto		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kecamatan Watang Sawitto		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			780,366,850								817,366,850		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	130,388,600						100 %	167,388,600	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	96,338,600						1 Tahun	79,608,900	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	18,833,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	16,670,250	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	77,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	62,938,650	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	1 Tahun	23,200,000					1 Tahun	20,680,000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Tahun	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	680,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	22,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawitto, Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	10,500,000					12 Bulan	8,207,200		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	4,000,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,207,200	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	350,000						100 %	10,350,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	100 %	350,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	649,978,250						50 %	649,978,250		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	649,978,250							100 %	649,978,250	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	599,978,250	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	599,978,250	Kecamatan Watang Sawitto	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawitto, Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						780,366,850				817,366,850		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	168,388,600							100 %	167,388,600	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	81,338,600							1 Tahun	79,608,900	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	15,412,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	16,670,250	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	65,926,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	62,938,650	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000							100 %	25,137,500	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 %	20,000,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	1 Tahun	9,200,000							1 Tahun	20,680,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Tahun	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	680,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	<b>11,500,000</b>						100 %	<b>23,405,000</b>	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	11,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	13,405,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	<b>6,000,000</b>						12 Bulan	<b>8,207,200</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	4,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,207,200	Kecamatan Watang Sawitto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	38,350,000					100 %	10,350,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	100 %	350,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	100 %	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	611,978,250						50 %	649,978,250	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	611,978,250						100 %	649,978,250	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	577,978,250	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	599,978,250	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	34,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sipatokkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7					UNSUR KEWILAYAHAN											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01				KECAMATAN		780,366,850							817,366,850		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	130,388,600						100 %	167,388,600	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	81,798,600						1 Tahun	79,608,900	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	21,618,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Tahun	16,670,250	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Tahun	60,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Tahun	62,938,650	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000						100 %	25,137,500	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	100 %	20,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	1 Tahun	2,340,000						1 Tahun	20,680,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Tahun	2,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	680,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	15,800,000						100 %	23,405,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	15,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	13,405,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	8,100,000					12 Bulan	8,207,200		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	4,000,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,207,200	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	350,000					100 %	10,350,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	100 %	350,000	Kecamatan Watang Sawitto	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	649,978,250					50 %	649,978,250		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	649,978,250						100 %	649,978,250	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	599,978,250	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	599,978,250	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 %	50,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			780,366,850							817,366,850	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	152,388,600						100 %	167,388,600	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	99,638,600						1 Tahun	79,608,900	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	15,988,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	16,670,250	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	83,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Tahun	62,938,650	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000						100 %	25,137,500	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya aparatur Sipil Negara yang memiliki kecakapan dan keterampilan	100 %	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	100 %	20,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	21,900,000						100 %	23,405,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4,600,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100 %	17,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	100 %	13,405,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	8,500,000						12 Bulan	8,207,200	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Bulan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	4,000,000	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor yg bersih dan terpelihara, serta Pelayanan yang terpenuhi	12 Bulan	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,207,200	Kecamatan Watang Sawitto
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	350,000						100 %	10,350,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	100 %	350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 %	350,000	Kecamatan Watang Sawitto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	627,978,250						50 %	649,978,250				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	627,978,250						100 %	649,978,250				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	577,978,250	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	599,978,250	Kecamatan Watang Sawitto			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	100 %	50,000,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Siparappe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	100 %	50,000,000	Kecamatan Watang Sawitto			
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						5,923,307,004						5,084,990,822		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	5,908,207,004							100 % 100 %	5,076,490,822			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17,200,000						100 %	16,200,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur		2,800,000	Kecamatan Paleteang			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan/Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Dokumen	2,800,000	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 orang / kegiatan	2,200,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	5 orang / kegiatan	2,200,000	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	2,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Dokumen	0	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen yang tersusun tepat waktu	5 orang / kegiatan	2,200,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	5 orang / kegiatan	2,200,000	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur		3,400,000	Kecamatan Paleteang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang dievaluasi tepat waktu	1 Dokumen	2,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Dokumen	2,800,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,635,263,619						100 %	4,696,090,822	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bul	5,509,442,119	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	10 Orang/bul	4,565,870,822	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	35,621,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	85,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	74,220,000	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	12 Bulan	2,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	3,200,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun Bulanan/Triwulan/Semest dengan akuntabel	12 Bulan	2,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	2,800,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,200,000						100 %	2,800,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun Bulanan/Triwulan/Semest dengan akuntabel	12 Bulan	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	2,800,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120,000,000						100 %	157,200,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 LS 0 Orang	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 LS 0 Orang	150,000,000	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	66,833,000						100 %	47,700,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	7,053,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	7,500,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	4,200,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksanan sesuai kebutuhan	12 Bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	34,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	35,126,385						100 %	30,500,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	11,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuha	12 Bulan	32,626,385		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	12,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	31,584,000						100 %	26,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah rekening Layanan Internet yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	10,584,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	14,000,000	Kecamatan Paleteang



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	12,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan	1 Kegiatan	15,100,000						1 Kegiatan	8,500,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan di Tingkat Kecamatan	100 %	15,100,000						100 %	8,500,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan yang terkoordinasi sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	15,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	12 Bulan	8,500,000	Kecamatan Paleteang
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			534,000,000							438,391,108	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			164,000,000							48,391,108	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61,250,000							30,750,032	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29,450,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Dokumen	30,750,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	31,800,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	32	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	27,200,000						100 %	17,641,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 LS 0 Paket	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 LS 0 Paket	7,200,000	Kecamatan Paleteang	
7		01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan 0 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 0 Orang	10,441,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,590,000							3		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,590,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Paket	0	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	3	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			21,500,000							28		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	13,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	0	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	8,500,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	28	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45,580,000							45		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	4,410,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Laporan	4	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	41,170,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Laporan	41	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,880,000							0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2,660,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Pacongang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	0	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	0	Kecamatan Paleteang	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Paleteang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	390,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan	100 %	370,000,000						100 %	390,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Ls	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Ls	370,000,000	Kecamatan Paleteang	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	1 Kegiatan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Kegiatan	20,000,000	Kecamatan Paleteang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN			534,000,000								459,862,762	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			164,000,000							69,862,730		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49,494,000							50		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	17,694,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	18	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	31,800,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		0 Dokumen	32	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	26,750,000						100 %	17,641,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 LS 0 Paket	6,750,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 LS 0 Paket	7,200,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan 0 Orang	20,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan 0 Orang	10,441,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,044,400							1,447	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1,004,400	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Paket	7	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	2,040,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	1,440	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37,125,000							7,000,003	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	8,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	3	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	29,125,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	7,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44,175,000							45,220,230	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	3,675,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Laporan	2,940,230	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	40,500,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Laporan	42,280,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,411,600							0	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	1,206,600	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	0	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	2,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	0	Kecamatan Paleteang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Paleteang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	390,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan	100 %	370,000,000						100 %	390,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	0 Unit 1 Ls	350,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Benteng Sawito	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	0 Unit 1 Ls	370,000,000	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	1 Kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Kegiatan	20,000,000	Kecamatan Paleteang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			35,483,000							558,031,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35,483,000							168,031,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35,483,000							49,780,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	3,683,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		0 Dokumen	17,980,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	31,800,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Mamminasae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		0 Dokumen	31,800,000	Kecamatan Paleteang
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			534,000,000							529,241,500	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			164,000,000							139,241,500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			53,275,000							50,714,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	21,475,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		0 Dokumen	18,914,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	31,800,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		0 Dokumen	31,800,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	26,750,000						100 %	17,641,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 LS 0 Paket	6,750,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 LS 0 Paket	7,200,000	Kecamatan Paleteang
7					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan 0 Orang	20,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 0 Orang	10,441,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6,780,000							1,980,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,800,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Paket	0	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	900,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Paket	900,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	1,080,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	1,080,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,700,000							22,900,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	6,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		0 Unit	12,400,000	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	24,700,000	Kab. Pinrang, Paletang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		0 Unit	10,500,000	Kecamatan Paletang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44,625,000							44,175,500	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	3,675,000	Kab. Pinrang, Paletang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Laporan	3,675,500	Kecamatan Paletang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	40,950,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Laporan	40,500,000	Kecamatan Paletang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,870,000							1,831,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	650,000	Kab. Pinrang, Paletang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	1,831,000	Kecamatan Paletang
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1,220,000	Kab. Pinrang, Paletang, Temmassarang	Dana Transfer Umum-Dana nAgelokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	0	Kecamatan Paletang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Paletang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	390,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan	100 %	370,000,000						100 %	390,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Ls	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Ls	370,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	1 Kegiatan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Kegiatan	20,000,000	Kecamatan Paleteang
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			534,000,000							523,519,600	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			164,000,000							133,519,600	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			54,597,000							54,597,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	22,797,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	22,797,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	31,800,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	31,800,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	29,450,000						100 %	17,641,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 LS 0 Paket	9,450,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 LS 0 Paket	7,200,000	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan 0 Orang	20,000,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 0 Orang	10,441,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,200,600							3,097,800	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1,600,600	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Paket	3,097,800	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	600,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	0	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10,095,000							0	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10,095,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	0	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51,371,400							55,626,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	8,996,400	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Laporan	8,996,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	42,375,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Laporan	46,630,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,286,000							2,557,800	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	1,961,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	2,557,800	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	13,875,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	0	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	450,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Laleng Bata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	0	Kecamatan Paleteang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Paleteang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	390,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan	100 %	370,000,000						100 %	390,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Ls	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Ls	370,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	1 Kegiatan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Kegiatan	20,000,000	Kecamatan Paleteang
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			546,000,000							529,885,032	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			176,000,000							139,885,032	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49,970,000							19,101,032	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	18,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	19,101,000	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	31,800,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	32	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	27,650,000						100 %	17,641,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Batik yang di adakan sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	7,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	7,200,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan yang dilaksankan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan	12 Bulan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	10,441,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5,300,000							2,880,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2,120,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Paket	0	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	900,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Paket	1,200,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	2,280,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Dokumen	1,680,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33,925,000							42,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	3,500,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		0 Unit	42,000,000	Kecamatan Paleteang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	30,425,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		0 Unit	0	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55,644,000							55,644,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	3,144,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnæ	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0 Laporan	3,144,000	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	52,500,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnæ	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0 Laporan	52,500,000	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,511,000						2,619,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	2,226,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnæ	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0 Unit	2,619,000	Kecamatan Paleteang	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1,285,000	Kab. Pinrang, Paleteang, Macinnæ	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	0 Unit	0	Kecamatan Paleteang	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Paleteang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000					50 %	390,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan	100 %	370,000,000					100 %	390,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Ls	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Ls	370,000,000	Kecamatan Paleteang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat		20,000,000	Kecamatan Paleteang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			4,080,686,694							11,407,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,070,826,694						100 %	8,192,000,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dan terlapor sesuai dengan aturan	10 Dokumen	17,940,000					10 Dokumen	30,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,990,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Pelaporan	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	2,990,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Pelaporan	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	2,990,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Pelaporan	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	2,990,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Pelaporan	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Pelaporan		5,000,000	Kecamatan Tiroang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,990,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Pelaporan	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	3,665,044,694						12 Bulan	6,710,000,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	3,530,653,694	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	12 Bulan	3,500,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Perkantoran sesuai Analisa Kebutuhan	12 Bulan	40,201,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	12 Bulan	200,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	88,210,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	12 Bulan	3,000,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	2,990,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	3 Laporan	2,990,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	3 Laporan	5,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Laporan	7,420,000						1 Laporan	60,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang terlapor sesuai aturan dan tepat waktu	12 Dokumen	7,420,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	10 Orang	73,150,000						10 Orang	172,000,000	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun	2 Dokumen	3,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang 0 Orang	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara	10 Orang 0 Orang	150,000,000	Kecamatan Tiroang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	82,745,000						12 Bulan	240,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,475,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			ASN		15,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	1,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Bulan	15,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Ekslamper	2,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Ekslamper	10,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan yang terigisterasi dan terkoordinasi sesuai dengan analisa kebutuhan	12 Bulan	77,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Bulan	200,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin kantor yang diadakan sresuai analisa kebutuhan	17 Unit	53,000,000						17 Unit	450,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	0 Unit 20 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara	0 Unit 20 Unit	100,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	23,000,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara	25 Unit	350,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	43,017,000						12 Bulan	350,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	22,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu	0 Laporan 12 Bulan	20,967,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	0 Laporan 12 Bulan	300,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Bangunan Gedung Kantor	3 Kegiatan	128,510,000						3 Kegiatan	180,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang tepelihara dengan baik	0 Unit 5 Unit	44,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BMD	0 Unit 5 Unit	120,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BMD		20,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlahsarana dan prasarana gedung kantor yang tepelihara dengan baik	7 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BMD	7 Unit	40,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan	1 Kegiatan	9,860,000						1 Kegiatan	15,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan baik	1 Kegiatan	9,860,000						1 Kegiatan	15,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang terlaksana dengan baik	1 Kegiatan	9,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur dan Masyarakat	1 Kegiatan	15,000,000	Kecamatan Tiroang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN											722,500,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			148,037,000							247,500,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44,127,000							75,000,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	15,927,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28,200,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,370,000							7,000,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6,370,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		4 Laporan	7,000,000	Kecamatan Tiroang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		30,180,000							30,000,000		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1,450,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Paket	1,500,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,080,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	27,650,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Laporan	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26,400,000							50,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6,400,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		5 Unit	50,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39,460,000							43,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,205,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	2,500,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37,255,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	41,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,500,000							7,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1,500,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	2,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Tiroang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	377,700,000						50 %	475,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang diadakan	2 Kegiatan	377,700,000					2 Kegiatan	475,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	5 Unit	450,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	7,700,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pakkie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN									669,100,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			160,999,500						194,100,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			43,057,000						41,500,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	14,476,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28,581,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	26,500,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,326,000						7,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6,326,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		4 Laporan	7,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			28,534,500						30,100,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2,074,500	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		5 Paket	2,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	26,460,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Laporan	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36,302,000							50,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6,302,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Unit	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,780,000							47,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3,675,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	2,500,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43,105,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	45,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Tiroang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	396,132,750						50 %	475,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang diadakan	29 Kegiatan	396,132,750						29 Kegiatan	475,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	5 Unit	450,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	26,132,750	Kab. Pinrang, Tiroang, Marawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			556,789,000							537,600,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			171,589,000							62,600,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			45,694,000							0	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	17,184,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,230,000							7,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6,230,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		4 Laporan	7,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			28,400,000							25,600,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	750,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Paket	1,500,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	27,650,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Laporan	21,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07		<del>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</del>			45,250,000							25,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45,250,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Unit	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08		<del>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</del>			46,015,000							0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3,675,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42,340,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	0	Kecamatan Tiroang
7	01	03			<del>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</del>			385,200,000							475,000,000	
7	01	03	2.02		<del>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</del>			385,200,000							475,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	360,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		5 Unit	450,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	25,200,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Mattiro Deceng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Pokmas / Ormas	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			558,286,000							227,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			179,856,000							202,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			47,076,000							30,000,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	18,556,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28,520,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,240,000							7,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,240,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	7,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			28,250,000							29,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	600,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Paket	2,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	27,650,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Laporan	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46,700,000							50,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16,700,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Unit	25,000,000	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47,780,000							47,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,940,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	2,500,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44,840,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	45,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,810,000							3,500,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1,500,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	2,500,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,310,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			378,430,000							25,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			378,430,000							25,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		5 Unit	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	8,430,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Pammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		2 Pokmas / Ormas	25,000,000	Kecamatan Tiroang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN			551,471,000							530,000,000		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			175,171,000							55,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			47,284,000							45,000,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19,084,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28,200,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Samaturue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	12 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,420,000							10,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,420,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Samaturue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			28,650,000							0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Paket	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	26,800,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Samaturue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	3 Laporan	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35,300,000							0	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	21,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	1 Unit	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	14,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Samaturue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	5 Unit	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57,517,000							0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,027,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	12 Laporan	0	Kecamatan Tiroang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51,490,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Samaturue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Laporan	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			376,300,000							475,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			376,300,000							475,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Samaturue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		5 Unit	450,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	6,300,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Samaturue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		2 Pokmas / Ormas	25,000,000	Kecamatan Tiroang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						577,050,400				475,000,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			192,063,400							0		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44,898,000							0		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	16,228,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28,670,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		12 Dokumen	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,470,000							0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,470,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		12 Laporan	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			30,617,400							0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	970,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		5 Paket	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	917,400	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		5 Paket	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		12 Dokumen	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	27,650,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		3 Laporan	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07		Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36,840,000							0	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7,100,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		1 Unit	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	29,740,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		5 Unit	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71,288,000							0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3,528,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		12 Laporan	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67,760,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkas Elektronik		12 Laporan	0	Kecamatan Tiroang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,950,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1,500,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	450,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		3 Unit	0	Kecamatan Tiroang	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			384,987,000							475,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			384,987,000							475,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370,000,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		5 Unit	450,000,000	Kecamatan Tiroang	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	14,987,000	Kab. Pinrang, Tiroang, Tiroang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		2 Pokmas / Ormas	25,000,000	Kecamatan Tiroang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN							2,916,619,228				3,726,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,871,038,228							100 %	3,683,000,000	
7	01	01	2.01		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100 %	16,025,000							100 %	24,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Efektif Dan Efesiens	4 Dokumen	6,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		asn	4 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Efektif Dan Efesiens Persentase Penyusunan Dokumen RKA Efektif Dan Efesiens	1 Dokumen 1 Dokumen	3,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		asn	1 Dokumen 1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Efektif Dan Efesiens	1 Dokumen	3,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		asn	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		asn		10,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	2,539,572,228						12 Bulan	3,177,800,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Terbayarkan Tepat Waktu	0 Orang/bula 12 Bulan	2,416,619,228		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN	0 Orang/bula 12 Bulan	3,000,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	114,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	100 %	154,800,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun Secara Efektif Dan Efesiens	1 Dokumen	3,953,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Secara Efektif Dan Tepat Waktu	100 %	4,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	100 %	15,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	3 Laporan	12,900,000						3 Laporan	15,000,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Orang	12,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2 Orang	15,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Terpenuhi	100 %	78,050,000						100 %	112,500,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Baju Olahraga Sesuai Analisa Kebutuhan	23 Pasang	8,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	23 Pasang	9,500,000	Kecamatan Mattiro Bulu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur Sipil Negara Yang Memikat Kecakapan Dan Keterampilan	100 %	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	100 %	100,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Terpenuhi Tepat Waktu	12 Bulan	114,415,000						12 Bulan	97,700,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpenuhi Penerangannya Sesuai Analisa Kebutuhan	2 Bangunan	890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	2 Bangunan	2,500,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	100 %	4,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	1,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Bulan	1,200,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material Sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	36,245,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	100 %	10,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang terkoordinasi SEsuai Analisa Kebutuhan Secara Efektif Dan Efesiens	12 Bulan	70,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Bulan	80,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase Pengadaan Barang Milik Daerah Terpenuhi Sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	19,050,000						100 %	20,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Yang Diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	1 Ls	14,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Ls	5,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Yang Diadakan Sesuai Analisa Kebutuhan	3 Unit	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	3 Unit	15,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Kantor	12 Bulan	34,170,000						12 Bulan	37,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu	2 Rekening	16,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Rekening	17,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Kantor Terbayarkan Tepat Waktu	12 Bulan	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	20,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpelihara	100 %	48,056,000						100 %	196,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48,056,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN		40,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi			8,800,000							3,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Analisa Jabatan	1 Kegiatan	8,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	3,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	100 %	12,151,000						100 %	13,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelanyanan Publik	100 %	12,151,000						100 %	13,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Terpenuhi	100 %	12,151,000						100 %	13,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran Desa	100 %	33,430,000						100 %	30,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persenatse Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	33,430,000						100 %	30,000,000	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Yang Terkoordinis Dalam Pembinaan Dan Pengawasan	7 Desa	33,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN DAN MASYARAKAT	7 Desa	30,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			600,000,000							629,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	184,018,000						100 %	212,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	54,943,000						12 Bulan	80,000,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	54,943,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN	12 Bulan	80,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	3 Laporan	6,000,000						3 Laporan	6,000,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Bulan	6,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Terpenuhi	100 %	24,200,000						100 %	24,500,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Baju Olahraga Sesuai Analisa Kebutuhan	14 Pasang	4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	14 Pasang	4,500,000	Kecamatan Mattiro Bulu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturn Sipil Negara Yang Memiliki Kecapan	2 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	2 Orang	20,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Terpenuhi Tepat Waktu	12 Bulan	28,200,000						12 Bulan	21,500,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	100 %	2,500,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang terkoordinasi Sesuai Analisa Kebutuhan Secara Efektif Dan Efesiens	12 Bulan	25,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Bulan	15,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.07		Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase Pengadaan Barang Milik Daerah Terpenuhi Sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	13,000,000						100 %	8,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Sesuai Analisa Kebutuhan	2 Unit	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	ASN	2 Unit	3,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Kantor	12 Bulan	57,675,000						12 Bulan	57,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu	1 Gedung	3,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	1 Gedung	3,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Kantor Terbayarkan Tepat Waktu	12 Bulan	54,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	12 Bulan	54,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	415,982,000						50 %	417,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik Dan Ekonomi	50 %	415,982,000						50 %	417,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Fisik Skala Kecil di tingkat Kelurahan	1 Paket	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Paket	400,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terpenuhi	100 %	15,982,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	100 %	17,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN											
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	184,012,000						100 %	222,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	54,802,000						12 Bulan	80,000,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	54,802,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	100 %	80,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	3 Laporan	6,000,000						3 Laporan	6,000,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	6,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Terpenuhi	100 %	24,200,000						100 %	24,500,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN		4,500,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kecakapan	2 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	2 Orang	20,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Terpenuhi Tepat Waktu	12 Bulan	19,200,000						12 Bulan	21,500,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	100 %	2,500,000	Kecamatan Mattiro Bulu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		16,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN		15,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu	
7	01	01	2.07		<del>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</del>	Pesentase Pengadaan Barang Milik Daerah Terpenuhi Sesuai Analisa Kebutuhan	100 %	15,400,000					100 %	15,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	4 Unit	15,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	4 Unit	5,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu	
7	01	01	2.08		<del>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</del>	Terpenuhinya Jasa Kantor	12 Bulan	64,410,000					12 Bulan	57,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu	1 Rekening	4,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	1 Rekening	3,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Kantor Terbayarkan Tepat Waktu	12 Bulan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	12 Bulan	54,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu	
7	01	03			<del>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</del>	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	415,988,000					50 %	417,000,000		
7	01	03	2.02		<del>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</del>	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik Dan Ekonomi	50 %	415,988,000					50 %	417,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Fisik Skala Kecil di tingkat Kelurahan	1 Paket	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Masyarakat	1 Paket	400,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terpenuhi	100 %	15,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Masyarakat	100 %	17,000,000	Kecamatan Mattiro Bulu	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN										3,540,579,575	
7	01	01			<del>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</del>	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,695,036,575					100 %	3,487,079,575		
7	01	01	2.01		<del>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</del>	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	41,376,000					100 %	37,194,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dimutakhirkan	0 Dokumen 2 Dokumen	10,666,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 2 Dokumen	7,424,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang termutakhirkan	1 Kegiatan	5,155,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Kegiatan	4,545,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang termutakhirkan	0 Dokumen 1 Kegiatan	4,570,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 1 Kegiatan	4,545,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang termutakhirkan	1 Kegiatan	4,142,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Kegiatan	4,545,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang termutakhirkan	1 Kegiatan	5,141,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Kegiatan	5,045,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Rencana Kerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Laporan 3 Dokumen	6,835,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan 3 Dokumen	6,545,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang termutakhirkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan 0 Laporan	4,867,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Kegiatan 0 Laporan	4,545,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,100,174,575						100 %	3,042,401,575	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang termutakhirkan	1 Tahun	2,955,080,575	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Tahun	2,840,385,575	Kecamatan Suppa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 3 Kegiatan	51,417,000	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 3 Kegiatan	96,866,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Laporan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan	0 Dokumen 1 Kegiatan	83,326,000	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 1 Kegiatan	47,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Laporan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan 1 LS	10,351,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan 1 LS	11,150,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	18,712,000						100 %	30,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Persentase Barang dan Aset Daerah yang terinventarisasi	0 Laporan 12 Bulan	18,712,000	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	155,434,000						100 %	129,500,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersediannya Pakaian Dinas ASN	0 Paket 1 LS	9,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Paket 1 LS	12,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Laporan Pengolhan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen 1 Kegiatan	6,434,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Dokumen 1 Kegiatan	7,500,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase ASN yang meningkat kecakapan dan keterampilannya	0 Orang 10 Kegiatan	140,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Orang 10 Kegiatan	105,000,000	Kecamatan Suppa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	217,863,000						100 %	93,500,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Persentase Pemenuhan Penerangan Gedung	0 Paket 12 Bulan	2,376,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Paket 12 Bulan	4,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedian Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket 12 Bulan	4,242,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Paket 12 Bulan	4,500,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terlaksananya Persentase Peralatan Rumah tangga	0 Paket 1 LS	5,125,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Paket 1 LS	5,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan 0 Dokumen	1,440,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	12 Bulan 0 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang terkoordinasikan secara efektif dan efisien Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan 0 Laporan	204,680,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	12 Bulan 0 Laporan	70,500,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	32,500,000						100 %	43,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	0 Unit 1 LS	10,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Unit 1 LS	5,000,000	Kecamatan Suppa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 LS 0 Unit	22,500,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	1 LS 0 Unit	38,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	24,969,000						100 %	39,584,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening yang terbayarkan tepat waktu	0 Laporan 12 Rekening	19,314,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 12 Rekening	18,054,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan 12 Bulan	5,655,000	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 12 Bulan	18,030,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	104,008,000						100 %	71,900,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Operasional yang layak jalan	0 Unit 1 Tahun	92,658,000	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Unit 1 Tahun	60,000,000	Kecamatan Suppa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	8,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	12 Bulan	3,400,000	Kecamatan Suppa		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara secara rutin	2 Gedung	2,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	2 Gedung	5,000,000	Kecamatan Suppa		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase ketercapaian pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	14,890,000					100 %	7,000,000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan	100 %	14,890,000					100 %	7,000,000			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersedianya Dana Koordinasi Sinergi Perencanaan pada penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	0 Laporan 1 Kegiatan	14,890,000	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat	0 Laporan 1 Kegiatan	7,000,000	Kecamatan Suppa	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pengelolaan Anggaran Desa	100 %	20,791,000					100 %	46,500,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Ketercapaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	20,791,000					100 %	46,500,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase Pengawasan Penggunaan Dana Desa	0 Dokumen 12 Bulan	20,791,000	Kab. Pinrang, Suppa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Dokumen 12 Bulan	23,500,000	Kecamatan Suppa
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN						546,000,000				574,688,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	176,000,000						100 %	204,688,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	56,777,000						100 %	60,691,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 1 Tahun	16,577,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 1 Tahun	19,891,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan	0 Dokumen 1 Tahun	40,200,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 1 Tahun	40,800,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	6,300,000						100 %	6,370,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	0 Laporan 1 Tahun	6,300,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 1 Tahun	6,370,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	24,200,000						100 %	32,500,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Presentase Pemenuhan Saran Pakaian Olahraga ASN	0 Paket 1 Ls	4,200,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Paket 1 Ls	4,500,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Presentase Aparatur Sipil Negara Yang Meningkatkan Kecakapan dan Keterampilannya	0 Orang 1 Tahun	20,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Orang 1 Tahun	28,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	14,280,000						100 %	21,456,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun 0 Dokumen	2,040,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	1 Tahun 0 Dokumen	2,040,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0 Laporan 1 Tahun	12,240,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 1 Tahun	15,416,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	27,500,000						100 %	18,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 1 Tahun	27,500,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Unit 1 Tahun	13,500,000	Kecamatan Suppa	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	46,443,000						100 %	48,671,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Layanan Rekening Listrik Yang Terbayarkan Tepat Waktu	0 Laporan 1 Tahun	3,528,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan 1 Tahun	5,616,000	Kecamatan Suppa	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 1 Tahun	42,915,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan 1 Tahun	43,055,000	Kecamatan Suppa	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	500,000						100 %	16,500,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit 1 Tahun	500,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Unit 1 Tahun	1,500,000	Kecamatan Suppa	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	370,000,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	370,000,000						100 %	370,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan	0 Unit 1 LS	350,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	0 Unit 1 LS	350,000,000	Kecamatan Suppa			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0 Pokmas / Ormas 1 Kegiatan	20,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Watang Suppa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	0 Pokmas / Ormas 1 Kegiatan	20,000,000	Kecamatan Suppa			
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN							534,000,000					624,950,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	164,000,000							100 %	254,950,000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	52,362,500							100 %	53,376,500			
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 12 Bulan	12,162,500	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 12 Bulan	12,576,500	Kecamatan Suppa			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan	0 Dokumen 12 Bulan	40,200,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpunua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 12 Bulan	40,800,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	6,120,000						100 %	6,180,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusun Administrasi Barang Milik Daerah	0 Laporan 12 Bulan	6,120,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpunua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 12 Bulan	6,180,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	26,300,000						100 %	33,850,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Presentase Pemenuhan Sarana Pakaian Olah Raga	0 Paket 1 LS	6,300,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpunua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Paket 1 LS	5,850,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Presentase Aparatur Sipil Negara yang Meningkatkan Kecakapan dan Keterampilan	0 Orang 12 Bulan	20,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpunua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Orang 12 Bulan	28,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	19,430,000						100 %	25,576,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terlaksananya Persentase Peralatan Rumah Tangga	0 Paket 1 LS	5,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpunua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Paket 1 LS	4,500,000	Kecamatan Suppa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sesuai Analisa Kebutuhan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan 0 Dokumen	1,680,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	12 Bulan 0 Dokumen	1,680,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0 Laporan 12 Bulan	12,750,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 12 Bulan	14,396,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	16,500,000						100 %	81,400,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersediaanya Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 12 Bulan	10,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Unit 12 Bulan	15,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	0 Unit 1 LS	6,500,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Unit 1 LS	50,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	42,837,500						100 %	41,567,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Layanan Listrik yang Terbayarkan Tepat Waktu	0 Laporan 12 Bulan	12,037,500	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 12 Bulan	10,777,500	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 12 Bulan	30,800,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Laporan 12 Bulan	30,790,000	Kecamatan Suppa
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	450,000						100 %	13,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 12 Bulan	450,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara Negara (ASN)	0 Unit 12 Bulan	1,000,000	Kecamatan Suppa
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	100 % 50 %	370,000,000						100 % 50 %	370,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	370,000,000						100 %	370,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Insfrastruktur Kelurahan	0 Unit 1 LS	350,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpunua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	0 Unit 1 LS	350,000,000	Kecamatan Suppa			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0 Pokmas / Ormas 1 LS	20,000,000	Kab. Pinrang, Suppa, Tellumpunua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	0 Pokmas / Ormas 1 LS	20,000,000	Kecamatan Suppa			
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN													4,082,625,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2,475,102,356						100 %	4,082,625,000				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,750,000						100 %	42,200,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	3,100,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 2 Dokumen	6,700,000	Kecamatan Mattiro Sompe			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3,800,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	5,600,000	Kecamatan Mattiro Sompe			
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	3,750,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	5,650,000	Kecamatan Mattiro Sompe			
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	3,800,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	4,100,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	5,300,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,100,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Laporan	8,250,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,100,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Laporan	5,700,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2,046,198,666						100 %	2,829,000,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bul	1,898,668,666	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	23 Orang/bul	2,300,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50,350,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Dokumen	200,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	87,180,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	50 Dokumen	315,500,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Laporan	6,200,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	17 Laporan	5,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	17 Laporan	7,300,000	Kecamatan Mattiro Sompe



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efesien	100 %	108,000,000						100 %	225,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	18,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 Paket	50,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	9 Orang	90,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	9 Orang	175,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	116,370,000						100 %	226,700,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	5 Paket	9,200,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2,416,619,228	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 Paket	3,000,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	98,870,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	30 Laporan	180,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 Unit	58,850,000						4 Unit	170,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	34,950,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Unit	70,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	23,900,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	5 Unit	100,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan ketersediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	26,999,340					12 Bulan	117,500,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14,999,340	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Laporan	17,500,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Laporan	100,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian barang milik daerah yang terpelihara	100 %	95,934,350					100 %	472,225,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	37,994,350	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 Unit	90,225,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	7,940,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Unit	12,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Unit	370,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN										897,500,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	168,809,040					100 %	407,500,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	89,746,000					100 %	300,000,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	14,446,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	75,300,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	6 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	24,880,000						100 %	19,500,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1,500,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Paket	2,500,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	23,380,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	10 Laporan	10,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 Unit	25,000,000						4 Unit	15,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Unit	0	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Unit	15,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan ketersediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	10,183,040						12 Bulan	38,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,399,040	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	7,784,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19,000,000							0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	0	Kecamatan Mattiro Sompe

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	400,000,000						50 %	490,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun Pemberdayaan ekonomi	100 %	400,000,000						100 %	490,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Sarana	360,000,000	Kab. Pinrang, Mattirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	4 Sarana	400,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Kegiatan	40,000,000	Kab. Pinrang, Mattirro Sompe, Pallameang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	3 Kegiatan	90,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN										897,500,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	190,000,000							100 %	407,500,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	95,269,000							100 %	300,000,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	13,969,000	Kab. Pinrang, Mattiro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berdasarkan Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	81,300,000	Kab. Pinrang, Mattiro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berdasarkan Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	6 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	4,950,000						100 %	35,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	4,950,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Paket	20,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	22,700,000						100 %	19,500,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Paket	2,500,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	21,700,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	10 Laporan	10,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 Unit	54,420,000						4 Unit	15,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	32,450,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 Unit	0	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	21,970,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Unit	15,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan ketersediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12,311,000						12 Bulan	38,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,311,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	350,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		1 Unit	0	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	410,000,000						50 %	490,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun Pemberdayaan ekonomi	100 %	410,000,000						100 %	490,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Sarana	360,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	4 Sarana	400,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	50,000,000	Kab. Pinrang, Matirro Sompe, Langnga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	4 Kegiatan	90,000,000	Kecamatan Mattiro Sompe
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			2,693,690,648						3,268,531,437		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,681,000,648						100 %	3,234,231,437	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Termutakhirkan	100 %	8,706,000						100 %	16,025,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2,006,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	6 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Lanrisang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang termutakhirkan	1 Dokumen	1,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun dan tepat waktu	1 Dokumen	1,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	3,200,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)		2,410,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	2,515,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyampaian Laporan Perencanaan,Penganggar dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	6 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	6 Dokumen	2,900,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana Secara efektif	12 Bulan	2,318,892,648						12 Bulan	2,355,513,937	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2,177,730,648	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 bulan	2,201,483,937	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	39,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 bulan	25,630,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pelaksanaan Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	96,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	122,000,000	Kecamatan Lanrisang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	2,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Dokumen	3,200,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	4 Doumen	2,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	4 Doumen	3,200,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Barang dan Aset Daerah yang Terinventarisasi	12 Bulan	12,720,000						12 Bulan	23,520,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	12 Bulan	12,720,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	23,520,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Termutakhirkan	100 %	55,360,000						100 %	166,000,000	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian yang tersusun	12 bulan	360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Lanrisang	12 bulan	3,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan sesuai analisa kebutuhan	6 Orang	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Lanrisang	6 Orang	154,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan Secara Efektif dan Efesien	100 %	96,780,000						100 %	179,741,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung kantor yang memiliki instalasi listrik yang memadai	2 Bangunan	380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Lanrisang	2 Bangunan	1,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan	3 buah	10,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Lanrisang	3 buah	2,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Aparat Kecamatan dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 Kegiatan	86,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Lanrisang	25 Kegiatan	173,341,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.07		<del>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</del>	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung	100 %	33,000,000						100 %	88,850,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan barang milik daerah yang di susun	1 Ls	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Ls	53,850,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening yang Terbayarkan	12 Bulan	27,642,000						12 Bulan	25,601,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah yang terbayarkan listrik di kantor camat	12 Bulan	20,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	14,438,000	Kecamatan Lanrisang	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pembayaran jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	12 bulan	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 bulan	11,163,500	Kecamatan Lanrisang	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Layak Jalan	12 Bulan	127,900,000					12 Bulan	378,980,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah tercapainya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	32,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 bulan	41,980,000	Kecamatan Lanrisang	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3,050,000	Kab. Pinrang, Lansirang, Lansirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Laporan	7,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 bangunan	92,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 bangunan	330,000,000	Kecamatan Lanrisang	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	100 %	11,670,000					100 %	18,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Dana Koordinasi Sinergi Perencanaan	100 %	11,670,000					100 %	18,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terpenuhinya kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	1 Kegiatan	11,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	1 Kegiatan	18,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	1,020,000						100 %	16,300,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penggunaan Desa	100 %	1,020,000						100 %	16,300,000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegaiaan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan desa	6 Desa	1,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	ASN Kantor Camat lanrisang	6 Desa	16,300,000	Kecamatan Lanrisang
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			545,999,800						570,104,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	225,795,800						100 %	130,104,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana Secara efektif	12 Bulan	64,516,000						12 Bulan	69,000,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	18,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	8,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pelaksanaan Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 bualn	46,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 bualn	61,000,000	Kecamatan Lanrisang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Termutakhirkan	100 %	10,000,000					100 %	22,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	3 Orang	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 Orang	14,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Terkoordinasikan Secara Efektif dan Efesien	100 %	40,470,000					100 %	18,400,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Paket	0	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparat Kelurahan dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Ls	26,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Ls	15,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Pemenuhan Peralatan Gedung	100 %	55,250,000					100 %	8,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			55,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)		8,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening yang Terbayarkan	12 Bulan	55,559,800					12 Bulan	12,704,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan tepat waktu di Kelurahan Lanrisang	12 Bulan	4,704,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	4,704,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pembayaran jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	50,855,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	8,000,000	Kecamatan Lanrisang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lanrisang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	320,204,000					50 %	440,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	320,204,000					100 %	440,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan skala kecil di Kelurahan Terpenuhi	4 Paket	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	4 Paket	411,730,000	Kecamatan Lanrisang		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	20,204,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 Kegiatan	28,270,000	Kecamatan Lanrisang		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			4,147,502,272								4,212,302,272		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,138,202,272							100 %	4,203,502,272		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Dokumen yang tersusun Tepat waktu	100 %	21,040,000							100 %	31,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 2 Dokumen	2,400,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Patampanua		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	2,750,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebililitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Aksebililitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	2,400,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebililitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Aksebililitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Patampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen 1 Dokumen	2,400,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen 0 Laporan	11,090,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 Dokumen 0 Laporan	14,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan Kinerja administrasi Keuanga yang terarah	12 Bulan	3,720,263,272						12 Bulan	3,727,502,272	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bula 12 Bulan	3,547,502,272	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Orang/bula 12 Bulan	3,547,502,272	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 Dokumen 12 Bulan	49,665,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen 12 Bulan	80,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	120,196,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Dokumen	78,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	2,900,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan	4,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Pengelolaan Barang dan Asset yang terbayarkan tepat waktu serta laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun tepat waktu	5 Laporan	19,380,000						5 Laporan	20,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	19,380,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan	20,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	<b>126,700,000</b>						100 %	<b>160,000,000</b>	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	11,700,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Paket	15,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	0 Orang 15 Kali	115,000,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Orang 15 Kali	135,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase Pemenuhan Pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	<b>116,486,300</b>						100 %	<b>76,000,000</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,166,300	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Paket	5,000,000	Kecamatan Patampanua

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,520,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Paket	10,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	0 Laporan 2 paket	113,800,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan 2 paket	55,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Kantor sesuai analisa Kebutuhan	100 %	47,125,000						100 %	77,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	0 Unit 5 unit	8,000,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Unit 5 unit	35,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 buah 0 Unit	14,125,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	5 buah 0 Unit	35,000,000	Kecamatan Patampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 buah 0 Unit	25,000,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 buah 0 Unit	7,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	100 %	25,612,500						100 %	55,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	18,127,500	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan	18,000,000	Kecamatan Patampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	7,485,000	Kab. Pinrang, Patampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	0 Laporan	37,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	100 %	61,595,200						100 %	57,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			23,870,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		35,000,000	Kecamatan Patampanua

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		7,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		34,594,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		15,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	100 %	9,300,000					100 %	8,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan tingkat kecamatan terlaksana secara optimal	1 Kegiatan	9,300,000					1 Kegiatan	8,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		9,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat		8,000,000	Kecamatan Patampanua	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN						670,787,500				763,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	203,677,500						100 %	228,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan Kinerja administrasi Keuanga yang terarah	12 Bulan	71,589,900						12 Bulan	77,500,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhinya barang dan jasa administrasi tugas ASN	12 Bulan	24,639,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Patampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	46,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	23,600,000						100 %	28,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		3,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek yang terlaksana sesuai kebutuhan	2 kali	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 kali	25,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Pelayanan administrasi publik sesuai analisis kebutuhan	12 Bulan	21,588,000						12 Bulan	15,500,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	3 buah	3,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 buah	1,500,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	40 kali	18,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	40 kali	10,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Kantor sesuai analisa Kebutuhan	100 %	26,600,000						100 %	27,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 buah	11,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 buah	5,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	5 buah	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	5 buah	15,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	12 Bulan	57,710,200					12 Bulan	72,500,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	2,440,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	2,500,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			55,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		70,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	100 %	2,589,400						100 %	7,500,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	1 unit	1,089,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Aksebililitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Aksebililitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 unit	3,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedia dan terpeliharanya peralatan dan mesin yang baik	2 buah	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Aksebililitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Aksebililitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 buah	2,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	100 %	467,110,000					100 %	535,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum serta SDM yang berkualitas	100 %	467,110,000					100 %	535,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 paket	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	5 paket	500,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Kelurahan	1 Kelurahan	17,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Kelurahan	35,000,000	Kecamatan Patampanua
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN									744,000,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	191,677,500						100 %	214,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan Kinerja administrasi Keuanga yang terarah	12 Bulan	77,092,500						12 Bulan	77,500,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya administrasi perkantoran sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	18,142,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Patampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	58,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	24,500,000						100 %	27,500,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian batik dan olahraga yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	12 Pasang	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Pasang	2,500,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	2 kali	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 kali	25,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Pelayanan admnistrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	20,880,000						100 %	14,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	50 Kali	20,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	50 Kali	9,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.07		<del>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</del>			21,550,000							25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 buah	10,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		3 buah	5,000,000	Kecamatan Patampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	4 buah	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi		4 buah	15,000,000	Kecamatan Patampanua		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	12 Bulan	46,696,000					12 Bulan	62,500,000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	4,116,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	2,500,000	Kecamatan Patampanua		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	42,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	60,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	12 Bulan	959,000							12 Bulan	7,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	12 Bulan	959,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	3,000,000	Kecamatan Patampanua	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	467,110,000						50 %	530,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum serta SDM yang berkualitas	100 %	467,110,000						100 %	530,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kelurahan	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Kelurahan	500,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Kelurahan	17,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Kelurahan	30,000,000	Kecamatan Patampanua	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			658,787,500						757,200,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	190,814,500						100 %	227,200,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran yang terealisasi tepat waktu dan kinerja adminitrasi keuangan yang terarah	12 Bulan	70,769,500						12 Bulan	77,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya administrasi perkantoran sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	17,649,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	53,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	JUmlah Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah Yang terlaksana secara efektif dan efesien	12 Bulan	24,050,000						12 Bulan	27,500,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian batik dan olahraga yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	12 Pasang	4,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Pasang	2,500,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	2 kali	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 kali	25,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Pelayanan administrasi publik sesuai analis kebutuhan	12 Bulan	15,440,000						12 Bulan	15,700,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	50 kali	15,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	50 kali	10,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Kantor sesuai analisa Kebutuhan	100 %	10,000,000						100 %	25,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang baik	2 buah	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 buah	5,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	12 Bulan	44,205,000						12 Bulan	72,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	2,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	2,500,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	42,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	70,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	15 Buah	26,350,000						15 Buah	9,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan yang baik	1 unit	350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 unit	5,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya gedung kantor yang baik	1 unit	26,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 unit	2,000,000	Kecamatan Patampanua	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	467,973,000					50 %	530,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun Pemberdayaan	100 %	467,973,000						100 %	530,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 paket	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	5 paket	500,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Kelurahan	1 Kelurahan	17,973,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Kelurahan	30,000,000	Kecamatan Patampanua
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			658,787,500							744,200,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	195,687,500						100 %	219,200,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	86,038,000						100 %	77,500,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya administrasi perkantoran sesuai analisa kebutuhan	12 Bulan	19,788,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Patampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	66,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	12 Bulan	25,400,000						12 Bulan	27,500,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian batik dan olahraga yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	12 Pasang	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Pasang	2,500,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	2 kali	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 kali	25,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Pelayanan administrasi publik sesuai analis kebutuhan	12 Bulan	10,200,000						12 Bulan	15,700,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	50 Kali	10,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	50 Kali	10,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Kantor sesuai analisa Kebutuhan	100 %	33,000,000						100 %	27,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 buah	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	3 buah	5,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		15,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	12 Bulan	38,940,000						12 Bulan	62,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	2,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	2,500,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	60,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelayanan Umum Kantor tersedia secara optimal	12 Bulan	2,109,500						12 Bulan	9,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas yang baik	1 unit	2,109,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi 3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 unit	5,000,000	Kecamatan Patampanua
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	463,100,000						50 %	525,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana umum serta SDM yang berkualitas	100 %	463,100,000						100 %	525,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 paket	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	5 paket	500,000,000	Kecamatan Patampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		13,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat		25,000,000	Kecamatan Patampanua	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN						4,631,908,862				4,560,890,362	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,624,043,762						100 %	4,548,070,362	
7	01	01	2.01		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100 %	5,690,000						100 %	13,705,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	2 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	150,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	2 Dokumen	2,170,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	150,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	2,170,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	8 Dokumen	560,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	8 Dokumen	2,260,000	Kecamatan Duampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	9 Dokumen	560,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	9 Dokumen	2,260,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2,270,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	6 Laporan	2,845,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,161,671,212						100 %	4,047,190,462	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,048,243,812	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	3,926,627,362	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	31,767,400	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	37,799,100	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	79,350,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	79,350,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,310,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	3,414,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	12,250,000						100 %	12,150,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12,250,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	12,150,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	65,842,000						100 %	93,380,000	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	2 Dokumen	2,380,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	65,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 Orang	91,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	75,810,000						100 %	61,900,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	780,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	3,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	9,000,000	Kecamatan Duampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,700,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	8,510,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	38,330,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	41,390,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	44,050,100						100 %	50,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	7,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Ls	34,050,100	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Ls	23,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	72,187,300						100 %	72,356,900	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42,927,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Laporan	47,241,900	Kecamatan Duampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29,260,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	25,115,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	100 %	186,543,150						100 %	197,388,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	34,103,150	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Unit	34,795,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2,440,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	7,593,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit	150,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrembang Kecamatan DuampanuaYang terakomodir	40 %	7,865,100						40 %	12,820,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan di Tingkat Kecamatan	100 %	7,865,100						100 %	12,820,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7,865,100	Kab. Pinrang, Duampanua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	12,820,000	Kecamatan Duampanua	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN						534,000,000					570,329,500				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	164,000,000							100 %	200,329,500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	38,088,600							100 %	42,159,500	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8,728,600	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	7,731,500	Kecamatan Duampanua	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	29,360,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Dokumen	34,428,000	Kecamatan Duampanua	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	6,000,000							100 %	6,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Duampanua	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000							100 %	22,500,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	10,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	3 Orang	21,000,000	Kecamatan Duampanua	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,100,000							100 %	6,950,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,100,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	5,950,000	Kecamatan Duampanua	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,000,000						100 %	58,200,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	35,200,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	57,450,000						100 %	57,255,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,675,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Laporan	9,675,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	47,775,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	47,580,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	100 %	2,361,400						100 %	7,265,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2,361,400	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	2,765,000	Kecamatan Duampanua
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	370,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	370,000,000						100 %	370,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	350,795,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Unit	350,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	19,205,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Lampa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kecamatan Duampanua
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			534,000,000							535,129,500	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	164,000,000						100 %	165,129,500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	47,914,000						100 %	42,159,500	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	19,384,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Pekkabata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	7,731,500	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	28,530,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Pekkabata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	34,428,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	6,000,000						100 %	6,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Pekkabata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000						100 %	22,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	10,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Pekkabata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	3 Orang	21,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	26,950,000						100 %	6,950,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	26,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	5,950,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18,000,000						100 %	23,000,000	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Pekkabata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	0	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	55,136,000						100 %	57,255,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,236,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Pekkabata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Laporan	9,675,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	47,900,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Pekkabata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	47,580,000	Kecamatan Duampanua
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	370,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	370,000,000						100 %	370,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Unit	350,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kecamatan Duampanua
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			534,000,000							601,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	164,000,000						100 %	231,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	41,665,000						100 %	47,817,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	11,665,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	13,390,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	34,427,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	6,000,000						100 %	6,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Duampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	19,970,000						100 %	27,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6,970,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	37,000,000						100 %	44,500,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	24,500,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	59,365,000						100 %	54,683,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5,880,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Laporan	7,236,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	53,485,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	47,447,000	Kecamatan Duampanua
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	370,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	370,000,000						100 %	370,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	350,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Tatae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Unit	350,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kecamatan Duampanua
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN			533,265,000							534,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	163,265,000						100 %	164,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	43,725,000						100 %	42,159,500	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	15,791,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	7,731,500	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	27,934,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	34,428,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	6,000,000						100 %	6,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Duampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	20,000,000					100 %	21,000,000		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	3 Orang	21,000,000	Kecamatan Duampanua	
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6,800,000					100 %	8,150,000		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6,800,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	7,650,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,500,000					100 %	23,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,500,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	17,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	51,240,000					100 %	56,925,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10,740,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	9,675,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40,500,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	47,250,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	100 %	30,000,000					100 %	6,765,500		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	4,000,000	Kecamatan Duampanua



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000					50 %	370,000,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	370,000,000					100 %	370,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Unit	350,000,000	Kecamatan Duampanua			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Bittoeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kecamatan Duampanua		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN						551,000,000					527,549,500		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	181,000,000						100 %	157,549,500			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	43,446,000						100 %	42,159,500			
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	11,556,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	7,731,500	Kecamatan Duampanua		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	31,890,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	34,428,000	Kecamatan Duampanua		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	6,000,000						100 %	6,000,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000						100 %	22,500,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	10,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	3 Orang	21,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	23,330,000						100 %	6,950,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	23,330,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	5,950,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32,450,000						100 %	23,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4,200,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	6,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	28,250,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Unit	17,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	65,774,000						100 %	49,675,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5,619,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Laporan	9,675,000	Kecamatan Duampanua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60,155,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	40,000,000	Kecamatan Duampanua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000					50 %	370,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	370,000,000					100 %	370,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	350,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Unit	350,000,000	Kecamatan Duampanua
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kab. Pinrang, Duampanua, Data	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kecamatan Duampanua
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN										3,187,956,788	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	3,278,436,788						50 %	3,180,666,788	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terseselaikannya Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	33,775,000						100 %	26,227,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terselesaikan dengan baik dan Tepat Waktu	2 dokumen	10,005,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 dokumen	6,470,000	Kecamatan Batulappa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tersusun dengan baik dan tepat waktu	1 dokumen	3,335,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	3,210,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,335,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen	3,272,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dokumen	3,385,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	3,335,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dokumen	3,710,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	3,470,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 laporan	10,005,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 laporan	6,470,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2,880,131,788						100 %	2,767,048,548	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bul	2,741,156,888	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Orang/bul	2,616,768,028	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terpenuhi sesuai aturan dan tepat waktu	12 bulan	58,682,900	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	58,341,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan Keuangan terbayarkan dan tepat waktu	12 bulan	68,720,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	81,000,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun terselesaikan sesuai aturan dan tepat waktu	1 Laporan	4,640,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan	4,140,000	Kecamatan Batulappa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Semesteran terselesaiakn sesuai aturan dan tepat waktu	2 Laporan	6,932,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 Laporan	6,799,520	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 %	25,099,000						100 %	24,665,500	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tersusunnya Perencanaan Barang Milikdaerah sesuai kebutuhan	100 Pesersen	3,335,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	100 Pesersen	3,060,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	21,764,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	21,605,500	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase Pelaksanaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	105,102,000						100 %	152,705,000	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	15,102,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	17,705,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase Bimbinga Teknis dilaksanakan sesuai kebutuhan	20 Orang 100 Pesersen	90,000,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	20 Orang 100 Pesersen	135,000,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi umum perangkat Daerah	100 %	126,560,000						100 %	96,488,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,560,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Paket	1,488,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang teregistrasi dan terlaksana sesuai analisa kebutuhan	12 bulan	124,000,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	95,000,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	36,708,500						100 %	55,250,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		8,250,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur		7,000,000	Kecamatan Batulappa	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 ls	21,562,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 ls	26,000,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6,896,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur		22,250,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	29,221,000						100 %	28,600,240	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Layanan Listrik yang terbayarkan tepat waktu	2 rekening	4,851,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 rekening	4,839,240	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu	12 bulan	24,370,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	23,761,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseTerpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	41,839,500						100 %	29,682,500	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35,276,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur		23,282,500	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6,563,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur		6,400,000	Kecamatan Batulappa
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik	100 %	9,520,000						100 %	7,290,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	9,520,000						100 %	7,290,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan terlaksana dengan baik dan tepat waktu	1 Laporan	9,520,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	7,290,000	Kecamatan Batulappa	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN											658,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	50 %	188,000,000							50 %	190,922,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	51,247,000							100 %	45,737,300	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN diadakan sesuai analisa kebutuhan	12 bulan	22,547,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	21,337,300	Kecamatan Batulappa	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			28,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur		24,400,000	Kecamatan Batulappa	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 %	6,170,000							100 %	6,140,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan dan laporan pengelolaan dan barang dan asset yang tersusun dan terbayarkan sesuai aturan dan tepat waktu	12 bulan	6,170,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	6,140,000	Kecamatan Batulappa	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi umum perangkat Daerah	100 %	18,190,000							100 %	10,260,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar disediakan sesuai kebutuhan	12 bulan	540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	1,080,000	Kecamatan Batulappa	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur		9,180,000	Kecamatan Batulappa	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	46,050,000							100 %	44,900,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		7,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur		10,700,000	Kecamatan Batulappa	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai analisa kebutuhan	1 ls	34,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 ls	22,000,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor diadakan sesuai dengan Analisa Kebutuhan	12 bulan	4,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	12,200,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	62,205,000						100 %	64,792,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Listrik terbayarkan setiap bulan sesuai analisa kebutuhan	12 bulan	2,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	3,608,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia dan terbayarkan tepat waktu	12 bulan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 bulan	61,184,000	Kecamatan Batulappa
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseTerpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4,138,000						100 %	4,092,700	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4,138,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur		4,092,700	Kecamatan Batulappa
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Batu Lappa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000						50 %	467,078,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelesaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	370,000,000						100 %	467,078,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kassa sesuai aturan dan tepat waktu	12 bulan	350,000,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	12 bulan	450,000,000	Kecamatan Batulappa
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai aturan dan tepat waktu	1 Ls	20,000,000	Kab. Pinrang, Batu Lappa, Kassa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Ls	17,078,000	Kecamatan Batulappa
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN						3,434,050,822				3,310,813,261	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,434,050,822						100 %	3,310,813,261	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %	8,240,000						100 % 100 %	8,120,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya RKA Di Kecamatan Cempa	1 Dokumen 1 dokumen	4,120,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen 1 dokumen	4,120,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Di Kecamatan Cempa	1 Dokumen 1 dokumen	4,120,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen 1 dokumen	4,000,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,470,050,022						100 %	2,442,710,008	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Cempa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 0 Orang/bula	2,253,566,022	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 0 Orang/bula	2,253,566,008	Kecamatan Cempa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN di Kecamatan Cempa	12 Bulan	128,764,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	63,744,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Cempa Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan 0 Dokumen	83,600,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 0 Dokumen	121,400,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan 1 dokumen	4,120,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Laporan 1 dokumen	4,000,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efesien	100 %	325,000,000						100 %	295,560,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas ASN Di Kecamatan Cempa	0 Paket 2 Kegiatan	45,000,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Paket 2 Kegiatan	49,600,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Peningkatan SDM Aparatur	0 Orang 12 Bulan	280,000,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Orang 12 Bulan	245,960,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	312,700,000						100 %	113,266,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	1 Laporan 12 Bulan	312,700,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan 12 Bulan	113,266,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	199,550,000						100 %	126,787,253	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan sesuai analisa Kebutuhan di Kecamatan Cempa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Kegiatan 5 Unit	69,000,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Kegiatan 5 Unit	53,000,000	Kecamatan Cempa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 kegiatan 3 Unit	120,000,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 kegiatan 3 Unit	60,000,000	Kecamatan Cempa	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	10,550,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan	13,787,253	Kecamatan Cempa	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	61,555,000						100 %	137,540,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Layanan Listrik dan Internet yang terbayarkan Tepat Waktu	1 Laporan 12 Bulan	14,700,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Laporan 12 Bulan	22,340,000	Kecamatan Cempa	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 1 Laporan	46,855,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan 1 Laporan	115,200,000	Kecamatan Cempa	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	56,955,800						100 %	186,830,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang baik	4 Unit 12 Bulan	52,755,800	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Unit 12 Bulan	40,830,000	Kecamatan Cempa	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedia dan Terpeliharanya Gedung Kantor yang baik	1 Unit 12 Bulan	4,200,000	Kab. Pinrang, Cempa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Unit 12 Bulan	146,000,000	Kecamatan Cempa	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN			530,700,000							530,700,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	147,149,000							100 %	150,700,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	51,934,000						100 %	45,130,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya biaya jasa tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN di Kelurahan Cempa	0 Dokumen 12 Bulan	23,034,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 12 Bulan	18,630,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Kelurahan Cempa	0 Dokumen 12 Bulan	28,900,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 12 Bulan	26,500,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efesien	100 %	9,000,000						100 %	23,300,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas ASN Di Kecamatan Cempa	0 Paket 2 kegiatan	9,000,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Paket 2 kegiatan	8,300,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	8,900,000						100 %	8,900,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan ASN Di Kelurahan Cempa	1 Dokumen 1 Kegiatan	1,080,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Dokumen 1 Kegiatan	1,080,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan di Kelurahan Cempa	1 Laporan 12 Bulan	7,820,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan 12 Bulan	7,820,000	Kecamatan Cempa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	19,850,000						100 %	32,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan sesuai analisa Kebutuhan di Kelurahan Cempa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Kegiatan 7 Unit	19,850,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Kegiatan 7 Unit	32,000,000	Kecamatan Cempa	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	57,465,000						100 %	41,370,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Layanan Listrik dan Internet yang terbayarkan Tepat Waktu	1 Laporan 12 Bulan	1,470,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 Laporan 12 Bulan	1,470,000	Kecamatan Cempa	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 1 Laporan	55,995,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	12 Bulan 1 Laporan	39,900,000	Kecamatan Cempa	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Cempa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	383,551,000						50 %	380,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik maupun Pemberdayaan ekonomi	100 %	383,551,000						100 %	380,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana umum yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	2 Kegiatan	355,000,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	2 Kegiatan	360,000,000	Kecamatan Cempa	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	28,551,000	Kab. Pinrang, Cempa, Cempa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	20,000,000	Kecamatan Cempa	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN												
								4,305,210,322							4,224,793,122		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	4,296,060,322					50 %	4,217,293,122		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,290,000					100 %	15,050,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan / Dokumen yang tersusun tepat waktu	2 Dokumen	570,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan / Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	3,050,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	750,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	2,470,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	5 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Keuangan yang baik	100 %	3,778,780,322					100 %	3,516,130,322		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3,667,815,322	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Tahun	3,336,210,322	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya ATK, Makanan dan Minuman Rapat dan luran BPJS Non ASN	12 bulan	35,555,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 bulan	97,870,000	Kecamatan Lembang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan yg terbayarkan tepat waktu	12 bulan	72,400,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	79,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	3,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Dokumen	3,050,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset yang dikelola dengan baik	12 Bulan	13,500,000						12 Bulan	14,700,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terpenuhinya Jasa Pejabat Pengadaan, Pengurus dan Penyimpan Barang	12 Bulan	13,500,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	14,700,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	100,000,000						100 %	137,302,800	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	6 Kegiatan	100,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	6 Kegiatan	127,302,800	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	120,950,000						100 %	97,680,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor yang diadakan sesuai kebutuhan	1 Kegiatan	2,250,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Kegiatan	2,500,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas yang terlaksana	1 Tahun	118,700,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 Tahun	80,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	97,975,000						100 %	241,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	5 Unit	97,975,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	5 Unit	100,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	53,025,000						100 %	45,600,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Listrik dan Internet yg dibayarkan	12 bulan	26,700,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	20,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan jasa tenaga pembersih yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	26,325,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	25,600,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	125,540,000						100 %	149,330,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik	12 bulan	92,250,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	100,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedia dan terpeliharanya peralatan dan mesin dengan baik	12 bulan	3,290,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	5,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedia dan terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 bulan	30,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	5,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	100 %	9,150,000						100 %	7,500,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Musrembang	1 Kegiatan	9,150,000						1 Kegiatan	7,500,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan yang terkoordinasi sesuai analisa kebutuhan	1 Kegiatan	9,150,000	Kab. Pinrang, Lembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur dan Masyarakat	1 Kegiatan	7,500,000	Kecamatan Lembang	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						534,000,000				575,717,200		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	184,000,000							50 %	205,717,200	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	65,826,000							12 Bulan	59,000,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya makan minum rapat, ATK dan luran BPJS kesehatan bagi Non ASN	12 Bulan	21,826,000	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 Bulan	9,000,000	Kecamatan Lembang	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan yg terbayarkan tepat waktu	12 bulan	44,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	50,000,000	Kecamatan Lembang	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Pejabat Pengadaan, Pengurus dan Penyimpan Barang	12 bulan	6,000,000						12 bulan	6,000,000		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Jasa pengurus barang pembantu	12 Bulan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	6,000,000	Kecamatan Lembang	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	68,500,000						100 %	68,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Unit	6,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Unit	8,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Unit	57,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	2 Unit	5,500,000	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	2 Unit	10,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya bahan dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	12 Bulan	43,674,000						12 Bulan	16,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Listrik dan Internet yg dibayarkan	12 bulan	11,439,000	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	10,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan jasa tenaga pembersih yang terbayarkan tepat waktu	12 bulan	32,235,000	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	6,000,000	Kecamatan Lembang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	350,000,000						50 %	370,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pembangunan Fisiik maupun pemberdayaan Ekonomi	100 %	350,000,000						100 %	370,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana umum yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	5 Kegiatan	350,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Taddokong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	5 Kegiatan	350,000,000	Kecamatan Lembang
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN						566,000,000			554,700,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	196,000,000						50 %	184,700,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Keuangan yang baik	100 %	95,500,000						100 %	85,300,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya ATK dan Makan Minum Rapat	12 bulan	13,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 bulan	11,500,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan yg terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	82,200,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 Bulan	73,800,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Pejabat Pengadaan, Pengurus dan Penyimpan Barang	12 bulan	6,000,000						12 bulan	6,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Jasa pengurus barang pembantu	12 bulan	6,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	6,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang terlaksana secara efektif dan efisien	100 %	33,600,000						100 %	34,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian seragam yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	10 Buah	3,600,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	10 Buah	4,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	1 kegiatan	30,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	1 kegiatan	30,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa kebutuhan	100 %	4,900,000						100 %	2,900,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan cetak dan penggandaan sesuai analisa kebutuhan	12 bulan	1,500,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseibilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	12 bulan	1,200,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan	12 bulan	3,400,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	1,700,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	47,500,000						100 %	45,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Unit	5,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 Unit	15,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	27,500,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Aparatur	0 Unit	25,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,500,000						100 %	8,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Listrik dan Internet yg dibayarkan	12 bulan	2,500,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	2,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah alat kebersihan dan jasa tenaga pembersih yang terbayarkan tepat waktu	12 bulan	6,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Aparatur	12 bulan	6,500,000	Kecamatan Lembang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	50 %	370,000,000					50 %	370,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pembangunan Fisik maupun pemberdayaan Ekonomi	100 %	370,000,000					100 %	370,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana umum yang tersedia sesuai analisis kebutuhan	3 kegiatan	350,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Penguatan Akseblitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi	Masyarakat	3 kegiatan	350,000,000	Kecamatan Lembang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peningkatan SDM Kelurahan	1 kegiatan	20,000,000	Kab. Pinrang, Lembang, Betteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Masyarakat	1 kegiatan	20,000,000	Kecamatan Lembang
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										5,891,875,318	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,055,085,481						100 %	2,974,160,000	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	25,025,000						100 %	29,000,000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja yang tersusun tepat waktu	0 Dokumen 1 dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 1 dokumen	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah dokumen RKA yang tersusun tepat waktu	0 Dokumen 1 dokumen	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 1 dokumen	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	4,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD jumlah dokumen DPA yang tersusun tepat waktu	0 Dokumen 1 dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 1 dokumen	3,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen DPA perubahan yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	3,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	3,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LKJIP LPPD dan perjanjian kinerja yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen 0 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	3 dokumen 0 Laporan	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja dan renstra yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen 0 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 dokumen 0 Laporan	3,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	2,613,571,981						100 %	2,383,500,000	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayarkan gajinya tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN 0 Orang/bula	2,403,691,151	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	25 ASN 0 Orang/bula	2,150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	44,660,830	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	4 Dokumen	45,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah jasa keuangan yang terhavarkan tenat waktu	0 Dokumen 20 jasa	153,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Dokumen 20 jasa	175,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen 0 Laporan	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen 0 Laporan	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	1 dokumen	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD	100 %	13,560,000						100 %	13,560,000	
8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang yang terbayarkan tepat waktu	2 jasa	13,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 jasa	13,560,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100 %	106,850,000						100 %	121,500,000	
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen datan kepegawaian yang tersusun Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen 0 Dokumen	6,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 dokumen 0 Dokumen	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan jumlah sumber daya manusia aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan sesuai	0 Orang 10 aparatur	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Orang 10 aparatur	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum SKPD	100 %	134,020,000						100 %	183,000,000	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 jenis 0 Paket	2,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	7 jenis 0 Paket	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	10 jenis	3,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	10 jenis	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	17 jenis	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	17 jenis	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah program kegiatan yang terkoordinasikan	0 Laporan 5 program	107,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Laporan 5 program	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07		<b>Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	<b>34,890,000</b>						100 %	<b>59,600,000</b>	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit 0 Unit	34,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	2 unit 0 Unit	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD	100 %	<b>54,755,000</b>						100 %	<b>91,000,000</b>	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terdistribusi	0 Laporan 100 surat	3,494,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Laporan 100 surat	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	0 Laporan 24 rekening	30,621,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Laporan 24 rekening	45,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa petugas administrasi yang terbayarkan tepat waktu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 orang 0 Laporan	20,640,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 orang 0 Laporan	42,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah SKPD	100 %	<b>72,413,500</b>						100 %	<b>93,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan	0 Unit 2 unit	67,783,500	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	0 Unit 2 unit	85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan	6 unit	2,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 unit	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit 0 Unit	2,440,000	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Aparatur	6 unit 0 Unit	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	90 %	61,448,000						90 %	120,000,000	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase ketercapaian pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	61,448,000						100 %	120,000,000	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pendidikan bela negara	40 orang	46,050,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	40 orang	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah fasilitasi forum kebangsaan	1 kali	15,398,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 kali	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik	100 %	1,287,612,000						100 %	1,215,000,000	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase ketercapaian pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik	100 %	1,287,612,000						100 %	1,215,000,000	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah jumlah pendidikan politik	0 Orang 12 kali	86,812,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	0 Orang 12 kali	115,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah bantuan keuangan parpol yang tersalurkan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 parpol 0 Laporan 12 Laporan	1,200,800,000	Kab. Pinrang, Watang Sawito, Maccoralaie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	11 parpol 0 Laporan 12 Laporan	1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	persentase Ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakat	100 %	<b>1,010,044,000</b>						100 %	<b>1,160,000,000</b>	
8	01	04	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Jumlah Organisasi Masyarakat yang aktif	245 ormas	<b>1,010,044,000</b>						245 ormas	<b>1,160,000,000</b>	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah fasilitasi organisasi kemasyarakatan Jumlah Ormas mendapat bantuan hibah	4 kali 11 Ormas	1,010,044,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	4 kali 11 Ormas	1,160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan,ekonomi,sosial dan budaya	100 %	<b>30,669,060</b>						100 %	<b>52,715,318</b>	
8	01	05	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budava</b>	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan,ekonomi,sosial dan budava	100 %	<b>30,669,060</b>						100 %	<b>52,715,318</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah fasilitasi forum kerukunan beragama Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 kali 0 Orang	15,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 kali 0 Orang	22,715,318	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah fasilitasi penyalahgunaan narkotika Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 kali 0 Orang	15,419,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 kali 0 Orang	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100 %	<b>299,050,000</b>						100 %	<b>370,000,000</b>	
8	01	06	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase ketercapaian deteksi dini dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	<b>299,050,000</b>						100 %	<b>370,000,000</b>	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan kejadian	12 laporan	283,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	12 laporan	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah fasilitasi forum kewaspadaan dini	1 kali	15,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan perempuan dalam pembangunan	Masyarakat	1 kali	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								1,440,014,142,371							1,747,906,118,076	

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**6.1 Indikator Kinerja Daerah**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

**6.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan**

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menetapkan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB PerKapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

**Tabel 6.1**  
**Target Kinerja Makro Pembangunan Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target	
			2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	5,65	6,42
2	PDRB PerKapita	(Juta Rp)	53,41	60,61	60,61
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,06	3,85	3,06
	- Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	Orang	6.717		
	- Penduduk Angkatan Kerja	Orang	165.431		
4	Indeks Gini	angka	0,367	0,345	0,33
5	Tingkat Kemiskinan	%	8,81	8,56	7,37
6	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,45	71,65	72,35
	- Harapan Hidup	Tahun	69,77		
	- Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24		
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,87		
	- Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Ribuan Rupiah)	(Ribu Rp/orang)	11.956		

Sumber Data : Pinrang Dalam Angka 2021 dan Data Olahan Bappelitbangda

6.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impactbased*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.

Tabel 6.2  
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pinrang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	52,67	58,28	60	62
2	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	62,86	63,59	65	67
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	85,99	86,45	87,35	88,2
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,26	71,45	71,65	72,35
5	Indeks Pendidikan	62,95	63,01	63,4	63,65
6	Indeks Kesehatan	76,32	76,57	77,35	77,85
7	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	N.A	42,50%	45%
8	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	73%	77%	80%	82%
9	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	85,90%	80,61	90%	92%
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,11%	68,43	69%	75,61
11	Persentase Penduduk Miskin	8,86%	8,81%	8,56%	7,37
12	Indeks Gini	0,375	0,367	0,345	0,33
13	Pertumbuhan Ekonomi	0,44%	5,04%	5,65%	6,42
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19%	4,06%	3,85%	3,06
15	Indeks Perkembangan Wilayah	78	82	83,5	85



16	Indeks layanan infrastuktur Kabupaten	76,20%	74,72	82,5%	84,5
17	Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	37,38%	73,25	74,50	75,25
18	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,74%	67,56%	69,75%	69
19	Persentase luas RTH (RuangTerbuka Hijau)	36,84%	36,84%	36,84%	36,84%
20	Indeks Resiko Bencana	205	169,57	185	163,25
21	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) perhektar)	5,9 ton/ha	6,08 ton/ha	6,15 ton/ha	6,17 ton/ha
22	Persentase Kelompok tani kelas Madya	3,73%	4,43%	5%	5,50%
23	Penguatan Cadangan Pangan	173,062%	269,88%	190,062%	280%

Sumber Data : Pinrang Dalam Angka 2021 dan Data Olahan Bappelitbangda

6.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten.

Tabel 6.3  
Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Pinrang  
Tahun 2023

No.	FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian 2021	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
	Pertumbuhan PDRB (%)	5,04	5,65	6,42
	PDRB per kapita (JutaRp.)	53,41	60,61	60,61
	Laju Inflasi	2,37	2,5-3,5	2,5-3,5
	Indeks Gini	0,367	0,345	0,33
	Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan	91,19	91,54	91,64
	Tingkat Kemiskinan	8,81	8,75	8,37
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,45	71,65	72,35
	Indeks Perkembangan Wilayah	82	83,5	85
	Indek layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	73,25%	74,50	75,25
KESEJAHTERAAN SOSIAL				

	Indeks Pendidikan	63,01	63,4	63,65
	Angka melek huruf	100%	100%	100%
	Angka rata-rata lama sekolah	7,87	8,01	8,01
	Indeks Kesehatan	76,57	77,35	77,85
	Angka usia harapan hidup	69,77	70,16	70,38
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	57,78	62,50%	63,75%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	3,85%	3,06
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,45	87,35	88,2
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi	90,60	91,00	91,25
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,05	82,4	82,50
	Penguatan Cadangan Pangan	269,88	275%	280%
	Kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB	18,60	20,97%	21,08%
	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	9,17	11,95%	12,67%
	Produksi Sektor Pertanian	660.252 (ton/tahun)	666.158 (ton/tahun)	668.708(ton/tahun)
	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100%	100%
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1,56	1,69	1,72
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadapPDRB	22,19	22,50%	22,75%
	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	14,48	14,50%	14,90%
	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	6,16	6,45%	6,75%
	Indeks Reformasi Birokrasi	58,28	60	62
	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	63,59	65	67
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Persentase Pengeluaran konsumsi Pangan perkapita	56,24	50,75	50,50
2	Nilai tukar petani	109,79	110	111
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	43,76	49,25	49,50
4	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten	74,72	82,5%	84,5
5	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	67,56%	69,75%	70,5%
6	Indeks Resiko Bencana	169,57	165	163,25
7	Persentase Angka kriminalitas yang tertangani	80,61	90%	92%
8	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	N.A	42,50	45

PELAYANAN UMUM				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN			
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,79%	100%	100%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,32%	100%	100%
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,27%	100%	100%
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,02%	100%	100%
2	KESEHATAN			
2.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah penduduk	0,08%	0,08%	0,09%
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%

3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	62%	62,50%	63%
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS KewenanganKab/Kota	55,00%	56,70%	58%
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,00%	93,60%	93,80%
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Seluruh kabupaten/kota	95,05%	100%	100%
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	97,78%	98,19%	98,81%
3.6	Rasio kepatuhan IMBkab/kota	100%	100%	100%
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,35%	71,73%	82,77%
3.8	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	94,13%	100%	100%
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	28,91%	100%	100%
4.2	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	-	-
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di kab/kota yang ditangani	4,55%	42,50%	45,50%
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,53%	2,62%	1,59%
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	6,40%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	77,15%	78,02%
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	263.689 jiwa/12 kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	79.108 jiwa,12 kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	92 jiwa,12 kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan	407.236 jiwa,12 kecamatan
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96,12%	97%	97,50%

5.7	Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	6,37 Menit	6,37 Menit	6,37 Menit
6	<b>SOSIAL</b>			
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	100%
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>				
7	<b>TENAGA KERJA</b>			
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	85%	90%
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	87,49%	88%	89%
7.3	Tingkat ProduktivitasTenaga Kerja (Juta Rupiah)	155.087,98	8.975,95	10.098,20
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	74,16%	75%	78%
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	63,02%	65%	67%
8	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	74,38%	75%	77,5%
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,07	0,06%	0,05%
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO(per 100.000 penduduk perempuan)	0,05%	0,05%	0,04%
9	<b>PANGAN</b>			
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	55,29%	57,25%	58,10%
10	<b>PERTANAHAN</b>			
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	45,5%	62,2%
10.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	59,60	62,50%	65,50%
10.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100	100%	100%
10.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum danTanah Absentee	40,78	59,9%	78,8%
10.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100%	100%
10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	75%	75%	75%

11	LINGKUNGAN HIDUP			
11.1	IndeksKualitasLingkungan Hidup(IKLH)Kab	67,56	68,75%	69%
11.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	44,21	70%	75%
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	100%	100%
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
12.1	Perekaman KTP Elektronik	99,15	99,40%	99,75%
12.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50,72	52%	55%
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	97,88	98%	98,75%
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	100%	100%
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
13.1	Persentase Pengentasan DesaTertinggal	10%	65%	70%
13.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	8%	10%
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
14.1	TFR (Angka KelahiranTotal)	2,61	2,10	2,08
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,05	95%	97%
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	10,76%	10,55%	10,25%
15	PERHUBUNGAN			
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,5	1,5	1,5
15.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,41	0,44	0,44
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
16.2	Persentas eLayanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	43,75%	50%	55%
16.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,73%	99%	99%
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	19,36	20%	21%
17.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	13,96	14,25%	15%
18	PENANAMAN MODAL			

18.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	5,22%	5,76%	5,76%
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	15,66%	15,90%	16%
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,80%	80%	85%
19.3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	2	5	5
20	STATISTIK			
20.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
21	PERSANDIAN			
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%
22	KEBUDAYAAN			
22.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%
23	PERPUSTAKAAN			
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	42,06	71,2	72
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	26,96	32	33
24	KEARSIPAN			
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75,18%	78%	79%
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	66,67%	66,67%	66,67%
URUSAN PILIHAN				
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
25.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	80.516,58 ton	83.925,1Ton	87.500,67Ton
26	PARIWISATA			
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11,76%	15,40%	15,50%
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	82,52%	5,41%	6,27%
26.3	Tingkat Hunian Akomodasi (verifikasi ulang)	12,89%	11,45%	11,85%



26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,56%	1,72%	1,75%
26.5	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	1,56%	1,80%	1,90%
27	<b>PERTANIAN</b>			
27.1	Produktivitas pertanian per hektar pertahun	6,08 ton/ha	6,24 ton/ha	6,26ton/ha
27.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	8,99%	7,25%	5,44%
28	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			
28.1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten / Kota	-	100%	100%
29	<b>PERDAGANGAN</b>			
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusa Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUPToko Swalayan)	100%	100%	100%
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	44,84%	55%	60%
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	54,51%	82,76%	92,42%
30	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	567,12%	5%	7%
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	428,64%	55%	60%
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	23,95%	75%	90%
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	100%	100%
30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	100%	100%
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95%	95,5%	96%
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
31	<b>PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>			
31.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	17,16	19%	19,30%
31.2	Rasio PAD	10,24%	10,35%	10,51%
31.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level3	Level3



31.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level3	Level3
31.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	70,64%	82%	82,10%
31.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
32	<b>PENGADAAN</b>			
32.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditanda tangani pada kuartal pertama	0%	0%	0%
32.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	8,66%	9,95%	9,95%
32.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	52,63%	55%	60%
33	<b>KEPEGAWAIAN</b>			
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk gurudan tenaga kesehatan)	293,38%	315,90%	355,38%
33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27,92%	61,32%	61,32%
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29,37%	30%	31%
34	<b>MANAJEMEN KEUANGAN</b>			
34.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5,87%	-5,75%	-5,50%
34.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-4,17	4,75%	4,50%
34.3	Manajemen Aset	100%	100%	100%
	1. Apakah ada daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya	Ya	Ya
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya	Ya	Ya
34.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	3,63%	6,30%	6%
35	<b>TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>			
35.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	106,23%	100%	100%
35.2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	58,33%	70%	80%

Sumber Data : Pinrang Dalam Angka 2021 dan Data Olahan Bappelitbangda

6.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan,

ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normative sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada table berikut ini:

**Tabel 6.4**  
**Capaian danTarget Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2023**

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional	Realisasi		Target	
				2020	2021	2022	2023
I	Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	92,53%	96,30%	100%	100%
2.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah WargaNegara Usia 7 – 18Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	97,27%	97%	100%	100%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	74,28	95,78	100%	100%

II	Kesehatan						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,31%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan	100%	90,73%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91,23%	100%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,65%	100%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	73%	100%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97%	100%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,36%	100%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94%	100%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang Mendapatkan layanan kesehatan	100%	83,21%	100%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	93,39%	100%	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,98%	100%	100%	100%

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yangm endapatkan Layanan kesehatan	100%	91,88%	100%	100%	100%
III	Pekerjaan Umum						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	-	97,76%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	97,56%	96,62%	100%	100%
IV	Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan &rehabilitasi rumahygy layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase JumlahWarga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	100%	100%	100%
V	Trantibumlinmas						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase JumlahWarga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perdadan perkada	100%	90%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi RawanBencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-	100%	100%	100%

4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-	100%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	84%	100%	100%	100%
VI	Sosial						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial Diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosialdasar tuna sosialkhususnyag elandangan danpengemis di luarpanti	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan sosial	100%	-	100%	100%	100%

Sumber Data : Data Olahan Bappelitbangda Kab. Pinrang

6.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan

terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Daerah. Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals(TPB/SDGs) disajikan pada table berikut ini:

**Tabel 6.4**  
**Capaian dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals(TPB/SDGs) Kabupaten Pinrang 2020-2023**

Kode Indikator	Target/Indikator	SumberDa ta	Satuan	Realisasi		Target Tahun	
				2020	2021	2022	2023
Tujuan SDGs 01: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS / Dinas Sosial	%	8,86	8,81	8,56	7,37
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	95		95	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja	%	79.75	79,10	91,36	92,27
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak Dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	100		100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	RT	8.900		PM	PM
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	87	100	91	93
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR	%			69,12	84,56
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/ sederajat.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	99	95,32%	95,42	97,85
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni(APM)SMP/MTs/sederajat.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	98,32	98,26%	90,2	95,47
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Disperindagem	%	95,79	96,65	97	97,50
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per100.000 orang.	BPBD	PM	1	0,25	PM	PM
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kecamatan	12	12	12	12
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	1.595.000.000	387.000.000	1.000.000.000	850.000.000
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	KK	79		90	90
Tujuan SDGs 02: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	4,8	5,88	5,5	5,25
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400kkal /kapita/ hari.	Dinas KetahananPa ngan	%	100	0	100	100
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan,ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	8,72	8,25	18,4	16



2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	%	9,6	8,59	9,15	9,14
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	2,05	2,71	7,5	7,3
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibuhamil.	Dinas Kesehatan	%	7,66	0,14	39	36
2.2.2.(b)	Persentasebayi usiakurang dari 6 bulan yangmendapatkanASlek sklusif.	Dinas Kesehatan	%	72,27	74,3	50	55
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat Konsumsi ikan.	Dinas KetahananPa ngan	PPH	89,3	90,6	90	90,0
2.4	Pada tahun 2030, menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertaniantangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasiterhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresifmemperbaikikualitastanahdanlahan.						
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian ,Bappeda	Ha	44.861	43.615,93	44.861	43.615
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1*	Angka KematianIbu(AKI).	Dinas Kesehatan	Per100.00 OKH	67,72	54	205	194
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh Tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	97,23	100	91	93
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di Fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	97,23	100	91	93
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25per 1000.						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per /1000KH	0,14	0,53	32	31
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per /1000KH	3,25	0,56	11,6	11
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per /1000KH	0,27	0	18,6	17,6
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

	pada bayi.						
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemic AIDS, tuberkulosis, malaria,dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	0,01	0,034	0,008	0,007
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per100.000	106,2	194,5	186,5	190,2
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Per/1000	0,15	0,17	0,13	0,12
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan	KAB	1	1	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	KAB	1	1	1	1
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkankesehatanmental dankesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur≤18tahun.	Dinas Kesehatan	%	9	9	8,9	8,8
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	36,6	18,7	35,9	35,7
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur≥18tahun.	Dinas Kesehatan	%	19,9	0,13	20,5	20,7
3.4.2*	Angka kematian (insidensrate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan	%	0	0	0	0
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatanjiwa.	Dinas Kesehatan	KAB	1	1	1	1
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat Kontrasepsi metode modern.	Dinas P2KBP3A	%	65,02	68,05	66,62	67,13
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia15-49 Tahun yang berstatus kawin.	Dinas P2KBP3A	%	65,02	68,05	66,62	67,13
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas P2KBP3A	%	18,17	19,09	20,46	21,39
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%		43	3,45	3,28
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate(TFR).	Dinas P2KBP3A	%		2,61	2,1	2,08

3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Jiwa	302	310	339	350
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Jiwa	301.982	128.743	339.480	349664
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.						
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	%	0	0	0	0
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO diseluruh Negara sebagai langkah yang tepat.						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15tahun.	Dinas Kesehatan	%	9	8,9	8,9	8,8
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan dinegara berkembang, khususnya Negara kurang berkembang, dan Negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Per 1000	4,67	2,42	5,03	5,30
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	98	98	100	100
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	88,95	91,92	88,39	86,97
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	70,18	73,68	73,68	73,68

4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar(APK)SD/MI/ sederajat.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	100,04	103.8%	99	100
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/sedera jat.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	100,06	81.23%	97,5	99
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15t ahun.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	9,07	13,24%	9,35	9,5
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	73,5	77,85	83,5	89,50
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di(1) SD/MI/sederajat;(2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan					
	SD = Perempuan / Laki-laki X 100		%	93,81	95,32	95,42	97,85
	SMP = Perempuan / Laki-laki X 100		%	99,78	98,26	99,75	99,85
	SMA,SMK,SLB = Perempuan / Laki-laki X 100		%	104,65		100	100,00
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						

4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15tahun.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	100	100	100	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan	%	100	100	100	100
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.						
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) computer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air,sanitasi,dan higienis Bagi semua(WASH)).	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%				
	SD= 304/323X100		%	94	96	98	99
	SMP=52/58X100		%	89	92	95	98
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB Yang bersertifikat pendidik.	Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		38,47			
	TK		%	32,18	23,24%	27	30
	SD		%	41,52	55,00%	70	73
	SMP		%	41,71	64,06%	70	71,5
Tujuan SDGs 05: MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P2KBP3A	Program	1	1	1	1
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%	0,01	0,01	0,01	0,01

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas P2KBP3A	%	0,03	0,03	0,02	0,02
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan Dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%	0,01	0,01	0,01	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat Layanan komprehensif.	Dinas P2KBP3A	%	90	84	90	90
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas P2KBP3A	%	0,17	0,15	0,13	0,12
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertamaperempuanpern ahkawin umur25-49tahun.	Dinas P2KBP3A	%	21,9	20	22	22,1
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%	4,43	43	3,45	3,28
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik,ekonomi,dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas P2KBP3A	%	10	30	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas P2KBP3A	%	6,25	30	30	30
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment andtheBeijing Platformsertadokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensitersebut.						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB Yang tidak terpenuhi).	Dinas P2KBP3A	%	11,48	10,76	9,34	7,81
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS )tentang metode Kontrasepsi modern.	Dinas P2KBP3A	%	65,02	68,05	66,62	67,13
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	%	65	94,07	92	93
Tujuan SDGs 06: MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air Minum layak.	Dinas PUPR	%			96,57	98,89

6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR	%				
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	desa	108	109	108	108
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	desa	40	109	109	109
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Parameter Kualitas Air Sungai	70	0	65	65
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.						
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	PSDA	Web	1	0	0	0
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	PSDA	Sungai	1	1	1	1
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PSDA	Lembaga	170	300	200	0
<b>Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA</b>							
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahun dinegara kurang berkembang.						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	0,44	5,04	5,65	6,42
8.1.1.(a)	PDRB perkapita.	BPS	RibuRpiah	52.930	53.412	60.610	64.220
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas tenaga Kerja	%	27.87	72,44	34,97	35,32
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas tenaga Kerja	%	33.17	24,14	33,33	34,02
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah	8	91	92%	90	93

8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja	Rp/Jam	19.399	19.399	33,186	44.169
8.5.2.(a)	tingkatsetengahpengangguran.	Dinas Tenaga Kerja	%	41,33	58,97	41,04	40,43
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja	%	4,19	4,06	3,85	3,06
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan ataupun pelatihan.						
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau Mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja	%	10.87	31,68	14,82	11,75
<b>Target SDGs 08 : 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</b>							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	%	9,73	1,57	1,32	1,34
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	-	19	50	55
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	7.379	13.468	62.700	63.500
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	66%	53,19%	72	75
<b>Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI</b>							
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan focus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	dermaga	4	13	4	4



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	pelabuhan	1	1	1	1
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur	Disperindagem	%	-1,05	5,55	11,17	11,64
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sector industry manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja	%	37.54	24,23	37,89	38,75
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	%	51,47	68,02	55	57,00
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	%	90,17	94,07	92	93,00
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang Menggunakan internet	Diskominfo	%	51,47	68,02	55	57,00
Tujuan SDGs 10: MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTAR NEGARA							
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS		0,375	0,367	0,345	0,33
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan Kelompok umur.	Dinas Sosial	%	8,31	8,81	8,56	7,37
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD	Desa Tertinggal	4	2	2	2
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa Tertinggal	12	10	8	6
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Dina PMD	Desa	0	0	1	2
Tujuan SDGs11: MENJADIKAN KOTADAN PERMUKIMAN INKLUSIF,AMAN,TANGGUHDAN BERKELANJUTAN							
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan focus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal,hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Per 100.000/orang	1	0,25	PM	PM
11.5.1.(c)	Jumlah system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	1	1	1EWS	2EWS
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	1.595.000.000	387.000.000	1.000.000.000	850.000.000
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton %	100	28.549,14	19,687.94 (100%)	20,374.14 (100%)



Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistic risiko bencana disemua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen
TujuanSDGs12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	27,098.18 Ton	7.047,69	18,903.35	20,205.67
Tujuan SDGs 13: MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA							
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam disemua egara.						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Per 100.000/ orang	1	0,25	PM	PM
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	1	0	1	1
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar						
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	orang	896	409	558	558
Tujuan SDGs 15: MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan Keanekaragaman hayati.	DLH	Dokumen	0	0	1	1
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ,MENYEDIKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN							
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus	4		2	1
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	%	0,029		0,02	0,015
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan disemua tingkat.						
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	94,57	94,13	94,57%	94,57%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	100	100,00	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Ortala	%	2,14	1,15	4,5	5
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA (PEMBANGUNAN)	%	15,17	44,02	16,64	18,41
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Ortala	%	Belum terbit	CC (nilai 58,28)	B(Nilai71)	BB(Nilai71)
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representative disetiap tingkatan.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas P2KBP3A	%	10%	30	30	30
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan dilembaga eksekutif (Eselon I Dan II).	Dinas P2KBP3A	%	6,25%	30	30	30
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1*	Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	99	100	100	100
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	97	100	99	100
16,1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.						
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsise bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	43	44	43	44
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,75	0,62	0,75	0,75
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,16	0,16	0,16	0,16
17.1.2*	Proporsi anggaran domestic yang didanai oleh pajak domestik.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	8,94	9,75	9	9,00
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya ditingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo	%	7,04	Belum ada data	9	10,00
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo	%	51,47	Belum ada data	55	57,00
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan Kualitas data statistik.*	BPS	%	98,92	93,42	100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	86,67	96,88	93	95
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistic di negara berkembang.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	-	ada		Ada	Ada
	Jumlah kelahiran		org	310			
	Jumlah kematian		org	635			
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data da informasi statistik Melalui website.	BPS	Pengunjung	12.952	10.941	15.547	17.047
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)*	BPS	%	95,24	100	100	100

Sumber Data : Data Olahan Bappelitbangda Kab. Pinrang

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

#### **7.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2023 sesuai dengan fungsinya yaitu dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, maka 3 pilar pelaku pembangunan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini. Bagi Dinas/Badan/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pinrang, RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD). Namun demikian, apabila terdapat perubahan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan struktur pembiayaan daerah, maka akan diakomodir dalam RKPD Perubahan Tahun 2023.

#### **7.2 Kesimpulan**

Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023, diharapkan sebagai pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dan dapat terakomodir berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan RKPD akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaku pembangunan sehingga sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, sehingga Tema RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah **“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan dan Sumber Daya Manusia”**.

Rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin

kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Pinrang tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan prioritas pembangunan Nasional.

